

**WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2024**



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berakhir Tahun 2022 yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan atas KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kota
15. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
18. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

Pasal 2

RKPD terdiri dari :

- a. bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024; dan
- b. bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024.

Pasal 3

Bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 10 Juli 2023

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 10 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 717



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2024

I. UMUM

Maksud penetapan RKPD Kota Cimahi Tahun 2024 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan periode Tahun 2024 yang dimulai dari 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024.

Tujuan penetapan RKPD Kota Cimahi Tahun 2024 adalah untuk :

- a. mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
- e. mencapai hasil pelaksanaan pembangunan yang optimal, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

RPKD terdiri dari :

- a. bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024; dan
- b. bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 199

LAMPIRAN I : BERITA DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 717 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 JULI 2023

TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan penjabaran perencanaan pembangunan tahunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Penyusunan RKPD Tahun 2024 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD, sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

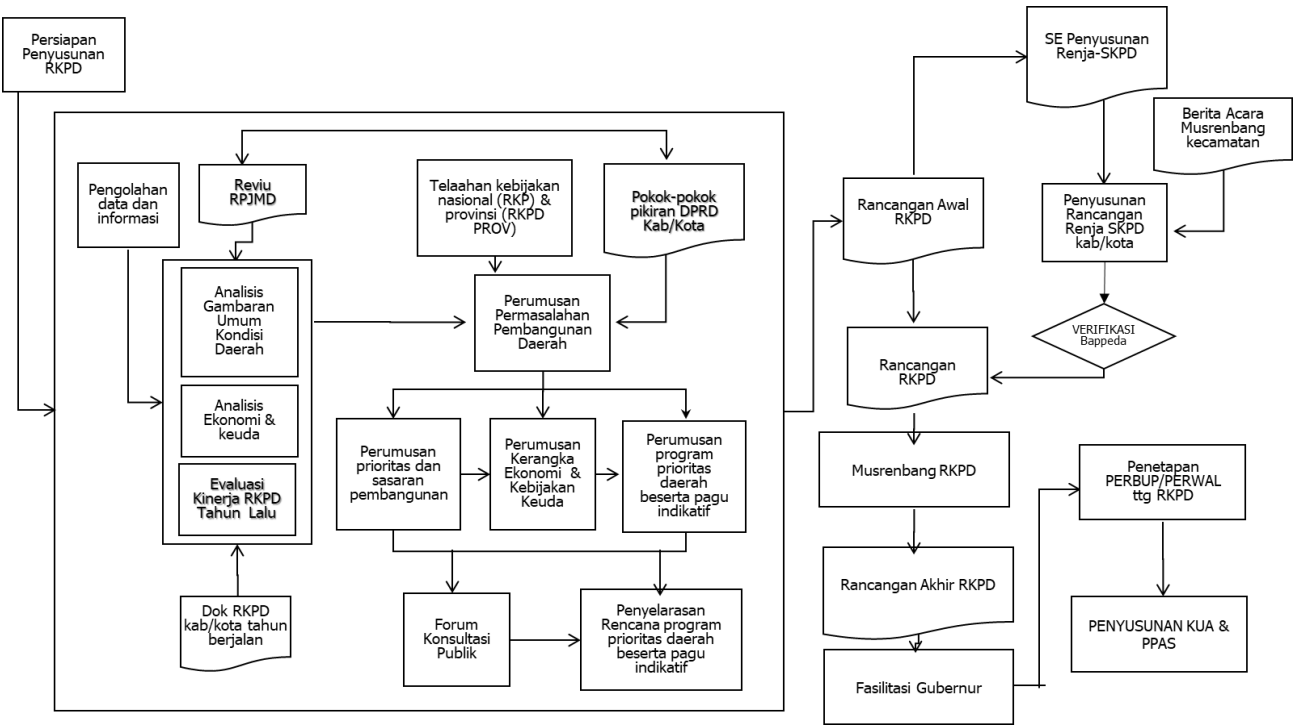
Selain berpedoman pada RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, penyusunan RKPD 2024 juga memperhatikan, penyelesaian target SPM, upaya pemulihan perekonomian daerah pasca Covid serta antisipasi krisis ekonomi global seperti krisis pangan dan krisis energi. Selain juga melaksanakan amanat yang tertuang *dalam Sustainable Development Goals (SDG's)*.

Tema pembangunan Kota Cimahi tahun 2024 yang sesuai dengan arah kebijakan pada RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 adalah **“Pemantapan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”**. Tema tersebut diusung dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memperkuat perekonomian dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Cimahi. Melalui upaya pemantapan stabilitas perekonomian dan peningkatan daya saing sumber daya manusia di Kota Cimahi tahun 2024, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta terciptanya lapangan kerja yang lebih baik. Hal ini akan membawa manfaat baik bagi warga Cimahi maupun untuk pembangunan Kota Cimahi secara keseluruhan.

Rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Kota Cimahi Tahun 2024 disusun berpedoman kepada : (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026; (2) RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2023 Triwulan I; (3) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; serta (4) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2024.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2024 ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2017

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Tata Cara Penyusunan RKPD

Dari gambar 1.1 di atas, alur penyusunan substansi pada proses penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2024, pada intinya meliputi berbagai proses yaitu :

1. Proses teknokratis. Pada tahapan ini dilakukan perumusan masalah, isu strategis, sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi dasar untuk fokus perencanaan yang dilakukan. Yang mana hal ini dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi, provinsi, dan pihak lain yang berkompeten.
2. Proses politik. Pada proses ini mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD Kota Cimahi yang merupakan hasil reses para anggota DPRD dengan konstituennya.
3. Proses *bottom-up*. Pada tahapan ini merupakan proses pengumpulan usulan pembangunan yang berasal dari komunitas/lembaga/individu yang berasal dari masyarakat.
4. Proses *top-down*. Pada tahapan ini dilakukan Penyelarasan dokumen RKPD terhadap dokumen RKP dan RPJMN dalam rangka sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dalam kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat yaitu Kementerian/Lembaga (K/L).

1.2. DASAR HUKUM

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah mengganti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

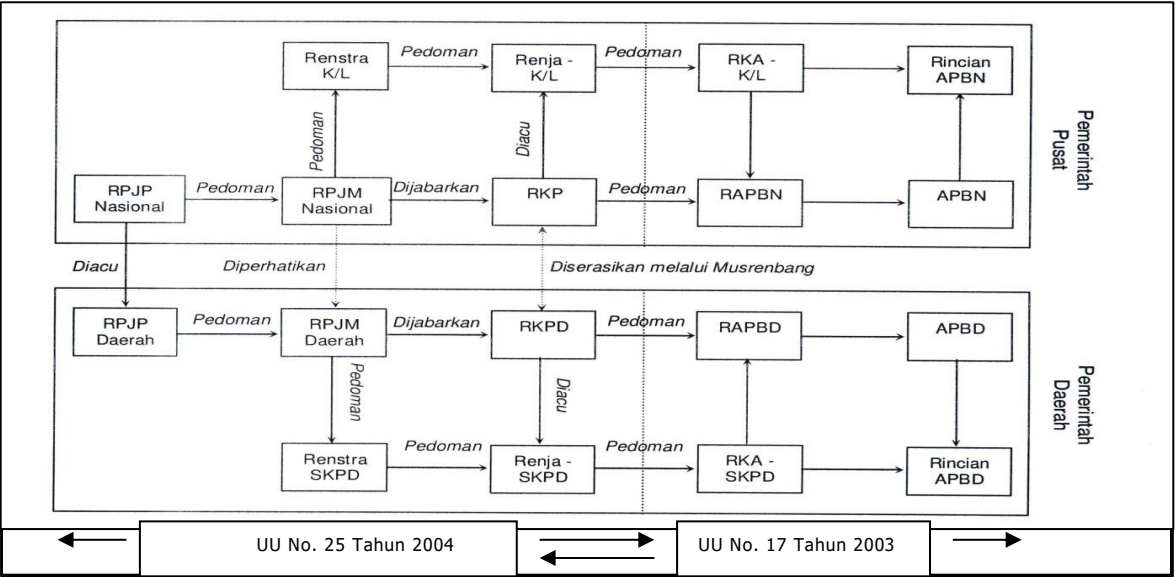
- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran

- untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
 35. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
 36. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
 37. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
 38. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287); dan
39. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139).

1.3. HUBUNGAN RKPD KOTA CIMAHI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara, keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan keterkaitan program strategis antar dokumen sebagaimana yang dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.2.



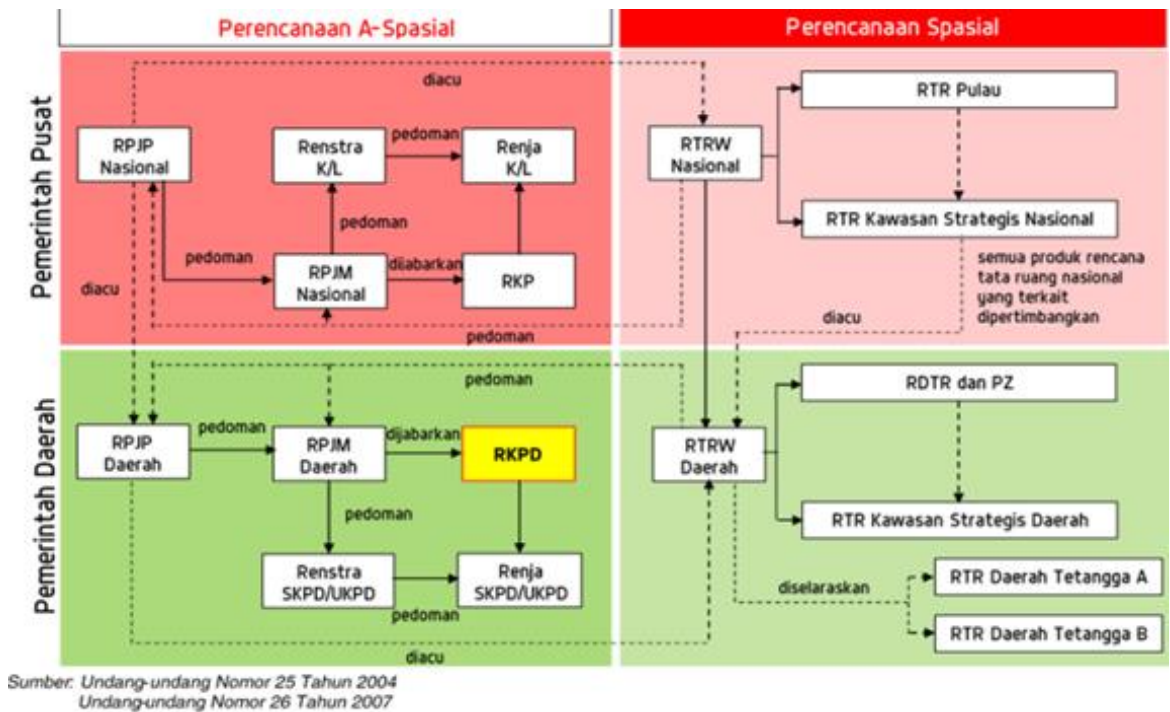
Gambar 1.2 Bagan Hubungan RKPD Kota Cimahi dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD). Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional. Dokumen RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum menjadi APBD. Sebagaimana telah disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD.

Dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat *aspasial* perlu disinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, seperti dokumen RTRW daerah, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ), serta RTR (Rencana Tata Ruang) Kawasan Strategis Daerah. Selain itu, sebaiknya perlu juga diselaraskan dengan dokumen keruangan RTR dari wilayah tetangga.

Posisi penyusunan RKPD merupakan penjabaran dari RPD, selain berpedoman pada RPJPD, berpedoman pula pada dokumen RTRW daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJPD dan RPD, yang sama-sama diacu oleh RKPD. Konstelasi hubungan antara dokumen spasial dan aspasial, sebagaimana dijabarkan di atas dapat dilihat pada gambar 1.3.



Gambar 1.3 Korelasi antar dokumen perencanaan spasial dan a-spasial

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk :

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
2. Menjadi acuan dalam penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2024 adalah :

1. Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah; dan
2. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kota Cimahi Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022, hasil evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022, hasil evaluasi SDG's tahun 2022, dan permasalahan pembangunan daerah.

1. Kondisi Umum Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah;
2. Evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, realisasi target kinerja, dan Perangkat Daerah penanggung jawab; dan
3. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan program, SPM dan SDG's tahun 2022 dan mengerucut menjadi permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi , pokok-pokok pikiran DPRD serta keterkaitan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan pada tiap tingkatan pemerintahan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan arah kebijakan, prioritas dan fokus RKPD Kota Cimahi Tahun 2024 yang telah sinkron dengan kebijakan Pusat maupun Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat tentang analisis gambaran umum kondisi Daerah yang memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan di Kota Cimahi. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan 1 (satu) tahun ke depan melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Kondisi Astronomi dan Geografi

Kota Cimahi secara geografis terletak diantara 108°30'37" – 107°34'34" Bujur Timur dan 6°49'38" – 6°55'58" Lintang Selatan. Kota Cimahi juga dilintasi oleh jalan nasional yang berfungsi menghubungkan Kota Bandung dan Kota Jakarta, jalan tol Cileunyi – Padalarang – Purwakarta, serta jalur kereta api Bandung – Jakarta. Berdasarkan letak geografis Kota Cimahi sangat strategis karena terletak di jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan ibukota Jawa Barat yang sangat dinamis.

2. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Luas Kota Cimahi secara keseluruhan mencapai 42,48 Km², dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

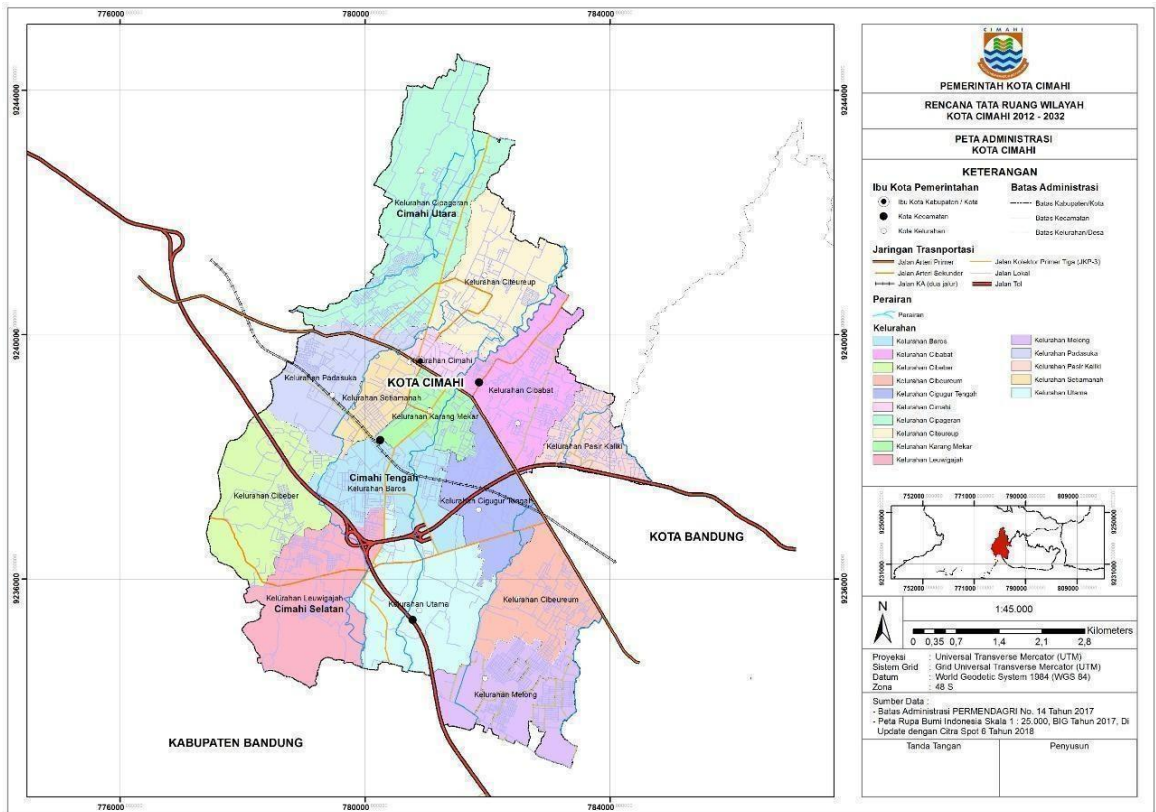
- a. Sebelah Utara: Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir Kota Bandung;
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Margaasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung dan Kulon Kota Bandung; dan

d. Sebelah Barat: Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Wilayah Kota Cimahi meliputi 3 (tiga) kecamatan dengan rincian pembagian wilayah beserta luasnya sebagai berikut :

- a. Kecamatan Cimahi Utara yang terdiri atas 4 (empat) kelurahan, 87 (delapan puluh tujuh) RW dan 469 (empat ratus enam puluh sembilan) RT;
- b. Kecamatan Cimahi Tengah yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan, 110 (seratus sepuluh) RW dan 571 (lima ratus tujuh puluh satu) RT; dan
- c. Kecamatan Cimahi Selatan yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan, 115 (seratus lima belas) RW dan 688 (enam ratus delapan puluh delapan) RT.

d. Secara tabulasi luas wilayah Kota Cimahi berdasarkan kelurahan disajikan pada Tabel 2.1 dan secara grafis wilayah administrasi Kota Cimahi disajikan pada Gambar 2.1.



Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Cimahi

3. Keadaan Topografi, Geologi dan Hidrologi

a. Kondisi Topografi

Secara topografi Kota Cimahi terletak pada elevasi +600 meter hingga +1.000 meter diatas permukaan laut (dpl), kondisi tersebut berdampak pada sebagian wilayah Kota Cimahi menjadi bagian Kawasan Bandung Utara (KBU) yaitu +750 meter dpl. Kegiatan pembangunan di KBU ini diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang menunjang fungsi lindung kawasan tersebut. Dilihat dari kemiringan lerengnya, Kota Cimahi memiliki kemiringan lereng yang cukup bervariasi yaitu daerah yang memiliki kemiringan lereng 0-2 % dengan dominan terletak di Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan. Daerah yang memiliki kemiringan lereng 2-15 % dominan terletak di wilayah Kecamatan Cimahi Utara. Daerah yang memiliki kemiringan lereng 15-25 %, 25 – 40 % dan lebih besar dari 40 % tersebar merata di seluruh Kota Cimahi yang total luasnya tidak lebih dari 4 ha.

Secara rinci, luasan wilayah Kota Cimahi per kecamatan berdasarkan kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng					Total (Km²)
		0 – 2%	2 – 15%	15 –25%	25– 40%	>40%	
1.	Cimahi Selatan	9,75	3,03	0,82	0,97	0,29	14,86
2.	Cimahi Tengah	10,33	2,89	0,14	0,11	0,02	13,48
3.	Cimahi Utara	2,61	9,85	1,06	0,51	0,12	14,14
	Total (Km²)	22,69	15,77	2,01	1,59	0,43	42,48

Sumber : Peta Dasar Validasi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019

b. Kondisi Geologi

Jenis batuan yang terdapat di Kota Cimahi terdiri dari jenis batuan Andesit, Basal, Lava, Tufa Berbatu apung, Tufa Pasir dan Breksi Tufaan Lava, Batupasir, Konglomerat. Klasifikasi jenis batuan yang ada di Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Luas Jenis Batuan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jenis Batuan (Ha)						Total
	A	B	Pb	Qyt	Qyd	Qyl	
Cimahi Selatan	16,73	12,77	67,68	1.557,1	-	-	1.654,30
Cimahi Tengah	-	4,64	-	826,86	158,11	-	989,62
Cimahi Utara	-	-	-	298,62	1.082,71	27,63	1.408,96

Sumber : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 1973
 Keterangan : A=Andesit, B=Basal, Pb=Breksi Tufaan Lava, Batu Pasir, Konglomerat, Qyt=Tufa Batu Apung, Qyd=Tufa Pasir, dan Qyl=Lava

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis batuan yang mendominasi di Kota Cimahi yaitu jenis batuan tufa batu apung dengan luas sebesar 2.682,58 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan, jenis batuan tufa batu apung dibanding dengan jenis batuan lainnya yang ada di Kota Cimahi merupakan jenis batuan yang kekerasan lunak dibanding dengan jenis batuan andesit, basal dan breksi tufaan lava, batu pasir, konglomerat yang memiliki tingkat kekerasan tinggi. Bahan penyusun jenis batuan tufa batu apung terdiri dari pasir tufaan, lapilli, bom-bom, lava berongga dan kepingan-kepingan andesit-basal padat bersudut yang berasal dari gunung tangkuban perahu (Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 1973).

c. Kondisi Hidrologi

Hidrologi Kota Cimahi yang ditandai dengan air permukaan berupa sungai, merupakan sungai-sungai orde ketiga dari Sungai Citarum. Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan, Sungai Cibabat, Sungai Cibeureum dan Sungai Cibaligo adalah 5 (lima) sungai utama yang mengalir melalui Kota Cimahi. Adapun kondisi sungai-sungai tersebut, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Kondisi Sungai Kota Cimahi

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
1.	Cisangkan Hulu-Hilir	16.91					
	Cisangkan Hulu	-	2	2	0,20	0,99	0,02

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
	Cisangkan Tengah	-	3	3	0,30	1,19	0,05
	Cisangkan Hilir	-	6	6	0,70	2,44	0,3
2.	Cibaligo Hulu-Hilir	35.04					
	Cibaligo Hulu	-	3	3	1,20	1,64	0,05
	Cibaligo Tengah	-	2,5	2,5	0,5	1,54	0,18
	Cibaligo Hilir	-	3	3	0,65	1,14	0,06
3.	Cibabat Hulu-Hilir	35.04					
	Cibabat Hulu	-	1,5	1,5	0,20	1,77	0,08
	Cibabat Tengah	-	4	4	0,60	3,68	0,01
	Cibabat Hilir	-	2	2	0,30	1,11	0,06
4.	Cibeureum Hulu-Hilir	24.66					
	Cibeureum Hulu	-	4	4	0,75	3,02	0,62
	Cibeureum Tengah	-	6	6	0,50	3,10	0,09
	Cibeureum Hilir	-	8	8	0,50	6,76	0,46
5.	Cimahi Hulu-Hilir	18.61					
	Cimahi Hulu	-	6	6	0,3	1,93	0,14
	Cimahi Tengah	-	4	4	0,5	1,85	0,13
	Cimahi Hilir	-	7	7	1	1,93	0,33

Sumber : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2021

Sungai Cimahi berhulu di puncak lereng barat Gunung Tangkuban Perahu tepatnya Situ Lembang, melintasi Kelurahan Citeureup, Cibabat, Baros, Utama dan Karang Mekar. Sungai Cisangkan melintasi Kelurahan Citeureup, Padasuka, Baros, Leuwigajah/Utama. Sungai melintasi Kelurahan Cibabat, Cibeureum, dan Melong. Sungai Cibeureum berasal dari bagian barat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung melintasi perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung. Sungai ini melintasi Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong.

4. Klimatologi

Kota Cimahi dan sekitarnya memiliki iklim tropis, dicirikan dengan adanya musim kemarau selama bulan Juni-September

serta musim penghujan berlangsung pada periode Oktober-Mei. Rata-rata curah hujan tahunan pada setiap wilayah di sekitar Kota Cimahi bervariasi tergantung dari elevasi permukaan tanah. Pada elevasi ± 700 -850 mdpl, curah hujan bervariasi antara 1.700-3.000 mm/tahun, sedangkan pada elevasi > 850 mdpl hingga puncak pegunungan (+3.000 m) curah hujan mencapai 3.000-4.000 mm/tahun. Kelembaban udara relatif konstan dengan variasi kecil. Pada dataran Bandung dan Cimahi kelembaban udara minimum sebesar 73% pada bulan September, dan maksimum 83% pada bulan April. Rata-rata temperatur udara berkisar $22,7^{\circ}\text{C}$ - $23,2^{\circ}\text{C}$.

Temperatur udara cenderung turun sejalan dengan kenaikan elevasi, besarnya penurunan temperatur sekitar $0,6^{\circ}\text{C}$ setiap kenaikan elevasi 100m. Evapotranspirasi bulanan berkisar 114 hingga 166 mm/bulan atau rata-rata 1.572 mm per tahun. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Oldeman (Lakitan 2002), iklim di Kota Cimahi termasuk dalam iklim tipe B2. Jenis tanaman pertanian yang cocok untuk tipe iklim tersebut adalah tanaman padi yang dapat ditanam sebanyak dua kali dalam setahun dan palawija yang dapat ditanam baik pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Dengan curah hujan berkisar antara 1.700-4.000 mm per tahun dan luas wilayah 4.248,10 ha, Kota Cimahi memiliki potensi volume air hujan sebesar 68,90-162,12 juta m³ per tahun. Selain sebagai sumber air untuk pertanian, dengan sentuhan teknologi air hujan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.

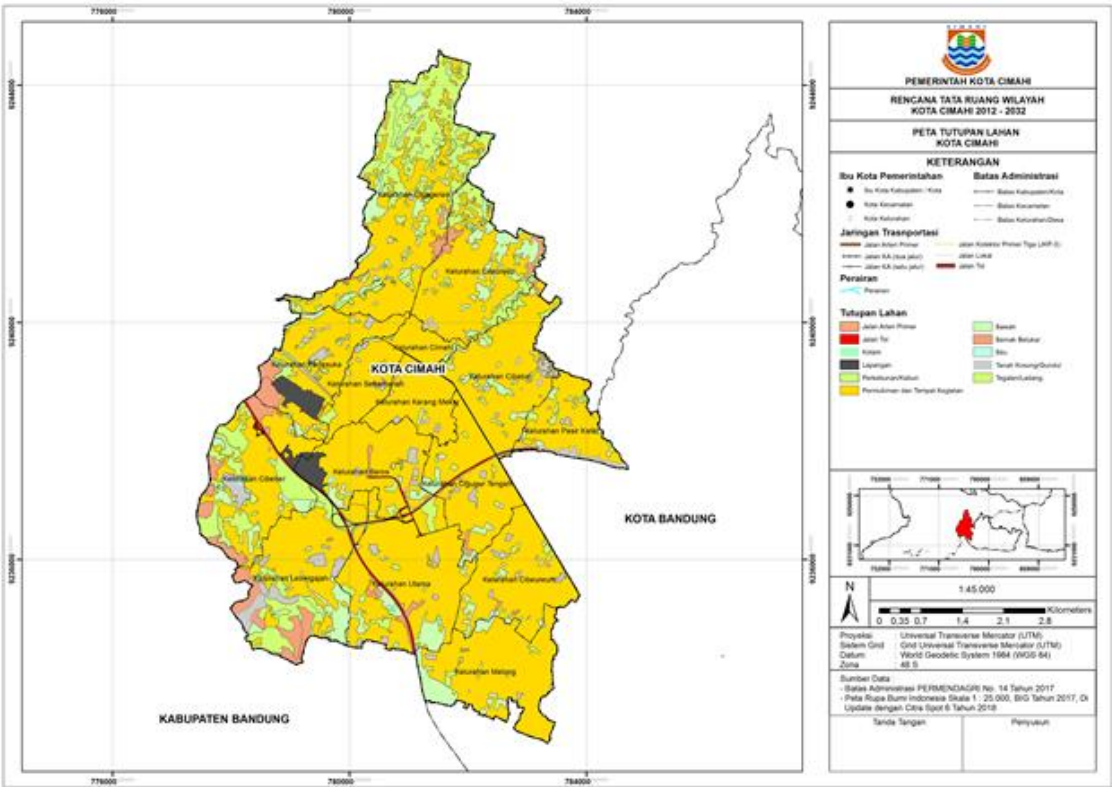
5. Penggunaan Lahan

Porsi penggunaan lahan terbesar adalah permukiman dan tempat kegiatan, disusul oleh tegalan, sawah dan semak belukar. Informasi ini juga ditampilkan dalam bentuk peta, seperti dibawah ini :

Tabel 2.4
Luas Wilayah Berdasarkan Tutupan Lahan di Kota Cimahi

Tutupan Lahan Eksisting	Luas (Ha)
Jalan Arteri Primer	5,57
Jalan Tol	29,35
Kolam	5,72
Lapangan	56,27
Perkebunan/Kebun	135,83
Permukiman dan Tempat Kegiatan	2957,20
Sawah	323,63
Semak Belukar	158,50
Situ	0,63
Tanah Kosong/Gundul	129,78
Tegalan/Ladang	445,64
Total	4.248,10

Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032



Gambar 2.2 Peta Tutupan Lahan Kota Cimahi

Sumber : Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032

B. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Rencana Sistem Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan

Bandung, Kota Cimahi menjadi bagian dari kawasan perkotaan inti dalam Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi. Kegiatan utama kota meliputi : pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat industri (ekonomi kreatif dan industri non polutif), pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan sistem angkutan umum dan penumpang regional serta pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kota Cimahi meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan dengan peruntukan lindung terdiri atas badan air (sungai dan embung), kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai) dan kawasan ruang terbuka hijau (RTH). Kawasan RTH ini terdiri atas rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, pemakaman dan jalur hijau. Kawasan budidaya terdiri atas berbagai kawasan yang akan dijabarkan selanjutnya.

Potensi pengembangan wilayah Kota Cimahi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya kota adalah wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Hal ini tertuang dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 meliputi :

a. Kawasan Perumahan

- 1) Pengembangan perumahan diarahkan pada intensitas pemanfaatan lahan berdasarkan kepadatannya, meliputi perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong dan Kelurahan Karangmekar; perumahan kepadatan sedang diarahkan di Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama, Kelurahan Baros dan sebagian Kelurahan Setiamanah;

dan perumahan kepadatan rendah diarahkan di sebagian Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cibabat, sebagian Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Cimahi dan sebagian Kelurahan Setiamanah; dan

- 2) Pengembangan hunian vertikal di Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah dan sebagian Kecamatan Cimahi Utara; dan Penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur di bantaran sungai di Kecamatan Cimahi Tengah dan Selatan.

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, toko dan ritel modern, dan perdagangan dan jasa lainnya, yang saat ini sebagian besar terpusat di wilayah Cimahi Tengah. Selain itu, wilayah Cimahi Selatan juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perdagangan dan jasa dengan adanya akses ke Tol Baros.

Adanya rencana pembentukan Sentra Perdagangan dan Jasa merupakan salah satu upaya dalam pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa. Beberapa kota di Indonesia telah berhasil menata pusat kotanya sehingga menjadi destinasi wisata. Untuk itu perlu adanya inovasi penataan kawasan alun-alun dan Kawasan Gandawijaya Kota Cimahi menjadi salah satu destinasi belanja dan menjadikan salah satu muka kota yang kreatif.

Untuk bisa mendukung perkembangan area *central business district* (CBD) lama di daerah alun-alun dan Jalan Gandawijaya perlu dilakukan inovasi penataan kawasan melalui penyediaan trotoar yang lebih luas bagi pejalan kaki dan ramah terhadap kaum disabilitas, tersedianya pemberhentian kendaraan umum yang kreatif, petunjuk area (*sign map*) yang kreatif, taman, jalur pesepeda dan penataan lampu kota. Diharapkan pusat kota dapat menjadi ruang publik yang terbuka bagi interaksi warganya untuk melakukan kegiatan – kegiatan kreatif seperti pertunjukan di

jalan (*street performance*) maupun *culinary night*. Sinkronisasi dan koordinasi kegiatan yang tersebar di banyak SKPD menjadi unsur penting bagi berhasilnya penataan kawasan alun-alun dan Gandawijaya selain juga penegakan disiplin agar tetap rapi dan tidak menjadi kumuh. Kota yang kreatif akan bisa meningkatkan tingkat kebahagiaan warganya.

c. Kawasan Peruntukan Industri

- 1) Kota Cimahi tidak lagi mengembangkan Kawasan Peruntukkan Industri menengah dan besar, tetapi hanya menjaga kestabilan keberadaan industri menengah dan besar yang banyak tersebar di wilayah Cimahi Selatan, diantaranya di Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Melong serta di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah. Keberadaan Kawasan peruntukkan industri tersebut diarahkan menjadi kawasan industri yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan prasarana pengelolaan limbah industri terpadu;
- 2) Pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi dipusatkan di wilayah Baros dengan dibangunnya Kawasan Cimahi *Technopark*. Industri kreatif yang dikembangkan adalah industri kreatif berbasis teknologi informasi diantaranya animasi dan film, serta sentra-sentra produk unggulan lainnya untuk produk kuliner, kerajinan dan fashion; dan
- 3) Rencana pengembangan industri kecil dan rumah tangga berbasis klaster industri terutama di beberapa lokasi yang bisa dikembangkan menjadi sentra produk unggulan dengan prinsip ramah lingkungan.

d. Kawasan Peruntukan Pariwisata

- 1) Pengembangan Wisata Budaya dan Agro Eduwisata di Kelurahan Cipageran dan Kampung Cireunde di Kelurahan Leuwigajah. Cireunde tidak lagi hanya sebagai Desa Wisata Ketahanan Pangan saja tetapi berkembang menjadi Desa Wisata Seni Pertunjukan dan Budaya berbasis budaya ketahanan pangan singkong;

- 2) Pengembangan Wisata Heritage dan Festival Tematik di Kecamatan Cimahi Tengah.

Di Kota Cimahi terdapat 23 objek bangunan bersejarah yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai bangunan heritage sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang hingga saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Diperlukan penggalian nilai-nilai sejarah dan perencanaan pemanfaatannya termasuk upaya pengembangan kewirausahaan dalam bidang pariwisata khususnya pada 23 objek bangunan bersejarah Kota Cimahi;

- 3) Pengembangan kawasan wisata Cipageran yang meliputi daerah Lebak Saat (Chitos 1), Legok Awi (Pasar Legok Awi) yang terintegrasi dengan hutan kota dan sentra pertanian (peternakan). Perlu dilakukan branding tempat yang terintegrasi dalam satu kawasan wisata serta dilakukannya pengintegrasian pembinaan usaha kesenian/budaya, pariwisata, *homestay*, hilirisasi produk dan pembinaan UKM baik kuliner maupun kerajinan berbasis potensi lokal (bambu) oleh warga setempat; dan
- 4) Pengembangan Kampung Gambar di Kelurahan Cibabat sehingga mendatangkan manfaat ekonomi dan sosial. Saat ini di Kampung Gambar Cibabat belum muncul aktivitas bisnis dan baru lebih berfokus kepada aktivitas ekspresi kreatif. Perlu dikembangkan model bisnis yang tepat (*model business canvas*) dan pemberdayaan komunitas lokal.

e. Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Sosial

- 1) Kawasan perkantoran pemerintahan meliputi peningkatan kawasan perkantoran pemerintah Kota Cimahi, peningkatan kawasan perkantoran skala kecamatan dan kelurahan di seluruh Kota Cimahi, peningkatan kawasan perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi dengan penyediaan ruang terbuka publik

yang dapat digunakan untuk interaksi sosial, peningkatan kawasan pusat pengembangan teknologi informasi, *Baros Information Technology Center* (BITC) di Jalan HMS. Mintaredja Kelurahan Baros; Pembangunan Kawasan Mall Pelayanan Publik dan peningkatan dan pembangunan lokasi lain sesuai dengan kebutuhan; dan

- 2) Kawasan perkantoran swasta mengarahkan dan mengembangkan kegiatan perkantoran swasta berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa.

f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan di Kota Cimahi meliputi : Markas Brigif – 15 Kujang II yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pussenarmed yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pussenarhanud yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusedikarmed yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusedikpal yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusedikhub yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusedikpom yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusedikjas yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusedikbekang yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusedikpengmilum yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Kodim 0609/Kabupaten Bandung yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Yonarmed – 4/105 GS yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Kiban Yonzipur-3/Yudha Wirograha yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Rumkit TK. II 03.05.01 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Denbekang III-44-02.A yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Benglap-A-03-43-02 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Domatzi yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Koramil 0609-22 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, dan Koramil 0609-25 yang terletak di Kecamatan Cimahi Utara. Di Kawasan ini bila dimungkinkan dapat dilakukan kerjasama dalam rangka pengembangan pembangunan di Kota Cimahi.

g. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Pengembangan RTNH di kawasan komersial dan perkantoran di Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Baros dan perumahan tersebar di Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan, yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi masyarakat dan layak anak.

Disamping itu terdapat juga lahan-lahan aset milik pemerintah Kota Cimahi berupa lahan kritis yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Cimahi bisa diarahkan dengan menerapkan konsep *agroforestry* sehingga kegiatan konservasi alam dan pertanian serta pariwisata bisa dikembangkan seperti di Bukit Padakasih Kelurahan Cibeber, di Cimenteng dan Legok Jawa Kelurahan Cipageran maupun ex-TPA Leuwigajah di Kelurahan Leuwigajah. Direncanakan juga pemanfaatan beberapa wilayah sekitar embung sebagai sarana ruang publik untuk olahraga dan pariwisata lokal.

h. Kawasan Peruntukan Ruang Untuk Sektor Informal

Merupakan sektor yang direncanakan untuk kegiatan sektor informal di lokasi yang direncanakan dengan membatasi pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang, mengoptimalkan fungsi pasar, dan mengintegrasikan kegiatan sektor informal dengan sektor formal, menjaga fasilitas publik agar tidak digunakan untuk kegiatan sektor informal dan mewajibkan setiap pengembang mengalokasikan ruang untuk kegiatan sektor informal.

i. Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana

Kawasan Rawan Bencana di Kota Cimahi terdiri dari kawasan rawan bencana tanah longsor, rawan banjir, rawan aliran lahar gunung berapi, dan rawan gempa bumi sehingga pengembangan kawasan ruang evakuasi diarahkan menyebar di seluruh wilayah kecamatan dengan memanfaatkan RTH,

RTNH, gedung dan bangunan lainnya. Penyediaan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi. Penyediaan sarana prasarana pada akses jalur evakuasi menuju ruang titik kumpul tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan memanfaatkan ruang publik dan RTNH.

j. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar melalui optimalisasi produksi ikan air tawar dan pemasaran hasil perikanan melalui optimalisasi pasar ikan di Kelurahan Cibabat.

k. Perlindungan kawasan peruntukan pertanian

Perlindungan kawasan pertanian diarahkan pada rencana penetapan regulasi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Aspek lain pengembangan wilayah Kota Cimahi adalah berkaitan dengan wilayah administrasi di Kota Cimahi. Saat ini Kota Cimahi memiliki tiga kecamatan dan lima belas kelurahan. Sedangkan jika berpedoman kepada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jumlah minimal kecamatan untuk Kota adalah 4 (empat) kecamatan. Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan Kajian Pemekaran Wilayah untuk memenuhi jumlah Kecamatan sesuai dengan peraturan dan perundangan.

C. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kota Cimahi, meliputi rawan tanah longsor, rawan banjir, dan rawan aliran lahar gunung berapi. Kawasan rawan tanah longsor mencakup kawasan di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan, terutama wilayah dengan kemiringan diatas 15 % (lima belas persen) seluas 147 (seratus empat puluh tujuh) ha. Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana untuk kawasan

rawan longsor dilakukan dengan menetapkan tingkat bahaya longsor di masing-masing kawasan, melakukan penanaman tanaman keras di kawasan rawan longsor dan menetapkan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai RTH pengaman lingkungan. Berdasarkan data pada tahun 2022, kejadian bencana di Kota Cimahi dikategorikan sebagai berikut (BPBD Kota Cimahi, 2022) :

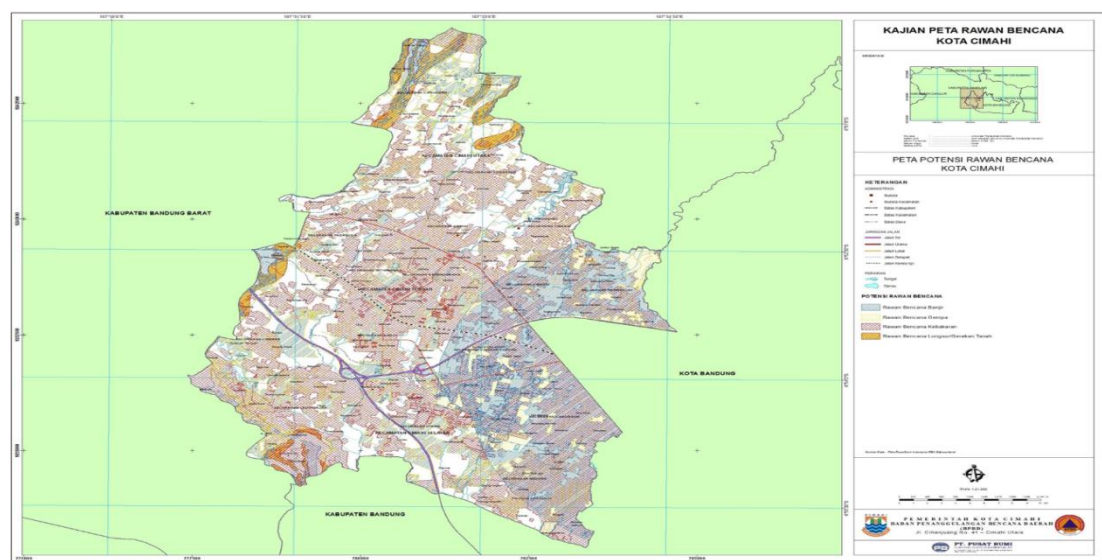
1. Banjir (53,51%);
2. Tanah Longsor (23,22%);
3. Angin Kencang (22,21%);
4. Pergerakan Tanah (5,5%);
5. Gempa Bumi (1,1%);
6. Kekeringan (0%); dan
7. Kebakaran Hutan/Lahan (0%).

Mengenai banjir, wilayah yang berpotensi/rawan banjir tidak hanya di Cimahi Selatan, tetapi wilayah yang dilintasi 4 sungai (anak Sungai Cihaur, Sungai Cimahi, Sungai Cilember, Sungai Cibeureum). Wilayah yang paling rawan adalah wilayah Cimahi Selatan yang menjadi wilayah hilir sebelum sungai-sungai tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat sebelum bermuara ke Sungai Citarum. Hal ini merupakan permasalahan yang tidak dapat secara langsung tertangani oleh Kota Cimahi sendiri, karena kewenangan kota/kabupaten hanya sebagai pendukung dari pelaksanaan penuntasan banjir wilayah DAS Citarum yang dilaksanakan oleh BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum.

Sedangkan Kawasan rawan aliran lahar gunung berapi mencakup daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu seluas 98 Ha. Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana untuk kawasan rawan aliran gunung berapi dengan menetapkan tingkat bahaya aliran lahar gunung berapi di masing-masing kawasan, memindahkan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan rawan aliran lahar gunung berapi tingkat tinggi serta

mengembangkan kawasan dan evakuasi bencana di Kecamatan Cimahi Utara.

Gambar 2.3

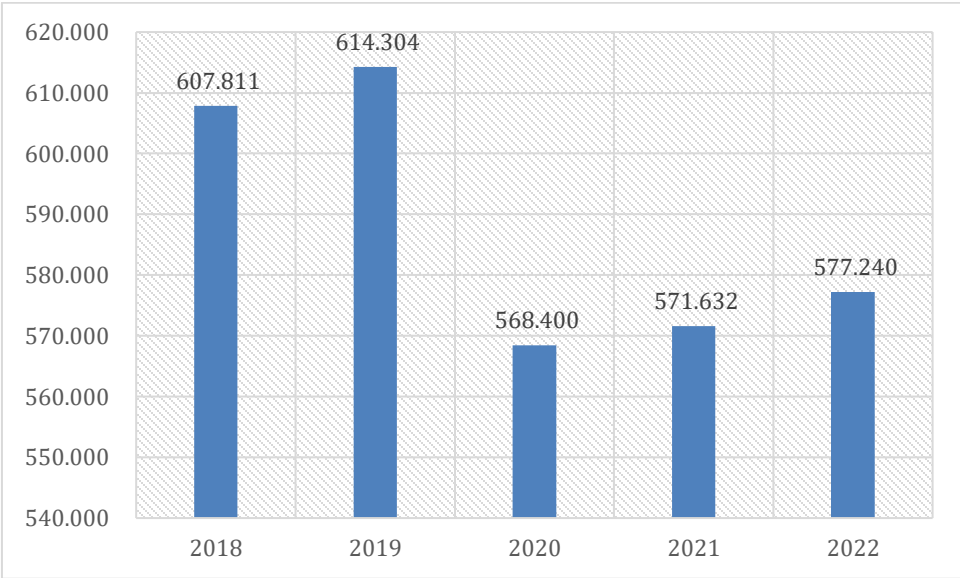


Sumber : BPBD Kota Cimahi, 2017

D. Demografi

Di dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 disebutkan bahwa perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yaitu sebesar 277 juta jiwa, memiliki kecenderungan terus meningkat, meskipun pertumbuhannya melambat. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat menjadi potensi pembangunan yang besar apabila dipersiapkan dengan baik menjadi sumber daya manusia produktif. Oleh sebab itu, Indonesia harus menerapkan strategi pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehingga pertambahan jumlah penduduk di Indonesia diharapkan dapat menjadi bonus demograsi yang cukup signifikan.

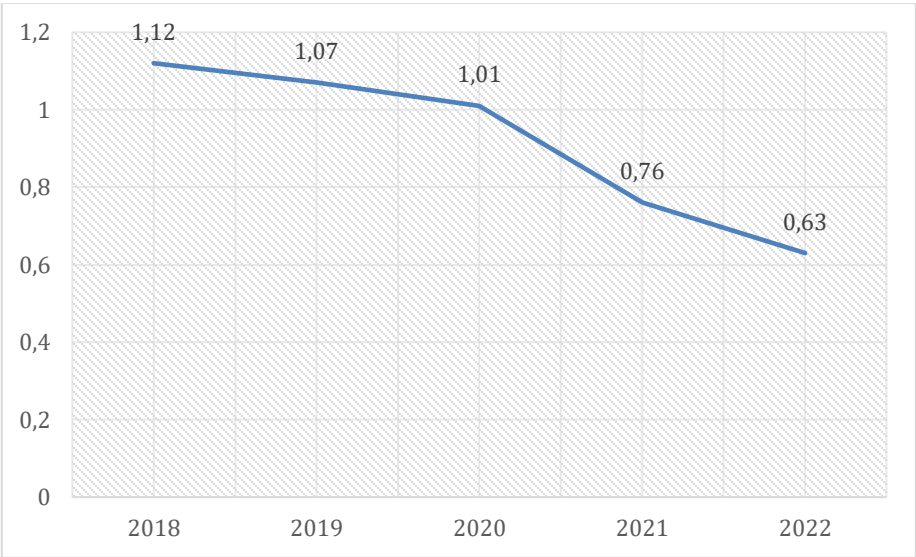
Untuk Kota Cimahi, jumlah penduduk juga terus bertambah dengan pertumbuhan penduduk yang mengalami perlambatan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Cimahi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 jumlah penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2021 adalah sebesar 571.632 jiwa, sedangkan pada tahun 2022 jumlah penduduk mengalami peningkatan menjadi 577.240 jiwa.



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2023 BPS, diolah

Gambar 2.4 Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Dilihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 hingga tahun 2022, laju pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 0,76% atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan Kota Cimahi menurun menjadi 0,63%.



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Jumlah penduduk Cimahi sebanyak 577.240 jiwa pada Tahun 2022 tersebar di 3 (tiga) kecamatan. Kecamatan Cimahi Selatan memiliki penduduk terbanyak dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Selain itu kecamatan Cimahi Selatan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 16.385 jiwa/km². Kepadatan ini bahkan berada diatas rata-rata kepadatan penduduk Kota Cimahi yaitu 13.605 jiwa/km².

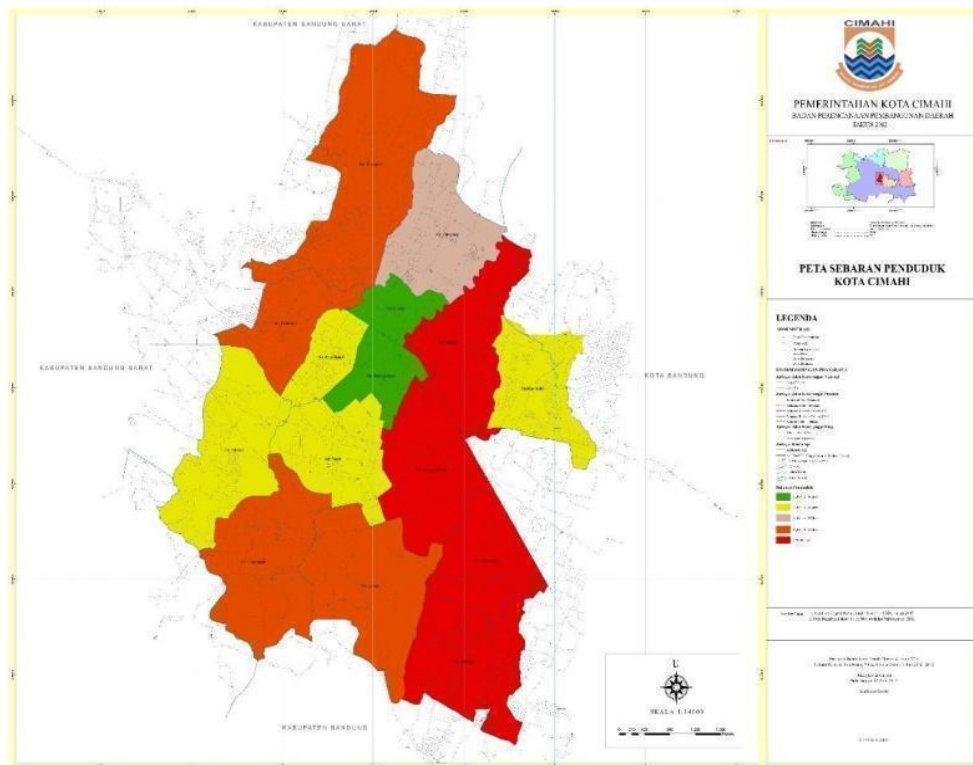
Tabel 2.5
Sebaran Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2020 - 2022

No	Kecamatan	2020		2021		2022	
		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Cimahi Selatan	240.990	14.226	234.848	14.295	243.480	16.385
2.	Cimahi Tengah	161.758	16.000	160.793	16.009	162.040	12.021
3.	Cimahi Utara	165.652	12.436	165.105	12.584	169.720	12.003
	Kota Cimahi	614.304	15.281	568.400	14.080	577.240	13.605

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2023, BPS, diolah

Persoalan lain yang terkait dengan jumlah penduduk adalah sebaran penduduk, kepadatan penduduk dan distribusi penduduk yang tidak merata. Sebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan banyaknya permasalahan kependudukan, seperti kemacetan, pengangguran, kebutuhan pemukiman dan masalah-masalah lain.

Laju pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi yang sebesar 0,63 % mempunyai konsekuensi dalam pemenuhan fasilitas umum dan pelayanan dasar bukan hanya dari kuantitas tapi juga kualitas, terlebih lagi dengan persebaran penduduk yang tidak merata berdampak pada kemacetan di waktu tertentu karena mobilitas penduduk yang tinggi dengan kondisi wilayah yang terbatas.



Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2021

Gambar 2.6 Peta Sebaran Penduduk Kota Cimahi

Meskipun Kota Cimahi menghadapi permasalahan demografis, namun berdasarkan data KCDA Tahun 2023, pada tahun 2022 terdapat 358.295 atau 71,5% proporsi penduduk produktif (15-64 tahun) yang tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa secara demografis, Kota Cimahi memiliki Bonus Demografi, yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan catatan bahwa kelompok penduduk usia produktif tersebut dipersiapkan dengan optimal. Adapun persiapan yang dapat dilaksanakan meliputi peningkatan derajat Kesehatan, tingkat Pendidikan, serta kemampuan bekerja (*labour skill*) dan berusaha (*business skill*). Oleh sebab itu, kebijakan dan program pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pengembangan usaha mikro dan kecil terpadu harus dapat terhubung satu dengan yang lainnya.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, aspek pembangunan yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan analisis adalah mencakup aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, aspek kesejahteraan sosial dan aspek seni budaya dan olahraga. Pada aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian diantaranya penilaian produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Untuk mengetahui kondisi aspek sosial dilihat diantaranya dari angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, kesehatan dan ketenagakerjaan. Sedangkan untuk melihat kondisi pada aspek budaya dan olahraga dapat dilihat diantaranya dari persentase kebudayaan yang dilestarikan dan Perkembangan seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Kulon Progo dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku. Analisis ekonomi suatu wilayah meliputi : PDRB harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan

ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah.

Tabel 2.6
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		2018 (Miliar Rupiah)	2019 (Miliar Rupiah)	2020r (Miliar Rupiah)	2021* (Miliar Rupiah)	2022** (Miliar Rupiah)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	60,60	64,89	67,38	66,97	69,22
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	13.639,67	15.878,19	15.325,61	15.864,71	17.964,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	96,17	100,03	98,36	114,88	124,59
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	18,29	17,98	19,51	21,50	22,44
F	Konstruksi	3.777,64	4.045,57	3.948,86	4.402,88	4.637,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.838,01	5.208,37	4.868,21	5.285,84	5.667,20
H	Transportasi dan Pergudangan	1.143,21	1.254,19	1.263,37	1.306,95	1.456,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	394,86	438,55	427,50	424,59	523,93
J	Informasi dan Komunikasi	1.429,52	1.469,88	1.963,41	2.227,64	2.320,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	922,50	958,30	964,60	1.067,67	1.140,93
L	Real Estat	262,20	281,89	294,76	353,81	378,89
M, N	Jasa Perusahaan	52,19	59,82	51,35	55.820,00	64,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	725,98	749,95	728,65	726.630,00	705,45
P	Jasa Pendidikan	1.122,81	1.274,08	1.377,37	1.470.590,00	1.515,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	293,17	319,58	310,40	345.270,00	362,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	463,22	518,26	501,32	508.720,00	584,80
	Produk Domestik Regional Bruto	29.240,03	32.639,54	32.210,68	34.244,47	37.538,21

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, BPS, 2023

Keterangan :

r merupakan angka revisi

* angka sementara

** angka sangat sementara

Pergeseran struktur lapangan usaha sebagian penduduk Kota Cimahi, dapat terlihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka lapangan usaha yang mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kota Cimahi pada tahun 2022 adalah Industri Pengolahan, Pengadaan listrik dan gas, kontruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, Informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, Real estate, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan dan kegiatan social. Sedangkan sektor lainnya memberikan nilai kontribusi yang konstan dan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Cimahi pada tahun 2022 tetap dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan, yaitu mencapai 47,86%. Selanjutnya disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 15,10%, sektor usaha Konstruksi sebesar 12,35%, dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 6,18%. Sementara peranan sektor lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Tabel 2.7
Distribusi Persentase PDRB Kota Cimahi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (persen)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,21	0,20	0,21	0,20	0,18
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	46,65	48,65	47,58	46,33	47,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,33	0,31	0,31	0,34	0,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	12,92	12,39	12,26	12,86	12,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	16,55	15,96	15,11	15,44	15,10

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
	Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	3,91	3,84	3,92	3,82	3,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,35	1,34	1,33	1,24	1,40
J	Informasi dan Komunikasi	4,89	4,50	6,10	6,51	6,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,15	2,94	2,99	3,12	3,04
L	Real Estate	0,90	0,86	0,92	1,03	1,01
M.N	Jasa Perusahaan	0,18	0,18	0,16	0,16	0,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,48	2,30	2,26	2,12	1,88
P	Jasa Pendidikan	3,84	3,90	4,28	4,29	4,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	0,98	0,96	1,01	0,97
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,58	1,59	1,56	1,49	1,56
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, BPS, 2023

Keterangan :

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator Makro Ekonomi yang menjadi perhatian baik pemerintah maupun sektor swasta dan juga masyarakat. Seringkali pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu perekonomian.

Pertumbuhan Ekonomi Cimahi tumbuh sebesar 5,92 persen pada tahun 2022. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,05%. Diikuti Jasa Perusahaan sebesar 10,55% dan Industri Pengolahan sebesar 10,16%. Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB di Kota Cimahi yaitu sebesar 47,86%, diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 15,10%.

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Cimahi (persen),
2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,54	2,38	3,18	1,34	-2,90
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	7,70	13,96	-7,04	0,43	10,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,72	2,59	-1,01	16,29	5,52
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,16	-7,93	7,95	9,70	1,55
F	Konstruksi	7,10	1,42	-2,79	8,24	-0,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,91	2,85	-6,55	6,51	2,30
H	Transportasi dan Pergudangan	5,30	4,57	-0,13	2,99	6,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,57	3,52	-2,62	-3,05	13,05
J	Informasi dan Komunikasi	9,14	3,31	33,56	14,42	5,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,13	1,53	6,07	4,61	-0,65
L	Real Estat	8,44	6,29	4,50	19,67	3,76
M, N	Jasa Perusahaan	8,01	6,91	-14,21	5,52	10,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,35	2,88	-2,86	-0,87	-2,67
P	Jasa Pendidikan	4,17	2,06	8,03	2,24	1,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,24	6,56	-4,81	10,15	4,05
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,68	4,16	-3,33	2,86	9,84
	Produk Domestik Regional Bruto	6,46	7,85	-2,26	4,19	5,92

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, BPS, 2023

Keterangan :

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Hampir seluruh lapangan usaha di Kota Cimahi mengalami peningkatan di tahun 2022 yang menunjukkan adanya perbaikan aktivitas produksi di sektor tersebut, namun beberapa diantaranya tetap mengalami perlambatan pasca pemulihan ekonomi. Sektor-sektor tersebut yakni Pertanian, kehutanan dan perikanan; Konstruksi; jasa keuangan dan asuransi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Angka pertumbuhan ekonomi (LPE) di tahun 2022 sebesar

5,92 telah melampaui target LPE Kota Cimahi dalam dokumen Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi (RPJMDP), dan masih berada diatas angka LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Tabel 2.9
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
		(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,81	33,59	34,66	35,12	34,10
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	9.675,44	11.026,48	10.250,61	10.294,91	11.340,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	55,20	56,63	56,06	65,20	68,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,81	10,87	11,74	12,88	13,07
F	Konstruksi	2.786,35	2.825,91	2.747,12	2.973,48	2.954,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.591,57	3.694,06	3.452,24	3.677,02	3.761,76
H	Transportasi dan Pergudangan	733,66	767,19	766,16	798,80	837,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	264,67	273,99	266,81	258,68	292,43
J	Informasi dan Komunikasi	1.482,69	1.531,78	2.045,80	2.340,87	2.468,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	661,02	671,13	711,88	744,68	739,81
L	Real Estate	194,18	206,39	215,67	258,09	267,80
M . N	Jasa Perusahaan	37,46	40,04	34,35	36,25	40,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	427,17	439,46	426,88	423,17	411,86
P	Jasa Pendidikan	754,44	769,94	8.311,77	850,37	866,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	178,63	190,34	181,19	199,59	207,67
R, S, T, U	Jasa Lainnya	305,51	318,22	307,62	316,41	347,54
Produk Domestik Regional Bruto		21.192,60	22.856,04	22.340,56	23.275,78	24.652,73

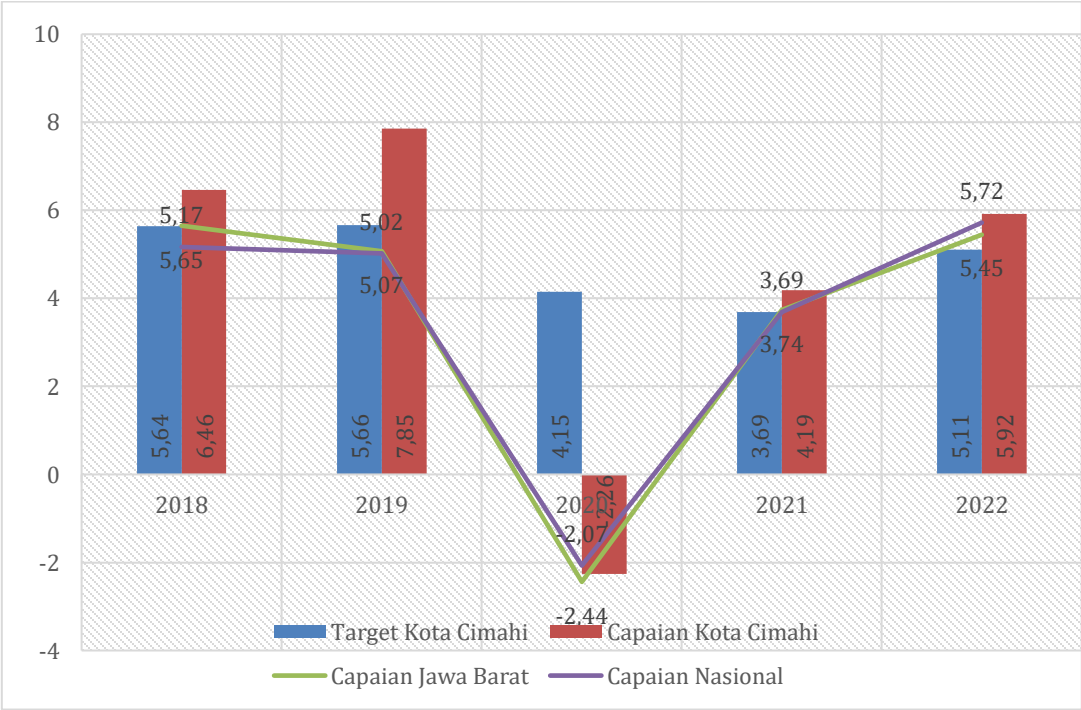
Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, BPS, 2023

Keterangan :

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Cimahi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan nilai PDRB ADHK tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Cimahi tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 24.652,73 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat sebesar 1.376,95 miliar dari tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi Laju pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 5,92%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka dan Jawa Barat Dalam Angka ,BPS, 2023

Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Dari Grafik diatas dapat terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi dari tahun 2018 sampai dengan 2022 selalu melebihi target, kecuali perekonomian Kota Cimahi pada tahun 2020 terkontraksi sebesar -2,26%, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 6,84%. Angka ini berada diatas nilai Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat di tahun 2020 yang berkontraksi sebesar -2,44%, berkontraksinya pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2020 ini sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi memiliki pola yang hampir mirip dengan pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Barat dan Nasional, tetapi apabila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Cimahi cenderung lebih baik dari Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 selalu berada diatas Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi adalah sebesar 5,92%, Kota Cimahi unggul 0,47 point dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan unggul 0,20 point dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang positif ini dikarenakan Aktivitas perekonomian Kota Cimahi mulai membaik serta daya beli masyarakat yang meningkat seiring dengan mulai berdampaknya program-program pemerintah dalam usaha pemulihan ekonomi daerah.

2. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur atau sejahtera.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2023, diolah

Gambar 2.8 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)

Meningkatnya PDRB perkapita (ADHK) mencapai 42,857 Juta rupiah yang mengalami perubahan sebesar 5,93% jika dibandingkan dengan PDRB per kapita (ADHK) Tahun 2021 sebesar 40,718 Juta Rupiah. Capaian PDRB per kapita tahun 2022 tersebut melebihi target sebesar 37,77 Juta rupiah dengan capaian kinerja sebesar 113,48%. Namun perlu diingat bahwa PDRB per kapita bukanlah angka pasti mengenai pendapatan rata-rata seluruh penduduk di suatu wilayah, karena tidak semua penduduk memiliki penghasilan yang sama.

Bila dilihat dari grafik diatas capaian Pendapatan Perkapita (ADHK) Kota Cimahi dari Tahun ke Tahun masih diatas Provinsi Jawa Barat sedangkan bila dibandingkan dengan Nasional secara rata-rata PDRB per Kapita (ADHK) Kota Cimahi masih lebih rendah dari capaian Nasional, baru di tahun 2022 capaian Kota Cimahi diatas dari capaian Nasional.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2023, diolah

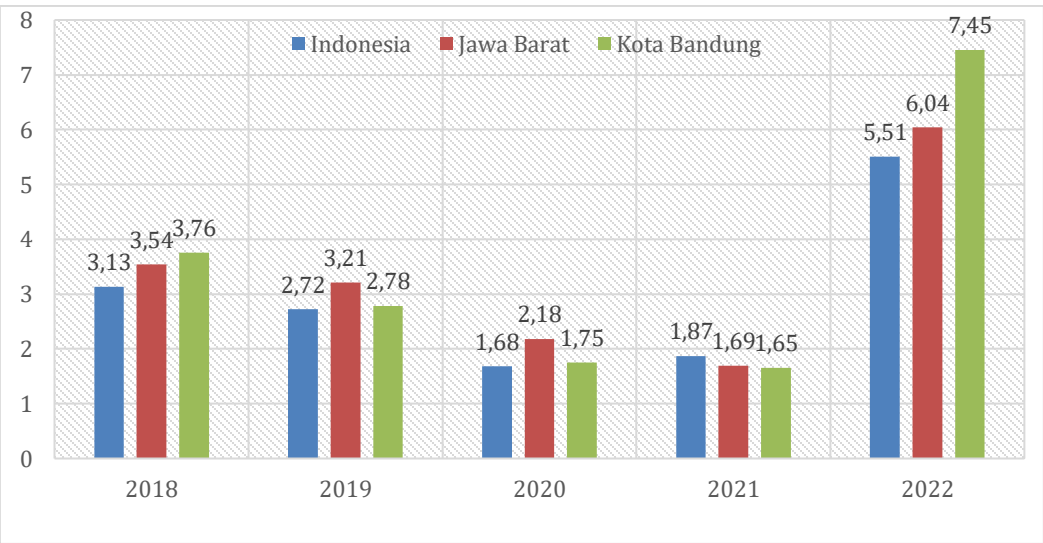
Gambar 2.9 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)

Sama halnya dengan PDRB Per Kapita atas dasar Harga Konstan, PDRB Per Kapita atas Harga Berlaku Kota Cimahi juga dari Tahun ke Tahun juga mengalami kenaikan. Tahun 2022 PDRB Perkapita Kota Cimahi masih diatas Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar Rp. 65.257.000. Namun perlu diingat bahwa PDRB per kapita bukanlah angka pasti mengenai pendapatan rata-rata seluruh penduduk di suatu wilayah, karena tidak semua penduduk memiliki penghasilan yang sama. PDRB per kapita hanya memberikan gambaran umum mengenai tingkat pendapatan rata-rata di wilayah tersebut. Kenaikan PDRB per kapita ini dipengaruhi oleh pulihnya kegiatan ekonomi pasca Pandemi Hal ini menggambarkan secara umum bahwa penduduk Kota Cimahi Sejahtera. Untuk Pendapatan Perkapita (ADHB) Kota Cimahi dari Tahun ke Tahun masih diatas Provinsi Jawa Barat akan tetapi bila disandingkan dengan capaian Nasional secara rata-rata PDRB per Kapita (ADHK) Kota Cimahi masih lebih rendah dari capaian Nasional.

3. Tingkat Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Terjadinya inflasi diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan arus masuk dan keluar uang maupun barang sehingga inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan turunnya nilai uang dari waktu ke waktu, sehingga daya beli masyarakat dan investasi menurun sehingga berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Cimahi tidak termasuk dalam penghitungan angka inflasi di Provinsi Jawa Barat, maka Kota Cimahi melakukan pendekatan angka inflasi ke *Sister City* yaitu Kota Bandung, dengan berasumsi bahwa kondisi Kota Cimahi tidak terlalu berbeda dengan Kota Bandung.



Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, BPS, 2023

Gambar 2.10 Perkembangan Inflasi Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Persen)

Dari Grafik diatas dapat dilihat Indonesia mengalami inflasi sebesar 5,5% sepanjang Tahun 2022. Angka ini menjadi rekor inflasi tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Kota Bandung sendiri menjadi kota dengan angka inflasi tertinggi dalam skala nasional dengan angka 2.04%. Inflasi Kota Bandung juga lebih

tinggi dari inflasi Provinsi Jawa Barat. Inflasi tertinggi di Jawa Barat terjadi di Kota Bandung sebesar 7,45%, sedangkan terendah terjadi di Kota Cirebon yaitu sebesar 4,86%.

Andil Inflasi selama tahun 2022 dipengaruhi sejumlah komoditas antara lain Kenaikan Harga BBM, tarif air minum PDAM, tarif angkutan dalam kota, telur ayam ras, bawang merah, beras dan rokok kretek. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran dengan rincian sebagai berikut, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,80%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,65%. Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 5,90%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,64%; kelompok kesehatan sebesar 2,39%.

Upaya untuk meminimalisir dampak inflasi di Kota Bandung yaitu dengan cara pengendalian inflasi agregat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, melalui pengendalian pasokan, subsidi transportasi, operasi pasar, dan gerakan masyarakat, monitoring rutin baik itu stok atau ketersediaan hingga harga kebutuhan bahan pokok serta merutinkan pemantauan stok dan harga pasar, upaya lain yang dilakukan untuk menekan resiko inflasi adalah dengan menggelar pasar murah.

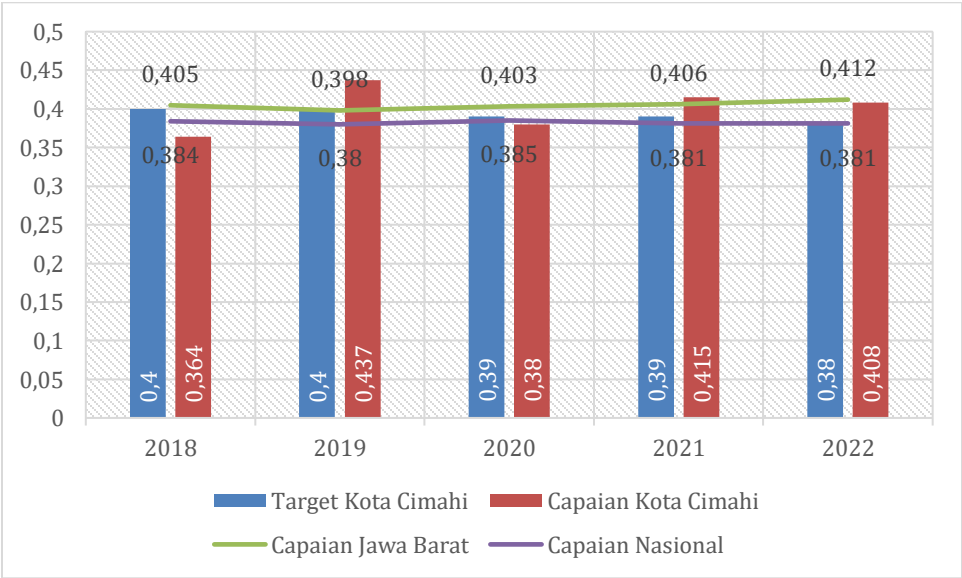
4. Indeks Gini

Salah satu keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah adalah pembangunan pada sektor ekonomi, yang melibatkan seluruh komponen yang ada di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses membuat dan memanfaatkan sumberdaya fisik, sumber daya manusia, keuangan, dan modal-modal sosial untuk menimbulkan perbaikan dan pemerataan ekonomi dan kualitas kehidupan bagi masyarakat atau wilayah.

Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan.

Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan ekonomi di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (*disparity*).

Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Guna mengukur ketimpangan pendapatan per kapita diperlukan data pendapatan, namun karena data pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran ketimpangan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi data pendapatan.



Sumber : BPS Jawa Barat (2023)

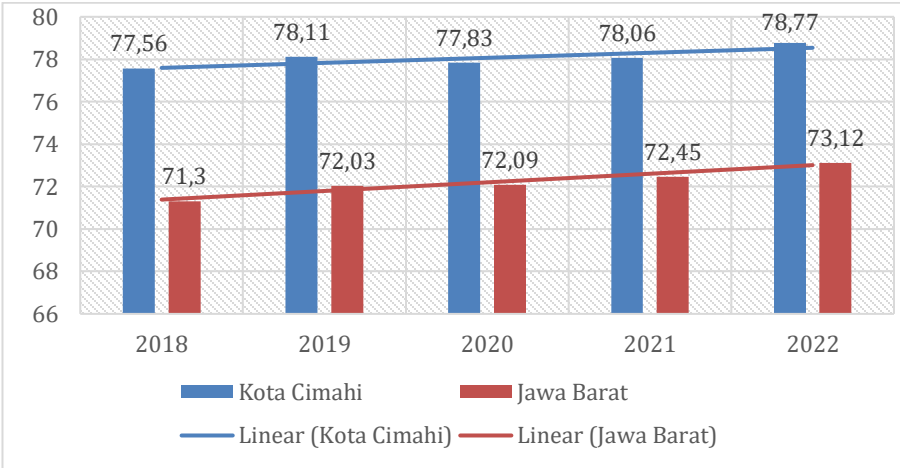
Gambar 2.11 Indeksi Gini Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Berdasarkan data BPS, Indeks Gini Kota Cimahi tahun 2022 yaitu 0,408, nilai indeks tersebut termasuk katagori sedang karena nilainya berada dibawah 0,5; nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,007 point. Nilai ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di kota Cimahi mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni terdapat peningkatan sebesar 1,68%.

Capaian Gini Ratio Kota Cimahi Tahun 2022 lebih baik daripada capaian Provinsi Jawa Barat namun berada dibawah capaian Nasional. Artinya Perbaikan kondisi ekonomi di tahun 2022 pasca pandemi Covid 19 yang diindikasikan dengan menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi berpengaruh positif terhadap perbaikan indeks gini di Kota Cimahi. Namun demikian Pemerintah Kota Cimahi harus bertindak cepat walaupun nilai indeks gini termasuk katagori sedang namun jaraknya cukup dekat dengan kategori tinggi.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator rata-rata besarnya pengeluaran per kapita atau PNB per kapita.



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka dan Jawa Barat Dalam Angka ,BPS, 2023

Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Manusia Kota Cimahi dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Kualitas hidup manusia di Kota Cimahi terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cimahi. Pada tahun 2022, IPM Kota Cimahi telah mencapai 78,77 yang sudah mencapai kategori tinggi.

Apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka IPM Kota Cimahi pada kurun waktu tahun 2018-2022 selalu berada diatas angka IPM Jawa Barat dan Nasional. Peningkatan IPM tahun 2022 merupakan hasil agregasi dari peningkatan komponen pembentuk IPM. Tahun 2022 menunjukkan IPM Cimahi mencapai 78,77 sementara IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing sebesar 73,12 dan 72,91.

Upaya peningkatan pembangunan manusia tidak dapat berdiri sendiri. Capaian pembangunan manusia dipengaruhi oleh tiga faktor terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Tabel 2.10
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru
Kota Cimahi Tahun 2018–2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka Harapan Hidup/AHH (Tahun)	73,75	73,89	74,03	74,21	74,50
2.	Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun)	13,77	13,79	13,80	13,81	13,82
3.	Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)	10,94	10,95	10,96	11,08	11,21
4.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan (PPP) Kota Cimahi (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	11.921	12.448	12.025	12.019	12.500

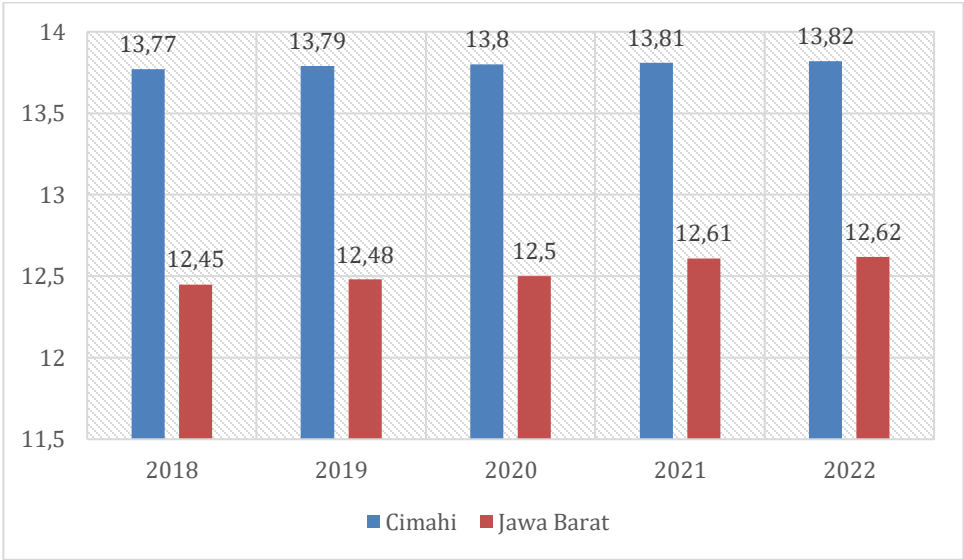
Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka dan Jawa Barat Dalam Angka ,BPS, 2023, diolah

Secara umum dapat dikatakan bahwa indikator-indikator kesehatan yang bisa berdampak terhadap peningkatan umur harapan hidup di masa pandemic Covid-19 masih menunjukkan perbaikan, akan tetapi perbaikannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga pada akhirnya peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2022 juga turut melambat. Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) turut memberikan peran yang positif pada peningkatan IPM di masa pandemi.

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan indikator output pembangunan dalam jangka panjang. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat memberikan gambaran tentang penambahan (*flow*) dan capaian (*stock*) kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Cimahi pada tahun 2022 dipengaruhi oleh peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di kelompok umur pendidikan yaitu 7-12, 16-18, dan 19-24 tahun.

Selama periode 2018 hingga 2022 HLS trennya terus meningkat setiap tahunnya, dari 13,77 hingga 13,82 di

tahun 2022. Capaian HLS 2022 memberikan gambaran bahwa anak-anak usia 7 tahun di Cimahi memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1 atau D2. Berikut disajikan perbandingan data HLS di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2022.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2023, diolah

Gambar 2.13 Harapan Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa selama periode 2018-2022, HLS di Kota Cimahi selalu berada di atas HLS Provinsi Jawa Barat. Adanya pandemi Covid di tahun 2020-2022 tidak memiliki efek yang signifikan dalam bidang pendidikan di Kota Cimahi.

Ukuran kualitas hidup manusia yang ketiga adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*).

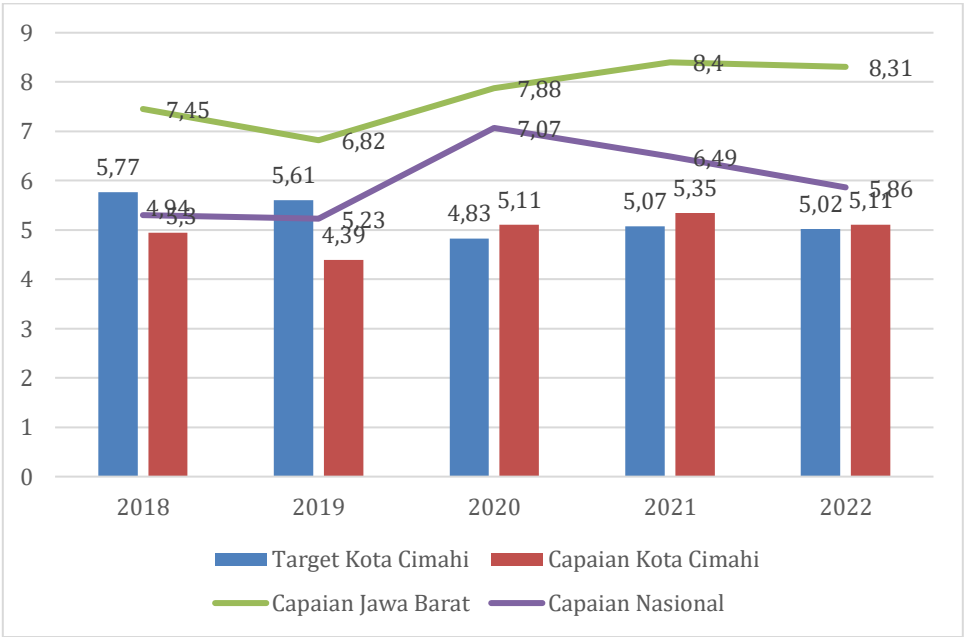
Upaya peningkatan pembangunan manusia tidak dapat berdiri sendiri. Capaian pembangunan manusia dipengaruhi oleh tiga faktor terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang berdampak hampir di seluruh aspek kehidupan manusia, telah menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan manusia Indonesia. Strategi yang tepat dan sinergi dari seluruh elemen sangat dibutuhkan untuk menaklukkan berbagai tantangan, serta untuk mewujudkan pembangunan manusia yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pandemi COVID-19 yang berdampak hampir di seluruh aspek kehidupan manusia, telah menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan manusia Indonesia. Strategi yang tepat dan sinergi dari seluruh elemen sangat dibutuhkan untuk menaklukkan berbagai tantangan, serta untuk mewujudkan pembangunan manusia yang lebih baik dan berkelanjutan.

6. Persentase Penduduk Miskin

a. Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Cimahi

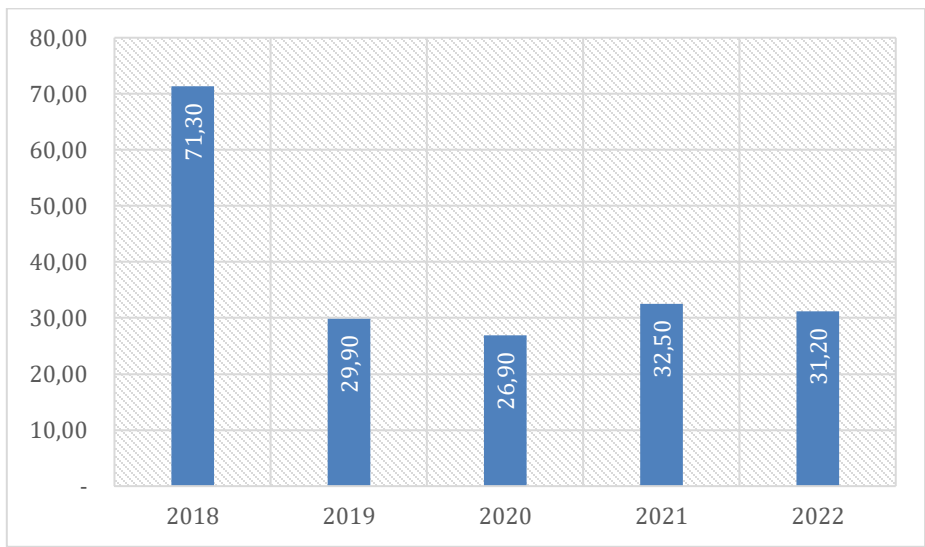
Salah satu penghambat laju pembangunan manusia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan sering kali menjadi penghalang bagi penduduk dalam mengakses kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan perlu aksi yang mencakup berbagai dimensi yang berkaitan.



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2023, diolah

Gambar 2.14 Tingkat Kemiskinan Kota Cimahi, Jawa Barat, dan Nasional beserta Target Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Tingkat kemiskinan di Kota Cimahi selama periode tahun 2018 hingga 2022 cenderung fluktuatif, namun angka tersebut selalu berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Pada tahun 2022 Tingkat Kemiskinan di Kota Cimahi masih berada dibawah target RPJMD, namun angka kemiskinan Kota Cimahi tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kota Cimahi pada tahun 2022 berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Cimahi.



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2023, diolah

Gambar 2.15 Jumlah Penduduk Miskin Kota Cimahi Tahun 2018-2022 (Ribu Jiwa)

Jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 1.300 jiwa jika dibandingkan tahun 2021, dimana pada Tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 5.600 jiwa akibat adanya pandemi covid 19 dimana banyak terjadi pemutusan hubungan kerja dan UMKM yang terpuruk.

b. Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Cimahi

Garis kemiskinan (GK) merupakan jumlah minimal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman makanan dan bukan makanan per orang untuk satu bulan, Pada tahun 2022 garis kemiskinan di Kota Cimahi mengalami peningkatan yakni Rp 549,450 per kapita per bulan dibandingkan tahun 2021, artinya biaya hidup di Kota Cimahi juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.

Tabel 2.11
Indikator Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2018–2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Garis Kemiskinan (GK) - Rupiah)	462.969	484.804	511.375	522.281	549.450
2.	Persentase Penduduk Miskin	4,94	4,39	5,11	5,35	5,11
3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,84	0,60	0,75	0,93	0,67
4.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	0,14	0,18	0,21	0,14

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2023, diolah

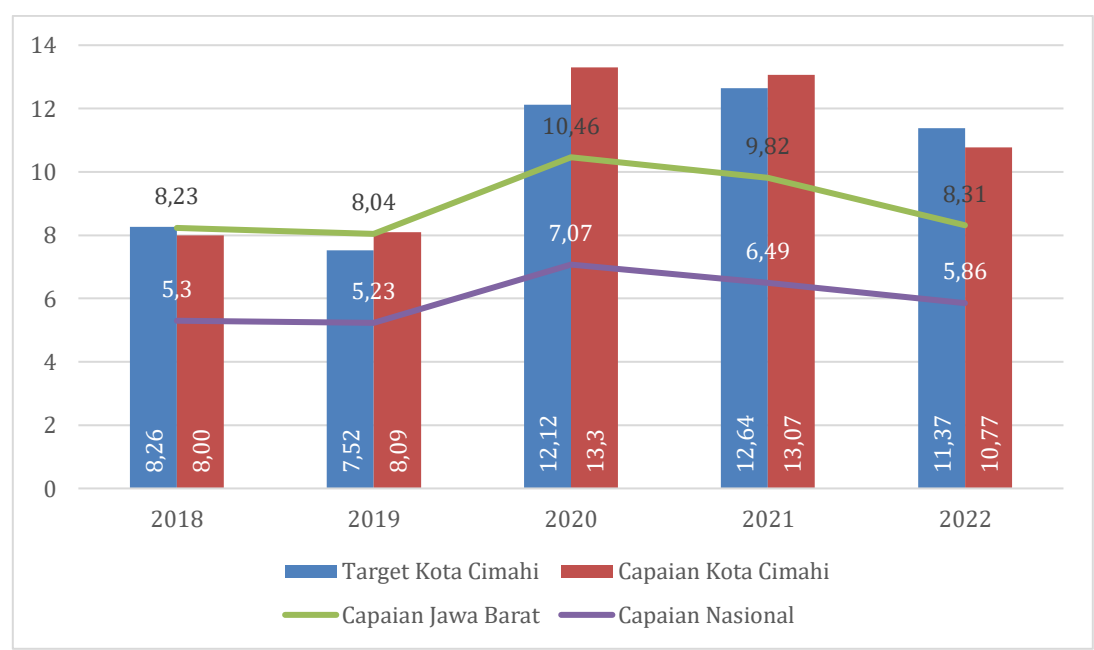
Indikator kemiskinan lainnya adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskian Pada tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan Kota Cimahi mengalami penurunan 0,26 point dari yang semula 0,93 menjadi 0,67, artinya peningkatan garis kemiskinan yang diikuti dengan peningkatan pendapatan penduduk miskin menyebabkan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2022 menjadi semakin rendah dibandingkan tahun sebelumnya, artiya terjadi perbaikan kondisi kemiskinan di Kota Cimahi karena pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) merupakan indikator kemiskinan lainnya yang dapat dianalisis untuk melihat kondisi kemiskinan di suatu daerah. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antar peduduk miskin. Semakin tinggi indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran penduduk miskin.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

TPT Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan.



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka dan Jawa Barat Dalam Angka ,BPS, 2023, diolah

Gambar 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Persen)

TPT seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat Agustus 2022 secara umum mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021, kecuali hanya Kabupaten Bekasi yang mengalami kenaikan. Pada Tahun 2021 TPT Kota Cimahi tertinggi di Jawa Barat, yaitu sebesar 13,07 persen. Tetapi TPT tertinggi pada tahun 2022 adalah Kota Bogor, sebesar 10,78 persen sedangkan yang

terendah adalah Kabupaten Pangandaran sebesar 1,56 persen. TPT Kota Cimahi kedua terbesar setelah Kota Bogor.

Pengangguran terbuka di Cimahi berdasarkan data BPS (2023) adalah 10,77 persen atau sebanyak 34.536 dengan jumlah laki-laki 27.636 dan perempuan 6.900. Angka TPT kota Cimahi pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan TPT Jawa Barat maupun nasional. Sejak tahun 2018 angka TPT Kota Cimahi cenderung meningkat namun angka ini mulai mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi di kota Cimahi cenderung meningkat sehingga kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja juga meningkat dan mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja di Kota Cimahi.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan sebuah negara. Beberapa alasan mengapa aspek pendidikan sangat penting dalam pembangunan antara lain :

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Pendidikan memberikan kesempatan kepada individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial negara.

b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing

Pendidikan juga membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi, produk, dan layanan baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing negara di pasar global.

c. Meningkatkan kesejahteraan social dan ekonomi

Pendidikan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dengan adanya pendidikan, seseorang dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan penghasilan, dan mengurangi kemiskinan.

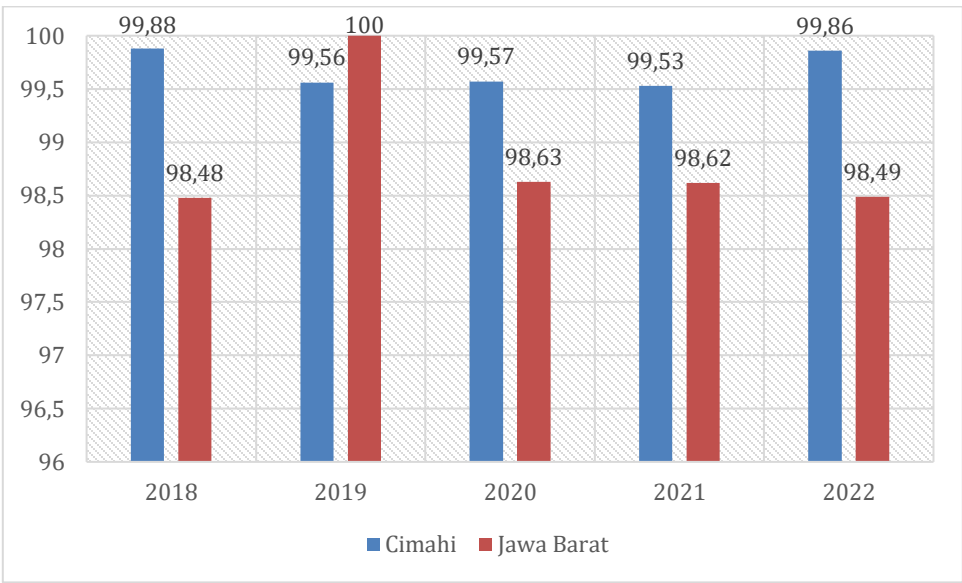
d. Meningkatkan partisipasi dalam kehidupan politik

Pendidikan juga dapat meningkatkan partisipasi dalam kehidupan politik suatu negara. Dengan memperoleh pengetahuan tentang sistem politik dan hak-hak warga negara, individu dapat lebih aktif terlibat dalam proses politik dan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Dengan demikian, aspek pendidikan sangat penting dalam pembangunan sebuah negara pada umumnya, dan pembangunan di Kota Cimahi pada khususnya. Berikut ini indikator-indikator pendidikan yang perlu diperhatikan :

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Berikut ini disajikan AMH untuk usia 15 tahun ke atas di Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir :



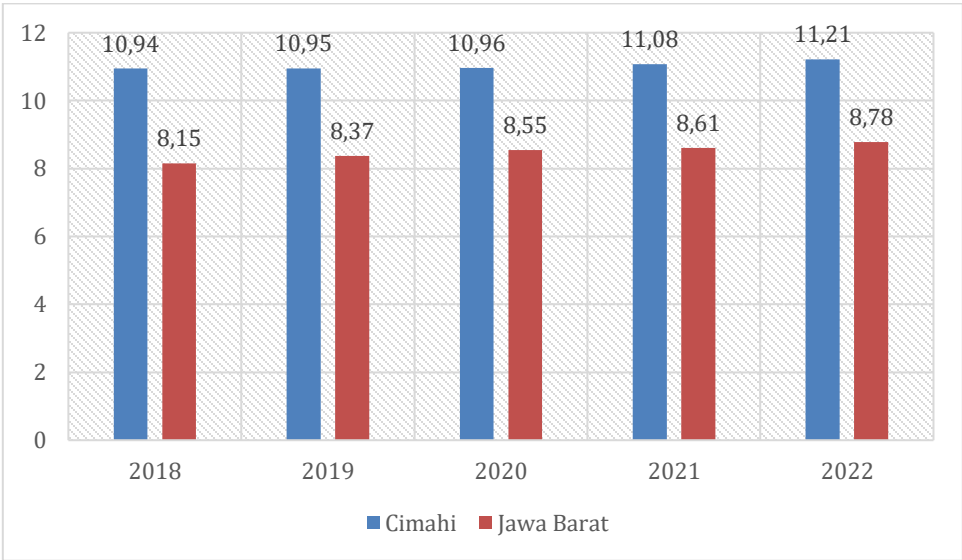
Sumber : BPS Kota Cimahi 2023, diolah

Gambar 2.16 Angka Melek Huruf Usia > 15 Tahun di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa AMH di Kota Cimahi rata-rata di atas 99 dari nilai 100, yang artinya kualitas di sektor Pendidikan di Kota Cimahi telah sangat baik. Sehingga dengan AMH yang tinggi ini, diharapkan dapat menjadi modal sebagai daya ungkit pembangunan di bidang lainnya di Kota Cimahi.

b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Selain HLS, ada indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator tersebut adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Berikut disajikan angka rata-rata lama sekolah di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018-2022.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2023, diolah

Gambar 2.17 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Sama halnya dengan HLS, RLS di Kota Cimahi juga memiliki tren yang terus meningkat dalam periode Rata-rata 2018 hingga 2022. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cimahi terus bertambah selama periode 2018 hingga 2022, dan nilainya selalu di atas Provinsi Jawa Barat.

Dengan nilai indikator rata-rata lama sekolah yang cukup tinggi, yaitu 11,21 di tahun 2022, dapat diartikan bahwa tingkat pendidikan di Kota Cimahi cukup tinggi, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kemajuan ekonomi dan sosial di Kota Cimahi untuk ke depannya, hal ini dikarenakan indikator ini juga menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Namun, perlu diingat pula bahwa rata-rata lama sekolah tidak selalu menggambarkan tingkat pendidikan yang sebenarnya dari setiap individu dalam populasi atau kelompok. Ada individu yang mungkin lebih atau kurang terdidik dari rata-rata yang ditunjukkan oleh indikator ini. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan indikator pendidikan lainnya, seperti tingkat literasi, angka melek huruf, dan kualitas pendidikan, untuk mendapatkan

gambaran yang lebih lengkap tentang tingkat pendidikan di Kota Cimahi.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pencapaian pembangunan dalam bidang seni budaya dan olahraga di Kota Cimahi perlu terus ditingkatkan dari waktu ke waktu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berkepribadian tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan. Upaya tersebut telah menghasilkan adanya komunitas adat di Cipageran dan Kampung Hukum Adat Cireundeu sehingga Kota Cimahi memiliki keberagaman budaya dan kearifan lokal. Kehidupan Kampung Hukum Adat Cireundeu memegang teguh budaya leluhur seperti pola konsumsi pangan non beras (singkong) dan mengedepankan pelestarian lingkungan.

Kampung Hukum Adat Cireundeu secara rutin menyelenggarakan acara adat Seren Taun (Tutup Tahun sebagai penanda pergantian tahun Saka Sunda. Acara itu digelar sebagai bentuk syukur atas segala karunia yang didapat selama setahun. Seren Taun Cireundeu telah diakui sebagai salah satu warisan budaya non benda.

Pengembangan kebudayaan di Kota Cimahi menemui masalah yang cukup pelik diantaranya menyangkut sarana atau gedung dan ruang publik sebagai wadah bagi seniman-seniman di Kota Cimahi untuk mengapresiasi karya seninya.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Cimahi juga fokus dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan, dengan persentase pada tahun 2019 baru mencapai 40,98%, tahun 2021 meningkat menjadi 83% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 90%.

Tabel 2.12
Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan di Kota Cimahi Tahun 2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan	40,98 %	55,56 %	83 %	90%

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2022, diolah

Tabel 2.13
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Group Kesenian	174	175	185	212	185
Jumlah gedung kesenian	NA	NA	NA	NA	NA
Jumlah klub olahraga	202	210	219	219	219
Jumlah gedung olahraga	NA	NA	NA	NA	259

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2022, diolah

Perkembangan jumlah group kesenian di tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu berkurang sebanyak 27 dikarenakan kurangnya regenerasi dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Kota Cimahi masih belum memiliki gedung kesenian karena belum tersedianya lahan untuk pembangunan Gedung Kesenian disebabkan masih terbatasnya kemampuan APBD. Jumlah Klub olah raga masih belum bertambah sejak tahun 2020. Pengembangan klub olah raga masih belum optimal sehingga calon atlet-atlet potensial banyak yang berpindah ke Kota lain. Minimnya penyelenggaraan kejuaraan lokal berpengaruh besar terhadap perkembangan klub olah raga. Gedung olah raga di Kota Cimahi mayoritas dimiliki oleh pihak swasta dan TNI. Masih banyak yang belum memenuhi standar nasional.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

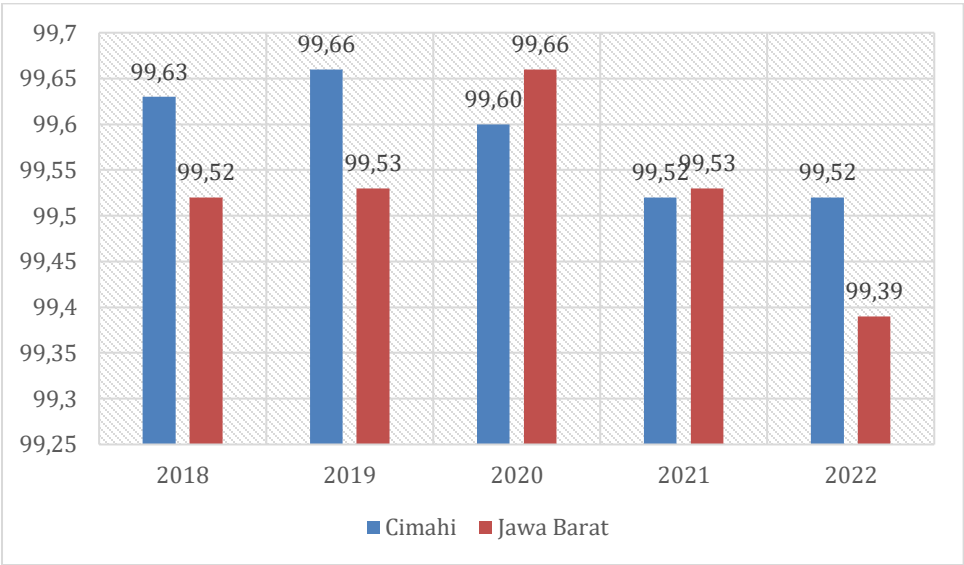
a. Urusan Pendidikan

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator yang mengukur persentase anak usia sekolah (biasanya diukur untuk usia 6-15 tahun) yang terdaftar di sekolah. APS dihitung dengan membagi jumlah siswa di suatu tingkat pendidikan dengan jumlah total populasi anak usia sekolah pada tahun yang sama, kemudian dikalikan dengan 100.

Semakin tinggi angka partisipasi sekolah, semakin banyak anak yang terdaftar di sekolah dan semakin besar kesempatan bagi mereka untuk memperoleh pendidikan formal. Namun, perlu diingat bahwa APS sendiri tidak memberikan informasi tentang kualitas pendidikan atau tingkat keterampilan yang diperoleh siswa.

APS dibagi menjadi beberapa jenjang usia, yaitu 7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24. Sehubungan dengan kewenangan pemerintah kota hanya sampai tingkat menengah saja, sehingga data yang ditampilkan hanya untuk kategori usia 7-12 dan 13-15 tahun saja.

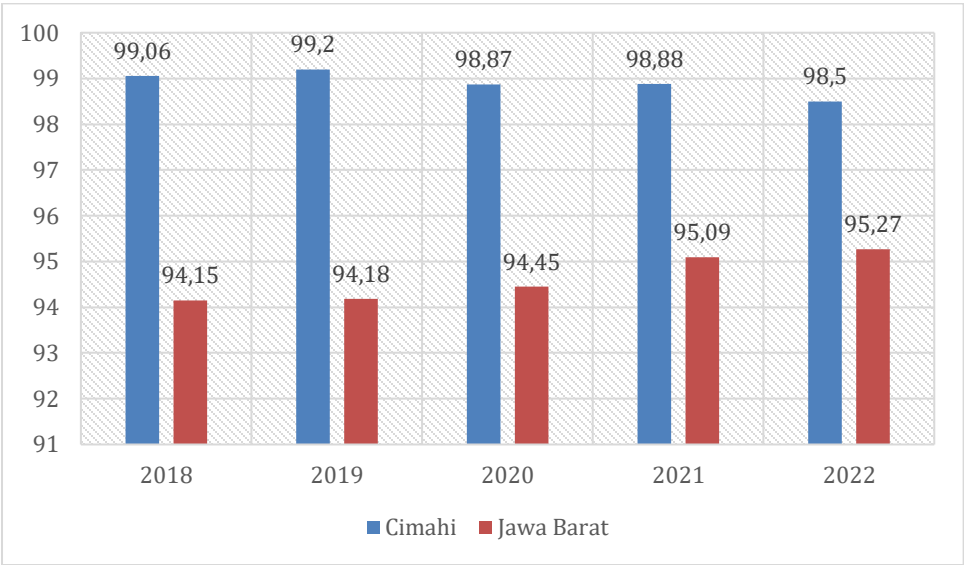


Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2023, diolah

Gambar 2.18 Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Dari grafik di atas, dapat terlihat bahwa partisipasi penduduk usia 7-12 tahun hampir seluruhnya (lebih dari 99%) mengikuti Pendidikan di tingkat dasar. Bahkan APS Kota Cimahi, di tahun 2018, 2019 dan 2022 selalu di atas APS Jawa Barat.

Begitu pula untuk capaian APS usia Pendidikan menengah, yaitu usia 13-15, ditunjukkan pada grafik di bawah ini, bahwa angka partisipasinya hampir 100%, yang artinya hampir seluruh penduduk di Kota Cimahi mengikuti Pendidikan menengah. Di sini terlihat juga, bahwa APS di Kota Cimahi untuk tingkat usia 13-15 tahun melebihi selalu APS Jawa Barat.

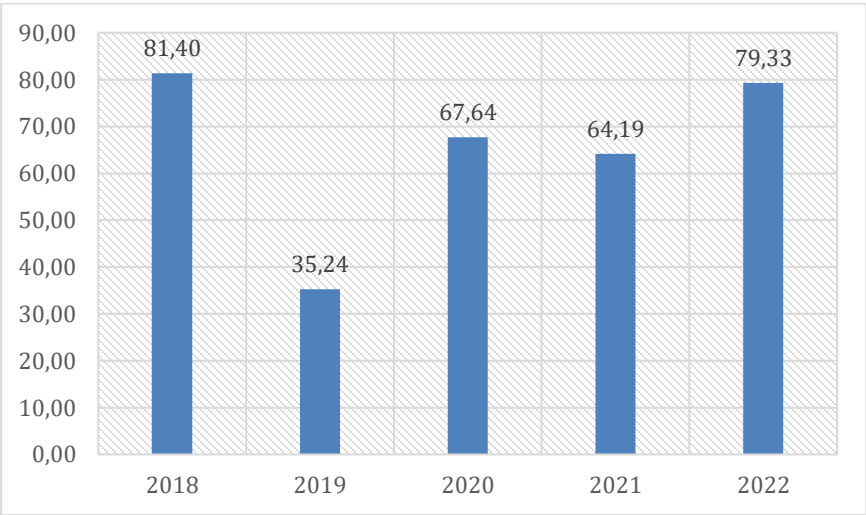


Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2023, diolah

Gambar 2.19 Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun Kota Cimahi Tahun 2018–2022

2) Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun dengan prioritas anak usia 4-6 tahun. Capaian APK PAUD pada tahun 2018 adalah 81,4%, namun pada tahun 2019 APK PAUD di Kota Cimahi mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 35,24%. Adanya kebijakan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tahun 2020, tidak serta merta menurunkan APK, justru di tahun 2020, APK kembali meningkat menjadi 67,64% namun di tahun 2021, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta efek lainnya karena pandemi Covid-19 cukup memberi pengaruh terhadap APK usia PAUD, yaitu 64,19%. Namun seiring semakin melonggarnya aturan PPKM, di tahun 2022, kembali meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cimahi, 2023, diolah

Gambar 2.20 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia 4-6 Tahun Kota Cimahi Tahun 2018-2022

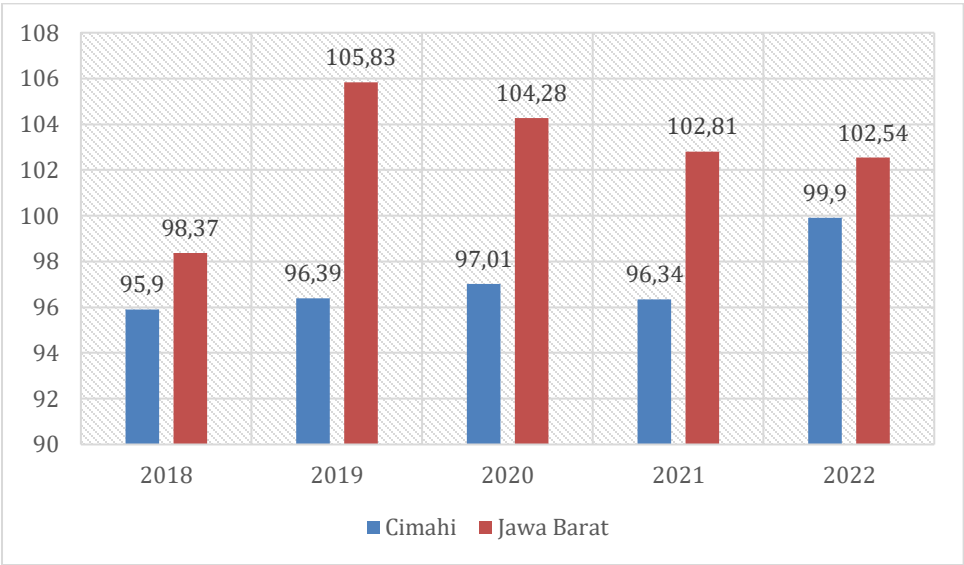
3) Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar dan Menengah

Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota meliputi Jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (MTs), lebih lanjut dapat dilihat pada tabel beriku ini :

**Tabel 2.14
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP Kota Cimahi Tahun 2018–2022**

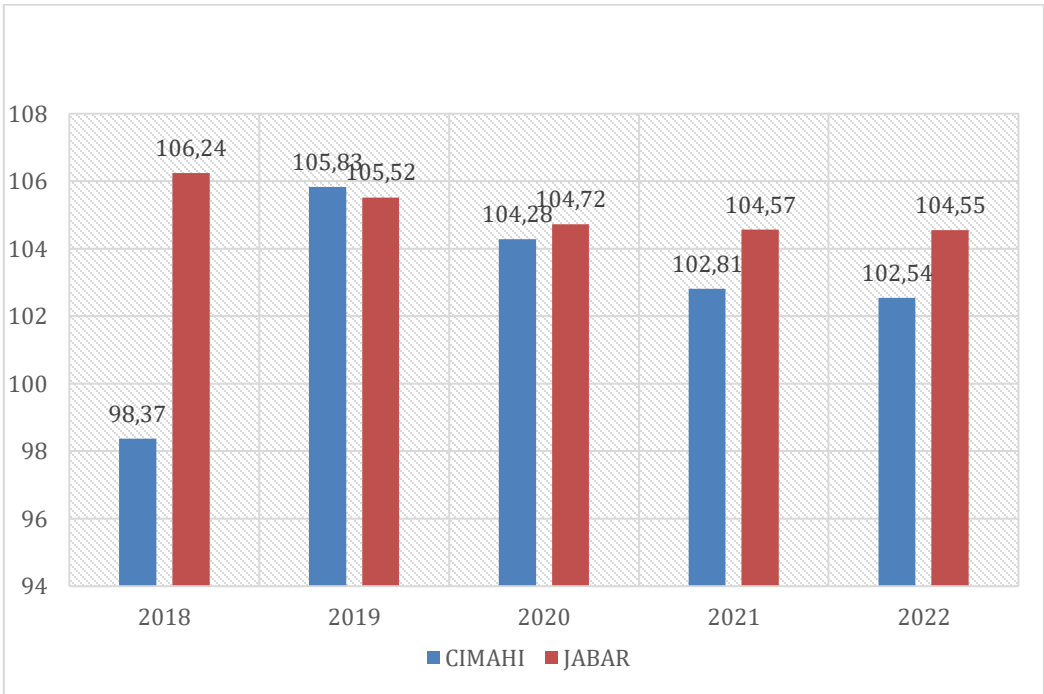
No	APK/ APM	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	95,22	102,54	95,57	102,81	102,54
2.	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	79,74	96,29	91,27	89,74	83,03
3.	Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI	89,67	96,45	93,25	96,34	99,90
4.	Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	77,41	78,81	83,03	80,50	80,79

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cimahi, 2023, diolah



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2023, diolah

Gambar 2.21 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Usia 7-12 Tahun Kota Cimahi Tahun 2018-2022

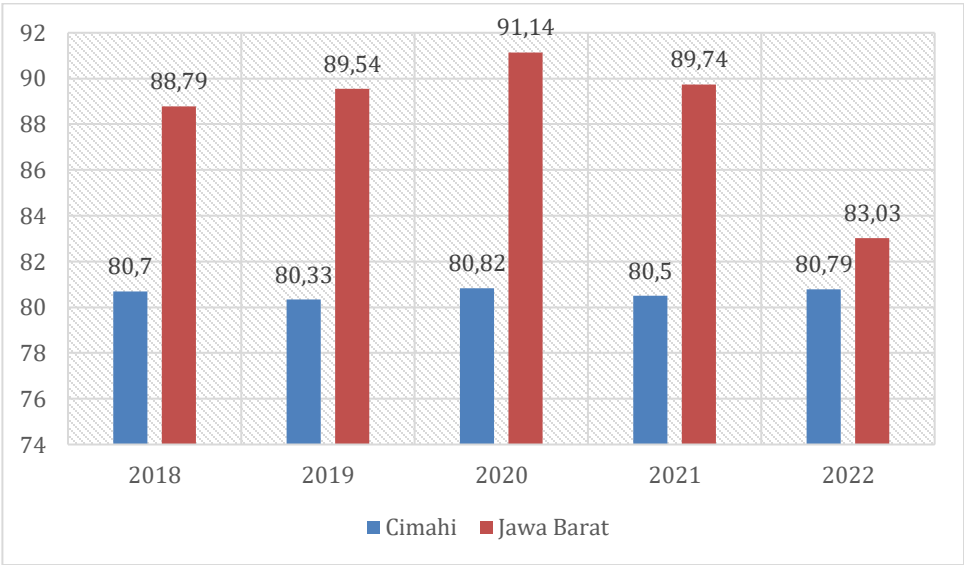


Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2023, diolah

Gambar 2.22 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia 13-15 Tahun Kota Cimahi Tahun 2018-2022

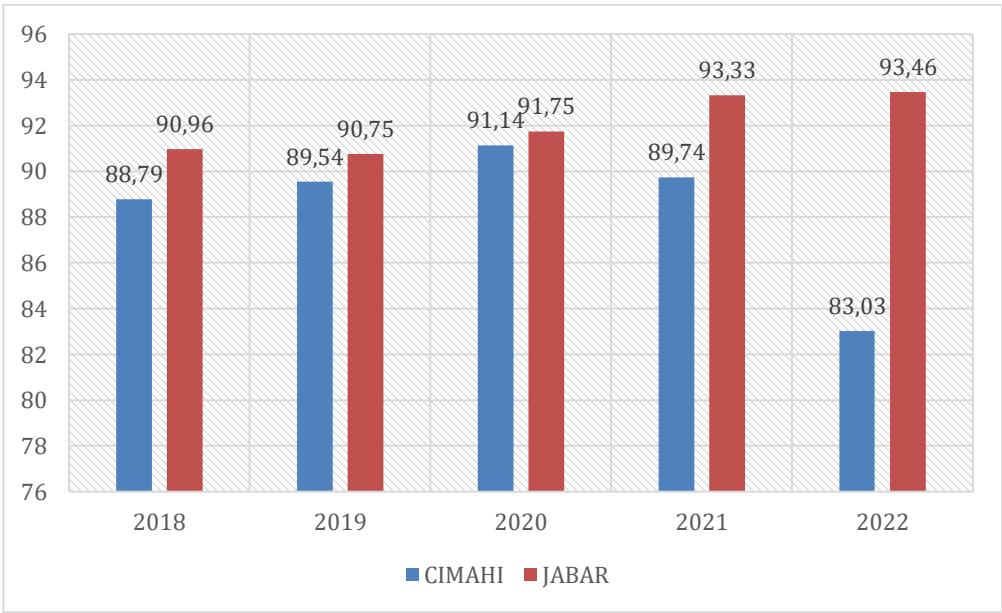
Sebagaimana kita ketahui, APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa APK jenjang SD mengalami fluktuasi, namun sejak 2019

trennya terlihat menurun, begitu juga dengan APM jenjang SD.



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2023, diolah

Gambar 2.23 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Usia 13-15 Tahun Kota Cimahi Tahun 2018-2022



Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2023, diolah

Gambar 2.24 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Usia 13-15 Tahun Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Beda halnya dengan jenjang SMP, APM dan APK sejak 2020 terlihat terus mengalami penurunan bahkan hingga tahun 2022. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa tingkat partisipasi penduduk usia SMP/ sederajat

di Kota Cimahi, lebih rendah dari tingkat partisipasi penduduk usia SD/ sederajat dalam mengikuti Pendidikan.

4) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah adalah perbandingan antara jumlah sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah pada suatu daerah atau negara. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana kebutuhan akan sekolah terpenuhi untuk populasi usia sekolah.

Rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah yang baik adalah 1:1000, yang berarti ada satu sekolah untuk setiap 1000 penduduk usia sekolah. Namun, perlu dicatat bahwa rasio ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan konteks lokal. Misalnya, di daerah pedesaan atau terpencil, rasio yang lebih rendah mungkin diterima karena aksesibilitas geografis yang sulit.

Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesenjangan pendidikan di suatu negara atau daerah. Rasio yang rendah dapat menunjukkan adanya kesenjangan dalam ketersediaan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara daerah kaya dan miskin, atau antara kelompok sosial tertentu. Rasio ini juga dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi daerah-daerah di mana perlu dibangun lebih banyak sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah tersebut.

5) Rasio Guru dan Murid

Rasio guru dan murid (G/M) adalah perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid dalam sebuah lembaga pendidikan. Rasio G/M yang rendah menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak guru yang tersedia untuk memberikan perhatian dan bimbingan kepada setiap murid, sementara rasio G/M yang tinggi menunjukkan sebaliknya.

Rasio G/M sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu negara atau daerah. Pada umumnya, rasio G/M yang ideal bervariasi tergantung pada tingkat pendidikan dan jenis sekolah. Misalnya, di sekolah dasar, rasio G/M yang dianggap ideal adalah 1:20 atau 1:25, sementara di sekolah menengah atas, rasio G/M yang ideal mungkin lebih tinggi, yaitu sekitar 1:30 atau 1:35.

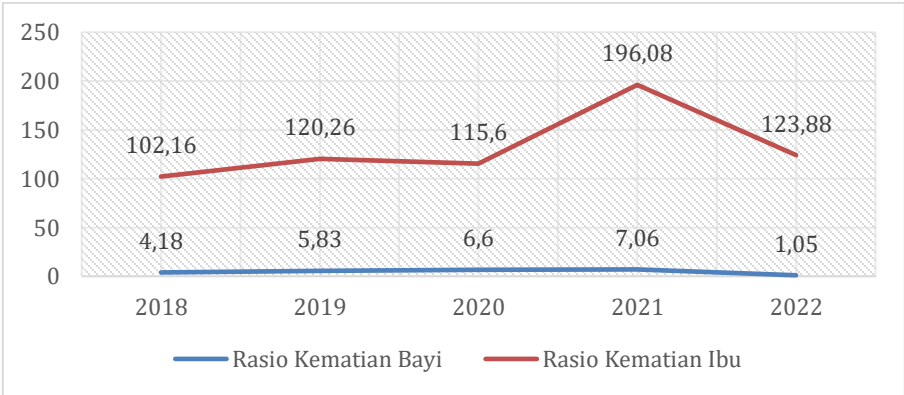
Meskipun rasio G/M dapat memberikan gambaran umum tentang kondisi pendidikan di suatu negara atau daerah, perlu dicatat bahwa rasio ini tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Faktor-faktor lain, seperti kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas pendidikan, juga dapat berdampak pada kualitas pendidikan.

b. Urusan Kesehatan

Kondisi pembangunan kesehatan di Kota Cimahi juga dapat dilihat dari perkembangan Rasio Kematian Ibu dan Rasio Kematian Bayi yang merupakan perhitungan rasio jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH) dan rasio jumlah kematian bayi per 1000 KH berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

Rasio Kematian Ibu di Kota Cimahi mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir dimana pada tahun 2018 berada pada angka 102,16, meningkat menjadi 120,26 pada

tahun 2019, menurun menjadi 115,6 pada tahun 2020, meningkat tajam menjadi 196,08 pada tahun 2021, dan kembali menurun menjadi 123,88 pada tahun 2022. Sementara untuk Rasio Kematian Bayi Kota Cimahi pada tahun 2018 berada pada angka 4,18 yang kemudian terus mengalami peningkatan menjadi 5,83 pada tahun 2019, 6,6 pada tahun 2020, dan 7,06 pada tahun 2021, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 1,05.

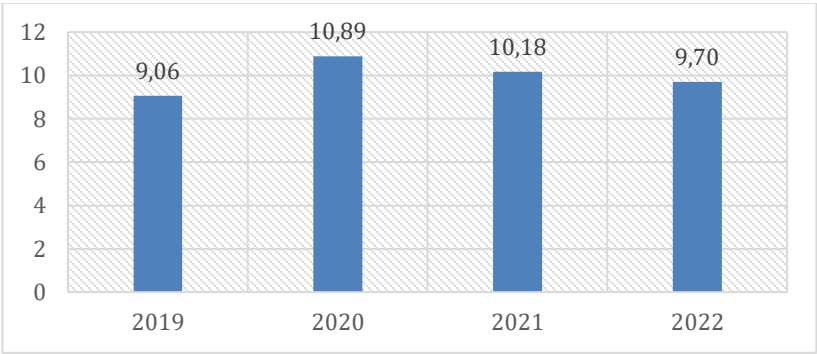


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2023, diolah

Gambar 2.25 Angka Kematian Bayi dan Ibu Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Kondisi kesehatan masyarakat Kota Cimahi juga dapat dilihat dari kondisi gizi balita, terutama terkait dengan kondisi prevalensi balita stunting, underweight, dan wasting. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Underweight dapat diartikan sebagai kondisi gizi kurang dimana berat badan balita yang diukur berada di bawah standar jika dibandingkan dengan usianya. Sedangkan wasting terjadi jika berat badan balita yang diukur berada di bawah standar jika dibandingkan dengan tinggi badannya Ketiga kondisi tersebut terjadi umumnya disebabkan asupan

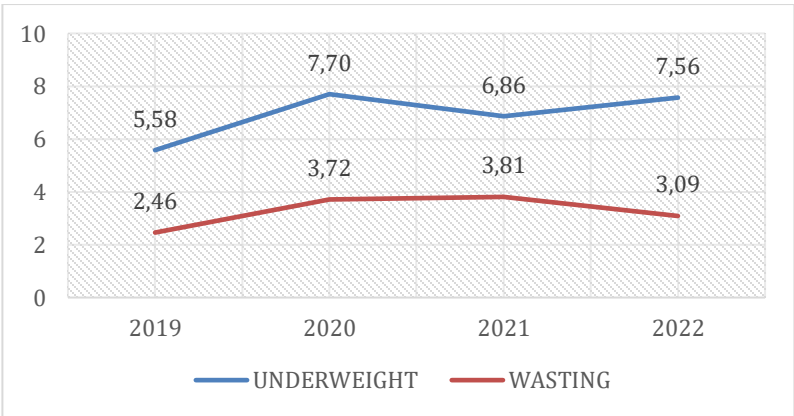
makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Kondisi balita *stunting*, *underweight* dan *wasting* di Kota Cimahi dapat dilihat pada grafik-grafik berikut ini.



Sumber : Data EPPGBM Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2023, diolah

Gambar 2.26 Angka *Prevalensi Stunting* pada Balita Di Kota Cimahi Tahun 2019-2022

Berdasarkan data EPPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) angka prevalensi stunting pada balita di Kota Cimahi berfluktuasi dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Pada tahun 2019 prevalensi balita *stunting* di Kota Cimahi berada di angka 9,06%, meningkat di tahun 2020 menjadi 10,89%, kemudian terus menurun kembali menjadi 10,18% di tahun 2021 dan 9,7% di tahun 2022.

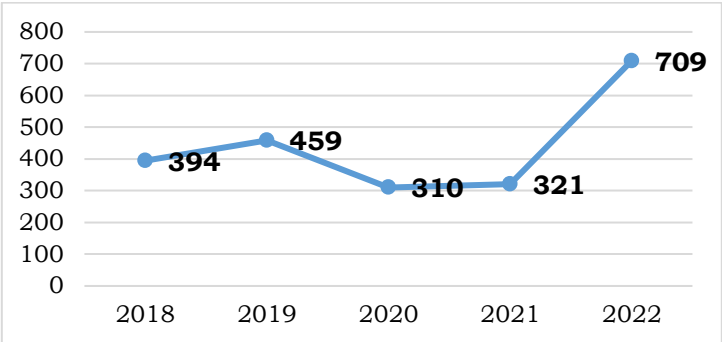


Sumber : Data EPPGBM Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2023, diolah

Gambar 2.27 Angka Prevalensi Balita *Underweight* Di Kota Cimahi Tahun 2019-2022

Selanjutnya untuk angka prevalensi balita kurang gizi (*underweight*) di Kota Cimahi pada tahun 2019 sebesar 5,58% dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 7,7%, menurun kembali menjadi 6,86% pada tahun 2021, namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 7,56%. Sedangkan untuk kondisi prevalensi balita wasting pada tahun 2019 terdata sejumlah 2,46%, meningkat menjadi 3,72% pada tahun 2020 dan 3,81% pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 3,09% di tahun 2022.

Selain itu, kualitas kesehatan juga dapat dilihat dari kondisi kesakitan pada penyakit-penyakit tertentu, diantaranya adalah terkait dengan penyakit Tuberkulosis (TB), kasus HIV/AIDS, dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Semakin banyak penduduk yang mengalami penyakit-penyakit tertentu tersebut berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

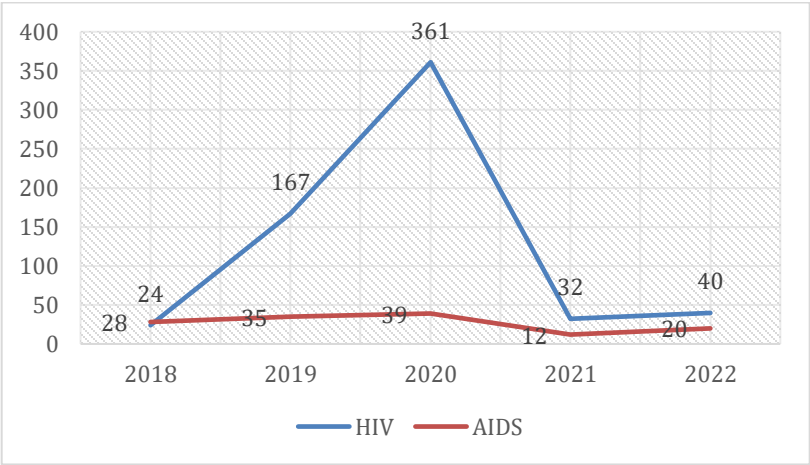


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2023, diolah

Gambar 2.28 Angka Notifikasi Kasus TB Per 100.000 Penduduk Tahun 2018-2022

Angka Notifikasi Kasus TB atau Case Notification Rate (CNR) seluruh kasus TB menggambarkan jumlah pasien baru semua tipe (TB Paru, Ekstra paru dan TB Anak) yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk. Angka CNR seluruh kasus TB dalam kurun waktu 2018-2022 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, angka CNR berada pada angka 394,

meningkat menjadi 459 pada tahun 2019, turun kembali menjadi 310 pada tahun 2020, meningkat sedikit menjadi 321 pada tahun 2021, namun meningkat drastis menjadi 709 pada tahun 2022. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk mengendaliannya.



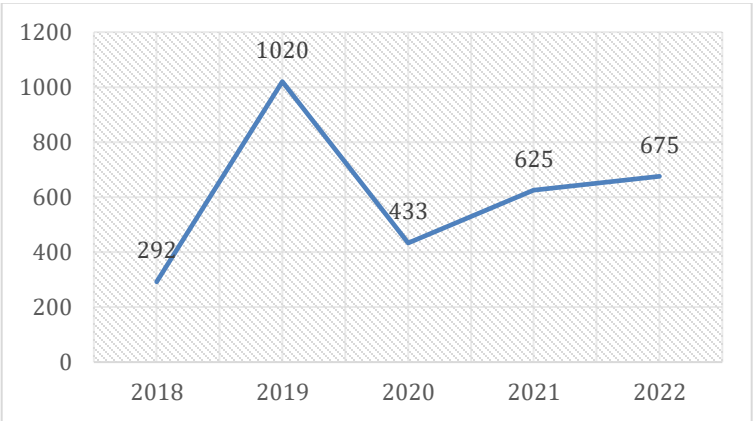
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2023, diolah

Gambar 2.29 Total Kasus Baru HIV/AIDS Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Kasus baru HIV/AIDS di Kota Cimahi mengalami fluktuasi selama tahun 2018-2022. Untuk kasus baru HIV, pada tahun 2018 ditemukan 28 kasus, naik drastis pada tahun 2019 menjadi 167 kasus, melonjak kebalik menjadi 361 kasus baru pada tahun 2020, kemudian turun tajam menjadi 32 kasus baru pada tahun 2021, dan meningkat kembali menjadi 40 kasus baru pada tahun 2022. Sedangkan untuk kasus baru AIDS juga berfluktuasi dari tahun 2018 sampai 2022, pada tahun 2018 tercatat ada 28 kasus baru AIDS meningkat menjadi 35 kasus pada tahun 2019, naik kembali pada tahun 2020 menjadi 39 kasus, menurun pada tahun 2021 menjadi 12 kasus dan meningkat kembali menjadi 20 kasus baru pada tahun 2022.

Di samping HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD) juga merupakan penyakit yang masih sering ditemukan di Kota Cimahi. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi

lingkungan dan perilaku masyarakat. Cakupan penemuan penderita DBD merupakan indikator yang berfungsi untuk mengetahui persebaran penyakit DBD di suatu daerah.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi 2023, diolah

Gambar 2.30 Cakupan Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang Ditangani Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa penemuan kasus DBD di Kota Cimahi pada tahun 2018 sebanyak 292, melonjak drastis menjadi 1.020 kasus pada tahun 2019, sempat menurun tajam menjadi 433 kasus pada tahun 2020, meningkat kembali menjadi 625 kasus pada tahun 2021, kemudian kembali meningkat menjadi 675 kasus pada tahun 2022.

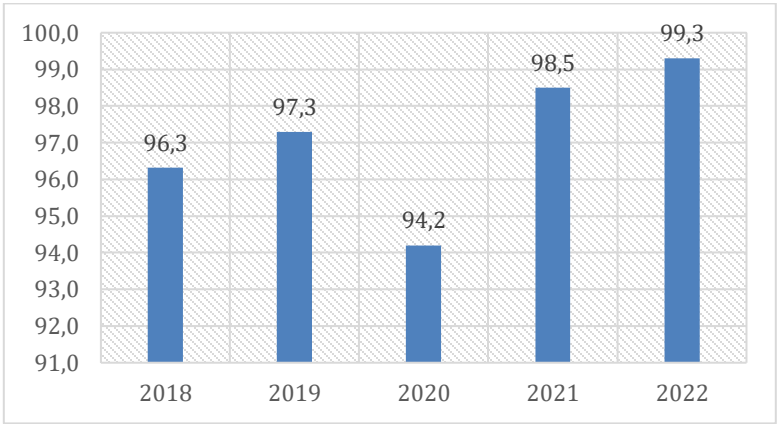
Pada tahun 2022, sarana dan prasarana kesehatan di Kota Cimahi terdiri dari 1 (satu) Rumah Sakit Pemerintah, 1 (satu) Rumah Sakit TNI-AD, dan 5 (lima) Rumah Sakit Swasta. Puskesmas di Kota Cimahi berjumlah 13 Puskesmas, sedangkan Puskesmas pembantu berjumlah 2 unit. Selain itu terdapat pula pelayanan klinik kesehatan dan sarana kesehatan lainnya yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Fasilitas Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2022

NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH
RUMAH SAKIT		
1	Rumah Sakit Umum	7
2	Rumah Sakit Khusus	1
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA		
1	Puskesmas Rawat Inap	1
2	Puskesmas Non Rawat Inap	12
3	Puskesmas Pembantu	2
SARANA PELAYANAN LAIN		
1	Klinik Pratama	42
2	Klinik Utama	9
3	Praktek Dokter Bersama	-
4	Praktek Dokter Umum Perorangan	132
5	Praktek Dokter Gigi Perorangan	57
6	Praktek Dokter Spesialis Perorangan	40
7	Praktek Pengobatan/Penyehat Tradisional	371
8	Laboratorium Kesehatan	6
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN		
1	Usaha Mikro Obat Tradisional	2
2	Pedagang Besar Farmasi	10
3	Apotek	86
4	Toko Obat	11
5	Toko Alkes	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2023

Ketersediaan fasilitas pendukung Kesehatan di Kota Cimahi berdampak pada cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan kunjungan neonatal pertama ibu hamil, dan cakupan kunjungan bayi. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Cimahi merupakan salah satu bagian deskripsi perkembangan layanan kesehatan dari pemerintah Kota Cimahi bagi ibu hamil.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi,2023, diolah

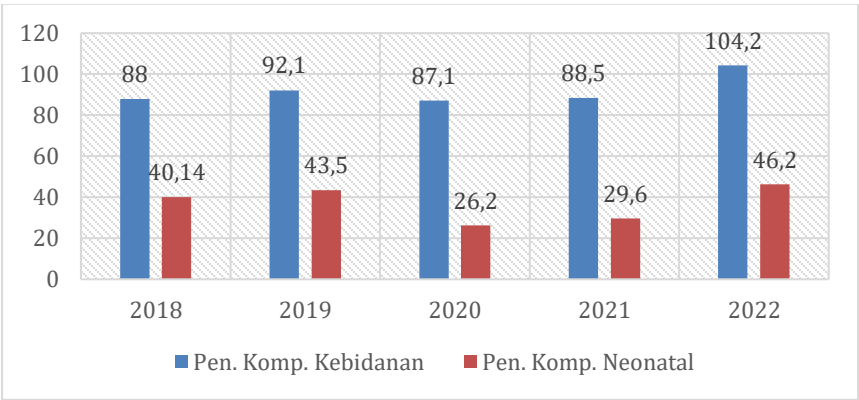
Gambar 2.31 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2018-2022

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Cimahi mengalami tren yang meningkat, dimana pada tahun 2018 angkanya adalah sebesar 96,3%, meningkat menjadi 97,3% pada tahun 2019, sempat menurun menjadi 94,2% pada tahun 2020, kembali meningkat menjadi 98,5% pada tahun 2021 dan 99,3% pada tahun 2022.

Komplikasi pada proses kehamilan, persalinan dan nifas juga merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin. Sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi maka dilakukan pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan. Pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu hamil, bersalin, atau nifas untuk memberikan perlindungan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.

Keberhasilan program ini dapat diukur melalui indikator cakupan penanganan komplikasi kebidanan. Indikator ini

mengukur kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi. Capaian indikator penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal dari tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada gambar berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2023, diolah

Gambar 2.32 Cakupan Pelayanan Komplikasi Kebidanan dan Neonatal Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa secara umum cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Kota Cimahi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuasi dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 88%, meningkat menjadi 92,1% di tahun 2019, kemudian turun menjadi 87,1% di tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 88,5% pada tahun 2021, kemudian melonjak menjadi 104,2% pada tahun 2022, hal ini terjadi karena perkiraan jumlah bumil dengan komplikasi lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya. Sedangkan pada penanganan komplikasi neonatal juga mengalami fluktuasi dari angka 40,14 persen pada tahun 2018 menjadi 43,5% pada tahun 2019, turun menjadi 26,2% di tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 29,6% pada tahun 2021, kemudian meningkat cukup drastis pada tahun 2022 menjadi 46,2%.

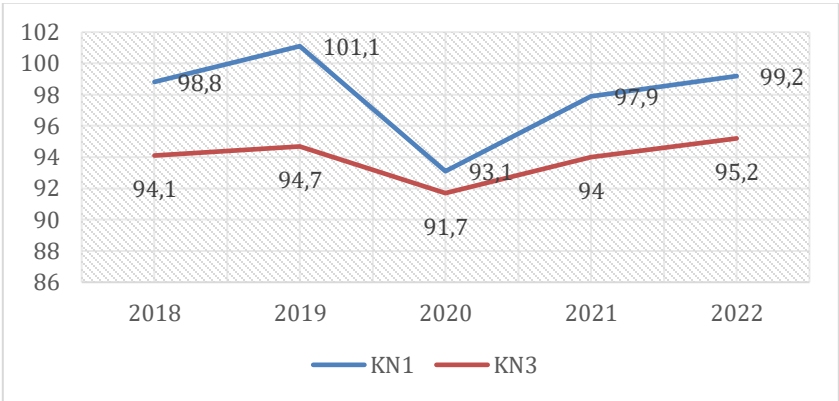
Kondisi pelayanan kesehatan di Kota Cimahi juga berdampak pada cakupan pelayanan kesehatan bayi. Capaian cakupan kunjungan bayi dapat menggambarkan seberapa besar jumlah bayi di Kota Cimahi yang mendapat pelayanan kesehatan. Apabila jumlah kunjungan bayi semakin meningkat, maka kualitas kesehatan bayi di Kota Cimahi dapat ditingkatkan. Kunjungan bayi atau Kunjungan Neonatal (KN) ini terdiri dari KN1 dan KN3 (Lengkap).

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 merupakan indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir. Pelayanan yang diberikan saat kunjungan neonatal yaitu pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis B0 (bila belum diberikan pada saat lahir).

Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah Kunjungan Neonatal Lengkap (KN lengkap) yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan Kunjungan Neonatal minimal tiga kali sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Kunjungan bayi di Kota Cimahi cenderung berfluktuasi bila ditinjau 5 (lima) tahun terakhir. Untuk KN1, pada tahun 2018 berada di angka 98,8%, meningkat pada tahun 2019 menjadi 101,1%, lalu turun menjadi 93,1% pada tahun 2020, kembali meningkat menjadi 97,9% pada tahun 2021 dan 99,2% pada tahun 2022. Sementara untuk KN3 (Lengkap) juga berfluktuasi, dari 94,1% pada tahun 2018 meningkat menjadi 94,7% pada tahun 2019,

namun menurun pada tahun 2020 menjadi 91,7%, kemudian meningkat kembali menjadi 94% pada tahun 2021 dan 95,2% pada tahun 2022.

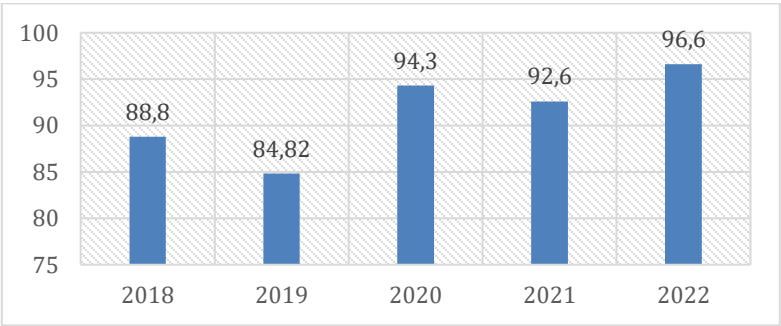


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2023, diolah

Gambar 2.33 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2018-2022

Untuk menangani kunjungan bayi yang cenderung mengalami peningkatan dimaksud, maka pemerintah Kota Cimahi melakukan penambahan Posyandu yaitu Posyandu Aktif. Posyandu aktif adalah penambahan dari posyandu purnama dan mandiri, dimana posyandu madya yang cakupan kelima kegiatan pokoknya lebih dari 50%, mampu melaksanakan program tambahan dan sudah memperoleh sumber pembiayaan dari dana Sehat yang dikelola masyarakat yang jumlah peserta masih terbatas yakni kurang dari 50% kepala keluarga (KK) di wilayah kerja posyandu. Sedangkan Posyandu Mandiri merupakan posyandu purnama yang sumber pembiayaannya diperoleh dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat dengan jumlah peserta lebih dari 50% KK di wilayah kerja posyandu.

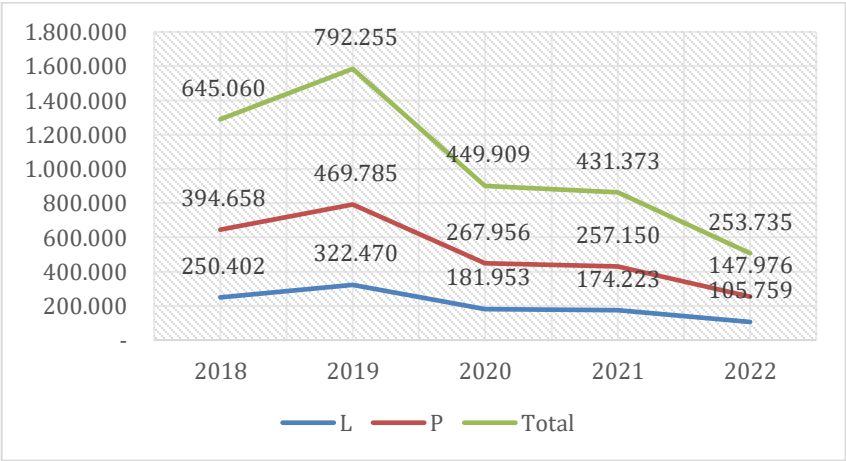
Berdasarkan gambar di bawah, diketahui bahwa jumlah posyandu aktif di Kota Cimahi pada tahun 2018 sebesar 88,8%, turun ke 84,82% pada tahun 2019, kembali naik menjadi 94,3% pada tahun 2020 dan menurun kembali di tahun 2021 menjadi 92,6%, kemudian meningkat menjadi 96,6% pada tahun 2022.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2023, diolah

Gambar 2.34 Posyandu Aktif Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Dalam memberikan pelayanan kuratif kepada Masyarakat Kota Cimahi dan sekitarnya, kunjungan rawat jalan di Puskesmas Kota Cimahi pada tahun 2021 mencapai 253.735 kunjungan. Jumlah ini merupakan penurunan daripada tahun sebelumnya.

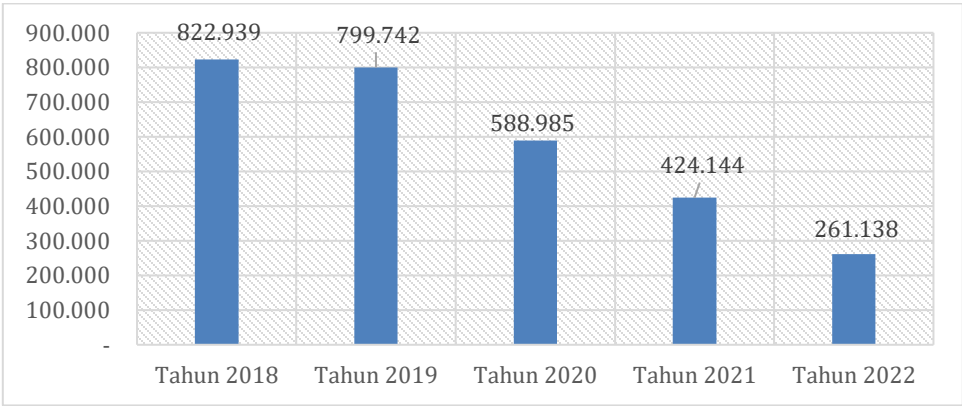


Gambar 2.35 Kunjungan Puskesmas Tahun 2018-2022

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2023, diolah

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa kunjungan Puskesmas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuatif dan menurun, dimana pada tahun 2018 jumlah kunjungan Puskesmas sebesar 645.060 kunjungan, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 732.255 kunjungan, namun pada tahun 2020 jumlah kunjungan turun cukup signifikan menjadi 449.909 kunjungan dan turun kembali menjadi

431.373 kunjungan pada tahun 2021, dan menurun kembali menjadi 253.735 kunjungan pada tahun 2022.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2023, diolah

Gambar 2.36 Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit Di Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Kunjungan rawat jalan Rumah Sakit pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Data pada tahun 2018 menunjukkan jumlah kunjungan sebesar 822.939 kunjungan, turun menjadi 799.742 kunjungan pada tahun 2019, kemudian kembali turun cukup jauh menjadi 588.985 kunjungan pada tahun 2020 dan menurun kembali menjadi 424.144 kunjungan pada tahun 2021 yang kembali menurun menjadi 261.138 kunjungan pada tahun 2022.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Kondisi Jaringan Ruas Jalan Kota

Kota Cimahi dengan panjang ruas jalan Kota sebesar 105,19 km, saat ini kondisi kemantapan ruas jalan Kota Cimahi dihitung dengan menggunakan SDI (*Surface Distress Index*) sesuai, yang merupakan sistem penilaian kondisi perkerasan jalan berdasarkan dengan pengamatan visual dan dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan, yang dibagi kedalam segmen-segmen survey kondisi jalan.

Adapun, kondisi kemantapan jalan di Kota Cimahi berdasarkan perkembangannya terjadi fluktuasi yang diakibatkan oleh kerusakan perkerasan yang terjadi, seperti : persentase luas retak (%), rata-rata lebar retak (mm), jumlah lubang per 100 m dan rata-rata kedalaman alur (cm). Selanjutnya disampaikan kondisi kemantapan ruas jalan kota Cimahi, sebagai berikut :

Tabel 2.16
Kondisi Kemantapan Ruas Jalan Kota Cimahi Tahun 2018-2022
berdasarkan SDI

Kondisi	2018		2019		2020		2021		2022	
	Panjang g (km)	(%)	Panjang g (km)	(%)	Panjang g (km)	(%)	Panjang g (km)	(%)	Panjang g (km)	(%)
Baik	71,55	62,02	54,07	51,40	76,25	72,48	79,37	75,46	79,08	75,17
Sedang	30,55	29,04	44,70	42,50	18,82	17,89	19,53	18,56	22,26	21,16
Rusak Ringan	3,09	2,94	6,42	6,10	10,13	9,63	6,29	5,98	3,85	3,67
Rusak Berat	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Panjang Total	105,19	94,00	105,19	100,00	105,20	100,00	105,19	100,00	105,19	100,00
Kemantapan Jalan	102,10	91,06	98,77	93,90	95,07	90,37	98,90	94,02	101,34	96,33

(sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi, 2023, diolah)

Adapun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Cimahi pada tahun 2022, dihitung dengan membandingkan antara panjang jalan kondisi baik dengan panjang jalan seluruhnya, yaitu sebesar 0,71.

Dengan menggunakan asumsi Jumlah penduduk Kota Cimahi di tahun 2021 adalah 571.632 jiwa (Kota Cimahi Dalam Angka 2022, BPS Kota Cimahi), maka rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Cimahi, dihitung dengan membandingkan jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk, yaitu sebesar 0,00018 km/jiwa. Kondisi tersebut disebabkan dikarenakan penambahan panjang ruas jalan kota di Kota Cimahi tidak pernah bertambah sejak tahun 2018, dan kondisi tersebut juga diperburuk dengan masih

banyaknya ruas jalan kota yang belum memenuhi standar jalan, seperti belum dilengkapi dengan trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m).

2) Kondisi Penataan Ruang

Dalam rangka mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kota Cimahi, mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2023. Saat ini Pemerintah Daerah Kota Cimahi masih menyusun rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran dari RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional, dimana penyusunannya bersamaan dengan penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi.

Adapun kondisi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang di Kota Cimahi pada tahun 2022 telah mencapai 62,2%.

3) Kondisi Bangunan Gedung Negara (BGN)

Kondisi gedung dan bangunan negara akan mempengaruhi kenyamanan para pihak yang menggunakan gedung dan bangunan tersebut, oleh karena itu diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk mengukur tingkat kerusakan, menentukan jenis pemeliharaan serta jenis perawatannya, dan termasuk proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran pada bangunan gedung negara. Permasalahan yang timbul pada penyelenggaraan bangunan gedung negara saat ini adalah masih adanya

bangunan yang belum tertib administrasi, belum tepat mutu, belum tepat waktu dan belum tepat biaya.

Berdasarkan hasil pendataan bangunan gedung negara di Kota Cimahi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi, bahwa terdapat 192 unit BGN. Adapun, capaian Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik di tahun 2022 sebesar 72,5 persen, naik 1,5% dari capaian tahun 2021 yaitu sebesar 71%.

4) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Akses air minum penduduk Kota Cimahi diperoleh dari sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan berasal dari PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung, UPT Air Minum Kota Cimahi, dan sumur-sumur artesis yang saat ini masih berfungsi dan dikelola oleh KP2A (Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air). Selain sumber-sumber perpipaan tersebut, masyarakat memperoleh air dari sistem non perpipaan berupa sumur-sumur terlindungi, mata air yang dikelola masyarakat, depot air minum dan sumur artesis dari industri-industri.

Berikut adalah capaian pelayanan air minum di Kota Cimahi Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Persentase Cakupan Layanan Air Minum di Kota Cimahi
Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	69,34	70,35	69,82	69,03	79,36

Sumber : DPKP Kota Cimahi, 2023, diolah

5) Persentase Penduduk Berakses Air Limbah Domestik

Pengelolaan sekaligus pelayanan air limbah domestik kepadamasyarakat dilakukan melalui penyediaan IPAL komunal yang didukung dengan layanan sedot tinja dari UPTD Air Limbah Domestik dan swasta. Terdapat 15 Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman skala 100-600 SR yang sudah terbangun. Selain melayani penyedotan kakus individual di permukiman, UPTD SPALD sejak tahun 2019 juga sudah melayani penyedotan kakus pada beberapa perusahaan, sekolah dan kantor.

Persentase cakupan layanan air limbah domestik di Kota Cimahi sejak tahun 2017 mengalami fluktuasi karena adanya kesulitan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik.

Berikut adalah capaian pelayanan air limbah domestik di Kota Cimahi :

Tabel 2.18
Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik di Kota Cimahi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76.50	94.73	91.09	84.2	80.55

Sumber: DPKP Kota Cimahi, 2023, diolah

6) Persentase Luasan Genangan Terhadap Luas Kota

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya genangan di Kota Cimahi salah satunya adalah kondisi drainase yang terganggu baik oleh pola masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan maupun terhalangnya

aliran drainase oleh bangunan dan penempatan utilitas lainnya di bawah tanah yang dimiliki oleh instansi di luar pemerintah kota Cimahi.

Sampai dengan tahun 2022, luas genangan dan banjir yang terdata adalah 33,398 ha, sedangkan khusus untuk target penanganan genangan di tahun 2024 berdasarkan kelas genangan yang dilakukan oleh PD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi seperti pada tabel berikut (DPKP, diolah 2022).

Tabel 2.19
Luasan Genangan Di Kota Cimahi

No	Kecamatan	Kelurahan	RT	RW	Luas (Ha)
1	Cimahi Utara	Pasirkaliki	1, 3, 4 dan 5	1	0.02
2	Cimahi Utara	Cibabat	6	15	0.01
3	Cimahi Utara	Cibabat	2	9	0.01
4	Cimahi Selatan	Utama	3, 4, 6 dan 7	12	0.01
5	Cimahi Selatan	Cibeureum		7	0.02
6	Cimahi Selatan	Cibeureum		8	
7	Cimahi Selatan	Cibeureum		28	
	Total				0.07

Sumber : Data DPKP, diolah Tahun 2022

Penyusunan kelas-kelas genangan disusun berdasarkan kriteria dalam Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan (1) tinggi genangan (cm); (2) lama genangan (jam); dan (3) frekuensi yang terjadi dalam setahun. Genangan/banjir dengan tinggi dan lama genangan berapapun, selama terjadi hanya 1 kali dalam setahun dianggap genangan/banjir yang bersifat insidentil, biasanya akibat adanya tanggul yang roboh atau tersumbat longsoran tanah/bangunan, sedangkan genangan/banjir dengan tinggi < 30 cm, lama genangan < 2 jam dan frekuensi <2 kali setahun dianggap

bukan genangan/banjir, penanganan biasanya cukup dengan pembersihan saluran oleh masyarakat (Kelas III).

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan SK Wali Kota Nomor 336/Kep.2330-DPKP/2021 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam Rangka Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cimahi Tahun 2021, tercatat bahwa Kota Cimahi memiliki 156,47 ha luasan kumuh yang tersebar di 28 kawasan di 15 kelurahan.

Terdapat 7 indikator yang diperhitungkan untuk pengurangan luas kawasan kumuh yaitu kualitas bangunan hunian, aksesibilitas lingkungan, drainase lingkungan, pelayanan air minum/baku, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan penanggulangan kebakaran. Pada akhir tahun 2022 seluas 5,02 ha pengurangan kekumuhan telah dilakukan oleh PD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Keamanan dan Kertertiban Umum

Isu tindak kejahatan dan kriminalitas menjadi salah satu isu yang penting untuk diselesaikan karena berkaitan dengan keamanan. Angka kriminalitas di Kota Cimahi menjadi salah satu fokus perhatian baik oleh pemerintah maupun aparat keamanan. Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Kota Cimahi terdapat beberapa titik rawan kriminalitas yang ada di Kota Cimahi, yaitu : Pesantren, Cimahi Utara; Sentral, Cimahi Utara; Permana, Cimahi Utara; Cipageran, Cimahi Utara; Setiamanah, Cimahi Tengah; Padasuka, Cimahi Tengah; Leuwigajah,

Cimahi Selatan; Cimindi, Cimahi Tengah; Contong, Cimahi Tengah; dan Nanjung, Cimahi Selatan.

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Cimahi masih terdapat potensi konflik dan rawan terjadi tindak kriminal. Dengan demikian diperlukan upaya peningkatan kesiapan dalam pengelolaan, terlebih posisi Kota Cimahi sebagai daerah perlintasan area metropolitan. Selain itu, gangguan keamanan dan ketertiban yang sering muncul dan berpotensi berkembang adalah konflik antara buruh dan pengusaha dalam pengelolaan manajemen perusahaan, terutama menyangkut kenaikan upah minimum kota (UMK). Hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan industri yang melibatkan masyarakat sebagai pegawainya.

Selanjutnya berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Persentase penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021 yaitu 100%.

Tabel 2.20
Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2018-2021

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penanganan Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kota Cimahi, 2022, diolah

Tabel 2.21
Rekapitulasi Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tahun 2022

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RT/RW	Jenis Kelamin		Jumlah Linmas	Keterangan
				Laki-laki	Perempuan		
1	Cimahi Utara	Pasirkaliki	70/14	80		80	
		Cibabat	138/25	147	1	148	
		Citeureup	113/19	123		123	
		Cipageran	148/29	158		158	
		Jumlah	469/87			509	
2		Cimahi	50/10	44	6	50	

No	Kecamatan an	Kelurahan	Jumlah RT/RW	Jenis Kelamin		Jumlah Linmas	Keterangan
				Laki-laki	Perempuan		
	Cimahi Tengah	Karangmekar	75/17	80		80	
		Setiamanah	81/18	81		81	
		Padasuka	148/21	148		148	
		Cigugur Tengah	112/19	112		112	
		Baros	105/25	120		120	
		Jumlah	571/110			591	
3	Cimahi Selatan	Cibeber	87/14	98	5	103	
		Leuwigajah	148/20	164		164	
		Utama	91/16	121		121	
		Cibeureum	171/29	187		187	
		Melong	191/36	207		207	
		Jumlah	688/115			782	
Jumlah Keseluruhan			1.728/321			1,882	

Sumber : Satpol PP Kota Cimahi, 2023, diolah

Tabel 2.22
Persentase Penegakan PERDA dan Perwal di Kota Cimahi

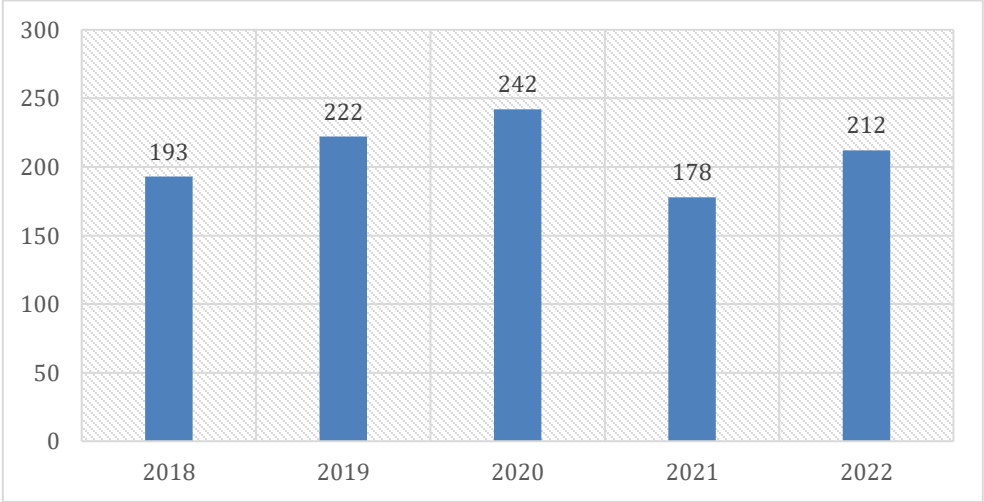
INDIKATOR	2021	2022
Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan	91,67	100

2) Kebencanaan

Kota Cimahi termasuk menjadi wilayah yang rentan mengalami bencana. Bencana yang berpotensi besar melanda wilayah Kota Cimahi adalah tanah longsor dan banjir. Berdasarkan peta rawan bencana Kota Cimahi sebagaimana dimuat pada bagian awal bab ini, menunjukkan bahwa wilayah Kota Cimahi mengalami rawan bencana tanah longsor berada di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan. Wilayah tanah longsor terjadi pada wilayah dengan kemiringan diatas 15%. Sementara itu, wilayah yang berpotensi banjir berlokasi di Cimahi Selatan. Bencana banjir dapat disebabkan adanya banjir bandang atau banjir akibat luapan sungai.

Kota Cimahi juga dihadapkan dengan bencana aliran lahar gunung berapi dan kebakaran. Wilayah rawan bencana aliran lahar gunung berapi berlokasi di daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Berdasarkan data dari IRBI diketahui

bahwa Indeks Risiko Bencana di Kota Cimahi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 berada pada Kategori Kelas Resiko Sedang. Adapun kejadian bencana di Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2018 – 2022 dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:



Sumber : BPBD Kota Cimahi Tahun 2023, diolah.

Gambar 2.37 Kejadian Bencana di Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kejadian bencana di Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang signifikan yang semula pada tahun 2016 sebesar 75 kejadian meningkat sampai 242 kejadian bencana di tahun 2020. Namun, pada Tahun 2021, kejadian bencana di Kota Cimahi kembali turun menjadi 144 kejadian dan ditahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 212..

Sementara itu, kepadatan penduduk dan bangunan yang ada di Kota Cimahi menyebabkan Kota Cimahi seringkali menghadapi bencana kebakaran. Kondisi tersebut dapat digambarkan dalam data terkait dengan jumlah bencana kebakaran Kota Cimahi berikut ini :

Tabel 2.23
Kejadian Kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2016-2022

NO	TAHUN	KEJADIAN KEBAKARAN	KORBAN JIWA	KERUGIAN MATERI (Rp)
1	2016	38 Kejadian	-	5.795.100.000
2	2017	5 Kejadian	-	210.000.000
3	2018	90 Kejadian	-	11.656.050.000
4	2019	74 Kejadian	1 meninggal, 2 luka sedang dan 1 luka ringan	4.307.700.000
5	2020	68 Kejadian	2 luka ringan	9.306.500.000
6	2021	54 Kejadian	1 luka berat, 3 luka sedang dan 4 luka ringan	6.480.700.000
7	2022	39 Kejadian	1 luka berat, 1 luka sedang dan 5 luka ringan	5.946.455.000

Sumber : Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa potensi bencana kebakaran di Kota Cimahi masih tinggi serta menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dari data kejadian bencana dan kejadian kebakaran di Kota Cimahi menunjukkan bahwa tingginya angka kejadian bencana di kota Cimahi harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana baik kesiapsiagaan bagi Pemerintah maupun kesiapsiagaan bagi masyarakat. Selain itu, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran juga masih rendah sehingga bencana yang muncul tidak mendapat penanganan yang cepat karena harus menunggu petugas dari pemerintah Kota karena selama ini masyarakat belum disiapkan dalam menghadapi bencana paling tidak untuk mengambil tindakan awal penanggulangan bencana. (*bridging* ke tabel 2.24)

Tabel 2.24
Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK)

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	86,96	100	90,24	90	94,87

f. Urusan Sosial

Perkembangan di bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakatnya. Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial yang mencakup semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan bersama sebagai tanggung jawab perintah dan masyarakat.

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan kepanjangan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan dalam memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota mendefinisikan Standar Teknis sebagai standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Teknis

Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam implementasinya kesejahteraan sosial memang tidak dapat diwujudkan hanya dengan intervensi-intervensi sosial saja namun membutuhkan campur tangan dari penyelenggaraan urusan lainnya. Dalam prakteknya urusan sosial lebih fokus pada penanganan dampak-dampak atau fenomena sosial yang membutuhkan intervensi sosial seperti keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS memiliki 21 kriteria mulai dari anak terlantar hingga pada keluarga Bermasalah Sosial Psikologis. Adapun kondisi PPKS di Kota Cimahi dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.25
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Cimahi
Tahun 2018-2022

No	Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Anak Bayi Terlantar	38	38	38	38	38
2	Anak Terlantar	593	593	570	201	201
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	34	34	5	6	46
4	Anak Jalanan	65	65	66	67	35
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	285	285	278	513	513
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	26	26	26	26	46

No	Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	5	5	5	5	19
8	Lanjut usia terlantar	2.812	2.812	2.614	6538	6538
9	Penyandang disabilitas	1.137	1.137	1.144	795	795
10	Tuna Susila	0	0	0	0	0
11	Gelandangan	29	2	29	29	46
12	Pengemis	2	70	2	2	
13	Pemulung	70	46	70	70	70
14	Kelompok Minoritas	46	18	38	52	52
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	18	74	18	18	18
16	Korban Penyalahgunaan NAPZA	74	4	74	74	74
17	Korban <i>Trafficking</i>	4	7	4	4	4
18	Korban tindak kekerasan	7	3	7	7	7
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	3	1.857	3	3	3
20	Fakir Miskin	10.239	10.239	10.214	10.213	31.640
21	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	130	130	129	26	7
Jumlah jiwa		15.617	17.474	15.334	18.687	40.152

Sumber: Dinas Sosial Kota Cimahi, 2022, diolah

Data di atas menunjukkan bahwa variasi PPKS didominasi oleh fakir miskin, penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar. Tingginya fakir miskin di Kota Cimahi yang terdata dan terverifikasi pada tahun 2021 sebanyak 10.213 jiwa meningkat menjadi 31.640 jiwa pada tahun 2022. Tahun 2018 jumlah PMKS sebanyak 15.617 jiwa naik/bertambah menjadi 17.474 jiwa pada tahun 2019, dan menurun kembali pada tahun 2020 sebanyak 15.334 jiwa, namun tahun 2021 dan tahun 2022 jumlah PMKS/PPKS naik cukup signifikan akibat dari dampak wabah Covid-19, sebesar 18.687 jiwa untuk tahun 2021 dan 40.152 jiwa untuk tahun 2022.

Tabel 2.26
Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Cimahi
Tahun 2022

JUMLAH DTKS BERDASARKAN ANGGOTA RUMAH TANGGA (JIWA)				
KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH (2020)	JUMLAH (2021)	JUMLAH (2022)
CIMAHI SELATAN	MELONG	13.258	31.795	31.456
	CIBEUREUM	13.292	39.897	39.455
	UTAMA	6.157	16.091	15.991
	LEUWIGAJAH	9.418	26.436	26.459
	CIBEBER	6.665	16.711	16.740
CIMAHI TENGAH	BAROS	3.650	9.870	9.795
	CIGUGUR TENGAH	10.235	19.442	19.437
	KARANG MEKAR	2.742	7.742	7.723
	SETIAMANAH	5.039	12.477	12.377
	PADASUKA	7.682	24.387	24.344
	CIMAHI	3.427	7.773	8.076
CIMAHI UTARA	PASIRKALIKI	2.795	7.224	7.313
	CIBABAT	10.956	23.605	23.759
	CITEUREUP	8.657	19.141	19.312
	CIPAGERAN	11.324	25.537	26.031
TOTAL		115.297	288.185	288.386

Sumber: Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2022, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah DTKS tiap kelurahan berbeda, namun ada beberapa kelurahan yang angkanya cukup tinggi yaitu seperti di kelurahan Cibeureum, Melong, Leuwigajah, Padasuka, Cipageran, Cibabat, Cigugur Tengah dan Citeureup.

Tingginya data DTKS di beberapa kelurahan tersebut menandakan bahwa belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pada tahun 2022 (data per Agustus 2022) data DTKS sebanyak 288.386 ART/jiwa yang tersebar di 15 kelurahan.

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS membutuhkan pengelolaan tersendiri, karena jangkauan dan populasi sasaran yang luas membutuhkan koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial sehingga PPKS dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial diperlukan efektifitas sistem perlindungan sosial melalui pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta program kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak negatif dari berbagai bencana sosial dan kebijakan ekonomi.

Dalam rangka mengatasi permasalahan sosial, pemerintah perlu menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga agar tidak mengalami masalah kesejahteraan sosial.

Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin diwujudkan dengan peningkatan penyediaan sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, pemberian jaminan sosial dan peningkatan kualitas manajemen kelembagaan sosial masyarakat. Perlu dicermati khusus bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial seharusnya dapat meningkatkan aksesibilitas PPKS terhadap pelayanan sosial dasar, baik yang diselenggarakan pemerintah

maupun masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak terlantar termasuk anak jalanan, lanjut usia (lansia) terlantar, penyandang cacat terlantar, korban bencana alam dan sosial (pengungsi), dan kelompok rentan lainnya dapat dicapai. Upaya pemberdayaan, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun didorong peran aktif dan ketahanan sosial masyarakat serta stakeholder lainnya.

Dengan memperhatikan situasi dan perkembangan aneka masalah sosial yang dihadapi Kota Cimahi perlu kegiatan lanjutan dan terobosan antara lain dengan meningkatkan SLRT dan PUSKESOS yang ada di setiap kelurahan serta kegiatan pelatihan keterampilan, bimbingan dan motivasi, sehingga PPKS memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dan dapat mengakses berbagai pelayanan sosial dasar secara mandiri.

Pada tahun 2022, tidak ada kejadian bencana alam yang menimbulkan korban, sehingga baik korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat maupun korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap tidak ada. Namun dalam menghadapi kenaikan BBM, masyarakat yang diidentifikasi terdampak telah mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai antara lain kepada ojek pangkalan, tukang parkir, dan masyarakat lainnya yang sesuai dalam kategori DTKS, Non DTKS, dan P3KE.

Tabel 2.27
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Penerima Jaminan Sosial	Jenis Bantuan	Tahun 2021	Tahun 2022
Lanjut Usia	Pemberian Hampers	200 jiwa	340 jiwa
	Pemberian kacamata		50 jiwa
	Home Visit		200 jiwa
Penyandang Cacat (Fisik dan Mental) Dewasa	Permakanan dan Home Visit	325 jiwa	100 jiwa
Penyandang Cacat (Fisik dan Mental) Anak	Permakanan dan Terapi		349 jiwa

Pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain adalah :

- 1) Pemberian hampers dan kaca mata; dan
- 2) Pemberian permakanan, home visit serta terapi.

Data ter *update* yang diperoleh sementara untuk penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial adalah baru pada tahun 2022, sementara tahun 2021 untuk total lansia sebanyak 200 jiwa dan penyandang cacat sebesar 325 jiwa.

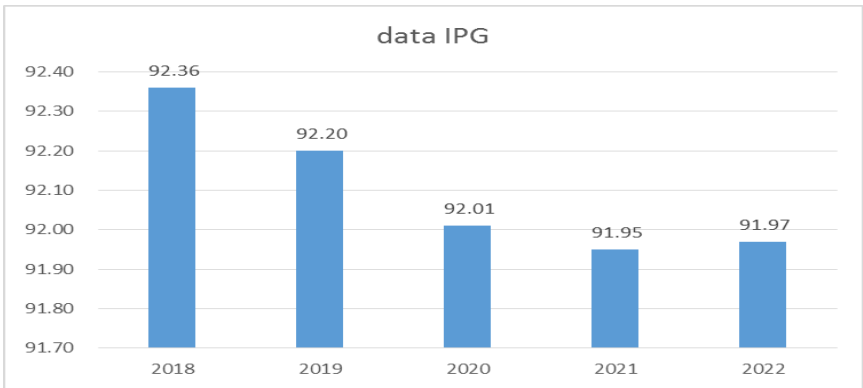
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peranan perempuan dalam pembangunan di Kota Cimahi cukup strategis, baik perorangan maupun melalui organisasi-organisasi perempuan. Dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 pelatihan Manajemen Berusaha diberikan kepada PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) di 15 kelurahan di Kota Cimahi dan 36 organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kemampuan organisasi perempuan dan peningkatan

kualitas hidup perempuan. Pembinaan Posyandu dan Pokjanal dilakukan melalui pelatihan-pelatihan bagi kader posyandu dan penyelenggaraan lomba posyandu serta pembinaan kepada Kader PKK.

Pembangunan gender di suatu daerah dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG berfungsi untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100%. Bila nilai IPG semakin tinggi, maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

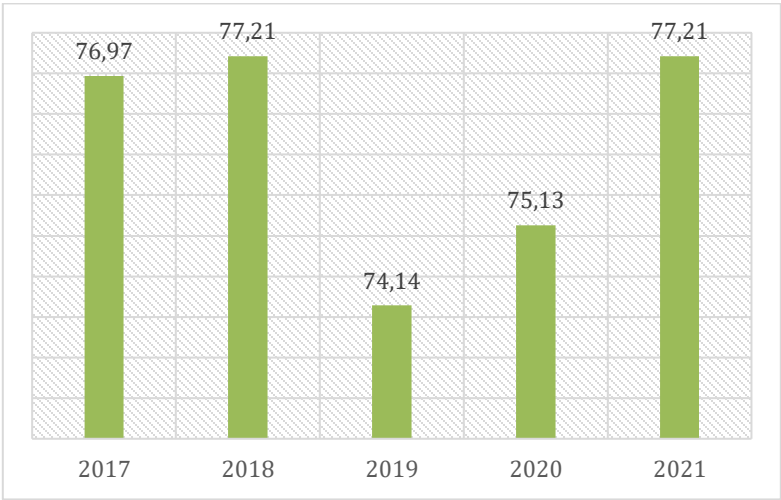


Sumber: BPS Jawa Barat, 2023

**Gambar 2.38 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kota Cimahi Tahun 2018-2022**

Data di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Cimahi selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 mengalami perubahan fluktuatif, dimana pada tahun 2018 angkanya sebesar 92,36 dan pada tahun 2019 turun menjadi 92,20. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 92,01 Hal ini dikarenakan karena adanya pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020. Tahun 2021 turun kembali menjadi 91,95. Adapun pada tahun 2022 naik menjadi 91,97. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 dengan nilai

IPG semakin tinggi, maka semakin rendah kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.



Sumber : BPS Jawa Barat, 2021

Gambar 2.39 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi Tahun 2017-2021

Sama halnya dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi juga pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2019 angkanya sebesar 74,14 dan mengalami kenaikan tahun 2020 menjadi 75,13. Pada tahun 2021 naik kembali menjadi 77,21. Adapun pada tahun 2022 data IDG belum rilis dari BPS, sehingga dalam hal ini data masih menggunakan data tahun 2021. Namun demikian dari data tersebut di atas menandakan posisi tawar perempuan meningkat seiring dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen, posisi perempuan sebagai tenaga profesional meningkat serta peran perempuan yang meningkat dalam hal pendapatan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan pada ranah ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan

pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Berdasarkan data capaian IPG dan IDG di atas, menunjukkan bahwa peran serta keterlibatan dan keaktifan masyarakat terutama kaum perempuan mengalami fluktuatif, hal ini tidak terlepas dari kondisi situasi sosial, ekonomi dan politik daerah saat itu.

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Negara harus menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta, sehingga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik.

Selain itu terhadap perempuan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es. KDRT merupakan suatu masalah yang sangat khas karena KDRT terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan anak serta pelakunya adalah orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan, ada banyak alasan, boleh jadi pelaku KDRT

benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT atau mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi.

Dalam bidang perlindungan perempuan dan anak di Kota Cimahi telah dibentuk P2TP2A, di bawah ini digambarkan data kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.28
Data Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

NO	TAHUN	TINDAK KEKERASAN, PELECEHAN SEKSUAL DAN TINDAKAN LAINNYA		JUMLAH
		TERHADAP ANAK	TERHADAP PEREMPUAN	
1	2017	18	6	24
2	2018	20	9	29
3	2019	20	10	30
4	2020	11	6	17
5	2021	14	12	26
6	2022	45	33	78

Sumber : DP2KBP3A Kota Cimahi, 2022, diolah

Berdasarkan data di atas, untuk penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan kasus. Dari 24 kasus pada 2017 menjadi 30 pada tahun 2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 17 kasus. Pada 2021 kasus naik kembali menjadi 26 kasus. Trend kasus pada tahun 2022 cukup memprihatinkan dikarenakan kenaikan kasus yang sangat signifikan dari tahun 2021 yang semula hanya 26 korban menjadi 78 korban dengan

kasus KDRT, Pelecehan seksual dan Tindakan lainnya seperti penipuan, penyiksaan fisik dan psikis.

b. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta masalah perselisihan tenaga kerja dengan perusahaan merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah pada urusan tenaga kerja. Oleh karena itu Pemerintah Kota Cimahi terus berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di atas melalui peningkatan kompetensi pencari kerja dan peningkatan hubungan industrial.

Peningkatan kompetensi pencari kerja yang termasuk dalam angkatan kerja Kota Cimahi dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kerja, Pemagangan dan Sertifikasi Kerja. Sasaran dari kegiatan ini adalah angkatan kerja yang terdaftar sebagai pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan secara swakelola bekerja sama dengan beberapa LPK di Kota Cimahi yang telah bersertifikat. Meskipun secara kuantitas perkembangan jumlah peserta pelatihan ada pengurangan tetapi secara kualitas ditingkatkan dengan menambah jam pelatihan sesuai standar dan pemberian sertifikat. Pelaksanaan sertifikat kerja bagi pencari kerja yang telah memiliki

keterampilan kerja dilakukan dengan lembaga sertifikasi yang diakui secara nasional. sedangkan pemagangan diberikan kuota oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkan peserta magang. Selain dari APBD, Kota Cimahi juga mendapatkan kuota peserta pelatihan dari APBN melalui Kementerian Tenaga Kerja yang bekerja sama dengan BBLK. Hubungan Industrial berkaitan erat dengan hubungan tenaga kerja yang dapat diwakili oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan perusahaan dan pemerintah daerah. Peningkatan Hubungan Industrial dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan berkurangnya angka perselisihan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui pemberian jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan serta perlindungan kerja melalui adanya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Tabel 2.29
Data Pendidikan dan Pelatihan Kerja serta Hubungan Industrial
Kota Cimahi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
I	Pendidikan dan Pelatihan Kerja					
1	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mengikuti Pelatihan (APBD)	500	160	100	188	565
2	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mengikuti Pelatihan (APBD Provinsi/APBN)	-	118	175	8	-
3	Jumlah Peserta Pelatihan Yang ditempatkan/Bekerja	110	92	96	453	565
4	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Mendapatkan	40	20	0	0	-

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Pemagangan (APBN)					
5	Jumlah Peserta Pemagangan Yang ditempatkan (APBN)	20	7	0	0	-
6	Jumlah Pencari Kerja Bersertifikat (LSP/BNSP)	-	118	175	8	-
7	Jumlah Pencari Kerja Bersertifikat (LSP/BNSP) Yang ditempatkan	-	3	0	0	-
II	Hubungan Industrial					
1	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	36	36	43	37	37
2	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	11	5	4	4	4
3	Jumlah SP / SB	6	6	6	6	6
4	Jumlah Lembaga Bipartit	10	9	9	9	6
5	Perusahaan peserta jamsostek aktif	120	241	276	299	709
6	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	56.286	53.448	51.203	64.202	62.471
7	Jumlah Perusahaan	593	619	619	819	1196
8	Jumlah Perusahaan Tata Kelola Layak	n/a	233	253	280	709
9	Jumlah Tenaga Kerja	47.812	59.007	60.068	67.185	65.713
10	Perselisihan					
	Jumlah Kasus Didaftarkan	25	24	42	46	45
	Jumlah Kasus Selesai dengan PB	17	18	18	24	24
11	Upah Minimum Kota (UMK)	2.678.028,45	2.893.074,13	3.139.271,74	3.241.929,00	3.514.093,25

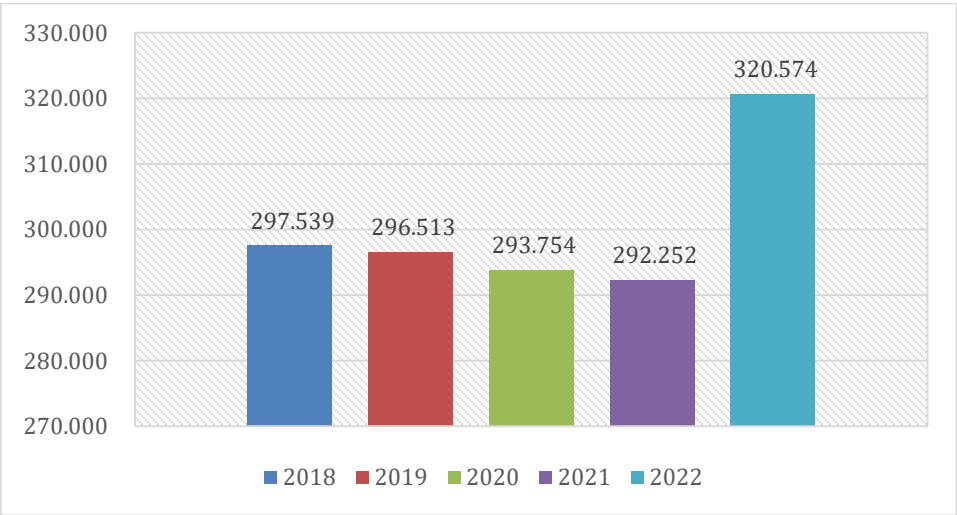
Sumber : Disnaker Kota Cimahi, 2022, diolah

Tabel 2.30
Data Statistik Ketenagakerjaan Kota Cimahi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Usia Kerja					476.922
2	Angkatan Kerja	297.539	296.513	293.754	292.252	320.574
3	Bekerja	273.955	272.553	254.699	254.059	286.038
4	Pengangguran	23.584	23.960	39.055	38.193	34.536
5	Bukan Angkatan Kerja	163.824	171.229	174.993	180.704	156.348
6	Sekolah	n/a	51.684	44.353	40.231	
7	Mengurus RT	n/a	103.340	110.791	108.829	
8	Lainnya	n/a	16.205	19.849	31.644	
9	TPAK (%)	64,49	63,39	62,67	61.79	67.22
10	Laki laki	82,79	79,88	79,02	77.43	85.50
11	Perempuan	46,13	46,87	46,19	46.05	48,82
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,93	8,08	13,03	13.07	10.77
13	Bekerja	273.955	272.553	254.699	254.059	286,038
14	UMK (Rp/bln)	2.678.028,45	2.893.074,13	3.139.271,74	3.241.929,00	3.514.093,25

Sumber : Data BPS dan Disnaker Kota Cimahi 2022

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Angka Kesempatan Kerja di Kota Cimahi pada tahun 2018-2021 terus mengalami penurunan. Dari 297.539 orang (2018), 296.513 orang (2019), 293.754 orang (2020) dan orang pada tahun 2021 menjadi 292.252 orang. Penurunan 4 (empat) tahun ini menjadi hal yang sangat diperhatikan. Sehingga di Tahun 2022, dengan adanya Pasca Covid, banyak perusahaan-perusahaan mulai membuka usaha kembali sehingga angka kesempatan kerja di Kota Cimahi meningkat menjadi 320.574 orang.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, 2022, diolah

Gambar 2.40 Angka Kesempatan Kerja Di Kota Cimahi Tahun 2018-2022

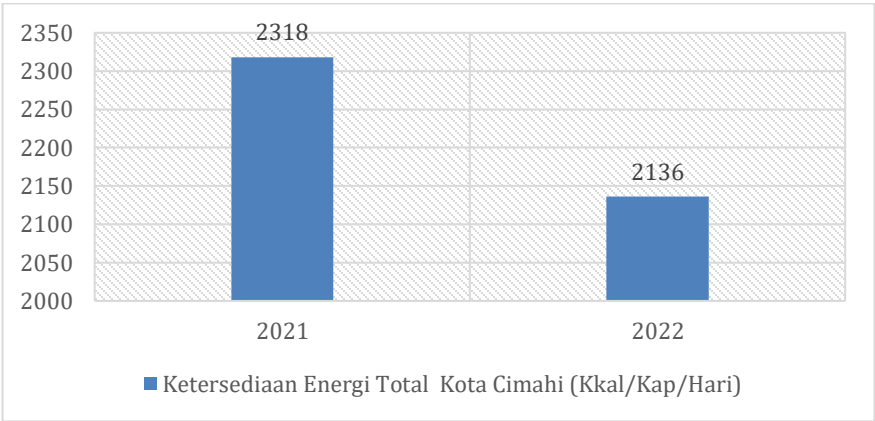
c. Urusan Pangan

1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Ketersediaan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan suatu wilayah. Konsumsi pangan dan gizi mulai dari tingkat masyarakat, rumah tangga, hingga individu secara berkelanjutan membutuhkan penyediaan pangan yang cukup. Menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2018 tingkat ketersediaan pangan per kapita bagi setiap penduduk dalam suatu wilayah diukur dari Angka Kecukupan Energi dan Protein. Pada tingkat penyediaan energi ditetapkan sebesar 2.400 kkal/kapita/hari, sedangkan untuk protein sebesar 63 gram/kapita/hari.

Hasil analisis ketersediaan pangan menggunakan instrumen Neraca Bahan Makanan (NBM) disajikan pada Tabel 2.31 Ketersediaan energi total di Kota Cimahi adalah sebesar 2.136 kkal/kapita/hari, yang terdiri dari pangan nabati (1.832 kkal/kapita/hari) dan hewani (304 kkal/kapita/hari). Angka ini masih dibawah standar yang ditetapkan untuk mencapai 100% AKE. Persentase ketersediaan energi terhadap standar AKE

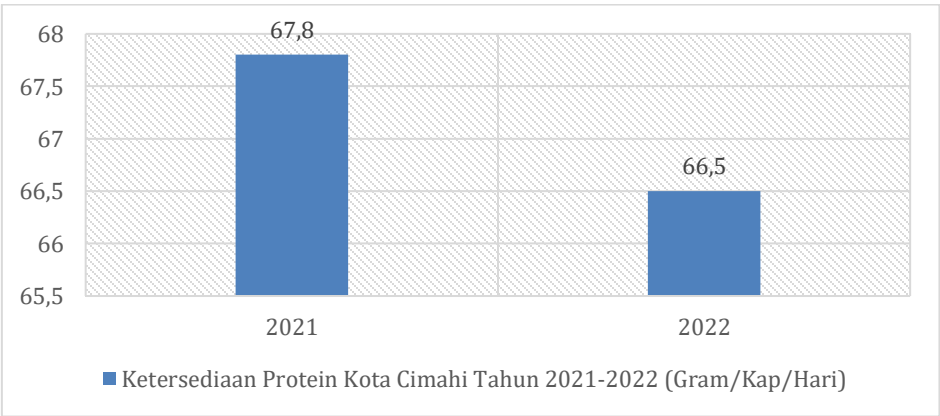
hanya mencapai 89%. Masih terdapat gap 19% untuk mencapai %AKE ketersediaan sempurna.



Sumber : Neraca Bahan Makanan Kota Cimahi (Dispangtan, 2022)

Gambar 2.41 Diagram A. Perkembangan Ketersediaan Energi Kota Cimahi Tahun 2021-2022

Hasil kajian NBM Kota Cimahi juga menampilkan ketersediaan protein dan lemak dari pangan nabati dan hewani. Ketersediaan protein per kapita per hari pangan nabati sebesar 41,7 gram, sedangkan pangan hewani sebesar 24,8 gram. Total penyediaan protein di Kota Cimahi adalah 66,5 gram/kapita/hari. Angka ketersediaan protein tersebut telah mencukupi standar yaitu 63 gram/kapita/hari.



Sumber : Neraca Bahan Makanan Kota Cimahi (Dispangtan, 2022)

Gambar 2.42 Diagram B. Ketersediaan Protein Kota Cimahi Tahun 2021-2022 (Gram/Kap/Hari)

Kelompok pangan yang memiliki gap %AKE cukup tinggi jika dibandingkan nilai ideal antara lain umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta lain-lain. Tabel C di bawah ini menyajikan hasil analisis kajian ketersediaan pangan di Kota Cimahi baik secara kuantitas maupun kualitas.

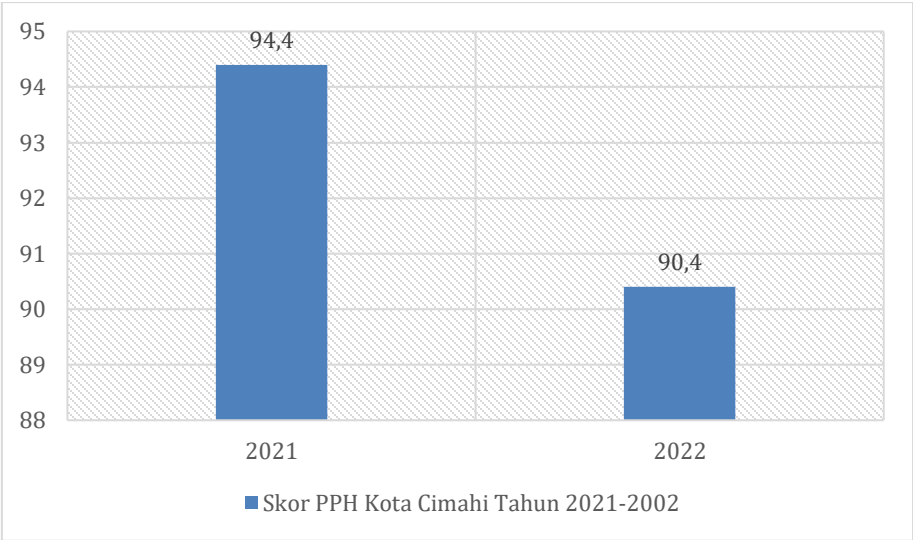
Tabel 2.31
Situasi Ketersediaan Pangan Di Kota Cimahi Tahun 2022

No	Kelompok Pangan	Berat	Energi				Protein		Skor PPH	
		g/kap/hari	kkal/kap/hari		%AKE		g/kap/hari	%AKP		
		Aktual	Ideal	Aktual	Ideal	Aktual	Aktual	Aktual	Ideal	Aktual
1	Padi-padian	351,5	1.200	1237	50,0	51,5	30,4	48,3	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	40,5	144	33	6,0	1,4	0,0	0,6	2,5	0,7
3	Pangan Hewani	266,8	288	299	12,0	12,4	25,0	39,4	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	33,1	240	296	10,0	12,3	0,1	0,1	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,9	72	3	3,0	0,1	0,0	0,1	1,0	0,1
6	Kacang-kacangan	19,0	120	72	5,0	3,0	7,4	11,8	10,0	6,0
7	Gula	16,3	120	60	5,0	2,5	0,1	0,2	2,5	1,2
8	Sayur dan Buah	471,1	144	136	6,0	5,7	3,2	5,1	30,0	28,4
9	Lain-lain	-	72	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			2.400	2.136	100,0	89,0	66,5	105,6	100,0	90,4

Sumber : Neraca Bahan Makanan Kota Cimahi (Dispangtan, 2022)

Tingkat ketersediaan pangan wilayah juga dinilai dari segi kualitas yaitu keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Skor maksimal dari PPH adalah 100, yang berarti pangan yang tersedia di suatu wilayah telah beragam dari 9 kelompok pangan yang ada. Berdasarkan analisis situasi ketersediaan pangan diketahui bahwa skor PPH Ketersediaan di Kota Cimahi sebesar 90,4. Angka ini hampir mendekati nilai ideal 100. Jika nilai skor PPH semakin mendekati angka ideal, maka dapat dikatakan ketersediaan pangan yang ada dalam suatu wilayah cukup beragam. Beberapa kelompok pangan masih jauh dari nilai ideal skor PPH, sehingga perlu ditingkatkan. Ketersediaan pangan yang perlu ditingkatkan keragamannya adalah

umbi-umbian (0,7 dari 2,5), buah/biji berminyak (0,0 dari 1,0), kacang-kacangan (6,0 dari 10), dan gula (1,2 dari 2,5). Adapun kelompok sayur dan buah meskipun belum mencapai nilai maksimal, gap dengan nilai ideal tidak terlalu besar.



Sumber : Neraca Bahan Makanan Kota Cimahi (Dispangtan, 2022)

Gambar 2.43 Diagram D. Perkembangan Skor PPH Kota Cimahi Tahun 2021-2002

Rata-rata ketersediaan pangan (energi dan protein) menjadi salah satu indikator program pembangunan daerah Pemerintah Kota Cimahi yang tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, berdasarkan data-data diatas maka evaluasi target urusan pemerintahan bidang pangan Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.32
Evaluasi Target Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kota Cimahi

Indikator Kinerja Program	Target Capaian Setiap Tahun		Realisasi	
	2021	2022	2021	2022
Rata-rata ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	2400	2400	2318	2136
Keterangan			Tidak tercapai	Tidak tercapai
Rata-rata ketersediaan protein (gram/kap/hari)	63	63	67,8	66,5
Keterangan			Tercapai	Tercapai

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Untuk menjamin ketersediaan pangan yang menjadi prasyarat terwujudnya ketahanan pangan dan gizi dapat diupayakan melalui beberapa strategi sebagai berikut :

a) Optimalisasi produksi pangan yang beragam di perkotaan, melalui :

- Mengakselerasi pemanfaatan lahan sub optimal, lahan tidur, wilayah perbatasan dan daerah rentan rawan pangan;
- Memberdayakan rumah tangga untuk penyediaan pangan yang beragam melalui pemanfaatan pekarangan dan media lainnya; dan
- Mengembangkan industri pangan olahan berbahan baku lokal.

b) Memperkuat cadangan pangan untukantisipasi ancaman ketersediaan pangan;

c) Menyediakan Pangan yang Aman :

- Memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan segar; dan
- Memperkuat SDM dan infrastruktur keamanan pangan.

d) Keterjangkauan Fisik;

Menjamin pasokan pangan dari daerah produsen untuk mencegah ketidakstabilan harga dan stok pangan di pasar.

e) Keterjangkauan Ekonomi :

- Menjaga stabilitas harga pangan terutama pangan yang tergolong barang kebutuhan pokok;
- Menyediakan insentif untuk mendorong pertumbuhan UMKM pangan; dan
- Memperluas akses sistem informasi pasar dan harga pangan untuk mencegah terjadinya perilaku spekulatif.

- f) Keterjangkauan Sosial :
- Mengembangkan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam; dan
 - Menyediakan dan menyalurkan pangan untuk situasi darurat sesuai kondisi wilayah dan kelompok umur/fisiologis yang terdampak bencana.

2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Selain ketersediaan pangan, Pemerintah Kota Cimahi juga wajib meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di Kota Cimahi. Penganekaragaman konsumsi pangan diukur melalui pencapaian nilai PPH Konsumsi, Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Situasi Konsumsi Pangan rata-rata penduduk Kota Cimahi Tahun 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.33
Situasi Konsumsi Pangan Rata-rata di Kota Cimahi
Tahun 2022

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan (Gram/Kapita/Hari)	Energi (Kkal/Kapita/hari)	% AKE	Protein (Gram/Kapita/hari)	% AKP	Skor PPH
1	Padi-padian	262,7	1124	53,5	25,7	45,1	25,0
2	Umbi-umbian	38,3	38	1,8	0,5	0,8	0,9
3	Pangan Hewani	123,0	280	13,3	22,8	39,9	24,0
4	Minyak dan Lemak	29,7	264	12,6	0,1	0,2	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,8	5	0,2	0,1	0,2	0,1
6	Kacang-kacangan	29,3	66	3,1	7,2	12,6	6,3
7	Gula	13,9	54	2,6	0,2	0,3	1,3
8	Sayur dan Buah	191,5	87	4,1	3,1	5,4	20,6
9	Lain-lain	86,0	62	3,0	1,1	1,9	0,0
	Total		1981	94,3	60,7	106,5	83,2

Sumber : Susenas BPS Provinsi Jawa Barat, diolah Dispangtan Cimahi (2022)

*Angka Kecukuapan Energi (AKE) : 2,100 kkal/kap/ hari

** Angka Kecukuapan Protein (AKP) : 57 g/kap/hari

Tabel diatas menggambarkan situasi konsumsi pangan rata-rata di kota cimahi Tahun 2022. Dijelaskan bahwa jumlah rata-rata konsumsi energi dan protein penduduk kota Cimahi sebesar 1981 kkal/kapita/hr (94,3% AKE), dari data tersebut diketahui bahwa rata-rata kuantitas konsumsi pangan Kota Cimahi tahun 2022 berada pada kategori tahan pangan karena jumlah pangan yang dikonsumsi mencukupi energi ideal (90-110% AKE). Akan tetapi jika dilihat per kelompok pangan maka dapat dilihat terdapat beberapa kelompok pangan yang konsumsinya masih belum sesuai dengan anjuran ideal. Konsumsi energi kelompok padi padian sebesar 1124 kkal/kapita/hari (53.5% AKE). Jumlah ini tergolong berlebih dari standar yaitu 1,050 kkal/kapita/hari (50% AKE). Kelompok pangan padi-padian terdiri dari beras, jagung, terigu. Penduduk Kota Cimahi harus menurunkan konsumsi padi-padian, terutama beras dan terigu karena sudah berlebih. Disisi lain, konsumsi pangan sumber karbohidrat lainnya yaitu umbi-umbian tergolong rendah, yaitu 38 kkal/kapita/hari dari standar 126 kkal/kapita/hari.

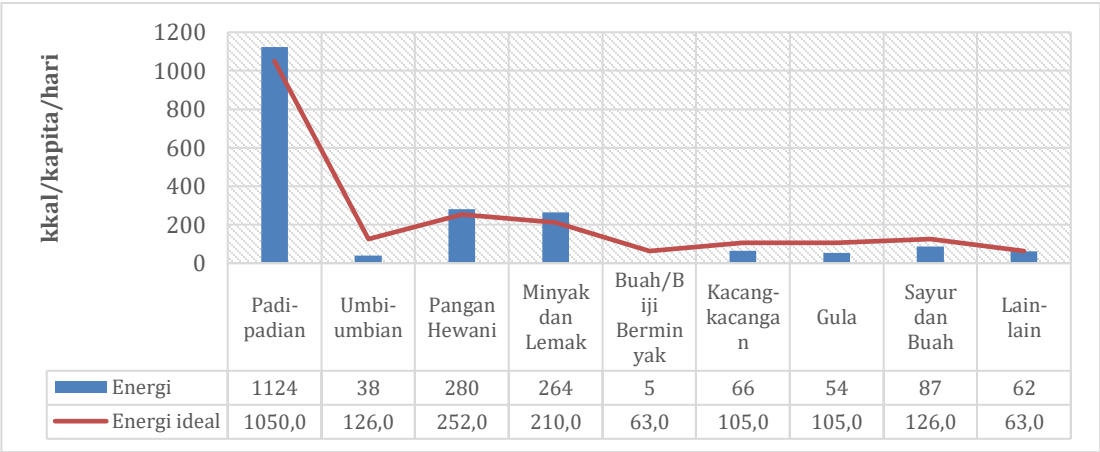
Kelebihan konsumsi perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko terkena penyakit tidak menular seperti kegemukan, obesitas, penyakit jantung, dan sebagainya. Selain akibat kelebihan konsumsi karbohidrat, tingginya obesitas tersebut juga diduga karena kelebihan konsumsi minyak dan lemak. Standar kecukupan kelompok minyak dan lemak yang dianjurkan hanya 210 kkal/kap/hari, namun rata-rata konsumsi penduduk Kota Cimahi sebesar 264 kkal/kap/hari.

Berbeda dengan konsumsi padi-padian serta minyak lemak yang berlebih dan harus diturunkan, konsumsi kelompok pangan hewani yang juga tergolong berlebih

yaitu 280 kkal/kap/hari dari standar 252 kkal/kap/hari, direkomendasikan untuk tetap dipertahankan.

Demikian halnya dengan konsumsi buah/biji berminyak, gula serta sayur dan buah. Konsumsi buah/bijiberminyak, gula serta sayur dan buah sebaiknya ditingkatkan untuk dapat mencapai masyarakat yang sehat dan produktif. Untuk Perbandingan jumlah kalori harian penduduk Kota Cimahi dengan jumlah Kalori Ideal tersaji pada Gambar 2.44.

Kualitas keberagaman konsumsi pangan penduduk Kota cimahi masih belum Optimal. Hal tersebut tercermin dari pencapaian skor PPH sebesar 83.2. Capaian tersebut terpaut 16.8 poin dari skor ideal yaitu 100. Adapun kelompok pangan yang Skor PPH nya masih kurang yakni umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah. Sementara itu, kelompok pangan padi-padian, pangan hewani serta minyak dan lemak sudah mencapai skor maksimal.



Gambar 2.44 Perbandingan Jumlah Kalori Harian Penduduk Kota Cimahi Dengan Jumlah Kalori Harian Ideal

**3) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Ketersediaan dan PPH Konsumsi Kota Cimahi**

Tabel 2.34
Skor Pola Pangan Harapan

Indikator	Skor Ideal	2018	2019	2020	2021	2022
PPH Ketersediaan	100	93,4	92,9	-	94,4	90,4
PPH Konsumsi	100	79,1	83,8	84,4	83,3	83,2

Sumber Data : Dispangtan ,Diolah (2022)

Berdasarkan data tersebut Kota Cimahi menalami penurunan PPh ketersediaan maupun PPh konsumsi pada tahun 2022 jika dibandingkan data tahun 2021. Kualitas keberagaman konsumsi pangan penduduk Kota cimahi masih belum Optimal. Hal tersebut tercermin dari pencapaian skor PPH sebesar 83.2. Capaian tersebut terpaut 16.8 poin dari skor ideal yaitu 100. Angka ini juga mengalami penurunan 0,01 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya. Strategi mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang memerlukan peran serta dari masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Adapun kelompok pangan yang Skor PPH nya masih kurang yakni umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah. Sementara itu, kelompok pangan padi-padian, pangan hewani serta minyak dan lemak sudah mencapai skor maksimal.

Analisis situasi ketersediaan pangan juga menyajikan gambaran tingkat keberagamanpangan yang tersedia melalui skor PPH ketersediaan. Skor PPH ketersediaan di Kota Cimahi sebesar 90,4 (skor maksimal=100). Beberapa kelompok pangan masih jauh dari nilai ideal skor PPH, sehingga perlu ditingkatkan antara lain, umbi-umbian (0,7 dari 2,5), buah/biji berminyak (0,0 dari 1,0), kacang-kacangan (6,0 dari 10), dan gula (1,2 dari 2,5). Adapun

kelompok sayur dan buah meskipun belum mencapai nilai maksimal, gap dengan nilai ideal tidak terlalu besar.

Ditinjau dari ketersediaan energi, protein, dan skor PPH ketersediaan, secara keseluruhan situasi ketersediaan pangan di Kota Cimahi tahun 2022 menurun dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh menurunnya jumlah produksi dan konsumsi pangan penduduk sebagai dasar estimasi impor pangan.

d. Urusan Pertanahan

Tahun 2015 Kota Cimahi memiliki aset tanah sebanyak 259 bidang tanah dimana 137 bidang telah tersertifikasi sedangkan sisanya sejumlah 122 bidang tanah masih dalam proses. Mengingat kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum, direncanakan pembelian tanah untuk kepentingan umum dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah daerah melalui OPD BPKAD Kota Cimahi memiliki salah satu kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban serta pengamanan Barang Milik Daerah yaitu kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang terdiri dari Pensertifikatan tanah, Penyusunan Laporan *Stock Opname* Persediaan dan Pemasangan Plang pada Aset Tanah/Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi. Pada Tahun 2019 BPKAD telah berhasil membuat 18 sertifikat tanah sehingga total sertifikat yang dimiliki menjadi 236 sertifikat dengan luas tanah 603.257m² dari luas tanah yang seharusnya bersertifikat seluas 1.447.501m². Sedangkan pemasangan plang kepemilikan aset pada tahun 2019 telah dipasang sebanyak 20 plang.

Kondisi pertanahan di Kota Cimahi mengalami keterbatasan lahan sehingga untuk pembelian lahan terutama dengan luasan yang besar sulit untuk terealisasi ditambah lagi dengan faktor lain seperti harga tanah dan

kepemilikan lahan yang sering terjadi sengketa antar beberapa pihak.

Pemerintah Kota Cimahi sangat *concern* dalam mengatasi konflik dan sengketa tanah yang terjadi di Kota Cimahi. Berdasarkan data diketahui bahwa Persentase penyelesaian konflik dan sengketa tanah yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2017 dan 2018 yaitu 100%.

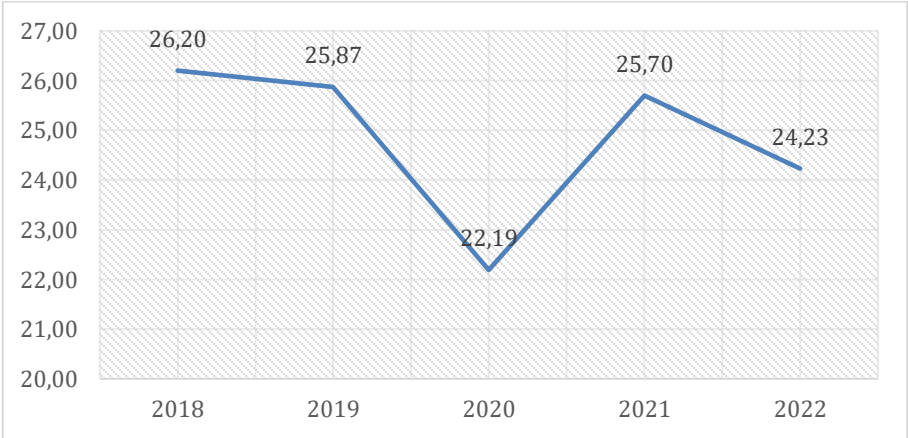
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi, urusan pemerintahan bidang pertanahan berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program yang diusung yaitu Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Program Pengelolaan Tanah Kosong, dan Program Penatagunaan Tanah.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan sedang mengalami penurunan kualitas akibat dari pencemaran, jika tidak ditangani dengan baik akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat sendiri. Isu-isu terkait kualitas lingkungan seperti alih fungsi lahan, pencemaran air sungai, pencemaran udara, dan persampahan merupakan beberapa isu yang harus diperhatikan secara signifikan. Untuk itu diperlukan sebuah upaya pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Dari sisi ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Cimahi, dengan luas Kota Cimahi 4.243,10 Ha, Kota Cimahi mengandalkan hutan kota, taman lingkungan serta penghijauan sepanjang sempadan jalan dan sempadan sungai sebagai penyerap polutan, penyerap bau, peredam

kebisingan, dan fungsi hutan lainnya. Luas lahan kehati yang dikelola tahun 2022 adalah seluas 48,68 Ha yang terdiri dari hutan kota, taman pemakaman dan lahan yang dikonservasi, Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) kota Cimahi sebesar 24,23. Kondisi ini dipicu oleh pertumbuhan penduduk, peningkatan perekonomian Hal-hal tersebut juga mendorong timbulnya faktor lain seperti tekanan peningkatan kebutuhan lahan permukiman, peningkatan timbulan limbah, pelanggaran izin lingkungan. Capaian indeks tutupan lahan kota cimahi adalah sebagai berikut :



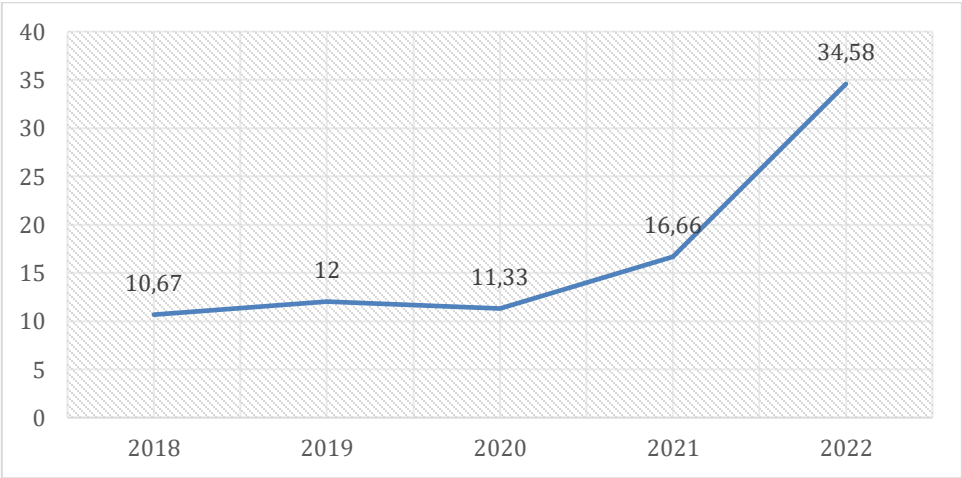
Sumber : Dinas LH, 2023 dan LKIP DLH 2022 diolah

Gambar 2.45 Indeks Tutupan Lahan Kota Cimahi

Penurunan indeks tutupan lahan akibat adanya perubahan aturan terkait kriteria penghitungan tutupan lahan, yang dihitung adalah tegakan pohon yang sudah membentuk canopy lahan berdasarkan penghitungan delineasi *google earth* dan diverifikasi oleh KLHK, upaya yang telah dilakukan adalah penanaman pohon dan pelestarian lahan-lahan yang telah memiliki tegakan pohon.

Pengelolaan Sumber daya air diperlukan untuk menjaga siklus daur hidrologi Kota Cimahi, secara kualitas dan kuantitas Air di Kota Cimahi saat ini mengalami penurunan, Air sungai dan air tanah merupakan sumber

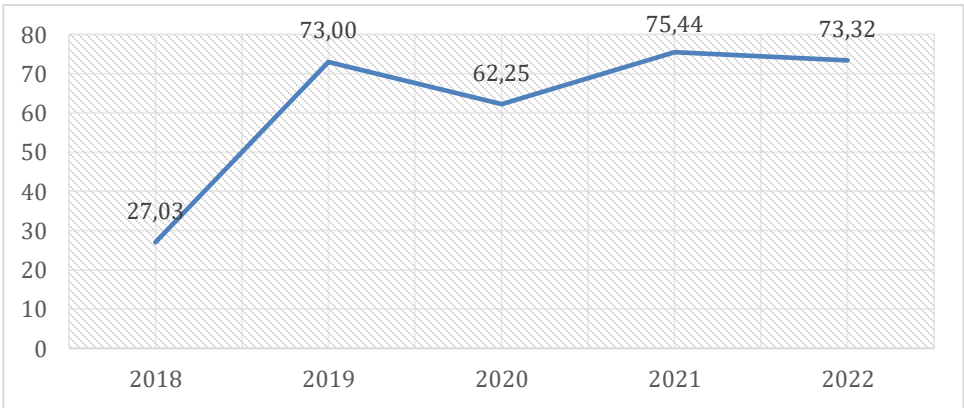
air baku yang biasa digunakan oleh masyarakat Kota Cimahi, baik menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), maupun air sumur dan sumber lainnya. Lingkup isu tentang air yang menjadi perhatian adalah air sungai dan air tanah/sumur, baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada tahun 2021 Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada Bulan Maret (bulan basah), Bulan Juni (bulan kering) dan Bulan September (bulan basah), terdapat 35 parameter yang diuji oleh UPTD Laboratorium untuk menunjukkan kualitas air sungai di Kota Cimahi. Selain itu, Indeks Kualitas Air (IKA) sungai Kota Cimahi pada tahun 2020 berada di skor 17,11 (skala 100) dan IKA tahun 2022 34,58, kriteria marginal yang berarti kualitas air sungai ini masih perlu dikelola lebih baik lagi. Selain itu, air sumur di Kota Cimahi yang menjadi salah satu sumber air minum bagi masyarakat menunjukkan masih banyak parameter yang melebihi baku mutu, seperti pH, NO₃, Mangan, Coliform, KMNO₄, dan MBAS. Kualitas air seperti ini secara tidak langsung menyebabkan keterbatasan pemakaian oleh masyarakat, sehingga terjadi kekurangan air bersih. Indeks Kualitas air kota Cimahi sebagai berikut :



Sumber : Dinas LH, 2023 dan LKIP DLH 2022 diolah

Gambar 2.46 Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi Tahun2018-2022

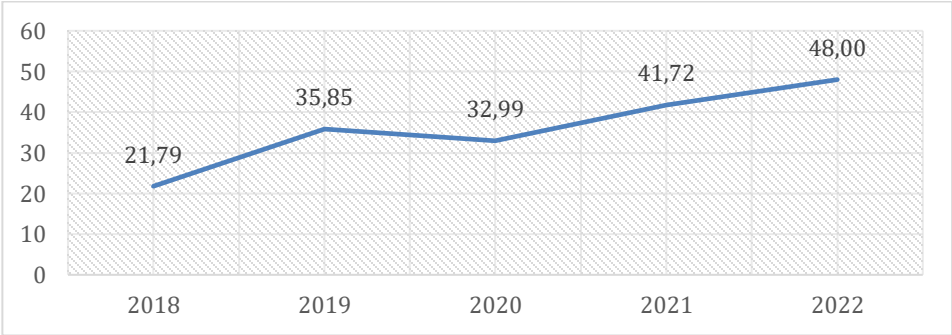
Kesehatan kota salah satunya dapat dilihat dari kualitas udara selain kualitas air dan pengelolaan persampahan. Pengukuran kualitas udara ambien merupakan tahap awal untuk mengetahui dampak negatif cemaran udara terhadap lingkungan. Kualitas udara digambarkan dengan konsentrasi parameter SO₂ dan NO₂ yang dibandingkan dengan baku mutu. Hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Kota Cimahi masih di bawah baku mutu. Jika data kualitas udara tersebut diolah menjadi nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), hasil menunjukkan nilai IKU Kota Cimahi tahun 2021 sebesar 72,58, dan IKU tahun 2022 sebesar 73,32 ada kenaikan indeks di bandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan program dalam memperbaiki kualitas udara melalui penanaman pohon dan kepatuhan pengguna kendaraan untuk mengurangi emisi udara, nilai 73,32 ini dengan keterangan kelas indeks “cukup” (skala indeks 100). Isu lingkungan kualitas udara dipicu dengan pertumbuhan penduduk yang menjadi pertumbuhan aktivitas terutama yang menggunakan bahan bakar (memasak, berkendara, dan sebagainya), jumlah kendaraan bermotor, dan sebagainya. Indeks kualitas udara dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Dinas LH, 2023 dan LKIP DLH 2022 diolah

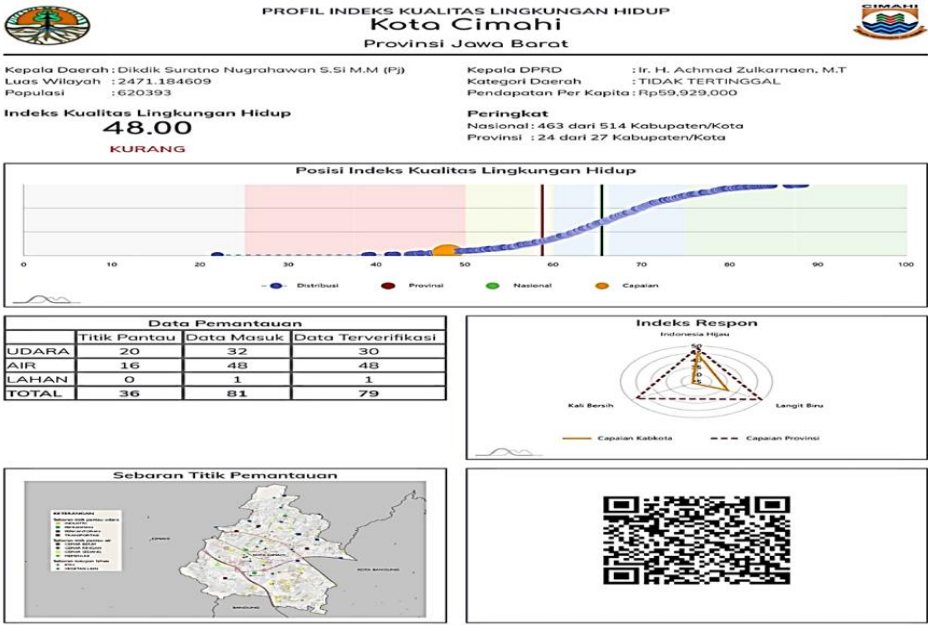
Gambar 2.47 Indeks Kualitas Udara di Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Keseluruhan pengukuran kualitas lingkungan di atur dalam surat edaran Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusaka Lingkungan Nomor S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 Tanggal 4 Desember 2020 tentang rumus penghitungan indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian IKLH kota Cimahi Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : Dinas LH, 2023 dan LKIP DLH 2022 diolah

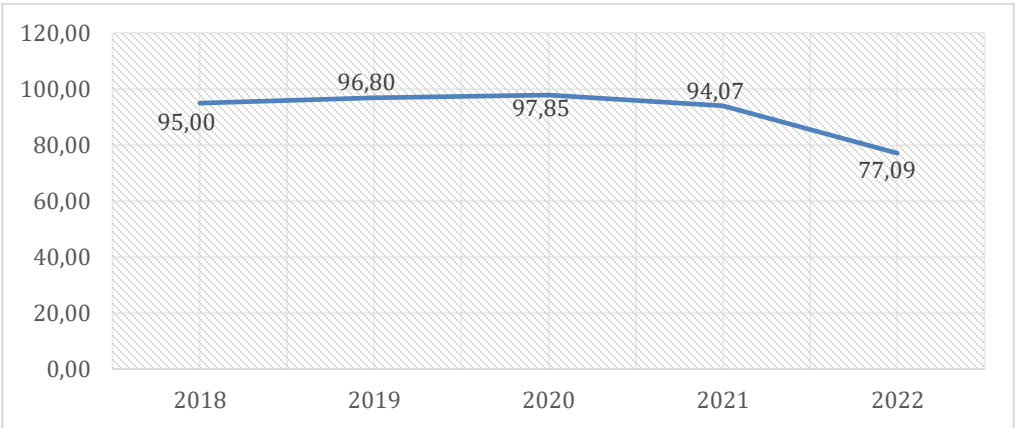
Gambar 2.48 Indeks Kualitas Lingkungan di Kota Cimahi Tahun 2018-2022



Sumber data : Bidang Penataan Hukum Lingkungan DLH Kota Cimahi Tahun 2022 dan dilaporkan pada aplikasi IKLH Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (www. <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>)

Gambar 2.49 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup

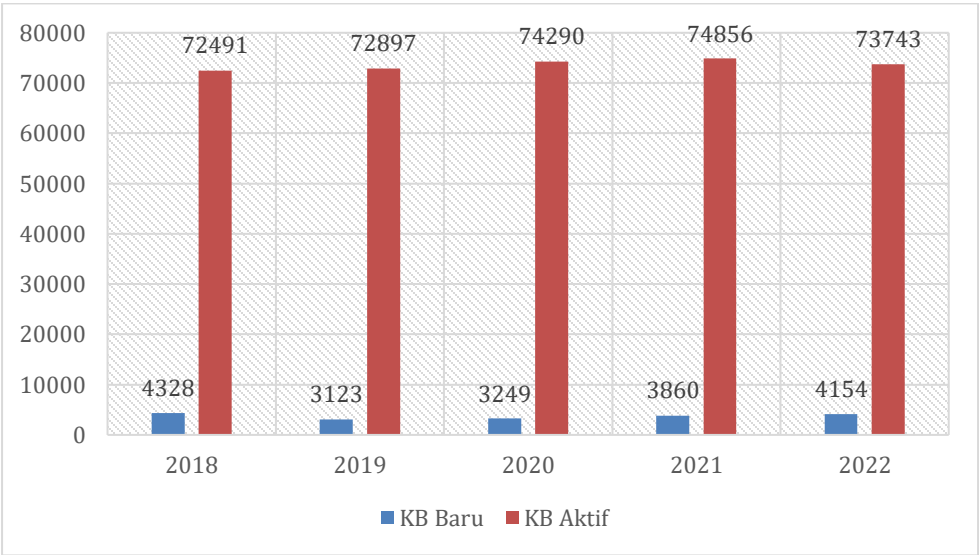
Permasalahan lainnya di perkotaan adalah masalah pengelolaan sampah, jumlah sampah ditimbulkan berasal dari perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat. Migrasi penduduk antar wilayah sulit dikontrol sehingga sering kali menimbulkan persoalan yang menyangkut permasalahan edukasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya sampah. Indikator yang menunjukkan bahwa suatu kota atau wilayah memiliki kondisi lingkungan yang sehat adalah tingginya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Faktor pemicu isu ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Selain jumlah penduduk, tingkat pendidikan memengaruhi perilaku hidup masyarakat. Pengelolaan sampah di Kota Cimahi dilaksanakan melalui program pengurangan dan penanganan sampah. Program pengurangan sampah saat ini dilaksanakan melalui *Reduce, Reuse Recycle* (3R), pembuatan *Refined Derived Fuel* (RDF), *composting* dan magotisasi yang diarahkan untuk menuju sirkular ekonomi, sedangkan untuk penanganan sampah adalah pengangkutan sampah ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Capaian pengelolaan Sampah di Kota cimahi dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : DIKPLHD 2022 dan LKIP DLH 2022 diolah

Gambar 2.50 Persentase Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2018-2022

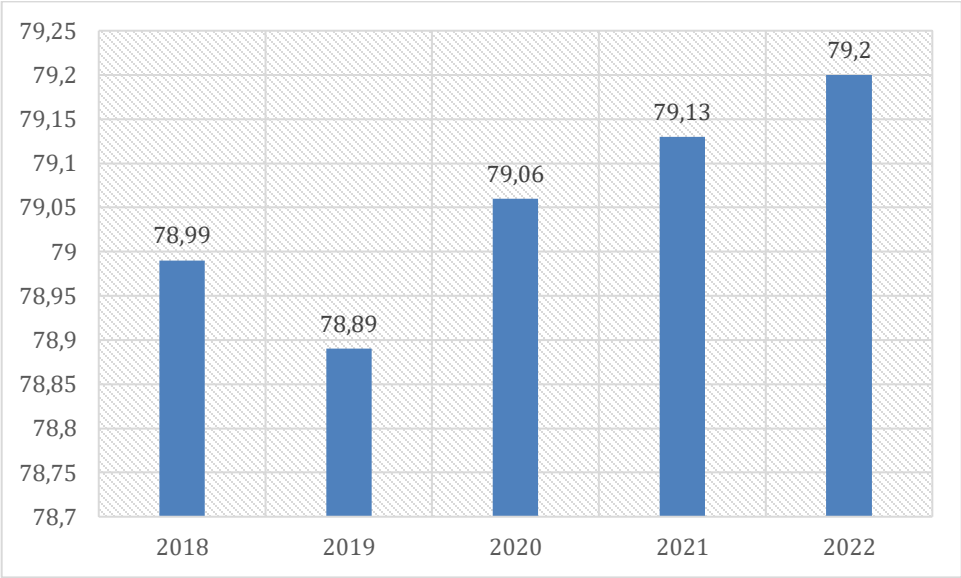
f. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Sumber : DP2KBP3A, 2022, diolah

Gambar 2.51 Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Jumlah peserta baru tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuatif, dari 4.328 hingga pada tahun 2022 menjadi 4154. Hal ini terjadi dikarenakan ada penurunan jumlah target setiap tahunnya pada pasangan usia subur. Selanjutnya, untuk peserta KB Aktif tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 juga mengalami hal serupa, pada tahun 2018 sebesar 72.491, dan tahun 2022 73.743. Adapun persentase cakupan akseptor KB dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



Sumber : DP2KBP3A, 2021, diolah

Gambar 2.52 Rasio Akseptor KB di Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Rasio Akseptor KB di Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ada kenaikan dari 78,99 menjadi 79,2. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Keluarga Berencana dalam mewujudkan kualitas keluarga.

g. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Di lihat dari kondisi saat ini jumlah penduduk Kota Cimahi setiap tahunnya mengalami peningkatan dan hal ini akan menambah permasalahan terkait dengan kebutuhan ruang yang lebih luas untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak namun di sisi lain terdapat permasalahan lingkungan seperti daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dan lain-lain. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapatkan perhatian yang sama demi keseimbangan alam dan yang lebih penting untuk dipahami adalah lahan dan wilayah Kota Cimahi tidaklah bertambah.

Adapun permasalahan lain yang ditimbulkan dari peningkatan jumlah penduduk adalah meningkatnya angka kemiskinan, menurunnya angka kesehatan masyarakat, memburuknya angka kecukupan gizi, terjadinya kesenjangan ekonomi, dan banyaknya pengangguran, serta sulitnya pemerintah daerah untuk mensejahterakan penduduknya. Oleh karena itu, perencanaan yang tepat dan matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan persebarannya.

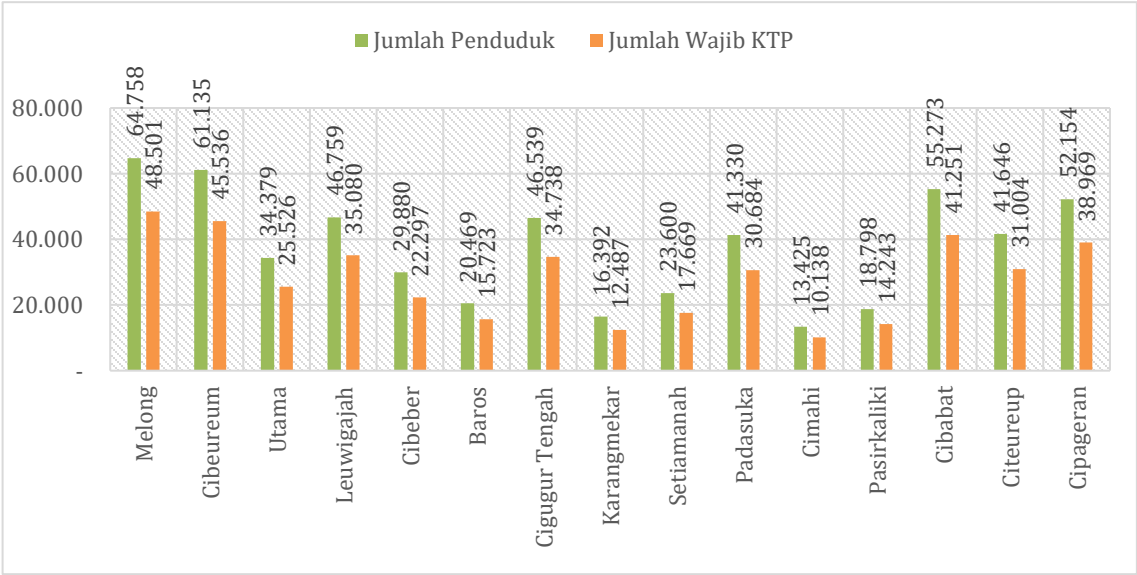
Selain dampak negatif terkait jumlah penduduk yang besar, dampak positifnya adalah tersedianya jumlah tenaga kerja yang cukup untuk mengelola sumber daya alam, semakin meningkatnya jumlah produksi, dan angka kewirausahaan akan meningkat serta potensi untuk menjadi seorang kewirausahaan untuk memenuhi kebutuhan akan semakin terbuka, dimana semua ini akan mengembangkan dan meningkatkan ekonomi.

Tabel 2.35
Jumlah Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Wajib KTP Tahun 2022

NO	WILAYAH	Jumlah Penduduk			Jumlah Wajib KTP		
		L	P	Jumlah	L_WKTP	P_WKTP	Jumlah WKTP
	KOTA CIMAHI	284.655	281.882	566.537	211.321	212.525	423.846
	CIMAHI SELATAN	119.244	117.667	236.911	88.379	88.561	176.940
1	MELONG	32.410	32.348	64.758	24.107	24.394	48.501
2	CIBEUREUM	30.889	30.246	61.135	22.841	22.695	45.536
3	UTAMA	17.400	16.979	34.379	12.871	12.655	25.526
4	LEUWIGAJAH	23.504	23.255	46.759	17.474	17.606	35.080
5	CIBEBER	15.041	14.839	29.880	11.086	11.211	22.297
	CIMAHI TENGAH	81.129	80.626	161.755	60.407	61.032	121.439
6	BAROS	10.293	10.176	20.469	7.850	7.873	15.723
7	CIGUGUR TENGAH	23.562	22.977	46.539	17.418	17.320	34.738
8	KARANGMEKAR	8.101	8.291	16.392	6.131	6.356	12.487

NO	WILAYAH	Jumlah Penduduk			Jumlah Wajib KTP		
		L	P	Jumlah	L_WKTP	P_WKTP	Jumlah WKTP
9	SETIAMANAH	11.744	11.856	23.600	8.732	8.937	17.669
10	PADASUKA	20.686	20.644	41.330	15.241	15.443	30.684
11	CIMAH	6.743	6.682	13.425	5.035	5.103	10.138
	CIMAH UTARA	84.282	83.589	167.871	62.535	62.932	125.467
12	PASIRKALIKI	9.382	9.416	18.798	7.076	7.167	14.243
13	CIBABAT	27.790	27.483	55.273	20.579	20.672	41.251
14	CITEUREUP	20.877	20.769	41.646	15.374	15.630	31.004
15	CIPAGERAN	26.233	25.921	52.154	19.506	19.463	38.969

Sumber: Database Konsolidasi Bersih Semester II 2022 Kota Cimahi



Sumber : Database Konsolidasi Bersih Semester II 2022 Kota Cimahi

Gambar 2.53 Perbandingan Jumlah Penduduk dan Wajib KTP Berdasarkan Kelurahan di Kota Cimahi

Gambar diatas menunjukkan bahwa dari 423.846 orang wajib KTP pada tahun 2022, hal ini diduga karena belum tercetak atau penduduk yang pindah atau keluar dari Kota Cimahi adalah penduduk yang sudah memiliki KTPel, sedangkan penduduk yang masuk atau datang ke Kota Cimahi mereka belum memperoleh KTPel walaupun mungkin mereka sudah pernah melakukan perekaman di daerah asalnya atau karena meninggal.

Tabel 2.36
Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran Menurut Kecamatan dan Kelurahan, Dan Jenis Kelamin Kota Cimahi Tahun 2022

KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN			PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
CIMAHISELATAN	119.244	117.667	236.911	61.711	59.877	121.588	51,75%	50,89%	51,32%
KEL. CIBEBER	15.041	14.839	29.880	8.826	8.493	17.319	58,68%	57,23%	57,96%
KEL. CIBEUREUM	30.889	30.246	61.135	15.115	14.612	29.727	48,93%	48,31%	48,63%
KEL. LEUWIGAJAH	23.504	23.255	46.759	12.766	12.437	25.203	54,31%	53,48%	53,90%
KEL. MELONG	32.410	32.348	64.758	16.511	16.188	32.699	50,94%	50,04%	50,49%
KEL. UTAMA	17.400	16.979	34.379	8.493	8.147	16.640	48,81%	47,98%	48,40%
CIMAHITENGAH	81.129	80.626	161.755	46.731	45.694	92.425	57,60%	56,67%	57,14%
KEL. BAROS	10.293	10.176	20.469	5.963	5.726	11.689	57,93%	56,27%	57,11%
KEL. CIGUGUR TENGAH	23.562	22.977	46.539	13.263	12.716	25.979	56,29%	55,34%	55,82%
KEL. CIMAHI	6.743	6.682	13.425	3.928	3.842	7.770	58,25%	57,50%	57,88%
KEL. KARANGMEKAR	8.101	8.291	16.392	4.774	4.858	9.632	58,93%	58,59%	58,76%
KEL. PADASUKA	20.686	20.644	41.330	11.922	11.786	23.708	57,63%	57,09%	57,36%
KEL. SETIAMANAH	11.744	11.856	23.600	6.881	6.766	13.647	58,59%	57,07%	57,83%
CIMAHIUTARA	84.282	83.589	167.871	45.231	44.308	89.539	53,67%	53,01%	53,34%
KEL. CIBABAT	27.790	27.483	55.273	15.001	14.618	29.619	53,98%	53,19%	53,59%
KEL. CIPAGERAN	26.233	25.921	52.154	14.220	13.762	27.982	54,21%	53,09%	53,65%
KEL. CITEUREUP	20.877	20.769	41.646	11.172	11.066	22.238	53,51%	53,28%	53,40%
KEL. PASIRKALI KI	9.382	9.416	18.798	4.838	4.862	9.700	51,57%	51,64%	51,60%
KOTA CIMAHI	284.655	281.882	566.537	153.673	149.879	303.552	53,99%	53,17%	53,58%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, Data SIAK SM II Tahun 2022, diolah

Akte Kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

Dari tabel diatas menggambarkan kepemilikan akta kelahiran penduduk Kota Cimahi terhadap total penduduk Kota Cimahi berdasarkan data yang terdapat dalam database SIAK Kota Cimahi SM II Tahun 2022 dan terlihat bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk

di Kota Cimahi Tahun 2022 hanya 53,58% (303.552 orang) dan meningkat sebesar 1,81% (13.246 orang) dari tahun 2021 yakni 51,77% (290.306 orang). Jika dilihat menurut kecamatan dan kelurahan, maka Kecamatan Cimahi Tengah merupakan wilayah kecamatan dengan kepemilikan akta kelahiran tertinggi yakni 57,14% dari jumlah penduduk Kota Cimahi sebesar 560.746 orang, diikuti Kecamatan Cimahi Utara sebesar 53,34%, dan Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kecamatan dengan persentase kepemilikan akta kelahiran terendah yakni sebesar 51,32% dari jumlah penduduk Kota Cimahi. Sedangkan jika dilihat menurut wilayah kelurahan, maka hampir semua kelurahan persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran di atas 50% kecuali Kelurahan Cibeureum (48,63%) dan Kelurahan Utama (48,40%) di bawah 50%.

Kecilnya jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran, diduga mereka tidak melaporkan atau mencatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau karena mereka merasa belum/tidak perlu mencatatkan kelahirannya atau memiliki akta kelahiran apalagi jika mereka sudah pra lansia dan lansia yang tidak bekerja atau yang bekerja tanpa memerlukan dokumen tersebut, sehingga kepemilikan akta kelahiran mereka tidak tercatat di database SIAK.

Untuk itu, Kota Cimahi terus menerus melakukan sosialisasi, inovasi pelayanan dokumen kependudukan dan pemutakhiran data terkait dengan kepemilikan akta kelahiran.

Tabel 2.37
Jumlah Penduduk Kota Cimahi Usia Nol (0) Tahun Menurut
Kecamatan, Kelurahan dan Jenis Kelamin, Tahun 2020-2022

KECAMATAN/ KELURAHAN	PENDUDUK USIA 0 TAHUN								
	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
CIMAH SELATAN	815	725	1.540	1.247	1.209	2.456	1.135	1.089	2.224
KEL. CIBEBER	112	87	199	183	149	332	155	145	300
KEL. CIBEUREUM	212	198	410	322	313	635	295	301	596
KEL. LEUWIGAJAH	167	142	309	229	249	478	206	185	391
KEL. MELONG	222	201	423	343	336	679	300	280	580
KEL. UTAMA	102	97	199	170	162	332	179	178	357
CIMAH TENGAH	529	515	1.044	837	805	1.642	699	689	1.388
KEL. BAROS	71	79	150	117	99	216	106	85	191
KEL. CIGUGUR TENGAH	167	125	292	245	245	490	191	196	387
KEL. CIMAH	39	42	81	58	56	114	55	53	108
KEL. KARANGMEKAR	48	52	100	78	80	158	71	53	124
KEL. PADASUKA	136	135	271	209	220	429	182	203	385
KEL. SETIAMANAH	68	82	150	130	105	235	94	99	193
CIMAH UTARA	586	553	1.139	960	898	1.858	781	767	1.548
KEL. CIBABAT	185	186	371	323	300	623	233	235	468
KEL. CIPAGERAN	188	157	345	287	279	566	269	244	513
KEL. CITEUREUP	153	148	301	256	232	488	196	210	406
KEL. PASIRKALIKI	60	62	122	94	87	181	83	78	161
KOTA CIMAH	1.930	1.793	3.723	3.044	2.912	5.956	2.615	2.545	5.160
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, DKB SM II Tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022, diolah									

Dari table 2.37 tampak jumlah bayi laki-laki pada tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan bayi perempuan, secara ilmiah bahwa kelahiran bayi laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, kecuali di tahun 2019 jumlah bayi laki-laki lebih rendah dibandingkan bayi perempuan (2.012 bayi V 2071 bayi).

Data penduduk usia nol tahun (data pencatatan kelahiran) Kota Cimahi tahun 2022 ini diduga belum semua tercatat atau terlapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau diduga saat bayi lahir hidup lalu meninggal saat itu juga dan tidak dicatatkan sebagai kelahiran hidup tetapi dicatatkan sebagai lahir mati, permasalahan ini harus menjadi agenda pemerintah kota melalui Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan terkait pemahaman

kelahiran hidup dan lahir mati serta prosedur pencatatannya di Dinas Dukcapil.

Tabel 2.38
Jumlah Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Kepemilikan Akte Kawin Tahun 2022

No	Wilayah	STATUS KAWIN			AKTA KAWIN			Persentase Kepemilikan Akta Kawin (%)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Memiliki	Belum Memiliki	Jumlah	
1	MELONG	15626	15787	31.413	21.503	9.910	31.413	68,45
2	CIBEUREUM	14809	14863	29.672	21.240	8.432	29.672	71,58
3	UTAMA	8582	8541	17.123	12.162	4.961	17.123	71,03
4	LEUWIGAJAH	11290	11292	22.582	17.001	5.581	22.582	75,29
5	CIBEBER	7398	7421	14.819	11.580	3.239	14.819	78,14
	Cimahi Selatan	57.705	57.904	115.609	83.486	32.123	115.609	72,21
6	BAROS	168	344	512	7.443	2.121	9.564	77,82
7	CIGUGUR TENGAH	333	667	1.000	18.848	4.022	22.870	82,41
8	KARANGMEKAR	147	340	487	5.762	1.713	7.475	77,08
9	SETIAMANAH	193	420	613	8.709	2.251	10.960	79,46
10	PADASUKA	365	692	1.057	15.456	4.246	19.702	78,45
11	CIMAH	153	275	428	4.765	1.304	6.069	78,51
	Cimahi Tengah	1.359	2.738	4.097	60.983	15.657	76.640	79,57
12	PASIRKALIKI	126	265	391	6.156	2.887	9.043	68,07
13	CIBABAT	461	881	1.342	18.302	7.880	26.182	69,90
14	CITEUREUP	374	694	1.068	14.213	5.806	20.019	71,00
15	CIPAGERAN	404	796	1.200	19.426	5.912	25.338	76,67
	Cimahi Utara	1.365	2.636	4.001	58.097	22.485	80.582	72,10
	KOTA CIMAH	60.429	63.278	123.707	202.566	70.265	272.831	74,25
	Persentase	81.390,29	85.227,53	166.617,82	74,25	25,75	100	

Sumber : Database Konsolidasi Bersih Semester II 2022 Kota Cimahi

Akta kawin merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.

Tabel diatas menggambarkan persentase penduduk berstatus kawin terhadap kepemilikan akta perkawinan, terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Cimahi yang berstatus kawin sebanyak 166.617 orang dan yang tercatat memiliki akta kawin hanya 74,25% atau 202.566 orang, sedangkan yang tidak memiliki akta kawin sebanyak 25,75% atau 70.265 orang. Kondisi seperti ditemukan diseluruh Indonesia, karena ada diantara penduduk terutama penduduk muslim yang melakukan perkawinan secara agama saja, sehingga perkawinan ini tidak diakui secara hukum negara atau penduduk

berstatus kawin yang tidak memiliki akta kawin ini diduga belum mencatatkan akta perkawinan (buku nikah) ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, karena perkawinan mereka dicatat oleh KUA setempat atau penduduk yang berstatus kawin dan tidak memiliki akta kawin ini diduga saat pengisian formulir biodata penduduk tidak lengkap yakni tidak menuliskan nomor buku nikahnya. Namun dengan adanya kebijakan baru terkait status perkawinan dalam Kartu Keluarga bahwa jika seseorang dalam KK statusnya Kawin tetapi tidak mempunyai dokumen perkawinan atau akta perkawinan/Buku Nikah, maka pada KK dapat ditulis Kawin Belum Tercatat.

Jika dilihat menurut wilayah, Kecamatan Cimahi Tengah merupakan kecamatan dengan persentase kepemilikan akta kawin tertinggi yakni 79,57% (60.983 orang) dan Kelurahan Cigugur Tengah merupakan kelurahan dengan persentase kepemilikan akta kawin tertinggi yakni 82,41% (18.848 orang).

h. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai sejak tahun 2004 silam serta terus dilakukan upaya-upaya untuk mendorong agar partisipasi dan gotong royong masyarakat terus tumbuh berkembang sehingga masyarakat akan ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu untuk efektifitas dan efisiensi pembangunan didorong dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pengawasan.

Adapun Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai

80% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 hingga mencapai 100%.

Tabel 2.39
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Cimahi
Tahun 2017-2021

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	95,1	100	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi, 2022, diolah

Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100% (sesuai target). Secara formulasi, usulan masyarakat yang diakomodir dihitung berdasarkan nomenklatur usulan yang ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan, tanpa melihat lokus usulan tersebut.

- i. **Urusan Perhubungan**
 - 1) **Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS)**

Tingkat pelayanan jalan ditunjukkan dengan nilai rasio volume kendaraan yang melintas pada suatu ruas jalan dibandingkan dengan kapasitas ruas jalan tersebut, atau biasa disebut dengan VCR (*volume capacity ratio*). Nilai VCR ini kemudian dikonversikan kedalam nilai tingkat pelayanan yang didasarkan pada Manual Kinerja Jalan Indonesia (MKJI) yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 1997 seperti yang disajikan pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40
Konversi Manual Kinerja Jalan Indonesia (MKJI) Tahun 1997

Tingkat Pelayanan	Karakteristik	(V/C)
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan.	0,0- 0,20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan	0,21-0,44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.	0,45-0,74
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan, Q/C masih dapat ditolelir.	0,75-0,84
E	Volume lalu lintas mendekati/berada pada kapasitas arus tidak stabil, terkadang berhenti.	0,85-1,00
F	Arus yang dipaksakan / macet, kecepatan rendah, V diatas Kapasitas, atrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar.	> 1,00

Sumber: (MKJI, 1997)

Berdasarkan hasil *traffic counting* yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada tahun 2022 di 15 (lima belas) ruas jalan kota yang dinilai dapat merepresentasikan kinerja jalan kota, diketahui bahwa nilai VCR rata-rata sebesar 0,66. Nilai ini termasuk kedalam tingkat pelayanan jalan/*level of service* (LOS) kategori C. Kategori C hasil penghitungan ini memiliki arti Adapun perbandingan kondisi LOS Kota Cimahi dari tahun 2017 s.d. tahun 2022 disampaikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.41
Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS) di Kota Cimahi Tahun 2017-2022

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Level of Service (LOS) Kota Cimahi	D	C	C	C	C	C

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2022, diolah.

Kondisi LOS di Kota Cimahi dipengaruhi juga oleh Rasio antara Volume Lalu Lintas dan Kapasitas Jalan, apabila semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kota Cimahi, dan tidak diimbangi dengan penambahan

kapasitas jalan, maka nilai VCR setiap ruas jalan akan semakin rendah, tentu hal tersebut akan mempengaruhi nilai LOS di Kota Cimahi. Saat ini pada beberapa ruas jalan di Kota Cimahi masih banyak yang belum didukung dengan fasilitas perlengkapan jalan seperti trotoar, drainase jalan, jalur sepeda dan fasilitas penyandang cacat, sehingga mempengaruhi juga. Adapun, kondisi VCR di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.42
Volume Capacity Ratio (VCR) di Kota Cimahi Tahun 2017-2022

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Volume Capacity Ratio	0,79	0,59	0,64	0,72	0,66	0,64

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2022, diolah.

Dalam mempertahankan capaian atau meningkatkan nilai LOS dan nilai VCR, maka diperlukan upaya melalui penambahan kapasitas ruas jalan, persimpangan jalan (radius tikung), perlintasan kereta api tidak sebidang, menghitung tingkat pelayanan setiap ruas jalan, melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan Sistem Satu Arah (SSA), penanganan hambatan samping, serta diperlukan adanya perencanaan transportasi massal (*Urban Mobility Plan*) Metropolitan Bandung Raya di Kawasan Cekungan Bandung, yang disusun atau berada di bawah otoritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga diharapkan dapat terjadi penurunan titik kemacetan.

2) Rasio Konektivitas Kota

Sesuai kondisi geografis, Kota Cimahi tidak memiliki angkutan sungai danau dan penyeberangan, namun di Kota Cimahi hanya terdapat angkutan jalan dengan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, hanya mengelola angkutan umum perkotaan trayek dalam kota.

Berikut disampaikan tabel konektifitas jaringan angkutan yang dijadikan dasar perhitungan rasio konektivitas kota, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.43
Rasio Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan di Kota Cimahi Tahun 2022

NO	TRAYEK ANGKUTAN DALAM KOTA	JARAK	REALISASI	BOBOT (%)
1	Pasar Antri – Leuwigajah - Cimindi	7,5	100	15
2	Pasar Antri - Cibeber Via Baros	8,7	99	40
3	Pasar Antri - Cibeber Via Contong	6	76	30
4	Citeureup – Term. Cimindi Via Pemkot	9	15	15
J U M L A H			275	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2022, diolah.

Berdasarkan hasil kajian jaringan trayek angkutan umum dalam kota (*rerouting*) pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi, telah dihasilkan kebutuhan jaringan trayek angkutan umum perkotaan yaitu : trayek Pasar Antri – Leuwigajah - Cimindi; Trayek Pasar Antri – Cibeber via Baros; Trayek Pasar Antri – Cibeber via Contong, Trayek Citeureup – Terminal Cimindi Via Pemkot; dan Trayek Pasar Antri – Citeureup via Padasuka. Namun, dari 5 (lima) kebutuhan trayek saat ini, baru terealisasi sebanyak 4 (empat) trayek, untuk merealisasikan 5 (lima) trayek masih diperlukan waktu beberapa tahun ke depan, yang didahului dengan sosialisasi dan kajian lebih lanjut. Adapun, dengan kondisi bobot trayek di Kota Cimahi yang berada pada atau lintas dengan bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), maka bobotnya adalah 0,8. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus jaringan trayek angkutan perkotaan yang sudah terlayani dibanding dengan data usulan kebutuhan jaringan trayek angkutan perkotaan maka Rasio Konektivitas Kota Cimahi

pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.44
Rasio Konektivitas Kota Cimahi Tahun 2019-2022

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022
Rasio Konektivitas	0,64	0,64	0,64	0,64

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2022, diolah.

3) Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Kondisi fasilitas terminal penumpang di Kota Cimahi hanya melayani penumpang angkutan jalan yang dilayani oleh 3 (tiga) terminal tipe C, berikut ini dijelaskan terminal yang melayani beberapa rute trayek, sebagai berikut :

Tabel 2.45
Fasilitas Terminal Penumpang Di Kota Cimahi

No	Terminal	Rute Trayek
1	Terminal Pasar Antri Baru	Pasar Antri – Cibeber Via Contong Pasar Antri – Cibeber Via Baros Pasar Antri – Cipatik – Soreang Pasar Antri – Cangkorah Pasar Antri - Parongpong
2	Terminal Cimindi	Cimindi – Cipatik Cimindi-Leuwigajah – Pasar Antri Cimindi – MargaAsih Via Cibaligo Melong Asih – Elang
3	Terminal Pasar Atas	Pasar Atas – Cisarua Pasar Atas – Cidahu – Pakuhaji Pasar Atas – Puri Permata – Cilame Cimindi - Citeureup

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2022, diolah.

4) Pelayanan Uji Berkala di Kota Cimahi

Dalam rangka memenuhi standar keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan yang berlaku, Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah memiliki Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dengan akreditasi B, dan menerima pelayanan kendaraan yang wajib baik kendaraan

berdomisili di Kota Cimahi dan domisili di luar wilayah Kota Cimahi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, diatur jenis kendaraan yang dilakukan pengujian. Berikut disampaikan jumlah kendaraan wajib uji serta jumlah kendaraan yang diuji pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.46
Jumlah Kendaraan Wajib Tahun 2021 di Kota Cimahi

Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Kereta Tempelan	Kereta Gandengan	Kendaraan Khusus	Jumlah
1.686	410	6.908	12	9.267	141	9.167

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2021, diolah.

Tabel 2.47
Kendaraan Yang Diuji UPTD Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2022

Bulan	Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Mobil Khusus	Total
Januari	45	17	474	16	552
Februari	73	25	565	10	673
Maret	77	20	613	16	744
April	31	9	494	8	542
Mei	30	16	462	10	518
Juni	69	24	661	15	769
Juli	55	18	491	11	575
Agustus	96	24	655	16	791
September	76	17	599	15	707
Oktober	43	12	507	9	571
November	41	12	411	8	472
Desember	65	19	538	16	638
Jumlah	701	213	6.488	150	7.552

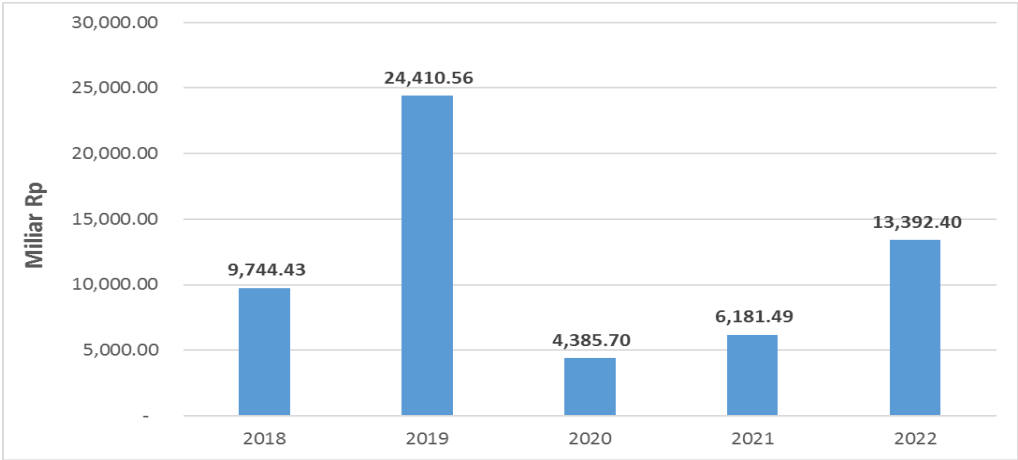
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2022, diolah.

j. Urusan Penanaman Modal

Sektor usaha dengan kontribusi terbesar pada PDRB Kota Cimahi adalah Industri pengolahan, perdagangan,

konstruksi, informasi dan komunikasi serta transportasi dan pergudangan. Sektor-sektor tersebut berpotensi untuk meningkatkan investasi di Kota Cimahi.

Berdasarkan data yang tersedia diketahui bahwa Realisasi Investasi (PMA/PMDN) di Kota Cimahi pada tahun 2018 mencapai Rp. 9,74 triliun, dan mengalami peningkatan hingga puncaknya pada tahun 2019 menjadi Rp. 24,41 triliun. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis di saat pandemi mulai berlangsung, yakni hanya mencapai hampir Rp 4,9 triliun dan naik menjadi sekitar Rp 6,18 triliun pada tahun 2021. Di tahun 2022, terjadi lonjakan yang signifikan dimana realisasi investasi mencapai Rp 13,39 triliun atau sekitar 186% dari target tahun 2022 yang sebesar Rp 7,17 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa situasi perekonomian Kota Cimahi tahun 2022 telah mulai pulih dan masyarakat sudah mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru pandemi covid.

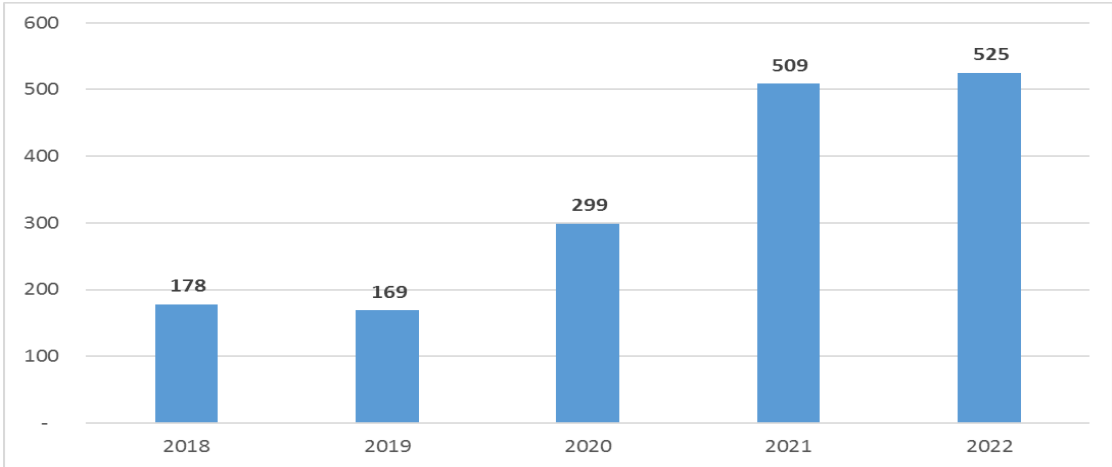


Sumber : DPMPTSP Kota Cimahi, 2023 diolah

Gambar 2.54 Realisasi Investasi (PMA/PMDN) di Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Adapun Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada tahun 2018 yaitu sebesar 178 perusahaan dan meningkat secara drastis

pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 299 perusahaan dan 509 perusahaan dan menjadi 525 perusahaan di tahun 2022. Peningkatan tersebut juga karena UMKM pun wajib untuk menyampaikan LKPM. Selengkapnya perkembangan jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM di Kota Cimahi Tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber : DPMPTSP Kota Cimahi, 2022, diolah

Gambar 2. 55 Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM di Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Diharapkan pelayanan izin usaha akan menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan pelayanan terintegrasi di MPP (Mall Pelayanan Publik) dengan menggunakan sistem informasi yang baik sehingga bisa lebih cepat dan meminimalkan interaksi langsung dengan pemohon perizinan.

k. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan

kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, serta mempererat persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pelayanan/pembangunan kepemudaan difokuskan pada upaya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Hal ini selaras dengan siklus Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dimana investasi kepada para pemuda (usia 16- 30 tahun), dengan jumlah 64,19 juta jiwa Tahun 2019 (Statistik Pemuda, BPS), dititikberatkan pada sektor pendidikan/keterampilan, kesehatan, pembangunan mental/karakter (integritas, etos kerja, dan gotong-royong), serta kepemimpinan dan kepeloporan sebagai bekal untuk fase selanjutnya (bekerja dan berkeluarga). Investasi pada peningkatan kualitas pemuda tersebut merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan fisik-materil dan mental-spiritual masyarakat Kota Cimahi, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan daerah dan nasional. Agar peran pemuda lebih optimal dan berkualitas dalam pembangunan di Kota Cimahi, maka pemuda harus berahlak mulia, sehat, Tangguh, cerdas, mandiri dan professional.

Perkembangan aktivitas kepemudaan dan olahraga di Kota Cimahi hingga saat ini cukup dinamis. Persentase Pemuda yang berperan serta dalam pembangunan selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022

mengalami peningkatan walaupun sedikit. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.48
Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan di Kota Cimahi Tahun 2019-2022

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022
Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	10%	11%	11.20%	11,30%

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2022, diolah

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kenaikan per tahun hanya 1 persen untuk tahun 2020 dan 1,20 persen untuk tahun 2021 serta naik 0,10 persen di tahun 2022. Ini menandakan bahwa peran serta pemuda perlu mendapatkan perhatian lebih agar dapat berperan lebih banyak di tahun tahun berikutnya.

Terkait dengan urusan kepemudaan, antusiasme kepemudaan di Kota Cimahi cukup baik, hal ini dapat dilihat dilihat dengan semakin meningkatnya Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif yaitu sekitar 70% pada tahun 2022, yang semula hanya 52% di tahun 2018. Sudah ada terlihat adanya upaya dari OPD terkait untuk memperluas peran aktif organisasi kepemudaan. Perlu dorongan lebih agar kegiatan khusus untuk pemberdayaan organisasi kepemudaan dapat diperbanyak dan ditingkatkan kualitas kegiatannya.

Tabel 2.49
Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif di Kota Cimahi Tahun 2018-2022

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	52%	55%	55%	60%	70%

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2022, diolah

Selanjutnya untuk cakupan persentase masyarakat yang aktif berolahraga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebesar 44,94% dan pada tahun 2022 naik menjadi 46,5%. Peningkatan yang masih belum signifikan disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana olah raga. Masih perlu dorongan lebih untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam berolah raga seperti percepatan perbaikan Stadion Sangkuriang, Cibodas, perbaikan dan penambahan sarana olah raga di instansi pendidikan, perluasan kegiatan senam dan lain sebagainya.

Perkembangan masyarakat yang aktif berolah raga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.50
Persentase Masyarakat Yang Aktif Berolahraga Tahun 2018-2022

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	44,94%	45,5%	45,62%	46%	46,5%

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2022, diolah

Di Kota Cimahi belum terdapat tempat yang bisa digunakan untuk menampung banyak orang didalam satu kawasan yang aktif, khususnya untuk kaum muda di Kota Cimahi. Keberadaan sarana olahraga dan sanggar seni yang ada di Kota Cimahi ini hanya berupa sarana dengan skala kecil dimana fasilitas olahraga dan seni memiliki tujuan untuk rekreasi dan tempat latihan, sehingga tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan event-event besar seperti pertandingan olahraga dan pertunjukan seni skala nasional.

Untuk Sarana dan Prasarana Olahraga yang ada di Kota Cimahi sebagai berikut :

Tabel 2.51
Data Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kota Cimahi

No	Uraian	Jumlah (Buah)	Kondisi
1	Lapangan Bola Kaki dilengkapi lintasan Atletik	6	Baik
2	Lapangan Basket	15	Baik
3	Lapangan Bola Volly	50	Baik
4	Lapangan Tennis	19	Baik
5	Kolam Renang	12	Baik
6	Lapangan/Gor Bulutangkis	42	Baik
7	Lapangan Futsal	20	Baik
8	Meja tenis Meja	41	Baik
9	Lapangan Bola/Sepak Bola	7	Baik
10	Lapangan Driving Golf	1	Baik
11	Fitness	3	Baik
12	Wall Climbing	2	Baik
13	Lapangan/ Gor Serbaguna	11	Baik

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi 2022, diolah
 Keterangan : Fasilitas sarana dan prasarana dikelola oleh berbagai stakeholder yaitu pemerintah, TNI/POLRI, Swasta, Masyarakat, dan sekolah.

Tabel 2.52
Data Sarana Olahraga Milik PEMKOT Cimahi

No	Uraian	Kondisi	Keterangan
1	Stadion Sangkuriang	Rusak Berat (sedang proses perbaikan)	PEMKOT (Bagian Aset)
2	Gor Sangkuriang	Rusak Ringan	PEMKOT (Bagian Aset)
3	Lapangan Poral	Baik	PEMKOT (Bagian Aset)
4	Lapangan Cibaligo	Rusak	PEMKOT (Bagian Aset)

Sumber :Profil Disbudparpora Kota Cimahi 2022

Dilihat dari tabel sarana dan prasarana di atas Kota Cimahi memiliki sarana olahraga yang cukup banyak, tetapi yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi hanya 4 sarana dan itupun kondisi 3 sarana dinyatakan rusak. Sebagian besar sarana olahraga adalah milik TNI, jadi akibat kurangnya sarana olahraga yang dimiliki Pemkot Cimahi kurang setiap ada event olahraga tingkat Kota maupun provinsi Dinas Pemuda dan olahraga harus

menyewa sarana olahraga kepada pihak TNI sehingga biaya untuk sewa tempat membengkak.

Oleh karena itu untuk peningkatan sarana prasarana olahraga yang ada di Kota Cimahi perlu adanya pembangunan ataupun revitalisasi. Salah satu aset yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi yaitu stadion sangkuriang kondisinya sekarang masih terus diupayakan di perbaiki atau direvitalisasi secara bertahap.

Dari permasalahan mengenai keterbatasan Lapangan Olahraga di Kota Cimahi pada Tahun 2016 Lapangan Krida Cimahi yang selalu digunakan oleh masyarakat sekitar untuk berolahraga khususnya olahraga sepakbola yang berlokasi di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan yang merupakan satu dari sedikitnya lapangan olahraga yang dimiliki Kota Cimahi dialihfungsikan menjadi Cimahi Technopark yang didasarkan pada hasil kajian dan rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Hal tersebut semakin mengurangi jumlah Lapangan Olahraga yang ada di Kota Cimahi. Sebagai konsekuensi dari kebijakan untuk mengalihfungsikan Lapangan Krida Cimahi menjadi Cimahi *Technopark*, Pemerintah Kota Cimahi dituntut untuk segera mendapatkan lahan pengganti untuk Lapangan Krida tersebut. Hal itu merupakan syarat dari terbitnya rekomendasi dari Kemenpora RI untuk pengalihfungsian tersebut selain dari desakan masyarakat sekitar yaitu masyarakat Kelurahan Utama yang menuntut tersedianya lapangan olahraga yang sebelumnya biasa dipakai untuk kegiatan olahraga.

Pada tahun 2022 telah dibangun juga Pussenarhanud *Sport Center* Cimahi (PSCC) yang berlokasi di Mapussenarhanud, Cimahi. Adapun *Sport Center* ini menyediakan berbagai fasilitas olahraga, seperti ruang fitness, ruang senam, tenis meja, jogging track, lapangan

bulutangkis, futsal, basket, tenis, voli, sepakbola dan lapangan tembak. Dengan fasilitas yang modern dan representatif ini diharapkan dapat digunakan oleh Prajurit dan keluarganya, sekaligus dimanfaatkan oleh masyarakat Cimahi sebagai taman rekreasi olahraga (*sport tourism*). Manfaatkan sarana olahraga untuk meningkatkan prestasi di ajang nasional maupun internasional, termasuk menjaga generasi muda agar terhindar dari kontaminasi hal-hal negatif.

1. Urusan Komunikasi dan Informasi

Pembangunan komunikasi dan informasi diterapkan pada jaringan dan Sistem Informasi pada beberapa Perangkat Daerah, yaitu pembangunan jaringan komunikasi informasi berbasis internet, salah satunya adalah pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk pelayanan kependudukan, pembangunan jaringan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Dinas Kesehatan dan Puskesmas, serta tersedianya Gedung *Baros Information Technology Creative* (BITC) sebagai sentral pengembangan pengelolaan kawasan kluster industri telematika.

Pembangunan sistem informasi perlu ditingkatkan dan diperluas, serta diarahkan pada pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi berbasis IT, diantaranya melalui kegiatan pengembangan dan operasi website *www.cimahikota.go.id*, pesan penduduk (pesduk), siaran radio, televisi, jumpa pers, *release* berita, serta pameran potensi daerah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan citra kota Cimahi.

Pemerintah Kota Cimahi telah mengembangkan *e-Government* Kota Cimahi yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kota Cimahi. Pembangunan Infrastruktur Jaringan yang menghubungkan seluruh perangkat daerah menggunakan teknologi *fiber optic* serta penyediaan akses internet dengan *bandwith* yang cukup memadai guna menunjang pelayanan berbasis elektronik baik di lingkungan Internal Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi maupun perangkat daerah yang ada di luar Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi (DPRD, RSUD Cibabat, 13 Puskesmas dan 2 Puskesmas pembantu, 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan) serta pembuatan Aplikasi *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi meliputi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelayanan Publik dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 2.53
Cakupan Pengembangan *E-Government* Daerah di Kota Cimahi Tahun 2017-2022

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan pengembangan <i>e-Government</i> daerah	10	58	100	40%	91%	91%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Cakupan pengembangan *e-Government* daerah di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 10% dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2018 menjadi 58%. Di Tahun 2019 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 100%. Namun, pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan menjadi 40% disebabkan adanya penurunan anggaran akibat *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga penyelenggaraan program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pada Tahun 2021 dan 2022, meskipun belum mencapai 100%, namun cakupan pengembangan *e-Government* daerah kembali meningkat menjadi 91%.

Selanjutnya untuk Cakupan layanan informasi pembangunan daerah di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 angkanya sebesar 40% dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 83%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 50%. Namun, di Tahun 2020 dan 2021 kembali terjadi peningkatan hingga mencapai 55% dan 60%.

Melalui layanan informasi pembangunan daerah berupaya untuk menyampaikan informasi pembangunan daerah yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam upaya mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan kepada seluruh masyarakat secara menyeluruh. Agar informasi pembangunan daerah tersampaikan secara efektif kepada masyarakat dan seluruh *stakeholder*, Pemerintah Kota Cimahi menggunakan berbagai media sebagai kanal penyampaian informasi antara lain melalui media elektronik, media cetak, media sosial dan *website* resmi milik Pemerintah Kota Cimahi.

Tabel 2.54
Cakupan Layanan Informasi Pembangunan Daerah di Kota Cimahi Tahun 2017-2022

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan layanan informasi pembangunan daerah	40	83	50	55%	60%	60%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2022, diolah

Selanjutnya, untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Cimahi pada tahun 2019 mencapai 3,16 dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 3,30 namun pada Tahun 2021 Indeks SPBE mengalami penurunan menjadi 2,75. Tahun 2022 Pemerintah Kota Cimahi berupaya untuk meningkatkan Indeks SPBE dengan berbagai upaya yang dapat

dilakukan, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menyusun Arsitektur SPBE, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Arsitektur SPBE Nasional sebagai pedoman dalam menyusun Arsitektur SPBE Daerah. Keberhasilan penerapan SPBE Daerah dalam penyelenggaraan alur hidup pemerintahan perlu didukung oleh arsitektur yang terperinci sehingga dapat menjadi acuan pengembangan SPBE dalam institusi. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi antara Proses bisnis, Data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengembangan dari keenam arsitektur tersebut didukung oleh Manajemen yang dilaksanakan dengan baik dan Tata kelola yang disusun secara rinci dan terarah. Strategi ini telah berhasil meningkatkan Indeks SPBE Tahun 2022 menjadi 3,09 Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.55
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Cimahi
Tahun 2018-2022

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,20	3,16	3.30	2,75	3,09

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2022, diolah

Dalam bidang komunikasi dan informasi masih terdapat kendala dalam membangun sistem komunikasi dan informasi, antara lain :

- 1) Membangun sistem komunikasi dan informasi dengan lebih terintegrasi sehingga tidak bersifat parsial;
- 2) Masih perlu ditingkatkannya kuantitas dan kualitas SDM di bidang teknologi informasi; dan

- 3) Unit organisasi pendukung yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan, penyediaan dan pengolahan transaksi informasi perlu ditingkatkan agar berperan lebih optimal.

m. Urusan Statistik

Persentase ketersediaan data statistik daerah Kota Cimahi pada Tahun 2019 sebesar 74,07 persen, sedangkan mulai tahun 2020 sampai dengan 2022, ketersediaan data statistik daerah semakin meningkat dari mulai 75%, 80%, dan 85%.

Tabel 2.56
Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral di Kota Cimahi Tahun 2018-2022

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	10	74,07	75	80	85

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2022, diolah

Ketersediaan data statistik sektoral Kota Cimahi secara terus menerus dilakukan pemutakhiran oleh seluruh perangkat daerah sebagai produsen data. Dalam rangka Desiminasi Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Satu Data pada tahun 2022 dilakukan replikasi open data, satu data serta web administrasi satu data Provinsi Jawa Barat sebagai upaya meningkatkan ketersediaan dan kualitas data yaitu jumlah dataset yang tersedia di Satu Data, Satu Peta, dan atau Open Data Jabar.

Ketersediaan *Platform* bagi pakai data (Ekosistem Data Jabar) di Jawa Barat, *Open* Data Jabar bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dari tata kelola data pemerintahan dan ketersediaan akses data yang akurat bagi publik dengan mudah dan cepat, Satu Data Jabar

bertujuan untuk mendukung percepatan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang lebih akurat.

n. Urusan Persandian

Keamanan Sistem Informasi sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam menjamin ketepatan dan keakuratan penyampaian informasi. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem yang berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, *online*, dan *real time*, SIPD menjadi penting karena merupakan media akuntabilitas publik yang memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam mengevaluasi kinerja, program pembangunan, serta mengevaluasi capaian-capaian pembangunan. Agar kinerja layanan informasi pembangunan daerah di Kota Cimahi menjadi lebih optimal maka perlu melakukan peningkatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dapat terlaksana dengan ditunjang oleh penerapan kebijakan peningkatan teknologi dan informasi di setiap instansi pemerintah, peningkatan keamanan informasi serta pengelolaan jaringan komunikasi. Dengan adanya sistem informasi yang dibangun dan dijalankan dengan tepat maka akan memberikan sebuah gambaran kinerja organisasi yang akurat bagi penggunaanya dalam pengambilan keputusan.

Tabel 2.57
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	20	30	35	35	35

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2022, diolah

Dalam upaya meningkatkan kemandirian informasi pada pemerintah Kota Cimahi selama tahun 2022 dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) *Penetration test* : merupakan evaluasi keamanan dari sistem dan jaringan komputer untuk mengetahui kelemahan dari sistem tersebut sehingga dapat diidentifikasi celah keamanan suatu aplikasi, memperkirakan kerugian yang mungkin timbul dari terjadinya serangan;
- 2) Fasilitasi penerbitan sertifikat elektronik/tanda tangan elektronik;
- 3) Pengamanan sinyal bagi kegiatan yang bersifat strategis; dan
- 4) Fasilitasi surat elektronik resmi Pemerintah Kota Cimahi (@cimahikota.go.id).

o. Urusan Kebudayaan

Cimahi adalah sebuah daerah yang unik karena masyarakat yang hidup di daerah ini sangat majemuk. Kemajemukan masyarakat Cimahi disebabkan oleh beragamnya suku bangsa yang hidup dan menetap di daerah ini. Beragam suku bangsa yang ada di Cimahi yang sekaligus memperlihatkan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia menjadi ciri tersendiri bagi Cimahi. Cimahi pun dapat dianggap sebagai “Miniatur Indonesia”.

Keberagaman suku bangsa yang ada di Cimahi menyebabkan munculnya kebudayaan dan kesenian yang beragam pula. Sebagai “Tuan Rumah”, kebudayaan dan kesenian Sunda tetap dilestarikan dan dikembangkan. Pementasan budaya dan kesenian bahkan telah dipertunjukkan sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Sebagai contoh, kesenian urang Sunda yang terkenal yang ada di Cimahi, antara lain Tari Jaipong, Sisingaan,

angklung, calung, kecapi suling, degung, tarawangsa, longser, kliningan, karawitan dan pencak silat.

Selain jenis kesenian tradisional sebagaimana telah dikemukakan di atas, ada juga kesenian-kesenian baru, seperti teater, kabaret, seni peran, perfilman, sastra, modeling, seni gambar atau lukis, seni patung, seni rias, nasyid, qasidah danacapela.

Untuk menjaga kelestarian kebudayaan yang ada di Kota Cimahi maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah agar kebudayaan yang ada dapat senantiasa dikembangkan dan diwariskan ke generasi berikutnya. Pengembangan kebudayaan di Kota Cimahi menemui masalah yang cukup pelik diantaranya menyangkut sarana atau gedung dan ruang publik sebagai wadah bagi seniman-seniman di Kota Cimahi untuk mengapresiasi karya seninya.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi juga fokus dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan, dengan persentase pada tahun 2019 baru mencapai 40,98%, tahun 2021 meningkat menjadi 83% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 90%. Ada pun perkembangan persentase pelestarian dan pengembangan kebudayaan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.58
Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan di Kota Cimahi Tahun 2018-2022

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan	40,98 %	55,56 %	83 %	90%	40,98 %

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2022, diolah

Perkembangan Perkembangan jumlah group kesenian di tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu berkurang sebanyak 27 dikarenakan kurangnya regenerasi dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Kota Cimahi masih belum memiliki gedung kesenian karena belum tersedianya lahan untuk pembangunan Gedung Kesenian disebabkan masih terbatasnya kemampuan APBD. Jumlah Klub olah raga masih belum bertambah sejak tahun 2020. Pengembangan klub olah raga masih belum optimal sehingga calon atlet-atlet potensial banyak yang berpindah ke Kota lain. Minimnya penyelenggaraan kejuaraan lokal berpengaruh besar terhadap perkembangan klub olah raga. Gedung olahraga di Kota Cimahi mayoritas dimiliki oleh pihak swasta dan TNI. Masih banyak yang belum memenuhi standar nasional.

Perkembangan Jumlah Group kesenian, Gedung Kesenian, Klub Olahraga dan Jumlah Gedung Olahraga dari Mulai tahun 2018 sampai 2022 dapat terlihat sebagai berikut :

Tabel 2.59
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga di Kota Cimahi

	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Group Kesenian	174	175	185	212	185
Jumlah gedung kesenian	NA	NA	NA	NA	NA
Jumlah klub olahraga	202	210	219	219	219
Jumlah gedung olahraga	NA	NA	NA	NA	259

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2022, diolah

Kota Cimahi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak warisan budaya dan bangunan bersejarah di tanah Pasundan. Isu pelestarian

budaya sudah menjadi amanat bangsa sejak dulu kala dan terus berjalan seiring dengan upaya kemanusiaan untuk melindungi sejarah. Budaya sendiri memiliki arti dan makna yang luas budaya bisa mencakup tradisi, moral, keyakinan, seni hingga bangunan bersejarah yang memiliki nilai-nilai tinggi di masa Lampau.

Setelah bangunan Rumah Sakit Dustira dan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Militer II Cimahi (Penjara Poncol) ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Cimahi pada Juni 2021 lalu, kini Bangunan Gedung Sudirman (*The Historich*) dan Stasiun Kereta Api Cimahi resmi ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Cimahi pada tahun 2022 ini. Ditetapkannya bangunan-bangunan bersejarah di Kota Cimahi menjadi cagar budaya merupakan upaya Pemerintah Daerah Kota Cimahi, khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi dengan kerja sama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dalam melaksanakan Program Pengembangan Kebudayaan, kegiatan pengelolaan kebudayaan.

Kondisi bangunan-bangunan tua bersejarah yang kini masih berdiri megah dan masih difungsikan dalam melayani masyarakat seperti Rumah Sakit Dustira, *The Historich*, Stasiun Kereta Api Tjimahi, Gereja Santo Ignatius, dan fisik bangunan lainnya dengan gaya arsitekturnya yang unik, bahkan di Kota Cimahi pun terdapat makam para pemimpin dan tentara Hindia Belanda yang disemayamkan di Leuwigajah yang kita kenal sebagai “Kerkhof”.

Selain Gedung bersejarah Kota Cimahi juga memiliki wisata adat, atau yang dikenal dengan Kampung adat Cirendeui, Kampung adat ini terletak di sebuah lembah yang diapit Gunung Kunci, Gunung Cimenteng, dan Gunung Gajahlangu Kota Cimahi. Masyarakat adat

Kampung Cireundeu adalah bagian dari Sunda Wiwitan yang tersebar di daerah Cigugur-Kuningan-Cirebon. Kesemua mereka sebagian besar memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan sampai sekarang. Agama leluhur yang mereka anggap sebagai sebuah agama besar. Dengan ajaran-arajan peduli terhadap alam dan sopan santun.

Masyarakat adat Cireundeu memandang agama sebagai sebuah ageman (pegangan). Menjadi tuntunan hidup, keselamatan, yang tidak bisa lepas dari pemaknaan budaya. Artinya ketika seseorang memeluk agama, maka ia sedang menjalankan dan memaknai budaya yang melekat pada agama yang dianut.

Pelestarian kebudayaan Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu, kebudayaan juga memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Keberagaman kebudayaan yang ada di daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Sebagai gambaran umum data cagar budaya yang ada di Kota Cimahi yang telah terverifikasi dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.60
Data Cagar Budaya Yang Terverifikasi Hingga Tahun 2022

NO	ID OBJEK	NAMA OBJEK	LOKASI OBJEK	KATEGORI
1	PO2019041500002	GEDUNG RIO X.NTER	Jl. Pabrik Aci, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
2	PO2019041000016	GEDUNG THE HISTORICH	Jl. Gatot Subroto No. 19 Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
3	PO2020071500001	GEREJA IMMANUEL	Jalan Pasir Kumeli 149 A Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
4	PO2019041100482	GEREJA SANTO IGNATIUS	Jl. Raya Baros No. 8, Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan

NO	ID OBJEK	NAMA OBJEK	LOKASI OBJEK	KATEGORI
5	PO2020090300003	HOTEL TJIMAH	Jl. Jend. H. Amir Machmud No.465 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
6	PO2019041600003	KOLAM RENANG BREAKLEUS	Jl. Sukimun RT 1 RW 4, Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
7	PO2020072700002	KOLAM RENANG KATAK RIANG	Jl. Pasir Kumeli No. 39 Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
8	PO2019052900058	LOJI	Jl. Alun-Alun Timur No. 634 Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
9	PO2020091600004	MAKAM EMBAH NURKARIM	Jl. Cigugur Tengah RT 02 RW 05 Kota Cimahi, Jawa Barat	Situs
10	PO2020090400001	MAKAM EMBAH TUMPANG	Jl. Gandawijaya, Pasar Antri, Kota Cimahi, Jawa Barat	Situs
11	PO2019111100001	MAKAM KEHORMATAN BELANDA	Jl. Kerkhof Gg. Kurba Miharja Leuwigajah, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
12	PO2019082100008	MASJID AGUNG CIMAHI	Jl. Kaum No. 3, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
13	PO2019053100010	MASJID USMAN DHOMIRI	Jl. KH Rd Usman Dhomiri No 133 Rt 04 Rw 08, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
14	PO2019041100637	PENJARA PONCOL	Jl. Poncol Selatan No. 24, Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
15	PO202009300002	PESAWAT DAKOTA	Jl. Gatot Subroto No. 6, Baros Kota Cimahi, Jawa Barat	Benda
16	PO2020071300003	RUMAH KEDIAMAN AMIR MACHMUD	Jl. Ibu Sangki RT 3 RW 13, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
17	PO2019053100011	RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	Jl. Sukimun Rt 03 Rw 04, Baros, Jawa Barat	Bangunan
18	PO2020072700003	RUMAH PETINGGI BELANDA	Jl. Sriwijaya No 11, KarangMekar, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
19	PO2015061200050	RUMAH SAKIT DUSTIRA	Jl. Dr Dustira No. 1, Baros, Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
20	PO2019082100014	RUMAH VAN BLOMMEISTEIN	Jl. Jen H Amir Machmud No 89,	Bangunan

NO	ID OBJEK	NAMA OBJEK	LOKASI OBJEK	KATEGORI
			Cibeureum, Kota Cimahi, Jawa Barat	
21	PO2020091700001	SDN KARANG MEKAR MANDIRI 1	Jl. Jend Amir Machmud No.505, Karang Mekar, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
22	PO2020100600001	SDN BAROS MANDIRI 4	Jl. Baros No 06 Rt 01 Rw 15, Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan
23	PO2020072700001	SMPN 1 CIMAHI	Jl. Rd EmbangArtawidjaja, KarangMekar, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
24	PO2020072400002	SMPN 2 CIMAHI	Jl. Sudirman No 152, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
25	PO2019041100637	STASIUN CIMAHI	Jl. Stasiun No 1, Kota Cimahi Jawa Barat	Bangunan

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2022, diolah

p. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Jenis perpustakaan terdiri atas perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Urusan perpustakaan di Kota Cimahi sendiri, secara khusus merupakan pembina dari seluruh perpustakaan di Wilayah Kota Cimahi untuk semua jenis perpustakaan.

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain. Pemerintah Kota Cimahi bertanggung jawab terhadap pembinaan seluruh perpustakaan di Kota Cimahi yang pada Tahun 2022 jumlahnya diperkirakan sebanyak 200 perpustakaan.

Perpustakaan sebagai salah satu sarana penyedia kepustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, perlu menjadi perhatian masyarakat Indonesia menjadi salah satu negara dengan minat baca yang rendah. Oleh karena itu, melalui perpustakaan diharapkan tingkat literasi membaca masyarakat khususnya di Kota Cimahi dapat meningkat. Dari data yang tersedia, jumlah pengunjung perpustakaan umum di Kota Cimahi dari Tahun 2017-2022 terus meningkat yaitu 23.769 orang di tahun 2017 bertambah menjadi 29.263 orang di Tahun 2022.

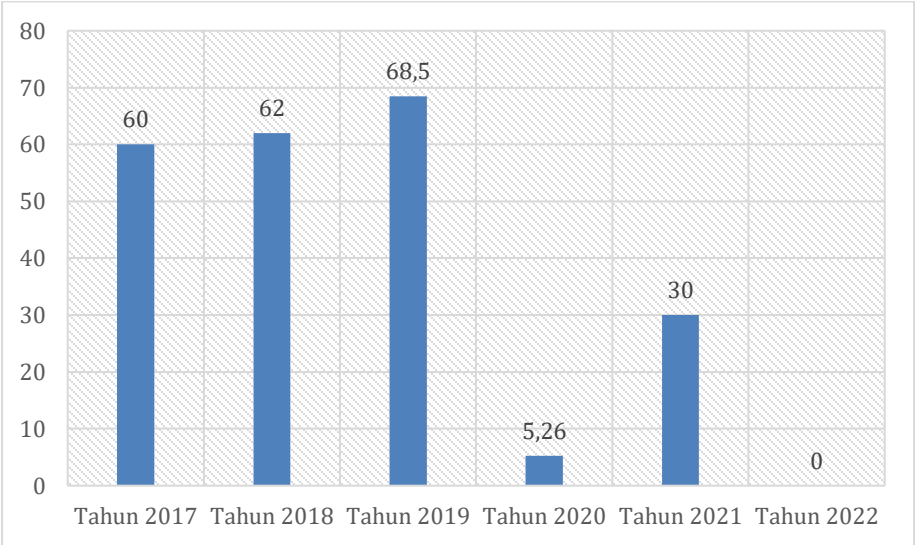
Tabel 2.61
Jumlah pengunjung perpustakaan Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	23.769	22.233	39.305	6.131	28.835	29.263

Untuk Persentase sarana baca masyarakat yang aktif juga dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 angkanya mencapai 60%, dan pada tahun 2019 naik menjadi 68,5%. Namun untuk Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 5,26% (dengan target 0%) dan

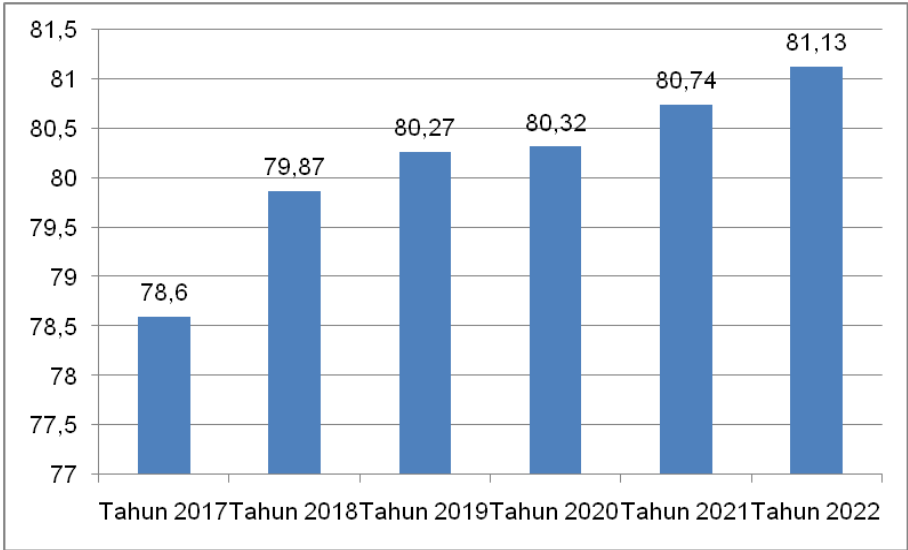
naik lagi di Tahun 2021 menjadi 30%. Pada Tahun 2022, kembali mengalami penurunan karena di tahun ini belum ada sarana baca masyarakat yang aktif di Kota Cimahi. Penurunan ini salah satu penyebabnya adalah adanya wabah Covid-19 yang membatasi lokasi-lokasi tempat berkumpul masyarakat, selain juga disebabkan oleh adanya faktor pendanaan. Meskipun sarana baca masyarakat Kota Cimahi pada Tahun 2022 belum ada yang aktif, namun dari data jumlah pengunjung perpustakaan terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya *e-library* yang tersedia, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses perpustakaan tanpa harus mengunjungi lokasi sarana baca, adanya layanan perpustakaan keliling yang mulai aktif Kembali, serta adanya POCADI (Pojok Baca Difital) yang berlokasi di Cimahi *Technopark*.

Data juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota dari tahun 2017 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan, yang semula di 2017 tercapai 78,6% menjadi 81,13% di Tahun 2022. Peningkatan tingkat kepuasan pengunjung merupakan salah satu indikator semakin membaiknya pelayanan perpustakaan di Kota Cimahi. Selanjutnya, di dalam pengembangan perpustakaan terdapat beberapa komponen yang harus ditindaklanjuti antara lain peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sistem layanan, penyempurnaan koleksi, dan fasilitas pendukung termasuk pengembangan optimalisasi pemanfaatan layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (*e-library*).



Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Cimahi, 2022, diolah

Gambar 2.56 Persentase Sarana Baca Masyarakat Yang Aktif Di Kota Cimahi Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi, 2022, diolah

Gambar 2. 57 Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Umum Kota di Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Di dalam penyempurnaan koleksi, Kota Cimahi telah memiliki jumlah koleksi buku sebanyak 30.693 di Tahun 2022, artinya telah ada penambahan sekitar 2.335 eksemplar, jika dibandingkan dengan tahun 2021, yang terdiri dari 456 buku fisik dan 1.879 buku elektronik (e-book). Adapun jumlah koleksi judul buku perpustakaan terus mengalami peningkatan sehingga mencapai 16.009 judul buku di Tahun 2022. Di dalam melaksanakan

optimalisasi pemanfaatan layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (*e-library*), perpustakaan umum di Kota Cimahi telah didukung dengan sumber daya manusia yang terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis, namun sampai saat ini, Kota Cimahi masih belum memiliki penilai yang memiliki sertifikat pendataan, Data mengenai Sumber Daya Manusia untuk pelayanan perpustakaan juga masih belum termasuk perpustakaan-perpustakaan lain yang dibina oleh Perpustakaan Cimahi.

Tabel 2.62
Jumlah Koleksi Buku dan Judul Buku Perpustakaan Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koleksi buku perpustakaan	21.965	25.876	27.958	27.983	28.358	30.693
2	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	12.841	14.364	15.185	15.193	15.318	16.009

Tabel 2.63
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pustakawan	2	2	2	3	3	4
2	Jumlah Tenaga Teknis	5	5	6	5	6	4
3	Jumlah Penilai Yang Memiliki Sertifikat	-	-	-	-	-	-

q. Urusan Kearsipan

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Cimahi pada Tahun 2018 hanya 8% dan pada tahun 2019 naik menjadi 18,50%. Hal tersebut berarti dalam pelaksanaan tata kearsipan terdapat beberapa kendala antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang kearsipan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif, masih terbatasnya tenaga profesional di bidang kearsipan; Secara kualitatif,

arsiparis yang ada belum memiliki standar profesi yang ideal, serta belum dimilikinya sarana depo arsip yang memadai untuk menampung dokumen dokumen pemerintah daerah. Sementara itu, untuk Persentase sumber daya pelayanan kearsipan pada tahun 2017 dan 2018 telah mencapai 100%.

Selain itu upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan diantaranya adalah melaksanakan diklat teknis serta pelaksanaan pembinaan dan pendampingan, monitoring dan evaluasi pada sistem pengelolaan kearsipan. Untuk penanganan kearsipan kedepan diperlukan terobosan untuk membangun sistem kearsipan digital yang diharapkan menjadi salah satu solusi permasalahan yang selama ini terjadi.

Tabel 2.64
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	5%	8%	18.5%	50%	50%	100%

Tabel 2.65
Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Arsip)	2 (Seluruh Pengelola Arsip pada PD)	2 (Seluruh Pengelola Arsip pada PD)	2 (Seluruh Pengelola Arsip pada PD)	2 (Seluruh Pengelola Arsip pada PD)	2 (Seluruh Pengelola Arsip pada PD)	2 (Seluruh Pengelola Arsip pada PD)

r. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal

untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Jumlah Koperasi di Kota Cimahi pada periode tahun 2018-2022 terus mengalami fluktuasi. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan minat berkoperasi dan menguatkan koperasi yang sudah terbentuk, antara lain dengan : Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian untuk pra koperasi, diklat pengurus koperasi, *coaching klinik* untuk koperasi yang tidak aktif, pendampingan dan pemberian penghargaan kepada koperasi yang berprestasi.

Beberapa indikator yang berkaitan dengan koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.66
Indikator Bidang Koperasi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koperasi	317	259	262	269	270
2	Koperasi Yang melaksanakan RAT (Koperasi Aktif)	103	105	70	80	74
3	Koperasi Sehat	36	40	11	33	29
4	Total Anggota Koperasi	43.909	51.402	52.740	52.956	51.666
5	Modal Sendiri	190.821.281.867	190.293.684.179	216.854.093.652	231.683.723.202	210.751.979.579
6	Modal Luar	133.131.698.017	141.490.036.366	148.308.833.901	157.037.306.320	164.353.247.211
7	Jumlah Aset	308.973.217.173	331.660.159.344	365.034.221.903	388.721.029.522	375.105.226.790
8	Volume Usaha	223.626.012.002	196.750.706.437	223.156.932.580	248.589.922.665	230.770.152.000
9	Sisa Hasil Usaha (SHU)	17.422.475.171	18.480.542.645	19.815.193.565	18.917.210.259	18.233.306.353

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cimahi, 2022, diolah

Pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan *coaching klinik* yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan atau penyebab koperasi aktif tetapi tidak melaksanakan RAT

dengan melakukan Pelatihan dan pendampingan untuk memperbaiki kondisi Koperasi sehingga koperasi aktif dapat menyelenggarakan RAT Kembali.

Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT juga mengalami fluktuatif. Menurun di tahun 2020 sebanyak 70 koperasi dan meningkat di tahun 2021 menjadi 80 koperasi sedangkan di tahun 2022 menjadi 74 Koperasi, namun demikian yang dapat dilakukan penilaian kesehatan Koperasinya sebanyak 60 (enam puluh) Koperasi dengan hasil dari penilaian kesehatan koperasi : 29 koperasi dengan predikat “sehat”, 31 koperasi dengan predikat “cukup Sehat” dan Koperasi yang tidak RAT masuk dalam predikat “dalam pengawasan”.

Upaya untuk menguatkan koperasi dilakukan pendidikan dan pelatihan koperasi antara lain : Pengawasan Koperasi, Sertifikasi Manajer dan pelatihan manajemen Perkoperasian. Selain kegiatan yang dibiayai APBD, juga terdapat beberapa kegiatan yang merupakan kolaborasi/sinergitas melalui program pengabdian masyarakat dari Perguruan Tinggi, yakni Kegiatan pelatihan akuntansi oleh Universitas Ahmad Yani (UNJANI) dan Pelatihan dan pendampingan Koperasi oleh Politeknik Negeri Bandung

Catatan kinerja koperasi di Kota Cimahi yang perlu menjadi perhatian antara lain :

- a) Pembentukan 1 (satu) koperasi baru yang telah berbadan hukum di tahun 2022, memberi semangat positif bahwa koperasi tetap menjadi pilihan model usaha bagi masyarakat pasca pandemi; dan
- b) Menurunnya Modal sendiri dipengaruhi oleh Penurunan jumlah anggota yang artinya adanya penarikan simpanan oleh anggota yang keluar dan anggota keluar paling banyak terjadi pada Koperasi masyarakat dan Koperasi Karyawan karena adanya

pengurangan/pemutusan tenaga kerja.

Kondisi yang belum stabil menyebabkan banyak koperasi-koperasi besar dalam memenuhi kebutuhan anggota terpaksa menggunakan modal pinjaman yang mengharuskan koperasi membayar jasa pada pihak ketiga sehingga jasa untuk koperasi sendiri berkurang sedangkan biaya operasional masih tetap besar seperti gaji pegawai, hal ini juga yang menyebabkan SHU.

2) Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Pengembangan UMKM mulai dikuatkan dengan Pengembangan Ekonomi Lokal Klaster dan Sentra Bisnis. Dari data Sensus Ekonomi tahun 2015 terdapat potensi 4 (empat) klaster industri unggulan di Kota Cimahi yaitu :

- a) Klaster industri makanan dan minuman;
- b) Klaster industri tekstil dan produk tekstil;
- c) Klaster industri kerajinan; dan
- d) Klaster industri telematika.

Pada RPJMD Perubahan 2017-2022, Strategi Optimalisasi Pengembangan UMKM dengan arah kebijakan

meningkatkan fasiltasi bagi pemngembangan UMKM dan meningkatkan skala usaha UMKM, diterjemahkan dengan program pemberdayaan UMKM dan program pengembangan UMKM.

Kedua program tersebut, ditujukan untuk menguatkan Pemulihan Ekonomi, terutama mengantisipasi dampak Pandemi Covid-19. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain : FGD dengan stakeholder ABCGM (Akademisi, Bisnis, *Community*, *Government* dan Media) dalam rangka mensinkronkan program-program terkait pemulihan ekonomi. Output dari kegiatan ini adalah dokumen kesepakatan bersama terkait program kegiatan pemulihan ekonomi pada setiap stakeholder ABCGM. Pembuatan Aplikasi BPUM (Bantuan Pemerintah Usaha Mikro) untuk mempermudah proses pendaftaran BPUM 2021 sehingga proses pendaftaran NIB oleh 908 pelaku usaha lebih cepat dan paperless yang memenuhi persyaratan diusulkan ke Kementrian KUKM melalui Dinas KUK Provinsi Jawa Barat. Pelatihan kewirausahaan bagi 75 orang WUB untuk menumbuhkan jumlah kewirausahaan baru di Kota Cimahi, Workshop Keterampilan Teknis bertujuan melatih pelaku usaha di bidang kuliner dan craft untuk mendukung program pariwisata di Legok Awi Cipageran. Koordinasi dan untuk memperluas kemitraan UMKM melalui tahapan penjagaan kemitraan, kurasi produk UKM dan Penandatanganan Kerjasama.

Pengembangan UMKM dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan ditujukan untuk membantu mempercepat UKM naik kelas, merupakan hasil seleksi dari peserta kegiatan pendampingan CSBI difokuskan pada akselerasi pendampingan akses pasar dengan memanfaatkan teknologi digital dan Networking. Inkubator Bisnis 2021 dilaksanakan berupa pelatihan,

pendampingan dan pemasaran produk yang merupakan program bersama di 3 bidang Disdakoperin dan UPT Cimahi Technopark, dengan hasil adalah 3 *tenant startup* yang aktif dan mengalami progress yang sangat baik untuk pengembangan *startup* yaitu *Invinic*, *My Pet* dan *icommit* sedangkan 4 *startup* lainnya masih berproses untuk menemukan pasar yang tepat yaitu Dijait, Sheedoutled, Parakarsa dan Ngaderes.

Kegiatan lain adalah Fasilitasi Halal Bagi UKM bertujuan untuk membantu UKM naik kelas dengan melengkapi dokumen halal bagi pelaku usaha klaster makanan minuman maka kesempatan para pelaku usaha lebih luas memasarkan produk-produk kulinernya, dilaksanakan oleh PT Sucofindo Dari 79 UKM yang mengikuti kegiatan halal ini 27 sudah selesai sampai dikeluarkannya sertifikat halal, sementara sisanya masih menunggu proses sidang fatwa MUI. Fasilitasi HAKI Merek bertujuan untuk membantu para pelaku usaha mendapatkan legalitas dalam merk usahanya untuk menjamin keberlangsungan usaha. Dari 130 fasilitas HAKI yang disediakan, hanya 78 pelaku usaha yang dapat memenuhi persyaratan.

Fasilitasi Desain dan Kemasan bekerjasama dengan Fakultas Desain Komunikasi Visual Universitas Pendidikan Indonesia, tanpa menggunakan anggaran APBD Kota Cimahi. Kegiatan ini berkolaborasi dalam Program Kampus Merdeka UPI yang dikawal bersama dosen dan mahasiswa jurusan DKV. Desain Label dan Desain Editorial; untuk 50 kelompok UKM, hasil desain dapat diakses melalui link : https://drive.google.com/drive/folders/1KM2292cEaT0PwxWibX1E_vEtKppDlDB?usp=sharing.

Selain itu, dilaksanakan juga Fasilitasi Dekranasda Kota Cimahi antara lain Workshop bagi anggota Dekranasda, Temu Usaha Dekranasda, Gelar Produk dan

keikutsertaan pada Rakerda Dekranasda Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, dilaksanakan juga Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha Bagi UMKM yang merupakan kegiatan lanjutan dari CSBI 2020, dengan pendampingan bagi 76 kelompok juara CSBI untuk memastikan bahwa inovasi yang disampaikan dalam proposal penilaian CSBI dapat direalisasikan dan ditingkatkan. Selain itu juga untuk memastikan bahwa uang hadiah CSBI yang diterima oleh para kelompok juara ini dimanfaatkan untuk pengembangan usaha atau inovasi kelompok.

Untuk pencapaian keberhasilan UKM kelompok Juara CSBI berdasarkan data yang diterima oleh Bidang KUKM melalui pengumpulan dokumen lomba CSBI 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.67
Dokumen Lomba CSBI 2021

No	Indikator	2020	2021	% kenaikan 2020-2021
1	Jumlah omzet	2.899.756.341	3.454.949.769	19,15%
2	Jumlah Aset	1.118.380.000	1.858.668.750	66,19%
3	Tenaga Kerja	118	151	27,97%

Sumber : Disdagkoperin 2021 (diolah)

Bidang KUKM pada akhir tahun 2022, untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan terkait UMKM menyampaikan progress laporan usahanya sepanjang tahun 2022 dan juga berdasarkan data yang diperoleh dari data OSS, dengan hasil data sebagai berikut :

Tabel 2.68
Laporan usaha Tahun 2021-2022

No	Indikator	2021	2022	% Kenaikan	Rata-Rata
1	Jumlah Usaha Mikro	6.951	4.145	- 40 %	5.545
2	Jumlah omzet	14.509.259.000	8.312.000.000	- 43 %	11.410.629.500
3	Jumlah Aset	11.925.405.000	668.975.969.651	5.510 %	340.450.687.326

No	Indikator	2021	2022	% Kenaikan	Rata-Rata
4	Tenaga Kerja	529	16.109	2.945 %	8.319

Sumber : Disdagkoperin 2022 (diolah)

Pada tahun 2021 tercatat 6.951 UKM yang mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada data tersebut tercatat UMK yang masuk kategori usaha mikro, usaha kecil dan usaha mikro penerima BPUM (Bantuan Pemerintah Usaha Mikro).

Data yang tercatat pada Disdagkoperin, jumlah Usaha Mikro berjumlah 1.567 (catatan : usaha mikro adalah yang beromzet s/d 1 milyar) sedangkan data berjumlah 5.384 adalah data pemohon BPUM dan usaha kecil (catatan omzet diatas 1 s/d 5 M) .Data tahun 2022, jumlah Usaha mikro yang tercatat di OSS berjumlah 4156 (Sumber data : data tahunan DPMPTSP). Penurunan laporan usaha dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 dikarenakan:

- a) Penurunan jumlah usaha mikro sebanyak 40% disebabkan sebagian penerima BPUM tidak melanjutkan usaha;
- b) Penurunan jumlah omzet 40% Usaha mikro sebesar 43% dipengaruhi jumlah usaha mikro;
- c) Kenaikan jumlah aset, dipengaruhi bertambahnya aset pada usaha mikro yang masih berjalan dan terdapatnpesatnya perkembangan usaha pada usaha mikro tertentu; dan
- d) Sedangkan kenaikan jumlah tenaga kerja bertambah karena perdatap perkembangan pesat pada pada usaha mikro tertentu.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

Pariwisata di Kota Cimahi di dominasi oleh pariwisata berbasis kreativitas manusia dan budayanya. Sektor

pariwisata di Kota Cimahi belum memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap perekonomian kota.

Di Kota Cimahi telah terdapat 3 event tingkat kota bahkan internasional diantaranya Baros International Animation Festival (BIAF), *Gatsoe Street* Carnival (GATREEC), dan pekan Seren Taun Cireundeu. Event - event ini berpotensi menjadi bangkitan ekonomi lokal dan dapat menjadi wadah ekspresi kreativitas warga Kota Cimahi. Selain itu, Kota Cimahi memiliki 2 bus Sakoci yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk tur keliling Kota Cimahi. Meskipun demikian, perlu ditingkatkan kembali manajemen, fungsi dan manfaat dari Sakoci tersebut agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi perekonomian kota.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kota Cimahi masih terbilang rendah, di tahun 2018 hanya mencapai 358 Wisatawan dan mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 804 wisatawan. Selanjutnya di tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi 91 wisatawan dan terus menurun hingga 5 wisatawan di tahun 2021 karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi Covid 19. Setelah keadaan membaik dan dicabutnya PPKM, jumlah kunjungan wisman kembali meningkat sebanyak 183 wisatawan di tahun 2022. Untuk Jumlah wisatawan nusantara (wisnus) di Kota Cimahi pada tahun 2018 mencapai 16.418 Wisatawan, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 hingga menjadi 65.610 wisatawan. Sempat mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 45.859 wisatawan akibat kebijakan PPKM dan meningkat sangat signifikan di tahun 2022 menjadi 115.656 wisatawan setelah dicabutnya kebijakan PPKM.

Tabel 2.69
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Di Kota Cimahi
Tahun 2018-2022

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Wisatawan Mancanegara (wisman)	358	804	91	5	183
Jumlah Wisatawan Nusantara (wisnus)	16.418	43.227	65.610	45.859	115.656

Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2023, diolah

Penurunan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara pada tahun 2021 merupakan dampak pandemi covid.

Tabel 2.70
Jumlah Tempat Akomodasi dan Kamar Menurut Jenis Akomodasi di
Kota Cimahi Tahun 2020-2022

Jenis Akomodasi	2020		2021		2022	
	Jumlah Akomodasi	Kamar	Jumlah Akomodasi	Kamar	Jumlah Akomodasi	Kamar
Hotel Bintang 3	1	63	1	63	1	63
Hotel Melati	2	46	2	46	2	46
Hotel Non Melati	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Penginapan Remaja	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pondok Wisata	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Guest House	4	63	4	63	3	52
Glamping	NA	NA	NA	NA	2	17
Villa	NA	NA	NA	NA	1	6
Home Stay	17	22	17	72	17	72

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, BPS, 2023

Jumlah tempat akomodasi dan kamar menurut jenis akomodasi di Kota Cimahi tidak mengalami perubahan yang signifikan bahkan cenderung stagnan pada tahun 2020 dan 2021. Tetapi terdapat penambahan jenis akomodasi yakni Glamping dan Villa yang menambah kuota jumlah akomodasi dan kamar yang tersedia di Kota Cimahi.

Selanjutnya, menurut data yang bersumber dari Kota Cimahi Dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS di Tahun 2023, bahwa jumlah rumah makan/restoran di

Kota Cimahi mengalami penurunan. Meskipun di Kecamatan Cimahi Utara terdapat penambahan cukup banyak, tetapi di Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Tengah terjadi penurunan. Secara total, di Tahun 2019 terdapat 116 Rumah Makan/Restoran, terus berangsur menurun hingga 111 di Tahun 2022.

Tabel 2.71
Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota Cimahi
Tahun 2019-2022

Kecamatan	2019	2020	2021	2022
Cimahi Selatan	17	19	19	13
Cimahi Tengah	80	72	71	58
Cimahi Utara	19	23	23	40
	116	114	113	111

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka ,2022

Kota Cimahi terus berupaya membangun, mengembangkan dan memasarkan destinasi wisata baru yang bertemakan potensi lokal Cimahi untuk menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara. Upaya tersebut dilakukan melalui upaya penguatan daya tarik wisata melalui pengelolaan destinasi wisata yang telah ada maupun yang potensial akan dikembangkan, penguatan SDM pariwisata, dan fasilitasi perizinan usaha di sektor pariwisata terus dilakukan Pemerintah Kota Cimahi, Pada tahun 2021 Kota Cimahi melalui bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat telah berhasil membangun ekowisata Cimenteng di Kawasan Cimahi Utara, diharapkan ekowisata Cimenteng tersebut dapat membantu masyarakat setempat untuk dapat menikmati hasil pembangunan tersebut melalui peningkatan lapangan kerja dan usaha.

2. **Urusan Pertanian**

a. **Sub Sektor Pertanian**

Sektor Pertanian bukan merupakan sektor unggulan untuk perekonomian Kota Cimahi. Meskipun demikian pengembangan sektor tersebut harus tetap dilakukan sebagai upaya peningkatan ketersediaan pangan di Kota Cimahi.

Berdasarkan data dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi (2023), total luas lahan sawah di Kota Cimahi mengalami penurunan di tahun 2022 adalah 134,98 ha yakni mengalami penurunan sebesar 1,02 ha atau 0,75 persen dari tahun sebelumnya. Untuk luas lahan sawah irigasi setengah teknis mengalami peningkatan sebesar 2,98 ha namun untuk luas lahan sawah tadah hujan mengalami penurunan 4 ha.

Luas lahan kering Kota Cimahi di tahun 2022 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 1,33 persen, yang semula 189 hektar menjadi 186,48 hektar, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.72
Luas Lahan Sawah dan Luas Lahan Kering Dirinci Menurut Jenis Pengairan di Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Tahun	Luas Lahan Sawah (Ha)		Total (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)			
	Irigasi Setengah Teknis	Tadah Hujan		Pekarangan/Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya	Tegal/ Kebun/ Ladang/ Huma	Kolam Tebat	Lainnya
2018	119	17	136	n/a	184	5	2
2019	119	17	136	-	184	-	-
2020	119	17	136	-	189	-	-
2021	119	17	136	-	189	-	-
2022	121,98	13	134,98	-	186,48	-	-

Sumber : Dispangtan, 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Kota Cimahi memiliki ketersediaan lahan yang semakin menurun baik lahan sawah maupun lahan kering. Terbatasnya lahan di Kota Cimahi berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas hasil pertanian, sehingga intensifikasi pertanian dengan teknologi yang tepat guna sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian pada lahan terbatas di perkotaan seperti di Kota Cimahi. *Urban farming* dapat menjadi salah satu solusi untuk tetap mempertahankan produksi hasil pertanian di Kota Cimahi.

Angka produktivitas pertanian di Kota Cimahi Berdasarkan data Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan luas panen padi di tahun 2022, yang semula 168 hektar menjadi 183 hektar. Sedangkan untuk produktivitas padi mengalami penurunan di tahun 2022 yang semula 69 kwntal/ha menjadi 66 kwntal/ha, Demikian pula dengan produksi padi mengalami peningkatan yang semula 11.596 kwntal/ha menjadi 12.064 kwntal/ha.

Tabel 2.73
Luas Panen, Produktivitas, Produksi di Kota Cimahi Tahun 2019-2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Luas Panen (ha)	270	219	168	183
Produktivitas (kw/ha)	68	68	69	66
Produksi (kw/ha)	18360	14892	11596	12064

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi. 2023

Namun demikian, bila dibandingkan daerah lain produksi pertanian Kota Cimahi masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah adanya alih fungsi lahan pertanian di Kota Cimahi, rendahnya kapasitas SDM petani, terbatasnya penerapan teknologi pertanian, masih rendahnya kualitas

infrastruktur pendukung produksi hasil pertanian di Kota Cimahi serta manajemen pengelolaan hasil pertanian yang masih kurang. Sektor pertanian di Kota Cimahi juga tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi dan cenderung menurun seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.74
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB
Kota Cimahi Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan (%)	0,21	0,20	0,21	0,21	0,18
Nilai PDRB ADHB sektor pertanian (Pangan, Pertanian, Peternakan) (Juta Rupiah	60,598.6	64,894.7	67,382.2	66,970.6	69,223.7
Nilai Laju Pertumbuhan PDRB sector pertanian (Pangan, Pertanian, Peternakan)	0,54	2,38	3,18	1,34	-2,90

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2023

Sektor pertanian di Kota Cimahi berdasarkan Tabel 2.74 tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi, yakni hanya menyumbangkan 0,18 % dari total PDRB ADHB yang mencapai 69,22 miliar rupiah. Nilai PDRB tersebut berfluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022 sektor ini mengalami penurunan laju pertumbuhan sebesar -2,9%.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan sektor pertanian diantaranya dengan pemanfaatan teknologi, yakni dengan penggunaan bibit

dan pupuk berkualitas untuk menghasilkan produktivitas produk pertanian yang lebih tinggi walaupun jumlah lahan pertanian di Kota Cimahi terjadi penurunan. Selain upaya di atas, untuk mengatasi beberapa keterbatasan di sektor pertanian, strategi pengembangan rantai nilai pada klaster/sentra produk pertanian akan menjadi sasaran kerja dinas terkait di sektor pertanian.

b. Sub Sektor Peternakan

Pada sub-sektor peternakan, unggas merupakan ternak yang paling banyak dibudidayakan di Kota Cimahi, beberapa komoditi unggas yang dibudidayakan di Kota Cimahi diantaranya adalah ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik. Berdasarkan data Dispangtan terdapat penurunan produksi ayam buras dan itik di tahun 2022 jika dibandingkan data produksi tahun 2021, data disajikan pada Tabel 2.75. Komoditas unggas jenis ayam pedaging adalah komoditas ternak unggas yang paling mendominasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi yang dapat dikembangkan dari sub-sektor peternakan.

Data Tabel 2.75 menunjukkan bahwa ternak domba adalah salah satu komoditas ternak ruminansia terbanyak di kota Cimahi. Selain ternak domba, Kota Cimahi juga memiliki ternak sapi potong, kerbau, kambing dan sapi perah. Berdasarkan Data Tabel 2.75 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah ternak sapi potong dan sapi perah mengalami sedikit peningkatan, sedangkan untuk jumlah ternak kerbau dan kambing di Kota Cimahi mengalami stagnansi, bahkan untuk jumlah ternak domba mengalami penurunan.

Tabel 2.75
Jumlah dan Jenis Komoditas Ternak Ruminansia di Kota Cimahi
Tahun 2018-2022

Jenis Ternak	Jumlah (ekor)				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Sapi Potong	211	210	342	300	310
Kerbau	13	6	5	3	3
Domba	1,845	3,183	2,873	2,900	1,815
Kambing	-	108	90	80	80
Sapi Perah	464	358	552	558	566

Sumber : Dis pangtan Kota Cimahi, 2023

Tabel 2.76. menjelaskan bahwa hasil produksi peternakan (daging) di Kota Cimahi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi.

Sedangkan peningkatan produksi susu dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami tren peningkatan, di tahun 2022 produksi hasil susu di Kota Cimahi mencapai 1.370,778 liter peningkatan ini didukung program nasional SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) yakni upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting, sehingga populasi sapi perah meningkat.

Produksi hasil tanaman padi di Kota Cimahi mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2021, penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan produksi padi di Kota Cimahi sangat dibutuhkan karena penurunan luas lahan yang terus terjadi di Kota Cimahi, sehingga upaya intensifikasi pertanian akan lebih efektif dilakukan di Kota Cimahi dibandingkan usaha ekstensifikasi.

Tabel 2.76
Produksi Hasil Peternakan dan Tanaman Padi di
Kota Cimahi Tahun 2018-2022

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Hasil Peternakan (Daging) (Ton)	1.004	777,93	357,78	1500,56	416,998

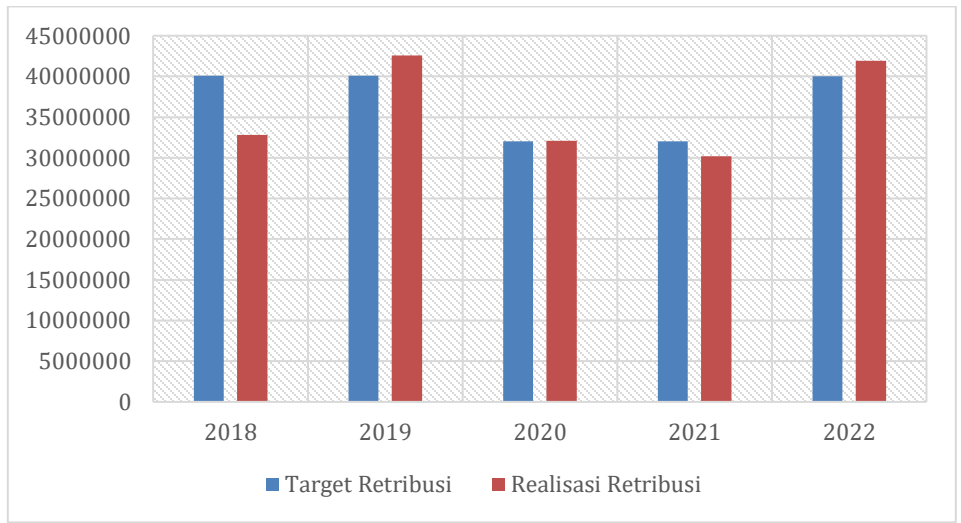
INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Hasil Peternakan (Susu) (Liter)	823	867.029	1.336.871	1.351.403	1,370,778
Produksi hasil tanaman padi (ton)	1.559,4	1.693,2	1.566	1159.2	NA

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, 2023,

3. **Urusan Perikanan dan Kelautan**

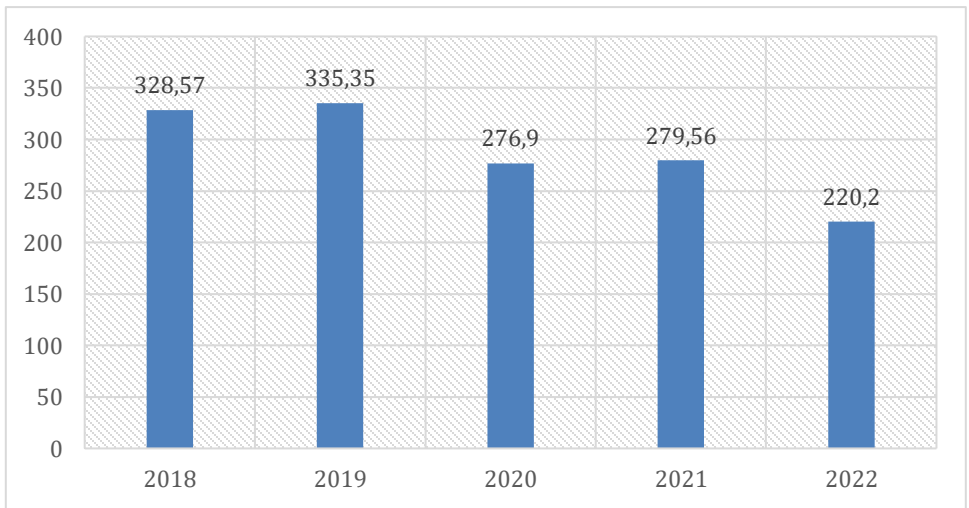
a. **Sub Sektor Perikanan**

Potensi sektor perikanan di Kota Cimahi terdapat di wilayah utara yakni Kelurahan Citeureup dan Cibabat. Keberadaan BBIAT (Balai Benih Ikan Air Tawar) di kelurahan Cibabat menjadi salah satu rantai nilai dalam produksi dan distribusi benih ikan konsumsi dan ikan hias bagi para pelaku usaha /kelompok budidaya ikan di Kota Cimahi. Keberadaan BBIAT sebagai penyedia benih ikan konsumsi dan ikan hias, juga berfungsi sebagai salah satu sumber Penghasil PAD di sektor perikanan, pada akhir tahun 2022 realisasi PAD BBIAT telah melampaui dari target yang ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BBIAT perlu didukung terus dengan melengkapi sarana dan prasarananya untuk menghasilkan produksi benih ikan konsumsi dan ikan hias yang lebih optimal agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.



Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2023

Gambar 2.58 Realisasi dan Target Pencapaian Retribusi BBIAT Kota Cimahi Tahun 2018-2022



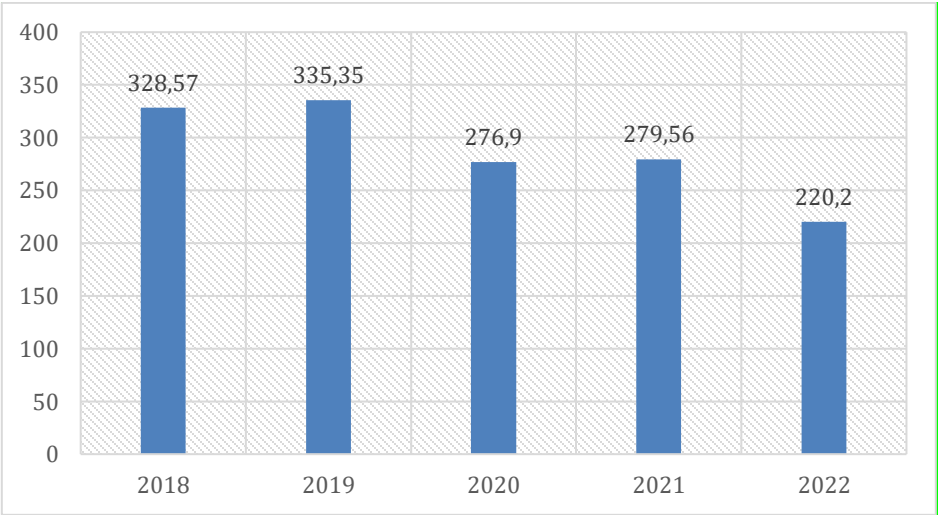
Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2023, diolah

Gambar 2.59 Produksi Ikan Konsumsi di Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2023, diolah

Selain budidaya ikan konsumsi, di Kota Cimahi juga terdapat potensi usaha perikanan yang memiliki nilai tambah (*added value*) yang besar dan tidak harus menggunakan lahan luas yaitu pengembangan ikan hias. Dengan karakteristik wilayah perkotaan dan sangat dekat dengan Ibukota Provinsi maka target pasar ikan hias masih sangat terbuka. Di akhir tahun 2022 Disdagkoperin Cimahi bekerjasama dengan Dispangtan

Cimahi telah membangun Pojok Ikan hias yang terletak di Pasar Atas Baru, tempat ini dibangun untuk membantu pemasaran para pelaku usaha ikan hias yang telah banyak tergabung dalam komunitas pecinta ikan hias Kota Cimahi. Diharapkan pembangunan Pojok Ikan Hias dapat lebih mendukung usaha masyarakat sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat serta memberikan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat di Kota Cimahi.



Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2023, diolah

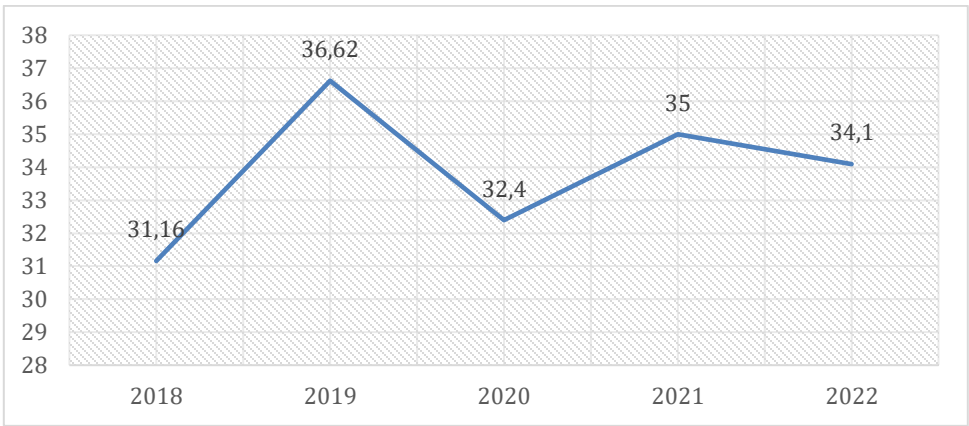
Gambar 2.60 Produksi Ikan Hias yang dikembangkan di Kota Cimahi Tahun 2019-2022

Berdasarkan data pada Gambar 2.60 Produksi ikan hias di Kota Cimahi mengalami fluktuatif, pada tahun 2022 produksi ikan hias mengalami peningkatan sebesar 5,81 persen jika dibandingkan dengan produksi ikan hias tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa pelaku usaha ikan konsumsi di Kota Cimahi sudah mulai beralih ke usaha produksi ikan hias, karena usaha budidaya ikan hias dianggap memiliki nilai tambah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan budidaya ikan konsumsi

b. Konsumsi Ikan

Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang dapat menjadi alternatif di tengah permasalahan yang dihadapi dalam produksi daging. Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat di Kota Cimahi mengalami fluktuatif, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 mencapai 31,16 Kg/Kap/Thn, Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 36,62 Kg/Kap/Thn, Tahun 2020 menjadi 32,40 kg/kap/tahun, dan Tahun 2021 kembali meningkat menjadi 35 Kg/Kap/Thn, dan menurun Kembali di tahun 2022 yakni mencapai 34,1. Penurunan AKI sejak tahun 2020 kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya penurunan pengeluaran konsumsi per kapita masyarakat, pada tahun 2021 AKI kembali meningkat kemungkinan disebabkan adanya perbaikan kondisi perekonomian masyarakat akibat adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, namun kembali menurun di tahun 2022.

Adapun data Tingkat Konsumsi Ikan oleh masyarakat di Kota Cimahi pada tahun 2018-2022 disajikan pada gambar berikut :



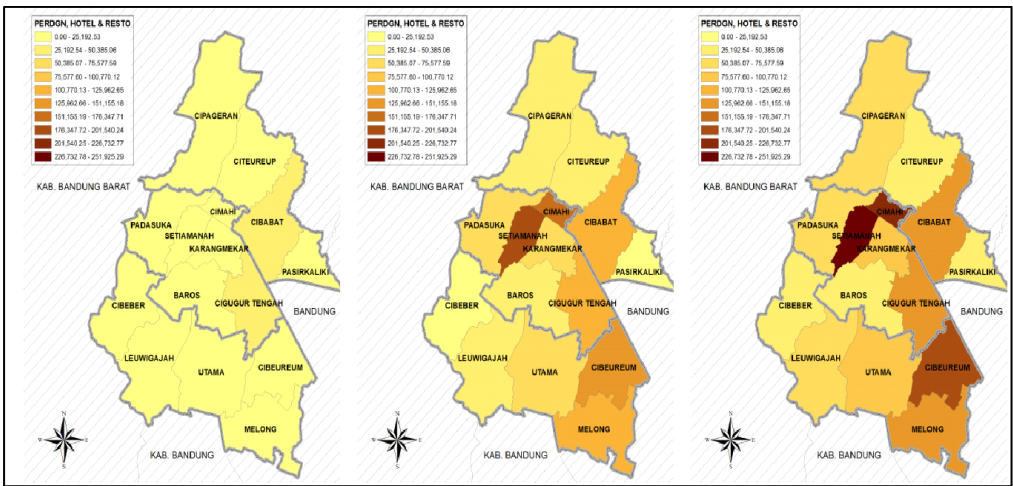
Sumber : Dispangtan Kota Cimahi, 2023, diolah

Gambar 2.61 Tingkat Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat di Kota Cimahi Tahun 2018-2022

4. **Urusan Perdagangan**

Kontribusi sektor perdagangan dan jasa menempati posisi ketiga sekaligus juga mendukung sektor utama perekonomian yaitu sektor industri pengolahan. Perkembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi dalam periode tiga tahun terakhir terlihat cukup signifikan. Aktivitas sektor ini menyebar di semua wilayah, tetapi pertumbuhan paling pesat berada di Cimahi Tengah. Berdasarkan fakta di atas, kita dapat mengambil pola tingkah laku aktivitas perdagangan di Kota Cimahi, yaitu aktivitas perdagangan di Kota Cimahi akan berada di daerah pusat kota, dan akan mengikuti aktivitas kegiatan lain, yaitu aktivitas industri dan aktivitas pemerintahan.

Gambaran pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Cimahi sebagai berikut :

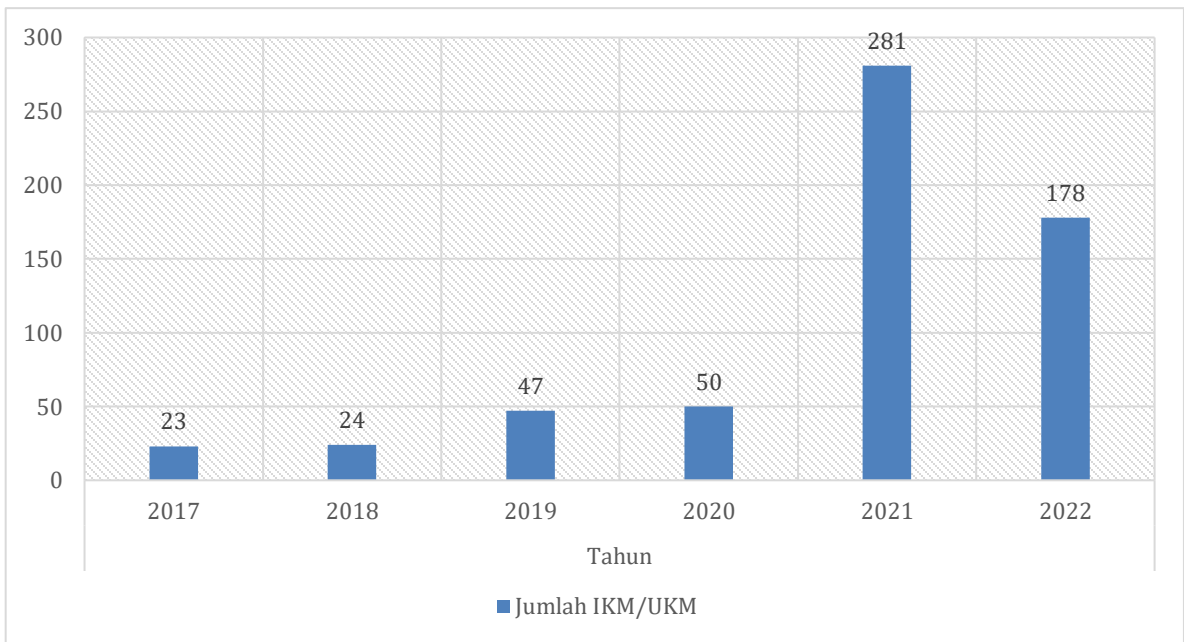


Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2021

Gambar 2.62 Sebaran Aktivitas Sektor Perdagangan

Pengembangan di sektor perdagangan diantaranya dilakukan melalui pengembangan pasar tradisional dan promosi produk IKM/UKM. Peningkatan kualitas pasar tradisional diwujudkan dengan menciptakan pasar yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) di mana pada tahun 2022 baru ada 1 dari 8 pasar tradisional (4 di antaranya dikelola oleh pemerintah kota) yang telah sesuai

dengan SNI. Adapun untuk promosi produk UKM/IKM, Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di level lokal, regional dan nasional juga masih terbilang rendah. Pada tahun 2020 terdapat 50 IKM/UKM, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 281 IKM/UKM. Namun, di tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 178 IKM/UKM.



Sumber : Disdagkoperin Kota Cimahi, 2022, diolah

Gambar 2.63 IKM/UKM Yang Mengikuti Promosi dilevel Lokal dan Nasional di Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Jumlah IKM/UKM yang mengikuti promosi di level lokal, dan nasional pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan semua bazar yang diadakan baik secara daring dan tatap muka dimasukkan dalam perhitungan. Namun, penurunan yang terjadi pada tahun 2022 disebabkan oleh

Selain itu, Kota Cimahi sebagai bagian dari Kawasan Bandung Raya adalah sebuah kota yang sangat pesat perkembangan transaksi perdagangannya. Hal ini tentu saja menuntut Pemerintah Kota untuk meningkatkan kemampuan pelayanan termasuk dalam hal kepastian

penggunaan Alat-Alat Ukur yang digunakan. Kota Cimahi dengan karakteristik kota kecil dengan penduduk yang sangat padat dan merupakan daerah penyangga bagi Kota metropolitan disekitarnya juga akan terbawa arus pesatnya perkembangan daerah-daerah disekitarnya.

Dalam dunia perdagangan, setiap transaksi yang menggunakan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya harus menggunakan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang sah dan terjamin kebenarannya. Untuk itulah setiap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang digunakan dalam transaksi perdagangan harus melewati pengujian tera/tera ulang yang merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian, UPTD Metrologi Legal Kota Cimahi memiliki tugas melaksanakan teknis operasional di bidang metrologi legal, yaitu pelayanan tera dan tera ulang dan pengawasan. Jadi apabila ditemukan kecurangan terhadap penggunaan alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan, masyarakat boleh melaporkan kepada UPTD Metrologi Legal untuk dilakukan pengawasan terhadap pemilik dan alat ukur dimaksud, Hal ini tentu saja dalam rangka melindungi dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan di Kota Cimahi.

5. **Urusan Perindustrian**

Sektor industri menjadi *leading* sektor ekonomi Kota Cimahi. Sektor ini mampu menyumbang lebih dari 45% terhadap total PDRB. Pertumbuhan sektor industri terbesar terdapat pada industri pengolahan, terutama industri tekstil. Walaupun menyumbang kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Berikut adalah data tentang pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

Tabel 2.77
Laju Pertumbuhan dan Peranan Kategori Industri Pengolahan di Kota Cimahi (Persen), 2018-2022

PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan	7.70	13.96	-7.04	0.43	10,16
Peranan	46.65	48.65	47.58	46.33	47.86

Sumber : BPS, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha 2017 - 2021*

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada 2018-2022, laju pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan sebesar -7,04%. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,43% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan pesat sebesar 10,16%. Sehingga nilainya menjadi 17,96 triliun rupiah. Kategori Industri Pengolahan merupakan sektor yang memegang peranan terbesar dalam PDRB Kota Cimahi. Pada tahun 2022 peranannya mencapai 47,86%. Mengalami kenaikan dari tahun 2021 yaitu 46,33.

Selain memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian kota, Sektor Industri Pengolahan terutama Industri Sedang Besar juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar, seperti yang tergambar pada dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.78
Jumlah Industri Sedang Besar dan Tenaga Kerja Kota Cimahi
Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Industri	595	619	691	819	1196
Tenaga Kerja (orang)	47.812	59.007	60.068	67.185	65.713

Sumber : Disnaker Kota Cimahi, 2022, WLKP, diolah

Namun demikian, data diatas tidak bisa menunjukkan penyerapan sebenarnya dari jumlah tenaga kerja pada sektor Industri karena WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan) hanya menunjukkan kenaikan jumlah Industri yang melaporkan kegiatan produksinya serta serapan tenaga kerjanya yang setiap tahun meningkat jumlah pelaporannya. Peningkatan laju pertumbuhan sektor industri tidak bisa serta merta meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terbatas pada Industri Kecil Menengah (IKM). IKM di Kota Cimahi juga memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Cimahi memberikan beberapa program fasilitasi terhadap IKM agar dapat meningkatkan standar mutunya sehingga bisa meningkatkan kapasitas dan kualitasnya sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja dan bersaing dengan IKM dari daerah lainnya.

Tabel 2.79
Jumlah IKM yang Mendapatkan Fasilitas Tahun 2019-2022

NO	JENIS FASILITASI	Jumlah IKM				Keterangan
		2019	2020	2021	2022	
1.	Uji Nilai Gizi dan KadaluarsaProduk IKM KlasterMakanan dan Minuman Kota Cimahi	66	60	-	-	Tidakdilaksanakankarena Refocusing Anggaran dan pemberlakuan PPKM Kegiatan dialihkan ke perdagangan
2.	Desiminasi dan Cetak Desain Merek dan KemasanProduk IKM KlasterMakanan dan Minuman	56	-	-	-	
3.	Festival SeleksiFood Ethnic dan Makanan&Minuman Halal Tingkat Kota Cimahi	147	-	-	-	
4.	Workshop DiversifikasiOlahanPangan	104	-	-	40	
5.	Workshop Good Manufacturing Practices (GMP)	25	-	50	50	
6.	PeningkatanStandarMutuProduk bagiPelaku IKM Makanan dan Minuman (PIRT, Sertifikat Halal, HAKI)	115	-	-	-	Tidakdilaksanakankarena Refocusing Anggaran dan pemberlakuan PPKM
7.	Workshop TeknologiIndustri di BidangPengolahanPangan	-	-	-	-	
8.	Pelatihan Teknis PembuatanFaceshield	-	50	-	-	
9.	Pelatihan PMT (Production Motivation Training) untuk IKM Craft, Fashion dan Makan-Minuman	-	200	-	-	
10.	PelatihanProduksiBersihuntuk IKM Craft, Fashion dan Makanan-Minuman	-	200	100	60	
11.	PelatihanOptimalisasiSosmeduntuk IKM Craft, Fashion dan Makanan-Minuman	-	100	100	100	
12.	PendampinganInkubasiBisnis	-	30	25	7	1 PPBT minimal beranggotakan 3 Orang
13.	Pendampingan Cimahi Makerspace Digital Kreatif		5	5	5	1 Studio CMS Digital Kreatif minimal beranggotakan 3 Orang
14.	Sosialisasi dan bimtek SIINAS	-	25	75	100	
15.	Pelatihan HACCP	-	-	50	50	
16.	Gelar Produk Pelaku Industri	-	-	-	50	
17.	Sosialisai IUI	-	-	-	50	
18.	Sosialisasi Restrukturisasi Mesin	-	-	-	50	
19.	Workshop GKM				50	

Sumber : Disdagkoperin Kota Cimahi, 2022, diolah

Selain potensi pada sektor industri pengolahan, saat ini pun di Kota Cimahi sedang dikembangkan pula sektor industri digital kreatif yang merupakan salah satu sektor industri potensial yang bertumpu pada kreativitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu sektor industri digital kreatif ini tentu saja sangat selaras dengan tujuan pembangunan

industri nasional yang mengarah pada revolusi industri 4.0 sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah pusat dan mendukung konsep *green industry* (industri hijau), yang berkontribusi signifikan terhadap sektor perekonomian, namun sangat ramah lingkungan dan minim polusi.

Gedung *Baros Information Technology Creative Centre* (BITC) sebagai bagian dari Kawasan Cimahi Technopark saat ini menjadi salah satu kawasan pusat pengembangan sektor industri digital kreatif di Kota Cimahi dan telah menjadi salah satu percontohan nasional kawasan perkantoran bersama (*co working space*) yang dikelola oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dikelola oleh UPT Cimahi *Technopark*).

Pada Gedung BITC saat ini, terdapat aktivitas bisnis para *startup* pelaku industri digital kreatif dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.80
Jumlah Tenaga Kerja dan Realisasi Retribusi Daerah dari Tenant di BITC

Jumlah Tenant	Jumlah Tenaga Kerja	RealisasiKontribusi PAD (Retribusi Daerah) [Rp]				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
24 perusahaan industri digital kreatif	182 orang	278.897.500	529.683.500	488.063.150	640.289.725	790.645.875

Sumber : Disdagkoperin, 2022*

Data di atas menunjukkan peningkatan realisasi kontribusi PAD disetiap tahunnya. Selain data di atas, *multiplier effect* yang timbul dengan adanya Gedung BITC di kawasan Baros Cimahi Tengah tersebut adalah mulai menggeliatnya sektor perekonomian di sekitar gedung hal ini terindikasi dengan mulai maraknya warung makan, toko dan kost-kostan yang ada di sekitar kawasan.

Data di atas menunjukkan peningkatan realisasi kontribusi PAD disetiap tahunnya. Selain data di atas, *multiplier effect* yang timbul dengan adanya Gedung BITC di kawasan Baros Cimahi Tengah tersebut adalah mulai menggeliatnya sektor perekonomian di sekitar gedung hal ini terindikasi dengan mulai maraknya warung makan, toko dan kost-kostan yang ada di sekitar kawasan. Pada Gedung BITC pula terdapat tenant yang berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi untuk mengembangkan potensi desain grafis template dalam program Cimahi Makerspace Digital Kreatif. Selain melaksanakan pengembangan potensi bisnis Bersama, tenant tersebut juga banyak merekrut pegawai asal Cimahi yang menjadi bagian dalam pengembangan sector desain template di Kota Cimahi. Terlaporkan lebihdari 30 (tigapuluh) orang pegawai asal Cimahi yang dipekerjakan dan menghasilkan dalam program tersebut. Selain itu, ada pula tenant lulusan program Inkubasi Bisnis Teknologi tahun 2019 yang juga membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pengembangan potensi rekayasa perangkat lunak dan jaringan, tenant tersebut adalah CV. Forit atau dengan brand Sekolah.id. Selain juga merekrut banyak SDM dari Kota Cimahi, Sekolah.id juga menerima banyak magang/praktek kerja lapangan untuk dapat mendeliver seluruh pengetahuannya kepada masyarakat Kota Cimahi. Pada saat ini, CV Forit/Sekolah.id merupakan satu-satunya perusahaan digital kreatif Kota Cimahi yang juga membuka layanan bandwidth internet yang meliputi kebutuhan Jawa Barat.

Perkembangan jumlah perusahaan startup yang tergabung dalam Inkubator Bisnis. Inkubasi Bisnis dan Teknologi merupakan salah satu amanat dari Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi yang diturunkan kepada Peraturan Wali

Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Cimahi Technopark sebagai Kawasan Sains dan Teknologi di Kota Cimahi. Cimahi Technopark sebagai program merupakan Kawasan yang dikelola oleh Tim Pusat Inovasi Baros, dimanafungsi dan layanan yang ada pada Cimahi Technopark adalahLayanan Teknis (Pelatihan, peragaan, konsultasiteknis dan informasi), Layanan Pengembangan Teknologi (desain teknologi, purwarupa, manajemen kekayaan intelektual dan konsultasi hukum), layanan inkubasi bisnis dan layanan pendukung (Fasilitas produksi skala terbatas, ruang kantor dan ruang konferensi/seminar/pameran).

Salah satu program dan kegiatan unggulan yang dilaksanakan di Cimahi *Technopark* sebagai salah satu kawasan pusat pengembangan ekonomi di Kota Cimahi adalah Program Inkubator Bisnis dan Teknologi, output dari program ini adalah untuk menghasilkan perusahaan-perusahaan rintisan atau yang dikenal dengan *startup* sebagai salah satu upaya untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi kota. Pada awal pelaksanaan.

Tabel 2.81
Data Perkembangan Jumlah *Start Up* yang tergabung dalam Program Inkubator Bisnis tahun 2016-2022

No	Tahun	Jumlah <i>Start Up</i>
1	2016	20 Kelompok <i>Start Up</i> denganPendampingandari Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologiRepublik Indonesia
2	2017	14 Kelompok <i>Start Up</i> & 10 Animator Graduate
3	2018	5 Kelompok <i>Start Up</i> & 12 Animator dalampendampinganPengembangan IP Animasi
4	2019	5 Kelompok <i>Start Up</i> & 12 Animator dalampendampinganPengembangan IP Animasi
5	2020	22 Kelompok <i>Start Up</i>
6	2021	11 Kelompok <i>Start Up</i>
7	2022	7 Kelompok <i>Start Up</i> yang terbagimenjadi <i>Early Stage Start Up</i> dan <i>Acceleration Start up</i>

Pada awal pelaksanaan Inkubasi Bisnis Teknologi, masyarakat Kota Cimahi masih ragu terhadap pelaksanaan

Inkubasi Bisnis Teknologi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cimahi dibawah tanggungjawab Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi. Namun, setelah banyak muncul lulusan PPBT champion yang berhasil mengembangkan produknya, pada tahun 2020 banyak sekali tim start up yang mendaftar menjad bagian dari pengembangan *start up* di Kota Cimahi. Sayangnya, pandemic covid 19 membuat program tersebut terhenti pada Maret 2020 dan baru dimulai Kembali pada tahun 2021 dengan bantuan Kementerian Perindustrian melalui program Founders Program.

Metode dan tahapan pelaksanaan Inkubasi Bisnis Teknologi pada tahun 2021 mengalami perubahan, karena Pemerintah Kota Cimahi merekrut Manajer Inkubasi Profesional untuk dapat mendampingi dan mengakselerasi pertumbuhan dari PPBT pada Kawasan Cimahi Techopark. Dengan metode seperti ini, terhaslkan PPBT yang dapat mendongkrak usahanya hingga mencapai omzet 6M/tahun pada akhir 2021. Metodeini pun akan dilanjutkan dengan berbagai update serta disinergikan dengan keberadaan program Cimahi Makerspace Digital Kreatif, untuk merespon adanya *bubble brust* (lay off start up dan penghentian investasi pada start up) pada seluruh pelaku start up di dunia. Dengan keberadaan program Pra Inkubasi yang saat ini disebut sebagai Program Cimahi Makerspace Digital Kreatif, diharapkan seluruh proses perkembangan PPBT akan lebih berkelanjutan.

Perkembangan **jumlah Studio/Tim yang tergabung dalam Program/Kegiatan Cimahi Makerspace Digital Kreatif.** Program/Kegiatan Cimahi Makerspace Digital Kreatif merupakan kegiatan *Quick Wins* dan Solutif dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi untuk mempertahankan potensi para pelaku digital kreatif yang ada di Kota Cimahi. Kegiatan ini lahir atas kolaborasi

antara Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi dengan komunitas digital kreatif yang ada di Kota Cimahi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dokumen Sistem Inovasi Daerah yang disusun Pemerintah Kota Cimahi dan BPPT RI serta Masterplan Pengembangan Cimahi *Technopark*, banyak sekali potensi animator/desaingrafis yang berada di Kota Cimahi. Namun, karena sulitnya menembus pasar animasi internasional sebagai sebuah perusahaan, maka dipandang perlu adanya kegiatan/program yang dapat mempertahankan potensi tersebut dengan penghasilan yang lebih stabil dan kontinyu. Terlebih dengan adanya pandemi Covid 19, membuat banyak sekali para start up dan animator yang terdapat. Oleh karena itu, atas keberpihakan Pemerintah Kota Cimahi didorong dengan kolaborasinya komunitas dan para industri pada sektor ini, dibentuklah program/kegiatan pendampingan terhadap para pelaku digital kreatif di kota Cimahi. Kegiatan pendampingan ini merupakan satu-satunya program pendampingan pemerintah pada sektor design kreatif di Indonesia.

Karena tidak adanya contoh yang dapat diadaptasi dari Pemerintah pusat, provinsi, kab/kota lain, maka penyusunan rencana seleksi, pendampingan, pelaporan, evaluasi pada program ini disusun Bersama para kolaborator yang intens dengan hubungan yang saling menguntungkan. Adapun yang berkolaborasi pada program kegiatan Cimahi *Makerspace* Digital Kreatif ini adalah :

- a. Pemerintah Kota Cimahi (Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi | UPTD Cimahi *Technopark*);
- b. Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat;
- c. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat melalui Bantuan Keuangan Kompetitif;
- d. Celcius *Design* Studio;

- e. CV. Tepi Garis;
- f. Graphicook Studio;
- g. Komunitas Konten;
- h. Tief Studio;
- i. Canva Ltd;
- j. Komunitas Canva Indonesia;
- k. PT. Kreasi Teknologi Multiguna;
- l. Envato Element Contributor; dan
- m. SMKN 2 Cimahi.

Tabel 2.82
Data Perkembangan Jumlah Studio yang tergabung dalam Program Inkubator Bisnis tahun 2017-2022

No	Tahun	JumlahStudio
1	2020	5 Studio Digital Kreatif
2	2021	12 Studio Digital Kreatif
3	2022	5 Studio Digital Kreatif

Dengan pendekatan Program Cimahi Makerspace Digital Kreatif, dari 22 (dua puluh dua) studio yang telah didampingi dan terus dievaluasi, dengan anggaran yang relative kecil (Rp. ±200 Juta/tahun), dapat menghasilkan lebih dari Rp. 3 Milyar dalam 2 (dua) tahun pendampingan program / kegiatan ini. Tentunya program ini akan terus dikembangkan menjadi lebih besar dengan kolaborator lebih banyak, sehingga kedepan program ini menjadi bagian dari program Inkubasi Bisnis Teknologi yang merupakan program utama dari Kawasan Cimahi *Technopark*. Kegiatan ini pula sudah diakui oleh Pemerintah Pusat sebagai inovasi terbaik dalam kegiatan yang menyentuk para pelaku digital kreatif dengan diperolehnya Top 45 KIPP Award tahun 2022. Serta diapresiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan diperolehnya Bantuan Keuangan Kompetitif tahun 2023 hasil dari presentasi inovasi yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

6. Urusan Transmigrasi

Program transmigrasi di Kota Cimahi bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga dapat memiliki penghasilan yang tetap. Akan tetapi, pelaksanaan Program Transmigrasi di Kota Cimahi dinilai tidak efektif. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengiriman beberapa keluarga ke daerah tujuan transmigrasi, dari 5 KK yang dikirimkan ada 2 KK yang kembali pulang. Meskipun masih ada keluarga yang tetap bertahan di daerah transmigrasi masih memerlukan dukungan finansial dari Pemerintah Kota Cimahi. Monitoring terhadap keluarga transmigran terakhir dilaksanakan Tahun 2018.

Pada Tahun 2019 dilaksanakan Sosialisasi Animo Transmigrasi kepada masyarakat 100 orang. Dari 100 orang tersebut, ada 10 KK yang semula berminat bertransmigrasi. Namun kemudian mundur karena 2 (dua) sebab : 1). Perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat bahwa untuk Program Pengiriman Transmigran dilakukan dengan *sharing* biaya, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dan Kota; 2). Mundurnya minat bertransmigrasi karena lokasi tujuan tidak sesuai yang diharapkan calon transmigran. Dari hal tersebut, disimpulkan berdasarkan dari hasil evaluasi belum efektifnya program pengiriman transmigrasi ini.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintah

1. Unsur Perencanaan Pembangunan

Kinerja pada fungsi perencanaan pembangunan Kota Cimahi ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa perencanaan Kota Cimahi telah baik dan memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.83
Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Cimahi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi, 2022, diolah

Capaian kinerja program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah diukur berdasarkan output dokumen yang dihasilkan. Pada tahun 2022 telah ditetapkan RPD Tahun 2023-2026, RKPD Tahun Anggaran 2023, Perubahan RKPD Tahun 2022, koordinasi dan asistensi penyusunan RENSTRA Tahun 2023-2026 dan RENJA Tahun 2023, Perubahan RENJA Tahun 2022, serta monitoring dan evaluasi hasil RENJA.

2. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan di Kota Cimahi secara spesifik ditangani dan dikoordinasikan oleh sebuah bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Kota Cimahi mulai tahun 2019. Adapun strategi pembinaan urusan ini lebih diarahkan kepada 5 (lima) hal, yaitu :

- a. Penyelenggaraan penelitian bagi penyusunan kebijakan pembangunan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang lainnya;
- b. Kegiatan penelitian yang bersifat terapan dan implementatif dengan membuat beberapa *pilot project* di beberapa lokasi (lokus). Sejak 2019 telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya pengembangan

kewirausahaan sosial melalui seni pertunjukan di Cireundeu, Legok Awi, Eko Wisata Cipageran, pengembangan *agroforestry* (Bukit Padakasih Cibeber, Eko Wisata Cipageran, dan Bojong Jawa Cipageran), penanganan sampah dengan metode *black soldierflies* di Kelurahan Padasuka, inovasi Gaskeun yang mensosialisasikan portal katalog produk para pelaku UMKM di Kota Cimahi dengan pasar-pasar potensial (diantaranya ASN Kota Cimahi), Penelitian Kultur jaringan Durian Kamajaya Kota Cimahi dan teknologi penyaringan air sungai menjadi air bersih dengan teknologi HR WTP berkerjasama dengan BP2D JABAR dan ITB;

- c. Pengembangan inovasi dan daya saing Kota Cimahi diantaranya memanfaatkan fasilitas Gedung Cimahi *Technopark* (CTP) dan BITC (*Baros Information and Technology Centre*) yang berfungsi untuk membangun sinergi dan pertumbuhan interaksi antar unsur kelembagaan IPTEK (*Academic - Business - Government – Community – Media*) serta memberikan layanan di bidang riset dan pengembangan iptek, Kompetisi Inovasi Cimahi *Motekar Awards* (ChiMA) sebagai kompetisi inovasi tingkat Kota Cimahi yang bertujuan sebagai salah satu stimulus untuk menumbuhkan iklim inovasi di kalangan ASN juga masyarakat Kota Cimahi, pengembangan Klinik Inovasi Keliling (Klinsing) sebagai salah satu bentuk pendampingan dalam pengembangan, monitoring dan evaluasi inovasi yang ada di Perangkat Daerah, bekerjasama dengan banyak perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri dan lembaga kerjasama hibah riset internasional dari Uni Eropa maupun *Value-chain Capacity Building Network* (VCBN). Sejak 2022 dikembangkan pula aplikasi Piramida (Pusat Informasi Riset dan Manajemen Inovasi Daerah) Kota Cimahi sebagai suatu hub informasi riset maupun manajemen

inovasi. Aplikasi ini akan meleburkan aplikasi sistem inovasi daerah (sid.cimahikota.go.id) yang selama ini digunakan sebagai pengumpulan data inovasi di Kota Cimahi. Pada tahun 2022 telah dikembangkan menu manajemen inovasi, event inovasi, ChiMA dan web. Aplikasi Piramida ini akan terus dikembangkan melalui penyempurnaan menu terkait penelitian dan pengembangan. Diharapkan Piramida akan menjadi *hub* yang dapat menghubungkan kebutuhan litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan) dan inovtek (Inovasi Teknologi) Kota Cimahi dengan kesediaan sumber daya dari perguruan tinggi maupun lembaga litbang lainnya sehingga riset dan pengabdian insan perguruan tinggi serta *stake holder* kelitbangannya dapat menjawab permasalahan maupun kebutuhan yang ada di Kota Cimahi;

- d. Pelaksanaan KKN tematik sebagai salah satu media untuk melakukan diseminasi dan difusi hasil penelitian terapan serta *pilot project* yang ada di perguruan tinggi kepada masyarakat penerima manfaat. KKN tematik yang telah dilaksanakan diantaranya dengan (1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJANI terkait KKN Digital Marketing pada UMKM di Kota Cimahi (2) Institut Seni Budaya Indonesia terkait KKN Seni Pertunjukan (Pasar Wisata Legok Awi Cipageran berbasis Kreativitas Seni Budaya) (3) Sekolah Ilmu Ekonomi dan Pariwisata (STIEPAR) Yapari Bandung terkait KKN (Pasar Wisata Legok Awi Cipageran) (4) KKN Universitas Muhammadiyah Bandung untuk piloting pengolahan sampah organik dengan metode *Black Soldier Fly* di komunitas Magotsuka Kelurahan Padasuka.
- e. Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Hasil penelitian dan pengembangan berupa inovasi yang memiliki nilai tambah yang jauh lebih tinggi atau disebut sebagai Kekayaan Intelektual mempunyai peranan

strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan perlu dilestarikan, dilindungi, dibina, dan dikembangkan sehingga mendukung daya saing Kota Cimahi. Bappeda Kota Cimahi melalui Bidang Litbang memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian, pengembangan serta pengkajian dan penerapan teknologi diantaranya indikasi geografis, paten, hak cipta, ekspresi budaya tradisional, merek dan lain-lain. Sejak Tahun 2021 telah difasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual terutama bagi para Pemenang Kompetisi Inovasi Cimahi *Motekar Awards* (ChiMA), pelaku UMKM dan lembaga kelitbangan.

Tabel 2.84
Target Kinerja Indikator Penelitian dan Pengembangan Kota Cimahi
Tahun 2021-2022

NO	URAIAN	2021	2022
1	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan (%)	n/a	100
2	Persentase penelitian yang dihasilkan	100	100
3	Persentase pertumbuhan inovasi	10	10

Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi, 2022, diolah

Pengelolaan dan koordinasi urusan penelitian ataupun kajian di Cimahi dilakukan pada 3 kelompok tugas yaitu penelitian/kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyusunan kebijakan, kajian/penelitian bagi perencanaan pembangunan dan kajian teknis seperti *feasibility studies* (FS) maupun DED.

Sejak berdirinya lembaga kelitbangan Kota Cimahi pada tahun 2019, Kota Cimahi telah mengikuti berbagai pengukuran indeks kelitbangan yang diselenggarakan oleh kementerian diantaranya Indeks Daya Saing Daerah (Kemenristek/BRIN), Indeks Inovasi Daerah (Kemendagri), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Kemendagri), RIDa-

Radar Inovasi Daerah (BPPT/BRIN) dan telah menerima berbagai penghargaan-penghargaan di bidang inovasi dan kelitbangan.

Direncanakan pada tahun 2023 akan dilakukan penyusunan Tagline *City Branding* Kota Cimahi yang akan menjadi Tema dalam penyusunan Dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Cimahi ke depannya. Dasar hukum penyusunan Dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebelumnya mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 dan Nomor : 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dengan berdirinya BRIN pada Tahun 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2022, maka ke depannya akan ada perundangan baru yang mengatur mengenai Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau yang sebelumnya dikenal dengan Dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Penyusunan Sistem Inovasi Daerah Kota Cimahi ataupun Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang baru akan mengacu pada perundangan yang baru tersebut. Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan diharapkan akan menjadi Landasan Perencanaan Pembangunan.

Penguatan kelembagaan, SDM, jaringan kerjasama dengan perangkat daerah dan perguruan tinggi serta pemberi hibah penelitian khususnya dalam pelaksanaan penelitian terapan berupa *pilot project* menjadi target kerja kelitbangan hingga tahun 2022.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2022 mengatur mengenai Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang merupakan peningkatan fungsi kelitbangan di daerah yang diharapkan menjadi *Think Tank* Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan dengan *Science Based Policy* Kepala Daerah. BRIDA bertugas membantu KDH

melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. BRIDA atau Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. BRIDA bisa dibentuk berdiri sendiri atau digabung dengan Bappeda. Saat ini Kota Cimahi dalam proses penyusunan Urgensi Penyusunan BRIDA Kota Cimahi. Dokumen ini nantinya akan menjadi salah satu kelengkapan dalam pengajuan BRIDA ke BRIN.

Penguatan bidang urusan penelitian dan pengembangan di Kota Cimahi harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai seperti fungsional peneliti, perekayasa dan analis kebijakan. Saat ini Kota Cimahi memiliki satu orang Peneliti Ahli Muda dengan kompetensi di bidang Transportasi Darat serta dua orang Analis Kebijakan Ahli Muda.

3. Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : a. Kualifikasi; b. Kompetensi; c. Kinerja; dan d. Disiplin.

Tabel 2.85
Target dan Realisasi IP ASN Tahun 2022

No	Dimensi	Target	Realisasi	Keterangan
1	Kualifikasi (25%)	14	13,10	
2	Kompetensi (40%)	18	15,77	
3	Kinerja (30%)	25	23,52	
4	Disiplin (5%)	5	4,98	
IP ASN		62	57,37	Sangat Rendah

Ket : - Jumlah ASN yang diukur indeks profesionalisme : 3.653 orang
- Data realisasi diambil DJASN.BKN per 1 Desember 2022

Analisis penyebab kegagalan/penurunan kinerja tidak tercapainya target IKU Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

- a. **Dimensi Kualifikasi** : tidak tercapai target disebabkan ada sebagian ASN yang pensiun dengan kualifikasi pendidikan sarjana (S1) ke atas yang memiliki bobot penilaian tinggi sebesar kurang lebih 250 orang pertahun dan ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan DII/DI/SMA sebanyak 569 orang atau 15 % dari jumlah pegawai ada beberapa belum menyelesaikan pendidikan S1 nya dan sebagian lagi tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi;
- b. **Dimensi Kompetensi** : Kompetensi ASN Cimahi sudah baik hanya saja Kompetensi yang diperoleh oleh ASN dari berbagai diklat yang telah diikuti baik diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional belum seluruhnya terinput dalam sistem informasi kepegawaian, dan juga disebabkan oleh ada kebijakan penyederhanaan birokrasi dimana Pejabat Administrator dan Pengawas yang beralih menjadi Pejabat Fungsional sebanyak 110 orang dan belum mengikuti Diklat Fungsional sehingga nilai bobot kompetensinya 0 (nol), serta masih banyak pegawai yang belum mengikuti diklat teknis 20 jp dan seminar/workshop, sebagai berikut :
 - 1) Pejabat struktural yang belum mengikuti diklatpim sebanyak 136 orang (37,98 %);

- 2) Pejabat fungsional hasil penyederhanaan birokrasi yang belum mengikuti fungsional sebanyak 110 orang (100 %);
 - 3) pegawai yang belum mengikuti diklat teknis sebanyak 3.393 orang (88,77%); dan
 - 4) pegawai yang belum mengikuti seminar/workshop sebanyak 1.348 orang (35,26%).
- c. **Dimensi Kinerja** : bobot diukur dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan, sebagian pegawai ada yang belum mengirimkan laporan SKP nya kurang lebih 1000 orang sehingga tidak terinput di sistem informasi kepegawaian yang menyebabkan nilai bobot dimensi kinerja tidak maksimal; dan
- d. **Dimensi Disiplin** : tidak mencapai target karena ada pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin (berat, sedang dan ringan) sebanyak 4 orang dari jumlah total pegawai 3.653 orang.

Oleh karena itu BKPSDMD melakukan secara berkesinambungan melakukan inventarisasi dan validasi terhadap data terkait dengan 4 dimensi yang dimiliki oleh setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Tabel 2.86
Indikator Indeks Profesionalitas ASN Kota Cimahi Tahun 2019-2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
IP ASN	77	46,65	60,58	79	53,23	67,38	58	53,58	92,38	62	57,37	92,53

Sumber : BKPSDM Kota Cimahi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel tersebut capaian Indikator Profesionalitas ASN pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya keterbatasan anggaran untuk pengadaan Bimtek dan Diklat yang di *refocusing* untuk penanganan Covid-19. Selain itu masih perlunya peningkatan pengumpulan SKP ASN tepat

waktu karena masih banyak mengalami keterlambatan. Masih banyaknya ASN yang belum melaporkan ke BKPSDMD mengenai Bimtek dan Diklat yang telah diikuti.

Untuk meningkatkan Nilai IP-ASN diarahkan untuk meningkatkan inovasi dan dukungan dari semua OPD misalkan dengan meningkatkan inventarisir Bimtek/Diklat, penggunaan SKP online, pengadaan Seminar/Bimtek/Diklat online dan dimasukannya Indikator IP ASN agar diampu oleh setiap OPD tidak hanya diampu oleh BKPSDMD.

4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Upaya untuk merealisasikan pembangunan harus diawali dengan penataan internal pemerintahan Kota Cimahi baik dalam konteks penataan organisasi pemerintahan maupun dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Cimahi. Penataan tersebut termasuk di dalamnya adalah pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi sampai dengan Mei 2022 jumlah total PNS sebanyak 4.052 orang. Terdiri dari Laki-laki berjumlah 1.646 orang dan perempuan 2.406 orang. Jadi jumlah ASN berjenis kelamin Perempuan lebih banyak dibandingkan dengan ASN laki-laki.

Jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan, ASN Kota Cimahi sebesar 53.01% berlatar belakang S.1 dan 14.49% berlatar belakang S-2. Adapun secara lengkap tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.87
Jumlah PNS Daerah Kota Cimahi Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2022

Latar Belakang Pendidikan	Jumlah PNS
SD	25

Latar Belakang Pendidikan	Jumlah PNS
SMP	33
SMA	523
D1	4
D2	46
D3	564
D4	80
S.1	1985
S.2	577
S.3	6

Sumber : BKPSDMD Kota Cimahi Tahun 2022

Jumlah PNS Daerah di Kota Cimahi berdasarkan golongan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.88
Jumlah PNS Daerah Kota Cimahi Berdasarkan Golongan
Tahun 2018–2022

TAHUN	GOLONGAN			
	I	II	III	IV
2018	52	780	2003	822
2019	49	755	2224	1505
2020	41	673	2288	1289
2021	37	627	2219	1169
2022	33	598	2203	1007

Sumber : BKPSDMD Kota Cimahi Tahun 2022

Berdasarkan jumlah ASN Kota Cimahi baik secara kuantitas maupun kualitas belum merata, namun demikian kinerja aparatur sudah relatif baik yang dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Cimahi. Perencanaan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah harus tetap diperhatikan mengingat kondisi dan persoalan pembangunan ke depan yang menuntut kinerja aparatur pemerintah yang lebih baik, ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis.

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 2.89
Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Kota Cimahi Tahun 2019-2022

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022
11	Persentase ASN yang dibina (%)	100	100	100	
22	Persentase ASN yang kompeten (%)	60	41	67	15,77
33	Persentase pelanggaran disiplin (%)	0,6	5	4,99	4,99
44	Penilaian kinerja pegawai (SKP) (%)	87	26	68	23,51

Sumber : BPSDM Kota Cimahi, 2022, diolah

5. Unsur Keuangan

Penetapan APBD Tepat Waktu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Kota Cimahi dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Cimahi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Penetapan APBD yang tepat waktu merupakan hal penting yang harus dilakukan agar proses pembangunan di Kota Cimahi dapat berjalan dengan maksimal pada tahun anggaran berkenaan dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Salah satu indikator penting untuk menilai pengelolaan keuangan sebuah institusi pemerintah yaitu Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015 sampai dengan 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Rasio Utilisasi Aset Semakin tinggi rasio utilisasi aset berarti semakin baik manajemen dalam memanfaatkan aset untuk

mencapai tujuan organisasi dan juga menunjukkan bahwa pengelolaan aset berjalan semakin efisien. Pada tahun 2021, rasio utilisasi aset mencapai 66,7% sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 71,97%.

6. Unsur Pengawasan

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bersih, dan terukur ke arah kebijakan pencegahan potensi dan risiko fraud, diperlukan peran kinerja pengawasan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cimahi yang diukur melalui indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 2.90
Indikator Kinerja Utama Urusan Pengawasan di Kota Cimahi
Tahun 2020-2022

NO	URAIAN	2020	2021	2022
1	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	71,43%	100%	100%
2	Nilai Maturitas SPIP	1,268	1,268	2,672

Sumber : Inspektorat Kota Cimahi, 2022, diolah

Capaian indikator kinerja pengawasan yang berkaitan dengan evaluasi terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja dari perangkat daerah telah mencapai 100%, yaitu seluruh perangkat daerah telah memperoleh nilai di ≥ 70 atau kategori BB. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja pada perangkat daerah, mulai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan telah mencapai kategori BB atau baik.

Adapun untuk capaian indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebelum tahun 2022 bertahan dengan nilai 1,268 atau masih pada Level Rintisan. Capaian indikator meningkat menjadi 2,672 pada tahun 2022, yang dihitung dengan metode perhitungan cepat oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut

sangat berisiko mengingat SPIP berkontribusi terhadap pencapaian Misi ke-2 Kota Cimahi Tahun 2017-2022, yaitu "Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik" serta dapat mempengaruhi Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Selain menggunakan indikator pengawasan, kinerja pengawasan dapat diukur pula melalui penyelesaian terhadap hasil pemeriksaan atau tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, maupun Inspektorat Kota Cimahi. Kinerja monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.91
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Tahun 2021-2022

NO	URAIAN	2021	2022
1	Rekomendasi Pemeriksaan BPK RI	74,24%	76,00%
2	Rekomendasi Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat	83,52%	90,55%
3	Rekomendasi Pemeriksaan Inspektorat Kota Cimahi	99,70%	100%

Sumber : Inspektorat Kota Cimahi, 2022, diolah

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mengukur jumlah rekomendasi terhadap temuan hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan, baik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, perangkat daerah maupun Pemerintah Kota Cimahi. Berdasarkan hasil monitoring, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti terus meningkat sehingga mengurangi jumlah total rekomendasi temuan yang harus diselesaikan, bahkan mencapai 100% atau seluruh rekomendasi telah diselesaikan untuk hasil pemeriksaan internal Inspektorat Kota Cimahi. Capaian 100% tindak lanjut rekomendasi

menunjukkan ketaatan objek pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan.

Kendala yang menjadi hambatan pencapaian kinerja pengawasan antara lain :

- a. Jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah Perangkat Daerah yang diawasi belum memadai;
- b. Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme belum memadai; dan
- c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Perangkat Daerah belum optimal.

2.1.3.4. Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

1. Urusan Kesekretariatan Daerah

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dengan indikator *outcome* berupa Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan indikator *impact* berupa *ease of doing bussiness*, *corruption perception index*, *government perception index* dan *trust barometer*. Tiga sasaran reformasi birokrasi lama yaitu birokrasi bersih dan akuntabel dengan indikator Indeks RB, birokrasi yang kapabel dengan indikator indeks kelembagaan, indeks SPBE, indeks profesionalitas ASN serta pelayanan publik yang prima dengan indikator indeks pelayanan publik.

KemenPANRB telah merumuskan kerangka pelaksanaan reformasi *birokrasi* tahun 2020-2024 dengan tujuan

birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Indikator *outcome* tetap sama dengan yang lama dan indikator *impact* terdapat perubahan untuk indikator *government perception index* dan *trust barometer* menjadi Capaian Kinerja Pemerintah dan *e-government development index*. Sasaran reformasi birokrasi secara umum yaitu pertama, Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, Dan Kolaboratif dan sasaran kedua Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional. Indikator sasaran pertama adalah Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Capaian Akuntabilitas Keuangan. Indikator untuk sasaran kedua yaitu Nilai Survei Penilaian Integritas, Nilai Employer Branding, Indeks BerAKHLAK dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Tindak lanjutnya berupa kebijakan percepatan dan kebijakan lanjutan.

Sasaran reformasi birokrasi tematik secara nasional Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Hasil Pada 4 Tema Prioritas RB Tematik dan secara Instansional yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Hasil Penanganan Tema yang Dipilih. Indikator untuk sasaran tematik ini adalah capaian kinerja RB tematik dengan tindak lanjut berupa Rencana aksi tematik. RB tematik yang dimaksud adalah RB yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan Investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, RB Tematik Prioritas Presiden. Indikator untuk RB tematik ini adalah Penurunan Tingkat Kemiskinan, Peningkatan Realisasi Investasi, Indeks Transformasi digital. Laju inflasi dan Tingkat Penggunaan PDN.

Tabel 2.92
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi Tahun 2019-2022

URAIAN	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	60,01 (B)	59,22 (CC)	60,01 (B)	(B)

Sumber : Setda Kota Cimahi, 2022 diolah

Berdasarkan data didapatkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi Tahun 2021 masuk pada *kategori* (B) dengan Nilai 60,01 berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 7 Maret 2022. Untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggolongkan Kota Cimahi pada kategori (B) namun nilai Indeks akan disampaikan lebih lanjut.

b. Sakip

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Tujuan evaluasi SAKIP adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan data diperoleh informasi bahwa realisasi nilai SAKIP Kota Cimahi Tahun 2022 masuk pada kategori (B) namun secara nilai belum bisa dirilis dari KemenPANRB.

Tabel 2.93
Nilai SAKIP Kota Cimahi Tahun 2019-2022

URAIAN	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP Kota Cimahi	66 (B)	65,07 (B)	65,88 (B)	B

Sumber : Setda Kota Cimahi, 2022, diolah

c. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas :

- 1) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- 2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Adapun nilai LPPD Kota Cimahi disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.94
Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Cimahi Tahun 2019-2022

URAIAN	2019	2020	2021	2022
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Masih proses

Sumber : Setda Kota Cimahi, 2022, diolah

Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Cimahi pada Tahun 2018 hingga 2020 dengan status tetap Sangat Tinggi namun turun menjadi tinggi pada tahun 2021. Hal ini dipengaruhi salah satunya adalah terkait dengan hasil penilaian terhadap capaian IKK yang meningkat, sehingga berpengaruh terhadap penilaian LPPD secara keseluruhan. Untuk tahun 2022, Kemendagri belum mengumumkan nilai LPPD Kota Cimahi.

d. Survey Kepuasan Masyarakat

Survei kepuasan masyarakat merupakan data otentik tentang respon masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun nilai atau predikat Survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kota Cimahi mengalami peningkatan. Hasil survei tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.95
Indikator Survei Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2019-2022

URAIAN	2019	2020	2021	2022
Survei Kepuasan Masyarakat	80,75	81,57	82,70	83,61

Sumber : Setda Kota Cimahi, 2022, diolah

2. Urusan Kesekretariatan DPRD

Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang mempunyai fungsi dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas DPRD Kota Cimahi untuk melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran. Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD adalah Persentase fasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi yang sesuai standar. Capaian indikator kinerja tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.96
Indikator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022

URAIAN	2019	2020	2021	2022
Persentase fasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi yang sesuai standar (%)	99	99	100	93

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Cimahi, 2022, diolah

Capaian indikator Persentase fasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi yang sesuai standar mengalami penurunan khususnya dalam aspek Publikasi dan Dokumentasi DPRD, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah,

Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

2.1.3.5. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Urusan Pemerintahan Umum dibuat oleh Pemerintah Pusat dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan umum dimaksud dilaksanakan oleh Wali Kota atau Bupati di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal, Wali Kota bertanggungjawab kepada menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat.

Pelaksanaan kegiatan aspek pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya Saing sebuah bangsa dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas daya pembangunan sebuah bangsa diantaranya adalah kualitas pertumbuhan ekonomi dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan dan wilayah. Indikator lain yang dapat digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks kemampuan daya beli, indeks pendidikan dan indeks kesehatan.

Selain kedua indikator di atas, dalam era globalisasi ini dalam rangka reformasi daya saing, untuk mengukur capaian peningkatan daya saing, *The World Economic Forum* setiap tahunnya telah menerbitkan sebuah indeks yang disebut Indeks Daya Saing. Indeks ini memiliki 114 indikator yang kemudian dikelompokkan menjadi 12 pilar. Salah satu dari indikator tersebut adalah inovasi dan faktor-faktor kemajuan usaha (*business sophistication factors*).

Dalam level nasional, berkaitan dengan pengukuran indeks daya saing terdapat *tools* atau alat ukur diantaranya Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Indeks Radar Sistem Inovasi Daerah (RIDa) dua alat ukur ini dikembangkan oleh Kemenristek/BRIN. Untuk IDSD Kota Cimahi Pada tahun 2019 dan tahun 2020 berhasil meraih predikat sangat tinggi. Pada tahun 2021 Kota Cimahi memperoleh nilai 3,633 atau predikat berdaya saing TINGGI. Dengan rincian Aspek Ekosistem Inovasi 4,253; Aspek Penguat 3,445; Aspek Sumber Daya Manusia 3,5 dan Aspek Pasar 3,333. Berbagai indikator yang diukur pada tahun 2021 ini (data yang diukur adalah data tahun 2020 diperbandingkan dengan data tahun 2019) mengalami beberapa penurunan skor, hal ini disebabkan dikarenakan adanya musibah dunia Pandemi Covid 19 yang mengguncang seluruh dunia pada awal tahun 2020 hingga saat ini. Pada tahun 2022 pengukuran IDSD dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari Kementerian/Lembaga

yang dilakukan langsung oleh BRIN. Pengukuran dilakukan terhadap 4 aspek yaitu aspek Lingkungan Pendukung, SDM, Pasar dan Ekosistem Inovasi. Kota Cimahi mendapatkan skor 3,16. Skor ini di bawah skor Nasional sebesar 3,26. Hal ini menjadi catatan penting bahwa Kota Cimahi masih perlu memanfaatkan segala potensinya dalam upaya meningkatkan daya saing daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk pengukuran RIDA pada tahun 2021 Kota Cimahi berhasil mencapai skor 83,79 yang sangat baik dan merupakan peringkat pertama dari seluruh responden Kabupaten /Kota yang dinilai, namun demikian Kota Cimahi masih perlu menyusun Dokumen *Roadmap* SIDA atau ke depannya menjadi Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang baru dengan mengacu pada perundangan yang baru.

Inovasi tumbuh dan berkembang dalam klaster-klaster industri karena di dalam klaster industri inilah akan terjadi penyebaran dan penyerapan pengetahuan dan difusi inovasi (*knowledge spillover and innovation diffusion*). Kota Cimahi sejak tahun 2012 mencoba mengarahkan pembangunan ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal dengan membangun sentra. Pada sentra-sentra inilah inovasi akan tumbuh dan menghasilkan produk-produk unggulan yang inovatif. Jika saja pembangunan sentra-sentra ataupun klaster-klaster ini dipadukan dengan pembangunan sektor lainnya seperti fisik infrastruktur/ lingkungan hidup, pendidikan (formal/informal), sosial, budaya dan kesehatan maka pembangunan sentra-sentra ini akan terjadi dengan lebih cepat dan lebih berkesinambungan. Kolaborasi antara banyak sektor (stakeholder) dalam proses pembangunan klaster/sentra ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam sebuah Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Sebagai salah satu implementasi pelaksanaan SIDA 2012-2017, Kota Cimahi membangun Gedung BITC (Baros Information Technology Creative) sebagai Gedung bagian yang tidak

terpisahkan dari pengembangan konsep Cimahi *Technopark*. Gedung ini diharapkan dapat memicu bangkitnya aktivitas ekonomi kota khususnya klaster industri telematika dan animasi. Strategi pengembangan klaster industri telematika dan animasi berorientasi kepada lahirnya para pelaku usaha baru (startup firms) serta komunitas-komunitas wanita, anak muda dan pengguna internet (*women, youth, netizen*).

Pengembangan kawasan BITC juga diharapkan dapat menjadi brand image bagi identitas lokal kota. Lahirnya pelaku usaha baru ini akan menjadi cermin dari daya tarik investasi di Kota Cimahi. Khusus untuk klaster industri telematika dan animasi, sejak tahun 2011 pembinaan startup dilakukan melalui kegiatan inkubasi industri dan pemberian kemudahan perizinan berusaha. Keberadaan Cimahi Technopark selain sebuah kawasan terintegrasi untuk melahirkan para wirausaha baru, mengakselerasi para pelaku UMKM/IKM eksisting dan mendorong karya-karya kreatif inovatif untuk dikomersialisasikan, juga diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan inovasi melalui program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi yang implementatif (*applied research*).

Untuk program pemulihan ekonomi di daerah akibat Pandemi Covid-19, Pemerintah menggulirkan dana transfer berupa Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan yang penggunaannya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020. Diharapkan dengan adanya DID Tambahan ini, daerah mampu memulihkan perekonomiannya melalui intervensi program/kegiatan yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Pada tahun 2020 diselenggarakan Cimahi *Small Business Innovation* (CSBI) *Competition* oleh Disdagkoperin dalam rangka pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, yang

dilanjutkan dengan pendampingan para pemenang yang diselenggarakan pada tahun 2021.

Untuk meningkatkan budaya inovasi dan mendorong tumbuh kembangnya inovasi maka Kota Cimahi sejak tahun 2021 telah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Cimahi *Motekar Awards* (ChiMA) di Kota Cimahi, dengan beberapa kelompok kategori diantaranya :

1. Kelompok SKPD termasuk RSUD Cibabat;
2. Kelompok Kelurahan;
3. Kelompok Puskesmas/UPTD/BLUD Kecuali RSUD Cibabat;
4. Kelompok Dosen Perguruan Tinggi;
5. Kelompok Umum/Masyarakat/Komunitas; dan
6. Kelompok Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Umat (Kerjasama dengan Baznas Kota Cimahi).

Pada tahun 2022 Kota Cimahi kembali menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Cimahi *Motekar Awards* (ChiMA) dengan penambahan kategori dan pelibatan Guru dan Calon Pegawai Negeri Sipil. Pada kompetisi inovasi ini terdapat 7 kategori yaitu :

1. Kelompok Perangkat Daerah termasuk RSUD Cibabat dan Bagian pada Setda;
2. Kelompok Puskesmas/UPTD/BLUD kecuali RSUD Cibabat;
3. Kelompok Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
4. Kelompok Kelurahan;
5. Kelompok Guru SD, SMP & SMA/SMK (Negeri & Swasta);
6. Kelompok Dosen Perguruan Tinggi; dan
7. Kelompok Masyarakat Umum (Pelajar, Mahasiswa, Komunitas, Perorangan, dll).

Selain itu untuk terus melahirkan inovasi-inovasi baru serta mengembangkan inovasi yang telah ada (eksisting) telah dibentuk pula TIM KLINSING (Klinik Inovasi Keliling) yang berfungsi untuk mendampingi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta pengembangan inovasi dan teknologi terus dikembangkan oleh

berbagai *stake holder* di Kota Cimahi. Namun belum semua Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta pengembangan inovasi dan teknologi tersebut terkoordinasi dan terangkum dalam suatu manajemen yang baik. Bappelitbangda Kota Cimahi melalui Bidang Litbang pada tahun 2022 telah mengembangkan teknologi melalui aplikasi Piramida (Pusat Informasi Riset dan Manajemen Inovasi Daerah Kota Cimahi) sebagai suatu *hub* informasi riset maupun manajemen inovasi. Pada tahun 2022 telah dikembangkan menu manajemen inovasi, *event* inovasi, ChiMA dan web. Ke depannya akan dikembangkan menu terkait penelitian dan pengembangan. Diharapkan Piramida akan menjadi *hub* yang dapat menghubungkan kebutuhan litbangjirap Kota Cimahi dan kesediaan/ sumber daya dari perguruan tinggi maupun lembaga litbang lainnya sehingga riset dan pengabdian insan PT serta *stake holder* kelitbangan lainnya dapat menjawab permasalahan maupun kebutuhan dari Kota Cimahi.

Peran ilmu pengetahuan dan teknologi sangat kental dalam merumuskan perencanaan pembangunan di Kota Cimahi. Pemanfaatan data sangat terlihat dalam merumuskan sektor-sektor unggulan termasuk juga pusat-pusat produk unggulan kota (sentra ekonomi). Dimungkinkannya banyak dari hasil-hasil penelitian digunakan dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Cimahi disebabkan sebagai berikut :

1. Kualitas SDM yang baik dengan jumlah ASN berpendidikan minimal S2 sebanyak 32 orang dari total 49 orang ASN, sehingga tidak sulit berdiskusi mengenai hasil penelitian dengan para perencana di Bappeda Kota Cimahi;
2. Bidang urusan kelitbangan berada pada satu institusi bidang urusan perencanaan pembangunan, sehingga terjadi komunikasi dan diskusi kebijakan pembangunan;
3. Kota Cimahi sudah terbiasa bekerja dengan IT dan ilmu pengetahuan berkat adanya Cimahi Technopark. Kegiatan kreatif dan inovatif yang dilakukan bersama pengusaha-

pengusaha muda (*start up*) sangat mewarnai kebijakan pembangunan di Kota Cimahi;

4. Dalam melakukan riset, Kota Cimahi telah mampu mengakses sumber pembiayaan dari pihak eksternal baik dari hibah penelitian bersama beberapa dosen dan juga hibah penelitian dari Uni Eropa dan *Value-Chain Capacity Building Network* (VCBN) yang berkantor di Swiss;
5. Sejak dikelolanya urusan bidang kelitbangan secara lebih fokus kepada kajian terapan melalui pembuatan *pilot project* di beberapa lokasi sejak tahun 2018 bekerja bersama para perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta masyarakat, hasil percontohan konsep di beberapa lokasi menunjukkan hasil yang baik, sehingga bisa memberikan input tidak hanya bagi perencanaan pembangunan tetapi lebih jauh lagi menjadi contoh bagi implementasi program dan kegiatan di SKPD. Beberapa percontohan *pilot project* diantaranya :
 - a. Pembangunan model kolektif Sentra Keripik Pedas Setiamanah;
 - b. Pembangunan model rantai nilai Sentra Susu Dan Produk Susu Cipageran Kota Cimahi;
 - c. Percontohan pengembangan kewirausahaan sosial berbasis pariwisata budaya di Cireundeu Kota Cimahi;
 - d. Percontohan pengembangan destinasi wisata alam berbasis kolaborasi dengan multi *stakeholders* di Legok Awi Cipageran Kota Cimahi;
 - e. Piloting Pengolahan Sampah Organik dengan Metode Maggot BSF; dan
 - f. Teknologi penyaringan air sungai menjadi air bersih dengan teknologi HR WTP Kerjasama dengan BP2D JABAR dan ITB.

Berhasil diperolehnya prestasi penghargaan inovasi dan kreatifitas di Kota Cimahi diantaranya :

1. Juara I tahun 2019 tingkat nasional untuk perkotaan dengan indeks daya saing tertinggi melalui Anugerah IPTEK dan Inovasi Budhipraja dari Kemenristek;
2. Juara 5 Kota melalui penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* dengan indeks inovasi tertinggi di Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri (tahun 2019);
3. Masuk Top 99 dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik melalui *Gastrodiplomacy* Cireundeu dari Kementerian PAN dan RB (tahun 2019);
4. Top 5 *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* tahun 2020 dari Kemenpan RB;
5. Peringkat 3 Kategori Kota Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif pada Tahun 2020 dari Kemenristek/BRIN;
6. Predikat Kota Sangat Inovatif Pada Ajang *Innovative Government Award* Tahun 2020 dari Kemendagri;
7. Top 10 Kompetisi Inovasi Jawa Barat untuk Inovasi Bidik Co-Space (UPTD Cimahi *Technopark* - Disdagkoperin) pada Tahun 2021;
8. Top 45 Kompetisi Inovasi Jawa Barat untuk Inovasi MPOK NOR KOCI (RSUD Cibabat) pada Tahun 2021;
9. Ditetapkan sebagai 11 Kab/Kota (KaTa) kreatif oleh Kemenparekraf RI tahun 2021;
10. Mendapatkan penghargaan pada dimensi *Smart Economy* pada evaluasi program *Smart City* tahun 2021;
11. Pada ajang Riset Rating Transformasi Digital dan Kota Cerdas Indonesia 2021 (RTDI & RKCI 2021) Kota Cimahi mendapatkan penghargaan untuk Kategori Kota Dengan Ekonomi Cerdas, Kategori Kota Dengan Lingkungan Cerdas dan Kategori Kota Tangguh (*Resilience City*);
12. Predikat Kota Sangat Inovatif dengan Peringkat ke-4 pada Ajang *Innovative Government Award* Tahun 2021 dari Kemendagri;
13. Predikat Kota Sangat Inovatif dengan Peringkat ke-5 pada Ajang *Innovative Government Award* Tahun 2022 dari Kemendagri;

14. Melalui inovasi *Makerspace* Digital Kreatif yang dikembangkan oleh UPTD Cimahi *Techno Park*, Pemerintah Daerah Kota Cimahi meraih Penghargaan Top Terpuji 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022;
15. Pada penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2022, terpilih inovasi RUSUNAWA - *Eco Green* dari UPTD Rusunawa Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan Kota Cimahi dan PIN MEDSOS (Penerapan Inovasi Pembelajaran Berbasis Media Sosial) dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi sebagai Top 45 Inovasi. Kemudian pada tahap penentuan Top 21 terpilih inovasi PIN MEDSOS sebagai perwakilan Kota Cimahi yang mendapat apresiasi;
16. ISNA (Indonesian *Smart Nation Award*) 2022 Kategori Smart Branding Kota;
17. *MarkPlus Institute* menghadirkan *Government Entrepreneurial Marketing Awards* (GEMA) yang dipersembahkan oleh *Philip Kotler Center for ASEAN Marketing (PK-CAM)*.
3 inovasi Kota Cimahi yang mendapat apresiasi yaitu :
 - a. Peringkat Silver Pada *Entrepreneurial Marketing Government Awards* 2022 untuk kategori UMKM (Inovasi Pemberdayaan UMKM);
 - b. Peringkat Bronze pada *Entrepreneurial Marketing Government Awards* 2022 untuk kategori Perdagangan (Inovasi Pemberdayaan Perdagangan); dan
 - c. Peringkat Bronze pada *Entrepreneurial Marketing Government Awards* 2022 untuk kategori Pariwisata (Inovasi Pemberdayaan Pariwisata).
18. Pemerintah Daerah Kota Cimahi juga meraih penghargaan Puskesmas Terbaik Tingkat nasional Tahun 2022. Pada penghargaan tersebut dinilai inovasi yang dilaksanakan serta pelaksanaan layanan di Puskesmas dan juga kelengkapan administrasi. UPTD Puskesmas Cimahi memiliki 2 inovasi unggulan yaitu OPAK MANTUL (OPerAsi

Kebiri/steril kucing bertarif Murah untuk kendalikan populasi) dan CEK ADRENALINE (Cegah Kerumunan Antrian Dengan Cara pENDaftaran onLINE).

Telah berhasilnya beberapa *pilot project* dan capaian prestasi penghargaan nasional dan internasional dinilai telah berhasil meningkatkan daya saing daerah Kota Cimahi dan mampu meyakinkan para Perangkat Daerah (PD) teknis untuk berkolaborasi melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang hingga saat ini sedang berjalan di antaranya :

1. Pengembangan *agroforestry* yang mengintegrasikan budidaya dan konservasi Durian Kamajaya sebagai durian asli dataran tinggi Kota Cimahi bersama Dinas Pangan dan Pertanian serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Lokus terdapat di dua lokasi yaitu di Bukit Padakasih Kelurahan Cibeber dan Hutan Kota Kelurahan Cipageran bersama UNPAD, IPB, Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
2. Pengembangan kewirausahaan sosial melalui pemanfaatan larva maggot BSF untuk mengolah sampah organik dengan DLH Kota Cimahi di Kelurahan Padasuka bersama Universitas Muhammadiyah Bandung (UMBdg);
3. Pengembangan padi Organik antara komunitas petani dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi;
4. Pendampingan kewirausahaan melalui kegiatan Tematik setiap tahun kepada 50 UMKM bekerjasama dengan Disdagkoperin, UKM serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), serta pendampingan Kawasan Seni dan Budaya dari ISBI Bandung dan STIEPAR YAPARI melalui kegiatan KKN tematik;
5. Pilot project instalasi pengolahan air Kota Cimahi bekerjasama dengan ITB, BP2D Jabar, Manchester University dan DPKP Kota Cimahi;

6. Pengembangan kapasitas Inovasi ASN Kota Cimahi bekerjasama dengan *Faculty of Engineering National University of Singapore* (NUS) dan UNPAR pada tahun 2020.
7. Pengembangan destinasi wisata alam berbasis kolaborasi dengan multi stakeholders di Legok Awi Cipageran yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan di Ekowisata Cipageran Kota Cimahi yang dilaksanakan pada tahun 2022, bekerjasama dengan diantaranya ISBI Bandung dan STIEPAR; dan
8. Pengembangan portal katalog marketplace umkmcimahi.com melalui program inovatif GASKEUN (Gerakan Aksi Selamatkan Kelompok Usaha Mikro Untuk Negeri) Kota Cimahi.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Nilai PDRB Kota Cimahi atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 37.538,21milyar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 3.293,74 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 34.244,46 milyar rupiah. Turunnya nilai PDRB tahun 2021 ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku 2010 Kota Cimahi pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.97
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Jenis Pengeluaran
Kota Cimahi Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	21.918,08	23.455,65	23.316,59	23.996,23	26.687,42
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	71,78	76,56	76,05	77,35	84,47
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.732,81	1.835,80	1.825,36	1.880,50	1.931,94
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	10.210,88	10.766,80	10.061,79	11.426,18	12.216,52
Perubahan Inventori	1.096,71	1.135,56	493,10	-211,24	34,66
Net Ekspor Barang dan Jasa	-5.790,22	-4.630,82	-3.562,20	-2.924,55	-3.416,81
PDRB	29.240,03	32.639,54	32.210,69	34.244,46	37.538,21

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2023

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan yang dibelanjakan/pengeluaran untuk kebutuhannya, maka rata-rata pengeluaran per kapita pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.98
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran
Kota Cimahi Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	15.505,45	16.138,02	15.696,18	15.961,42	16.699,19
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	51,78	53,41	51,46	52,23	54,20
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.079,54	1.120,78	1.101,55	1.117,59	1.106,18
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	7.284,43	7.574,12	7.033,98	7.522,03	7.540,08
Perubahan Inventori	654,25	654,86	287,26	-116,08	18,68
Net Ekspor Barang dan Jasa	-3.382,85	-2.685,15	-1.829,88	-1.261,40	-756,60
PDRB	21.192,60	22.856,04	22.340,56	23.275,78	24.652,73

Sumber : BPS Kota Cimahi, 2023

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.2.1. REKAPITULASI KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

Tabel berikut menunjukkan Program, Indikator, Target, dan Capaian Kinerja Tahun 2022 di Setiap Perangkat Daerah Kota Cimahi. Jumlah total program yang dilaksanakan adalah 118 program dengan 258 indikator yang tersebar di 28 Perangkat Daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata kinerja indikator program mencapai 108,53% dan berada dalam kategori sangat tinggi. Adapun realisasi anggaran pada Tahun 2022 mencapai Rp. 1.377.414.247.898,00 atau sebesar 85,31% dari total anggaran sebesar Rp. 1.614.682.803.477,00. Realisasi anggaran tersebut berada dalam kategori tinggi.

Tingginya capaian kinerja indikator program disebabkan terdapat 229 indikator berada pada kategori sangat tinggi (90 indikator yang memiliki capaian lebih dari 100% dan 139 indikator yang capaiannya antara 91% dan 100%), 15 indikator dalam kategori tinggi (76% < 90%), 3 indikator dalam kategori sedang (66%<75%), 3 indikator yang capaiannya antara 51% sampai dengan 65% atau berada dalam kategori rendah, 6 indikator yang berkinerja kurang atau sama dengan 50% atau berada dalam kategori sangat rendah, dan terdapat 2 indikator yang belum ada data.

Tabel 2.99
Rekapitulasi Realisasi dan Capaian Kinerja Program

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	103,04	100,47	97,51	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	97,08	95,05	97,91	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	Persen	97,73	99,52	101,83	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD	Persen	0,014	0,028	50,00	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SD sesuai SNP	Nilai	95,48	86,71	90,81	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Bersertifikasi	Persen	54,66	49,1	89,83	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen	97,6	97,8	100,20	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SD yang Terakreditasi Minimal B	Persen	96,55	99,14	102,68	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	90,08	100,32	111,37	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	76,64	82,26	107,33	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	Persen	79,59	89,5	112,45	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SMP	Persen	0	0,02	99,80	Dinas Pendidikan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	96,56	93,18	96,50	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SMP sesuai SNP	Nilai	77,81	82,00	105,38	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Bersertifikasi	Persen	78,56	59,24	75,41	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen	97,77	99,26	101,52	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SMP yang Terakreditasi Minimal B	Persen	86,66	91,67	105,78	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	Persen	77,35	79,33	102,56	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	77,35	79,33	102,56	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang PAUD sesuai SNP	Nilai	52,1	81	155,47	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD Bersertifikasi	Persen	51,39	9,53	18,54	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	Persen	46,7	42,05	90,04	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	Persen	62,95	53,87	85,58	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Melek Huruf	Persen	99,99	99,99	100,	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	68,06	29,09	42,74	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang Dikmas sesuai SNP	Nilai	100	100	100	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase PKBM yang Terakreditasi	Persen	66,67	60	90,00	Dinas Pendidikan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase LKP yang Terakreditasi	Persen	46,67	90	192,84	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase penerapan kurikulum sesuai standar	persen	100	100	100	Dinas Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SD	Nilai	01:24	01:24	100	Dinas Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SMP	Nilai	01:24	01:21	96,43	Dinas Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang PAUD	Nilai	01:07	01:11	105,97	Dinas Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru terhadap Warga Belajar Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Nilai	01:07	01:07	100	Dinas Pendidikan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama	Persen	84,62	53,85	63,64	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan	Persen	83	99,65	120,06	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi stunting pada balita	Persen	10,7	9,7	101,89	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC))	Persen	97	98,83	101,89	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi/Izin	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pengobatan TB yang berhasil	Persen	90	87,7	97,44	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	90	96,7	107,44	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Persentase Kasus dan KLB yang ditangani	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Upaya Kesehatan Masyarakat						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tingkat Pemenuhan Standar Minimal Tenaga Kesehatan	Persen	97	100	103,09	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibina dan sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Rumah Tangga yang Ber PHBS	Persen	54	53,4	98,89	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80	79,06	98,83	RSUD CIBABAT
Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2,1	2,1	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengendalian Penduduk	Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	Persen	9	11,326	126	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB	Persen	79	99,69	126	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio akseptor KB mandiri	Persen	80	66,65	83	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai Survey Kepuasan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Nilai	90 (A)	80,86 (B)	89,84	Sekretariat DPRD

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian yang dihasilkan	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pertumbuhan inovasi	Persen	10	20,27	202,7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	2,672	89,07	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Hasil Pengawasan	Persen	80	83	103,75	Inspektorat
Program Pengembangan	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi dalam	Persen	18	15,77	87,61	Badan Kepegawaian dan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Sumber Daya Manusia	pelaksanaan tugas jabatan					Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100	100	Kecamatan Cimahi Utara
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100	100	Kecamatan Cimahi Tengah
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	95,17	95,17	Kecamatan Cimahi Selatan
Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	25	25	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Program perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan sosial	Persen	10	10	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tingkat Kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Persen	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi terhadap Perusahaan Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaku Usaha terinput dalam SIKP	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Bidang Perekonomian	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai IKM bagian Administarsi Perekonomian	Persen	77	80	104	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian	Persentase Monitoring kegiatan diperangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
dan Pembangunan						
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Standar Biaya Belanja dengan Baik	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai IKM pada Bgian Administrasi Bangunan	Persen	77	82,52	107	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pangadaan barang jasa yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan ketentuan	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ASN pelaku pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat PBJ	Persen	100,00%	100	100	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai IKM pada bagian pengadaan barang dan jasa	Persen	79,05%	79,97	101	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Persen	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Persen	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	Persen	2	7,78	389	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Persen	90	115,3	128,11	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaporan BMD secara tepat waktu	Persen	80	100	125	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dalam pelaksanaan tugasnya	Persen	14	13,1	93,57	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Program Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN	Persen	5	4,98	99,60	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang nilai kinerjanya baik	Persen	25	23,52	94,08	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Persen	80	80,06	100,08	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	Persen	65-70	70	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase permohonan rekomendasi IUI kecil dan menengah yang dilayani	Persen	100	100	100	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase permohonan rekomendasi IUTM, ijin pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan tanda daftar gudang yang dilayani	Persen	100	100	100	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	99	91,4	92	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan kartu keluarga	Persen	99	88	89	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akte kelahiran	Persen	55	54	98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akte kematian	Persen	80	112,73	141	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Validitas database pelayanan kependudukan	Persen	95	100	105	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase lembaga yang memanfaatkan profil kependudukan	Persen	92	100	109	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	100	100	100	Kecamatan Cimahi Utara

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	100	100	100	Kecamatan Cimahi Utara
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	91	91,02	100	Kecamatan Cimahi Utara
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	100	100	100	Kecamatan Cimahi Tengah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	100	100	100	Kecamatan Cimahi Tengah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	83	91	110	Kecamatan Cimahi Tengah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase permohonan perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	100	92,3	92,30	Kecamatan Cimahi Selatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	Persen	100	99,51	99,51	Kecamatan Cimahi Selatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	86	86,63	100,73	Kecamatan Cimahi Selatan
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan penanganan trantib wilayah	Persen	75	100	133	Kecamatan Cimahi Utara
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan penanganan trantib wilayah	Persen	75	75	100	Kecamatan Cimahi Tengah
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan penanganan trantib wilayah	Persen	75	80,64	107,52	Kecamatan Cimahi Selatan
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Persen	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM)	Persen	100	92,25	92,25	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Program Penguatan Ideologi Pancasila	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan	Persen	100	93,5	93,50	Kantor Kesatuan Bangsa

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
dan Karakter Kebangsaan	pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan					
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan	Persen	100	98,8	98,80	Kantor Kesatuan Bangsa
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	Persen	100	85	85	Kantor Kesatuan Bangsa
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	Persen	100	90	90	Kantor Kesatuan Bangsa
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	Persen	100	90,1	90,10	Kantor Kesatuan Bangsa
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	90	87	97	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai pelaporan AKIP kategori baik	Kategori	B	B	100	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persetanse Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persetanse Perangkatat Daerah yang Menerapkan SOP	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Standar Pelayanan	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan KDH dan WAKDH yang Terfasilitas dengan Baik	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Persen	100	95	95	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM bagian Umum dan Protokol	Nilai	80	87,38	109	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	100	91,7	92	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang Sesuai dengan SAP	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Kategori	B	B	100	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	Persen	100	99,58	100	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM pada bagian TU (tata usaha)	Nilai	81	88,12	109	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pertanggunjawaban Dokumen Pemerintah Daerah yang Bernilai Baik	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kasus Hukum yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi	Persen	100	100	100	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Agama dan Pendidikan yang Terlaksana	Persen	97	99	102	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan bidang kesehatan P2KBP3A, Sosial, Kepemudaan dan Olahraga	Persen	71	95,5	135	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Nilai	84	80,4	95,71	Sekretariat Daerah
Program Aplikasi Informatika	Cakupan pengembangan e-Government daerah	Persen	80	91	114	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	Persen	55	60	109	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik daerah. (Persentase data sektoral yang dapat disajikan tepat waktu)	Persen	60	93,33	156	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik daerah	Persen	35	100	286	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kepuasan Pengunjung perpustakaan umum kota	Persen	80,27	81,13	101	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase sarana baca masyarakat yang aktif	Persen	3	0	0	Dinas Komunikasi, Informatika,

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
						Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kebijakan penanaman modal	Kebijakan	2	1	50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase sistem informasi online penanaman modal	Persen	62,50	62,50	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM	Perusahaan	250	250,00	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi Investasi Daerah yang dipromosikan	Persen	4,76%	4,76%	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang berdaya saing	Persen	78,8	78,8	100	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Sentra Industri Pengolahan	Sentra	3	3	100	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat/tradisional yang dikelola pemerintah sesuai dengan SNI	Pasar	1	1	100	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	Persen	100	100	100	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Pengembangan Ekspor	Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti pameran promosi	Persen	25	30	120	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTP yang ditera/tera ulang	Persen	50	64,94	130	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Penggunaan dan Pemasaran	Tingkat penggunaan produksi dalam negeri	Persen	80	80	100	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Produk Dalam Negeri						Menengah, dan Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang dikelola di dalam SIINAS	Persen	50	50	100	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Pariwisata yang dikelola dengan baik	Persen	83,33	78	94	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang dipasarkan	Persen	83,33	100	120	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya manusia Pariwisata yang memiliki kompetensi	Persen	25,18	29	115	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase jumlah koperasi yang diawasi/diperiksa	Persen	40	40	100	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	Persen	15	26	173	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prosentase koperasi yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan koperasi	Persen	75%	85%	113	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	40%	40%	100	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	Persen	18,67	54,53	292	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Pengembangan UMKM	Persentase UKM yang naik dari kelas mikro menjadi kelas kecil	Persen	17,54	14,41	82	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan wirausaha baru	Persen	24,59	36,6	149	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rata-rata ketersediaan Energi	kkal/kap/hari	2400	2136	89	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rata-rata ketersediaan Protein	gr/kap/hari	63	66,5	106	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rata-rata Konsumsi Energi	kkal/kap/hari	2.100	1.982,2	94	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rata-rata Konsumsi Protein	gr/kap/hari	57	60,7	106	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	Persen	100	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi	Persen	70	98,4	141	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan dan dibangun	Persen	25	80	320	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persen	100	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi ikan konsumsi	ton	252,5	220,2	87	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi ikan hias	ekor	1.020.000	2.443.602	240	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	Persen	15,87	17,14	108%	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi ikan	Kg/kapita/thn	37	Belum Rilis	0%	Dinas Pangan dan Pertanian
Program Pemberdayaan Sosial	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Persen	1 : 200	1 : 200	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
						Perlindungan Anak
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi	Persen	15	8,85	59,00	Dinas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	Persen	5	25,98	519,60	Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	50	77,68	155,36	Dinas Tenaga Kerja
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Prosentase kesesuaian program di RTKD dengan program di Renstra	Persen	90	100	111,11	Dinas Tenaga Kerja
Program Pembangunan	Prosentase koordinasi kawasan transimigrasi	Persen	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Kawasan Transmigrasi						
Program Hubungan Industrial	Persentase kasus yang diselesaikan	Persen	50	100	200	Dinas Tenaga Kerja
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	Persen	67	61,25	91	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Angkutan yang Layak jalan	Persen	95	83,23	88	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	Persen	78,09	78,09	100	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan titik kemacetan	Persen	30	26,67	89	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kondisi jalan yang mantap	Persen	94,87	96,33	102	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Tingkat Hunian	Persen	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	Persen	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni	Persen	1,47	1,92	69,39	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Program Kawasan Permukiman	luas kawasan kumuh ringan	Ha	7,23	5,02	130,57	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	Persen	10	10	100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Program Pengembangan Permukiman	Persentase Pemakaman yang tersedia	persen	7,60	7,60	100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase sarana permukiman yang tersedia taman	Persen	0,058	0,058	100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Program Peningkatan Prasarana, sarana dan	Persentase sarana permukiman yang tersedia Jalan setapak	persen	1,60	1,60	100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Utilitas Umum (PSU)						
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	Persen	99	94,78	96	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Timbunan Sampah	Persen	73	75,22	103	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Timbunan Sampah	Persen	26	19,55	75	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	77,48	80,80	104,28	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	nilai beban pencemar	ton per hari	31	3,82	187,68%	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase luas genangan di daerah rawan genangan	Persen	0,004	0,004	100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pesentase luas genangan di daerah tidak rawan genangan	persen	42,86	NA	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	69,82	79,36	113,65	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase air minum layak dan aman	Persen	24,23	24,23	100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran	Persen	100	94,6	94,60	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	Persen	100	92,31	92,31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Program Penanggulangan Bencana	Persentase pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana	Persen	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanggulangan Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Program Penanggulangan Bencana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kapasitas Sungai	m3	114,826	43,705	38,06	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	Persen	80	80	100	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen rencana lingkungan hidup yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase perusahaan yang memenuhi baku mutu air limbah	Persen	75	85,71	114	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Pencemar Air	Nilai	15,5	10,68	131,10	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Pencemar Udara	Nilai	0,6196	0,62	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase luasan kehati kota cimahi yang dikelola	Persen	1,18	1,15	97	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin penyimpanan limbah B3	Persen	75	75,19	100,25	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	Persen	55,55	77,73	140	Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Lingkungan Hidup (PPLH)	Pemerintah Daerah kota					
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persen	62	62,2	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Pemerintah Kota Dalam Kondisi Baik	Persen	72,5	72,5	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi	Persen	8	18,18	227	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan lingkungan hidup	Persen	50	64	128	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang LH tindak lanjuti	Persen	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen	90	100	111	Kecamatan Cimahi Utara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan	Persen	80	100	125	Kecamatan Cimahi Utara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen	90	90	100	Kecamatan Cimahi Tengah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan	Persen	80	80	100	Kecamatan Cimahi Tengah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen	90	95,97	106,63	Kecamatan Cimahi Selatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan	Persen	100	97,61	97,61	Kecamatan Cimahi Selatan
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Kelurahan yang Terbina	Persen	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	Persen	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
dan Masyarakat Hukum Adat						Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase tahapan kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	Persen	70	70	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase sumberdaya olahraga yang terbina	Persen	53	53	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah	Persen	50	50	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan	Persentase Anggota Pramuka Yang Dibina	Persen	12	12	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	Persen	52	60	115,38	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dilestarikan	Persen	55	94	170,91	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	33	33	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	Persen	100	11,8	12	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	Persen	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	100	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	Persen	90	90	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	Persen	0,65	0,74	113,85	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	Persen	12,39	18,39	148,43	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	Persen	14,46	14,41	99,65	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	Persen	11,66	14,2	121,78	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	Persen	0,39	0,59	151,28	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan	Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	Persen	1,25	1,98	158,40	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
Keluarga Sejahtera (KS)						Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan secara umum, adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja :
 - a. Penentuan target yang terlalu tinggi akibat baseline data belum akurat, tidak lengkap, atau tidak tersedia;
 - b. Waktu pelaksanaan yang belum sesuai dengan rencana kerja akibat pelaksanaan pekerjaan tergantung dari tingkat provinsi atau nasional, perangkat daerah dan lembaga lainnya;
 - c. Pekerjaan yang dilaksanakan kurang atau belum sinergi dengan Indikator kinerja yang akan dicapai;
 - d. Alokasi anggaran belum sesuai dengan target kinerja; dan
 - e. Sumber daya manusia masih kurang, baik secara kompetensi dan kuantitas untuk melaksanakan kegiatan, terutama yang berhubungan dengan survei dan pekerjaan lapangan lainnya, serta tenaga pengelola dan analis data.
2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja :
 - a. Penentuan target kinerja yang sudah sesuai;
 - b. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan
 - c. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi kinerja kegiatan melebihi target kinerja :
 - a. Penentuan target kinerja terlalu rendah akibat baseline data belum akurat, tidak lengkap, atau tidak tersedia sehingga kurang tepat dalam menentukan proyeksi target kinerja;

- b. Alokasi anggaran yang berubah pada saat pelaksanaan anggaran tidak disertai dengan perubahan target kinerja;
- c. Perhitungan realisasi anggaran yang salah akibat data yang kurang tepat atau rumus yang perhitungan yang belum benar; dan
- d. Efisiensi dan efektivitas dari sisi pelaksanaan, pendanaan, dan sumber daya manusia yang digunakan.

2.2.2. KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir penyelenggaraan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, terdapat 38 bidang urusan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi, bidang urusan yang memiliki kinerja paling tinggi adalah urusan keuangan dengan total capaian sebesar 389%. Tingginya capaian tersebut disebabkan adanya capaian indikator yang capaian jauh melebihi target yang ditetapkan. Kinerja yang paling rendah terdapat di bidang urusan perpustakaan dengan capaian sebesar 51% dan berada dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan sejak merebaknya kasus COVID-19 di Kota Cimahi, seluruh ruang publik, termasuk perpustakaan telah ditutup untuk membatasi adanya kerumunan massa. Perpustakaan hanya dapat diakses secara daring melalui *e-library* Kota Cimahi. Data hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.100
Capaian Kinerja Setiap Urusan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
Angka Melek Huruf	99,99	Persen	99,99	99,99	100	100,01%	99,99	99,99	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	77,35	Persen	77,35	77,08	64,19	83,28%	77,35	79,33	103%	102,56%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	103,04	Persen	103,04	102,77	92,16	89,68%	103,04	100,47	98%	97,51%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	90,08	Persen	90,08	89,81	92,2	102,66%	90,08	100,32	111%	111,37%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,08	Persen	97,08	96,81	88,97	91,90%	97,08	95,05	98%	97,91%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	76,64	Persen	76,64	76,37	84,99	111,29%	76,64	82,26	107%	107,33%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	97,73	Persen	97,73	97,46	93,43	95,86%	97,73	99,52	102%	101,83%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	79,59	Persen	79,59	79,32	89,91	113,35%	79,59	89,5	112%	112,45%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah SD	0,014	Persen	0,014	1,5	2,8	13,33%	0,014	0,028	50%	50,00%	Rendah	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah SMP	0	Persen	0	1,9	6,19	-125,79%	0	0,02	0%	99,8	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	77,35	Persen	77,35	77,08	56,95	73,88%	77,35	79,33	103%	102,56%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	96,56	Persen	96,56	96,29	90,13	93,60%	96,56	93,18	96%	96,50%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	68,06	Persen	68,06	68,89	20,52	29,79%	68,06	29,09	43%	42,74%	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan
Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang Sesuai dengan SAP	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Nilai AKIP Sekretariat Daerah	B	Kategori	B	B	B	100,00%	B	B	100%		Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Nilai IKM bagian Umum dan Protokol	80	Nilai	80	78	83,36	106,87%	80	87,38	109%	109,23%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Nilai IKM pada bagian TU (tata usaha)	81	Nilai	81	80	88,07	110,09%	81	88,12	109%	108,79%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	90	Persen	90	90	83,25	92,50%	90	87	97%	96,67%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	46,7	Persen	46,7	46,7	70,89	151,80%	46,7	42,05	90%	90,04%	Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD Bersertifikasi	51,39	Persen	51,39	51,39	42,02	81,77%	51,39	9,53	19%	18,54%	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Bersertifikasi	54,66	Persen	54,66	54,66	49,85	91,20%	54,66	49,1	90%	89,83%	Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	97,6	Persen	97,6	97,6	95,21	97,55%	97,6	97,8	100%	100,20%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Bersertifikasi	78,56	Persen	78,56	78,56	63,81	81,22%	78,56	59,24	75%	75,41%	Sedang	Dinas Pendidikan
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	97,77	Persen	97,77	97,1	96,5	99,38%	97,77	99,26	102%	101,52%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase Kegiatan KDH dan WAKDH yang Terfasilitas dengan Baik	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Persentase koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	100	Persen	100	100	92	92,00%	100	99,58	100%	99,58%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	62,95	Persen	62,95	53,11	44,58	83,94%	62,95	53,87	86%	85,58%	Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase LKP yang Terakreditasi	46,67	Persen	46,67	40	20,83	52,08%	46,67	90	193%	192,84%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase penerapan kurikulum sesuai standar	100	persen	100	0	0	0,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai pelaporan AKIP kategori baik	B	Kategori	B	B	B	100,00%	B	B	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Standar Pelayanan	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase PKBM yang Terakreditasi	66,67	Persen	66,67	62,5	53,85	86,16%	66,67	60	90%	90,00%	Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase Realisasi Anggaran	100	Persen	100	100	84	84,00%	100	91,7	92%	91,70%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	95	95%	95,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase SD yang Terakreditasi Minimal B	96,55	Persen	96,55	95,69	97,41	101,80%	96,55	99,14	103%	102,68%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase SMP yang Terakreditasi Minimal B	86,66	Persen	86,66	80	75,56	94,45%	86,66	91,67	106%	105,78%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SOP	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang PAUD	0,046528	Nilai	0,046527778			0,00%	0,046527778	0,049305556	106%	105,97%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SD	0,058333	Nilai	0,058333333			0,00%	0,058333333	0,058333333	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SMP	0,058333	Nilai	0,058333333			0,00%	0,058333333	0,05625	96%	96,43%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap Warga Belajar Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,046528	Nilai	0,046527778			0,00%	0,046527778	0,046527778	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang Dikmas sesuai SNP	100	Nilai	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang PAUD sesuai SNP	52,1	Nilai	52,1	52	81	155,77%	52,1	81	155%	155,47%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SD sesuai SNP	95,48	Nilai	95,48	95,47	60,7	63,58%	95,48	86,71	91%	90,81%	Tinggi	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SMP sesuai SNP	77,81	Nilai	77,81	77,8	57,4	73,78%	77,81	82	105%	105,38%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	90	Persen	90	86	91,89	106,85%	90	96,7	107%	107,44%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Cakupan Rumah Tangga yang Ber PHBS	54	Persen	54	53	56,07	105,79%	54	53,4	99%	98,89%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Indeks Kepuasan Masyarakat	80	Persen	80	75	83,62	111,49%	80	86,63	101%	108,29%	Sangat Tinggi	RSUD CIBABAT
Persentase Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi/Izin	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Persentase Kasus dan KLB yang ditangani	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian Universal Health Coverage (UHC))	97	Persen	97	96	98,64	102,75%	97	98,83	102%	101,89%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama	84,62	Persen	84,62	69,23	53,85	77,78%	84,62	53,85	64%	63,64%	Rendah	Dinas Kesehatan
Persentase sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibina dan sesuai standar	100	Persen					100				Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Prevalensi stunting pada balita	10,7	Persen	10,7	10,8	10,18	94,26%	10,7	9,7	91%	109,35%	Tinggi	Dinas Kesehatan
Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal	83	Persen	83	83	98,37	118,52%	83	99,65	120%	120,06%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
bidang kesehatan yang diterapkan												
Tingkat Pemenuhan Standar Minimal Tenaga Kesehatan	97	Persen	97	95	100	105,26%	97	100	103%	103,09%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Tingkat Pengobatan TB yang berhasil	90	Persen	90	90	84,77	94,19%	90	87,7	97%	97,44%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
Kapasitas Sungai	114,826	m3	114,826	62,015	89628	38,06%	114,826	43,705	38%	38,06%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
nilai beban pencemar	31	ton per hari	31	31	4,22	-	31	3,82	187,68%	187,68%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase air minum layak dan aman	24,23	Persen	24,23	24,06	18,45	-	24,23	24,23	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Bangunan Pemerintah Kota Dalam Kondisi Baik	72,5	Persen	72,5	71	100	140,85%	72,5	72,5	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi	8	Persen	8	6,2	0	0,00%	8	18,18	227%	227,25%	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase kondisi jalan yang mantap	94,87	Persen	94,87	93,37	94,02	100,70%	94,87	96,33	102%	101,54%	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase luas genangan di daerah rawan genangan	0,004	Persen	0,004	0,057	0,086	100,00%	0,004	0,004	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Pemakaman yang tersedia	7,60	persen	7,60	7,6	7,6	100,00%	7,60	7,60	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	62	Persen	62	62	100	161,29%	62	62,2	100%	100,32%	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	80	Persen	80	80	82	100,00%	80	80	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	69,82	Persen	69,82	69,65	89,79	113,65%	69,82	79,36	114%	113,66%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	77,48	Persen	77,48	76,78	80,55	104,28%	77,48	80,8	104%	104,28%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase luas genangan di daerah tidak rawan genangan	42,86	persen	42,86	57,14	33,09	-	42,86	-	-		Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
luas kawasan kumuh ringan	7,23	Ha	7,23	7,23	7,23	3,21%	7,23	5,02 Ha	130,57%	130,57%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	10	Persen	10	10	10	100,00%	10	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase rumah tidak layak huni	1,47	Persen	1,47	1,45	1,45	98,08%	1,47	1,92	69,39%	69,39%	Sedang	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase sarana permukiman yang tersedia Jalan setapak	1,6	persen	1,60	1,6	1,6	100,00%	1,6	1,60	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase sarana permukiman yang tersedia taman	0,058	Persen	0,058	0,058	0,058	100,00%	0,058	0,058	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Tingkat Hunian	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA												

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100%	Sangat Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	92,31	92%	92,31%	Sangat Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana	100	Persen	100	73,33	100	136,37%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100	Persen	100	100	0	0,00%	100	92,25	92%	92,25%	Sangat Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	94,6	95%	94,60%	Sangat Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100	Persen					100	100	100%	100%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	1:200	Persen					1:200	1:200	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
Persentase kasus yang diselesaikan	50	Persen	50	50	95,65	191,30%	50	100	200%	200,00%	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	50	Persen	50	50	77,68	155,36%	50	0,8952	2%	1,79%	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja
Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi	15	Persen	15	10	4,26	42,60%	15	8,85	59%	59,00%	Rendah	Dinas Tenaga Kerja
Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	5	Persen	5	5	14,08	281,60%	5	0,2598	5%	5,20%	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja
Prosentase kesesuaian program di RTKD dengan program di Renstra	0,9	Persen	0,9			0,00%	0,9	1	111%	111,11%	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
Prosentase koordinasi kawasan transigrasi	1	Persen	1			0,00%	1	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	11,8	12%	11,80%	Sangat Rendah	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	90	Persen	90	87,94	89,82	102,14%	90	90	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100	Persen					100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	33	Persen	33	33	59,2	179,39%	33	33	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
Persentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi	70	Persen	70	70	78,5	112,14%	70	98,4	141%	140,57%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Rata-rata ketersediaan Energi	2400	kkal/kap/hari	2400	2400	2318	96,58%	2400	2136	89%	89,00%	Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
Rata-rata ketersediaan Protein	63	gr/kap/hari	63	63	67,8	107,62%	63	66,5	106%	105,56%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
Rata-rata Konsumsi Energi	2100	kkal/kap/hari	2100	2100	2093,9	99,71%	2100	1982,2	94%	94,39%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
Rata-rata Konsumsi Protein	57	gr/kap/hari	57	57	61,9	108,60%	57	60,7	106%	106,49%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											Sangat Tinggi	
Hasil Pengukuran Indeks Pencemar Air	15,5	Nilai	15,5	16	10,68	66,75%	15,5	10,68	69%	68,90%	Sedang	Dinas Lingkungan Hidup
Hasil Pengukuran Indeks Pencemar Udara	0,6196	Nilai	0,6196	0,6215	0,542	87,21%	0,6196	0,62	100%	100,06%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase dokumen rencana lingkungan hidup yang dimanfaatkan	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase luasan kehati kota cimahi yang dikelola	1,18	Persen	1,18	1,15	1,15	100,00%	1,18	1,15	97%	97,46%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan lingkungan hidup	50	Persen	50	50	86,36	172,72%	50	64	128%	128,00%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin penyimpanan limbah B3	75	Persen	75	75	69,81	93,08%	75	75,19	100,25%	100,25%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Penanganan Timbulan Sampah	73	Persen	73	74	77	104,05%	73	75,222	103%	103,04%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota	55,55	Persen	55,55	50	63,05	126,10%	55,55	77,72511848	140%	139,92%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Persentase pengaduan yang LH tindak lanjuti	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	26	Persen	26	24	17,2	71,67%	26	19,554	75%	75,21%	Sedang	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase perusahaan yang memenuhi baku mutu air limbah	75	Persen	75	70	70,74	101,06%	75	85,71	114%	114,29%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase sampah yang dikelola	99	Persen		98	94,07	95,99%	99	94,777	96%	95,73%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
Cakupan penerbitan akte kelahiran	55	Persen	55	50	49,94	99,88%	55	54	98%	98,18%	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan penerbitan akte kematian	80	Persen	80	75	95,6	127,47%	80	112,73	141%	140,91%	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan penerbitan kartu keluarga	99	Persen	99	99	62,27	62,90%	99	88	89%	88,89%	Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99	Persen	99	99	97,49	98,47%	99	91,4	92%	92,32%	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase lembaga yang memanfaatkan profil kependudukan	92	Persen	92	90	100	111,11%	92	100	109%	108,70%	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Validitas database pelayanan kependudukan	95	Persen	95	92	80,14	87,11%	95	100	105%	105,26%	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Persentase Administrasi Kelurahan yang Terbina	100	Persen	100			0,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	100	Persen	100			0,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	12,39	Persen	12,39	12,39	46,49	375,22%	12,39	18,39	148%	148,43%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	11,66	Persen	11,66	11,66	29,72	254,89%	11,66	14,2	122%	121,78%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	14,46	Persen	14,46	14,46	26,95	186,38%	14,46	14,41	100%	99,65%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	1,25	Persen	1,25	1,25	8,9	712,00%	1,25	1,98	158%	158,40%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	0,39	Persen	0,39	0,37	2,17	586,49%	0,39	0,59	151%	151,28%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	0,65	Persen	65	0,65	0,37	56,92%	0,65	0,74	114%	113,85%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rasio Akseptor KB	79	Persen	79	78,9	79,13	100,29%	79	99,69	126%	126,19%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Rasio akseptor KB mandiri	80	Persen	80	80	80	100,00%	80	66,65	83%	83,31%	Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,1	Anak	1,8	2,3	2,3	100,00%	2,1	2,1	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	9	0	9	9,1	9,6	105,49%	9	11,326	126%	125,84%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
Persentase Angkutan yang Layak jalan	95	Persen	95	95	83,23	87,61%	95	83,23	88%	87,61%	Tinggi	Dinas Perhubungan
Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	67	Persen	67	67	86,53	129,15%	67	61,25	91%	91,42%	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	78,09	Persen	78,09	78,09	78,09	100,00%	78,09	78,09	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
Persentase penurunan titik kemacetan	30	Persen	30	20	26,67	133,35%	30	26,67	89%	88,90%	Tinggi	Dinas Perhubungan
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	55	Persen	55	50	50	100,00%	55	60	109%	109,09%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Cakupan pengembangan e-Government daerah	80	Persen	80	70	91	130,00%	80	91	114%	113,75%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
Persentase jumlah koperasi yang diawasi/diperiksa	0,4	Persen	0,4	0,3	0,408922	136,31%	0,4	0,4	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	0,796527 778	Persen	18.67	16.67	16	0,00%	18,67	54,53%	292%	292%	Sedang	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase koperasi aktif	0,4	Persen	0,4	0,38	0,3	78,95%	0,4	0,4	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase koperasi sehat	0,15	Persen	0,15	0,13	0,4125	317,31%	0,15	0,26	173%	173,33%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase peningkatan wirausaha baru	24,59	Persen	24.59	24.59	40	0,00%	24,59	36,6	149%	148,84%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Persentase UKM yang naik dari kelas mikro menjadi kelas kecil	17:54	Persen	17.54	17.54	19	0,00%	17:54	14,41	82%	1932,07%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Prosentase koperasi yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan koperasi	0,75	Persen	0,75	0,7	0,7	100,00%	0,75	0,85	113%	113,33%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
Jumlah kebijakan penanaman modal	2	Kebijakan	2	1	1	100,00%	2	1	50%	50,00%	Sangat Rendah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM	250	Perusahaan	250	230	509	221,30%	250	250	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Potensi Investasi Daerah yang dipromosikan	0,0476	Persen	0,0476			0,00%	0,0476	0,0476	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase sistem informasi online penanaman modal	0,625	Persen	0,625	0,4688	0,4688	100,00%	0,625	0,625	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	65-70	Persen	65-70	60-65	65	0,00%	65-70	70	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Persentase Anggota Pramuka Yang Dibina	12	Persen	22			0,00%	12	12	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	70	Persen	70	60	60	100,00%	70	70	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah	50	Persen					50	50	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase sumberdaya olahraga yang terbina	53	Persen					53	53	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
Persentase ketersediaan data statistik daerah. (Persentase data sektoral yang dapat disajikan tepat waktu)	60	Persen	60	50	71,42	142,84%	60	93,33	156%	155,55%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik daerah	35	Persen	35	30	100	333,33%	35	100	286%	285,71%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
Persentase kebudayaan yang dikembangkan	52	Persen	52	50	75	150,00%	52	60	115%	115,38%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase kebudayaan yang dilestarikan	55	Persen	50	50	65	130,00%	55	94	171%	170,91%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											Sangat Tinggi	
Persentase sarana baca masyarakat yang aktif	3	Persen	3	2	0,053	2,65%	3	0	0%	0,00%	Sangat Rendah	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Tingkat Kepuasan Pengunjung perpustakaan umum kota	80,27	Persen	80,27	80,27	80,32	100,06%	80,27	81,13	101%	101,07%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	25	Persen	25	20	50	250,00%	25	100	400%	400,00%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Tingkat keberadaan dan Keuutuhan Arsip Sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan sosial	10	Persen					10	10	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Tingkat Kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
Angka Konsumsi ikan	37	Kg/kapita/thn	37	35	35	100,00%	37	NA	0%		Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
Jumlah produksi ikan hias	1020000	ekor	1020000	1000000	2309399	230,94%	1.020.000	2.443.602	240%	239,57%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Jumlah produksi ikan konsumsi	252,5	ton	252,5	250	279,56	111,82%	252,5	220,2	87%	87,21%	Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
Persentase Daya Tarik Pariwisata yang dikelola dengan baik	83,33	Persen	83,33	66,67	78	116,99%	83,33	78	94%	93,60%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase daya tarik wisata yang dipasarkan	83,33	Persen	83,33	66,67	78	116,99%	83,33	100	120%	120,00%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase sumber daya manusia Pariwisata yang memiliki kompetensi	25,18	Persen	25,18	20,86	36	172,58%	25,18	29	115%	115,17%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	15,87	Persen	15,87	7,94	12,3	154,91%	15,87	17,14	108%	108,00%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan dan dibangun	25	Persen	25	25	25	100,00%	25	80	320%	320,00%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
Jumlah pasar rakyat/tradisional yang dikelola pemerintah sesuai dengan SNI	1	Pasar	1	1	1	100,00%	1	1	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti pameran promosi	25	Persen	25	20	30	150,00%	25	30	120%	120,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase permohonan rekomendasi IUTM, ijin pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan tanda daftar gudang yang dilayani	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase UTP yang ditera/tera ulang	50	Persen	50	45	65,4	145,33%	50	64,94	130%	129,88%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Tingkat penggunaan produksi dalam negeri	80	Persen	80	60	30	50,00%	80	80	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
Jumlah Sentra Industri Pengolahan	3	Sentra	3	2	2	100,00%	3	3	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Persentase IKM yang berdaya saing	78,8	Persen	78,8	68,8	71,8	104,36%	78,8	78,8	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase IKM yang dikelola di dalam SIINAS	50	Persen	50	46,51	46,51	100,00%	50	50	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase permohonan rekomendasi IUI kecil dan menengah yang dilayani	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4.01 SEKRETARIAT DAERAH												
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bagian Admnistrasi Kesejahteraan Rakyat	84	Nilai	84	84	83,62	99,55%	84	80,4	96%	95,71%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Nilai IKM bagian Administarsi Perekonomian	77,00%	Persen	77,00%	77,00%	77,00%	100,00%	77,00%	80%	104%	103,90%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Nilai IKM pada bagian pengadaan barang dan jasa	79,05%	Persen	79,05%	79,05%	79,05%	100,00%	79,05%	79,97%	101%	101,16%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Nilai IKM pada Bgian Administrasi Bangunan	77%	Persen	77	77	79,54	103,30%	77%	82,52%	107%	107,17%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase ASN pelaku pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat PBJ	100,00%	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Kasus Hukum yang terfasilitasi	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Kegiatan Agama dan Pendidikan yang Terlaksana	97	Persen	97	97	98,84	101,90%	97	99	102%	102,06%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Kegiatan bidang kesehatan P2KBP3A, Sosial, Kepemudaan dan Olahraga	71	Persen	71	71	86,51	121,85%	71	95,5	135%	134,51%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Monitoring kegiatan diperangkat Daerah	100	Persen	1	1	1	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase pengadaan barang jasa yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan ketentuan	100	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Pelaku Usaha terinput dalam SIKP	100	Persen	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Standar Biaya Belanja dengan Baik	100	Persen	1	1	1	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Pertanggungjawaban Dokumen Pemerintah Daerah yang Bernilai Baik	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi Bidang Perekonomian	100	Persen	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi terhadap Perusahaan Daerah yang ditindaklanjuti	100	Persen	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Produk Hukum yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
4.02 SEKRETARIAT DPRD												
Nilai Survey Kepuasan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	90 (A)	Nilai	90 (A)	85 (B)	85 (B)	0,00%	90 (A)	80,86 (B)	0%		Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5.01 PERENCANAAN												

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase tahapan kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	100	Persen	100			0,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02 KEUANGAN												
Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Persentase Pelaporan BMD secara tepat waktu	80	Persen	80	70	66,6	95,14%	80	100	125%	125,00%	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	2	Persen	2	6,4	13,18	205,94%	2	7,78	389%	389,00%	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Persentase Realisasi Pajak Daerah	90	Persen	90			0,00%	90	115,3	128%	128,11%	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5.03 KEPEGAWAIAN												
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	80	Persen	80	79	79,83	101,05%	80	80,06	100%	100,08%	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dalam pelaksanaan tugasnya	14	Persen	14	13,5	13,06	96,74%	14	13,1	94%	93,57%	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Persentase ASN yang nilai kinerjanya baik	25	Persen	25	24,5	16,88	68,90%	25	23,52	94%	94,08%	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN	5	Persen	5	5	4,98	99,60%	5	4,98	100%	99,60%	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	18	Persen	18	15	10,11	67,40%	18	15,77	88%	87,61%	Tinggi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
Persentase penelitian yang dihasilkan	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase pertumbuhan inovasi	10	Persen	10	10	35,15	351,50%	10	20,27	203%	202,70%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6.01 INSPEKTORAT DAERAH												
Level Peningkatan Kapabilitas APIP	3	Level	3	3	2	66,67%	3	2,672	89%	89,07%	Tinggi	Inspektorat
Nilai Hasil Pengawasan	80	Persen	80	70	71	101,43%	80	83	104%	103,75%	Sangat Tinggi	Inspektorat
7 UNSUR KEWILAYAHAN												
7.01 KECAMATAN												
Indeks Kepuasan Masyarakat	80	Persen	80	75	83,62	111,49%	80	86,63	101%	108,29%	Sangat Tinggi	RSUD CIBABAT
Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	90	Persen	90	85	100	117,65%	90	95,97	107%	106,63%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	90	Persen	90	85	100	117,65%	90	95,97	107%	106,63%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase kegiatan penanganan trantib wilayah	75	Persen	75	0	-	0,00%	75	80,64	108%	107,52%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	99,51	100%	99,51%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	100	100%	100,00%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksnaakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	95,17	95%	95,17%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Selatan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksnaakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	95,17	95%	95,17%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase permohonan perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	100	Persen	100	100	68	68,00%	100	92,3	92%	92,30%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan	80	Persen	80	80	100	125,00%	80	97,61	98%	122,01%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Utara
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	90	90%	90,00%	Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa
Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	90,1	90%	90,10%	Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa
Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	93,5	94%	93,50%	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa
Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100,00%	100	98,8	99%	98,80%	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TARGET AKHIR	2021		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2021	2022		REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI				
Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	100	Persen	100	100	100	100,00%	100	85	85%	85,00%	Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa

2.2.3. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KINERJA

Ketercapaian kinerja Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pekerjaan pada masing-masing Perangkat Daerah. Tabel berikut menyajikan faktor pendorong dan penghambat dari masing-masing Perangkat Daerah di Kota Cimahi pada saat pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2.101
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di Perangkat Daerah Kota Cimahi

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran disesuaikan dengan target dan perencanaan	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat anggaran sebesar 1 Milyar yang tidak terserap untuk pengadaan CPNS, karena adanya petunjuk dari pusat kalau tahun 2022 tidak jadi dilaksanakan perekrutan CPNS- Masih kurangnya kompetensi ASN dan pendataannya menyebabkan nilai Indeks Profesionalisme ASN masih rendah.
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none">- Keselarasan antara program di RKPD Tahun 2022 dengan APBD di Perangkat Daerah Tahun 2022 tergolong baik, dengan persentase 100%, artinya tidak ada program di RKPD yang berbeda dengan dalam APBD;- Keselarasan antara kegiatan di APBD Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 tergolong baik, dengan persentase 100%;	<ul style="list-style-type: none">- Jadwal pelaksanaan tidak sesuai rencana yang telah disepakati, sehingga terjadi keterlambatan penyampaian laporan, penyerapan dana dan perkembangan fisik
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun	<ul style="list-style-type: none">- Secara umum, tidak ada kendala di dalam melaksanakan kegiatan
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun	<ul style="list-style-type: none">- Secara umum, tidak ada kendala di dalam melaksanakan kegiatan

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Terbitnya UU 1/2022 sebagai pedoman untuk optimalisasi pendapatan daerah dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). - Koordinasi yang baik antar unit kerja Bappenda Kota Cimahi dengan membentuk jaringan perencanaan hingga tingkat sub bidang atau sub bagian 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kompetensi keahlian pegawai khususnya terkait pajak daerah. - Kurang jumlah SDM dan kompetensi SDM yang sesuai menyebabkan terbatasnya cakupan pekerjaan yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya - Base data Objek Pajak dan Wajib pajak yang belum diperbaharui - Perlu dievaluasi kembali dan didorong pemenuhan Sarana Prasarana penunjang Pengelolaan Pendapatan pada Bappenda khususnya Sarana Prasarana penunjang layanan dan sistem layanan (PC, Laptop dan penunjang kesisteman lainnya) serta Penunjang lainnya untuk melakukan pendataan dan pengecekan objek pajak di lapangan.
6	Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase RENSTRA selaras dengan RPJMD. Dengan selesainya RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat segera diselesaikan dan selaras indikator kinerja yang ditetapkan. - Perubahan RENJA Tahun 2022 telah selesai dikoordinasikan dan diasistensikan sehingga tercapai keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya dengan Perubahan RKPD Tahun 2022. - Perubahan RKPD Tahun 2022 telah selaras dengan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2023, RKP, serta RKPD Provinsi Jawa Barat, dilihat dari program prioritas pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda telah tercantum dalam dokumen LKIP serta dokumen yang dimaksud, tetapi tidak terevaluasi oleh Evaluator Inspektorat - Pelaksanaan kegiatan masih ada yang belum sesuai dengan anggaran kas.
7	Dinas Arsip Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan anggaran yang tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Akibat adanya Covid-19, perpustakaan di Kota Cimahi tidak aktif - Cimahi belum memiliki Gedung arsip yang sesuai dengan ketentuan - Gedung perpustakaan membutuhkan perbaikan dan penambahan jumlah buku dan judul buku

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			- Kurangnya anggaran untuk sosialisasi dan publikasi perpustakaan
8	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	- Dukungan anggaran yang cukup terhadap organisasi dan kegiatan	- Kurang jumlah SDM dan kompetensi SDM yang sesuai menyebabkan terbatasnya cakupan pekerjaan yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun	- Secara umum, tidak ada kendala di dalam melaksanakan kegiatan
10	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun - Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya sebagai suatu upaya yang berkesinambungan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sehat lahir dan batin 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat capaian masih di angka 76% dan 78 %, lebih kepada administrasi keuangannya belum selesai terkait invoice pembayarannya. - Aspek kualitas pelayanan para medis dan nakes/perawat yang masih kurang, hal ini dikarenakan beberapa hal : <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa pelayanan menurun efek dari kebijakan rujukan berjenjang dari BPJS Kesehatan sehingga berefek pada penurunan pendapatan; b. Tunjangan /TKD dari APBD 40%; c. Efek dari recofusing; d. Pelayanan pasien, kunjungan dari 800 sekarang hanya 200 akibat dari kebijakan BPJS kesehatan; e. Sudah tidak ada dana talangan dari Pemda terkait BPJS
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan anggaran telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan - Konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dan perencanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Secara umum, tidak ada kendala di dalam pelaksanaan kegiatan - Kurangnya jumlah SDM dan kompetensi SDM yang sesuai menyebabkan terbatasnya cakupan pekerjaan yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya
12	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan - Jumlah dan kompetensi SDM di DLH sudah sesuai dengan yang dibutuhkan - Terdapat sistem yang membantu mempermudah dan mempercepat pekerjaan seperti SIL (Sistem Informasi Lingkungan) dan Pusdaloptin 	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen waktu perencanaan dan pelaksanaan yang kurang baik menyebabkan output belum sesuai target - IPPBJ (Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan) perlu dipastikan agar dapat memenuhi pelaksanaan pekerjaan - Koordinasi dan Kerjasama dengan Tenaga Ahli, Perangkat Daerah lainnya, dan BPS masih perlu dilaksanakan. - Data-data yang belum lengkap, akurat, dan belum ada

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
13	Dinas Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, dan seimbang di Kota Cimahi - Tingkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan meningkat - Realisasi PAD dari UPTD puskesmas selalu melebihi target, antusiasme masyarakat Kota Cimahi dan Kabupaten/Kota sekitarnya untuk berkunjung ke Puskesmas Cimahi selalu meningkat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tercapainya target lahan LP2B Kota Cimahi - Dispangtan agar melakukan evaluasi internal terhadap capaian kinerja setiap indicator program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai bahan penyusunan Renja Tahun 2024, serta penentuan isu permasalahan utama, prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2024. - Perlunya optimalisasi target capaian retribusi UPT BBIAT dan Puskesmas di tahun 2024 sebagai upaya peningkatan PAD Kota Cimahi. - Perlunya dievaluasi kembali kelembagaan UPTD BBIAT serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang pada UPTD BBIAT dan puskesmas
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Keberpihakan kebijakan pembangunan terhadap sektor infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlambatan proses barang dan jasa - Beberapa pekerjaan konstruksi mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga terkena penalti.
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada kendala
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebutuhan warga terhadap dokumen perijinan mengharuskan DPMPSTP melakukan pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan - Inovasi pelayanan secara online memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan perijinan sesuai SP dan SOP - Dilakukannya sosialisasi pelaporan LKPM ke perusahaan-perusahaan - Posisi Kota Cimahi sebagai penghubung terhadap Ibu Kota provinsi mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur provisi secara umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Secara umum, tidak ada kendala di dalam melaksanakan kegiatan - DPMPSTP perlu melengkapi capaian indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum terisi. - Perlu update data-data untuk RKPD Kota Cimahi 2024 dari DPMPSTP.

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		<ul style="list-style-type: none"> - Upaya DPMPSTSP untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, misalnya dengan melakukan sertifikasi ISO 9001:2015 dan bimtek bagi para pegawai. 	
17	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan peningkatan fasilitas fisik, seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendukung lainnya, dapat memberikan akses yang lebih baik dan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa dan guru. - Pengembangan kurikulum yang relevan, komprehensif, dan inklusif dapat meningkatkan kualitas pendidikan. - Melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, guru dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan pengajaran yang lebih baik kepada siswa. - Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung sistem pendidikan. - Ketersediaan dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya pendidikan, seperti buku teks, bahan ajar digital, fasilitas perpustakaan, dan teknologi informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ada kendala penyerapan anggaran untuk PPPK yang belum memenuhi kuota oleh pihak terkait. - Pengelolaan dana BOS dan pengadaan perlengkapan siswa masih belum realisasi karena belum verifikasi oleh BPKAD. Pengadaan mebel dan perlengkapan SD Baros Mandiri 3 tidak dapat dilaksanakan dan dialihkan ke 2023. Selain itu pada sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan tersisa anggaran sebesar Rp. 1 milyar karena rencana awalnya untuk beasiswa masyarakat level kuliah di Kota Cimahi namun tidak bisa direalisasikan karena pengelolaan level kuliah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pengadaan perlengkapan pendidikan nonformal/kesetaraan belum realisasi karena sedang dalam proses pengadaan. Terdapat kemungkinan silpa di sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP sebesar Rp. 190.962.500 yang merupakan sisa DAK namun tidak bisa direalisasikan karena juknis penyerapan sisa DAK dari pusat belum ada.
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Secara umum hasil dari evaluasi kinerja triwulan IV sampai dengan bulan Desember 2022 , 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat perubahan target dari indikator pada pelaksanaan renja triwulan IV yang diakomodir pada perubahan anggaran tahun 2022 yang efektif baru bisa dilaksanakan

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi relatif sudah sesuai dengan pagu anggaran dan jadwal. Adapun penyerapan anggaran yang tidak terserap dengan alasan efisiensi. <ul style="list-style-type: none">- Rantai pasok bahan pokok yang terkendali- Dukungan dari stakeholder dan pelaku usaha	mulai bulan Nopember-Desember 2022. <ul style="list-style-type: none">- Kualitas dan kapasitas SDM yang belum mencukupi menimbulkan beberapa keterlambatan jadwal pelaksanaan kegiatan- Perlunya integrasi dalam pelaksanaan kegiatan antar bidang
19	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana- Dukungan kompetensi SDM yang sesuai	<ul style="list-style-type: none">- Ouput kegiatan tidak sesuai target yang ditetapkan karena material yang tidak tersedia (dari kementerian), perubahan regulasi, pengajuan rekomendasi lalin lebih kecil dari anggaran yang disediakan, gagal lelang, dan masalah pengadaan barang jasa lainnya.
20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none">- Anggaran yang mencukupi untuk beberapa kegiatan- Adanya sumber pendanaan lain yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar	<ul style="list-style-type: none">- secara keseluruhan, setiap program/kegiatan/sub kegiatan telah dilaksanakan tanpa adanya hambatan yang tidak dapat terselesaikan.- Terdapat beberapa hal yang membutuhkan penanganan/tindak lanjut berikutnya sehingga diharapkan pada tahun anggaran berikutnya (TA 2023) setiap program/kegiatan/sub kegiatan memiliki kinerja yang semakin meningkat.

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
21	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi yang sudah terisi secara penuh, tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas - Adanya dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan - Adanya pilar-pilar sosial sebagai partisipasi masyarakat yang merupakan mitra kerja Dinas Sosial - Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Gaji yang tidak terserap sekitar + 2 milyar (terdapat kekosongan untuk 16 orang ASN); - Adanya Penyediaan Rastrada dari pagu 2 milyar hanya bisa terserap (sekitar 475 juta saja karena keterlambatan penerbitan Perwal sehingga pengadaan lelang waktunya sangat mepet; - Adanya anggaran untuk keadaan "darurat" yang tidak terserap karena tidak ada kejadian (pada Program Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten/Kota) sekitar Rp.231.788.000;
22	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapatnya aplikasi SIDAKEP3 mempermudah para pencari kerja untuk memperoleh AK1 atau kartu kuning - Anggaran yang tersedia sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang jumlah SDM dan kompetensi SDM yang sesuai menyebabkan terbatasnya cakupan pekerjaan yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya
23	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian IKU yang berkaitan dengan evaluasi terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja dari perangkat daerah telah mencapai 100%, yaitu seluruh perangkat daerah telah memperoleh nilai di ≥ 70 atau kategori BB. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja pada perangkat daerah, mulai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan telah mencapai kategori BB. - Secara umum penyerapan anggaran dan pencapaian target sub kegiatan pada masing-masing 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat sisa dari Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, karena telah dialokasikan anggaran untuk penambahan pegawai, tetapi belum ada penambahan pegawai sampai dengan akhir tahun sehingga terdapat sisa anggaran - untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal terdapat sisa anggaran karena adanya efisiensi pengadaan BM, efisiensi belanja makan dan minum, kegiatan Saber Pungli pada semester 2 yang tidak dilaksanakan, serta belanja jasa konsultasi akuntan publik yang juga tidak dilaksanakan karena kendala teknis. - Kendala terbesar pelaksanaan kegiatan adalah kekurangan SDM sehingga beberapa kegiatan pengawasan dilakukan secara tandem (beberapa orang mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu yang sama). Untuk itu disarankan lebih ketat dalam menyusun program kerja pengawasan dengan

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		perangkat daerah sudah mencapai target dan rencana yang telah ditentukan.	memperhitungkan ketersediaan SDM dan beban kerja pengawasan, khususnya yang bersifat mandatori dan wajib dilakukan berdasarkan perencanaan pengawasan yang ditetapkan oleh Kemendagri.
24	Kecamatan Cimahi Selatan	- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun	- Secara umum, tidak ada kendala di dalam melaksanakan kegiatan
25	Kecamatan Cimahi Tengah	- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun	- Secara umum, tidak ada kendala di dalam melaksanakan kegiatan
26	Kecamatan Cimahi Utara	- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun	- Secara umum, tidak ada kendala di dalam melaksanakan kegiatan
27	RSUD CIBABAT	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dukungan anggaran dari sumber dana lain seperti PAD Kota Cimahi dan Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Umum - Kualitas SDM yang memenuhi standar pelayanan RS tipe B 	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek kualitas pelayanan para medis dan nakes/perawat yang masih kurang, hal ini dikarenakan beberapa hal : <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa pelayanan menurun efek dari kebijakan rujukan berjenjang dari BPJS Kesehatan sehingga berefek pada penurunan pendapatan; b. Tunjangan /TKD dari APBD 40%; c. Efek dari refocusing; d. Pelayanan pasien, kunjungan dari 800 sekarang hanya 200 akibat dari kebijakan BPJS kesehatan; e. Sudah tidak ada dana talangan dari Pemda terkait Jamkes.
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Keselarasan antara program di RKPD Tahun 2022 dengan APBD di Perangkat Daerah Tahun 2022 tergolong baik, dengan persentase 100%, artinya tidak ada program di RKPD yang berbeda dengan dalam APBD - Keselarasan antara kegiatan di APBD Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 tergolong baik, dengan persentase 100%; 	- Jadwal pelaksanaan tidak sesuai rencana yang telah disepakati, sehingga terjadi keterlambatan penyampaian laporan, penyerapan dana dan perkembangan fisik
29	Sekretariat Daerah	- Seluruh OPD telah mengikuti regulasi yang ditetapkan	- koordinasi kerja belum optimal karena secara SOTK tidak ada sub bagian pengendalian hanya ada sub bagian perencanaan dan pelaporan

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			<p>sehingga aktivitas kerja menumpuk di bagian pelaporan.</p> <ul style="list-style-type: none">- banyak SKPD punya kegiatan rutin tahunan tapi minta difasilitasi untuk mamin dan sarpras seperti tenda, sound system, kursi meja yang harus disewa sehingga anggaran sebelum perubahan sudah habis. Selain itu idealnya pengadaan perlengkapan sarpras di bagian umum.- anggaran untuk bimtek tematik PBJ masih relatif kurang, hal ini juga untuk menunjang DUPAK dan karir SDM di PBJ. Kendala lain yaitu SPPD masih kurang untuk pengecekan fisik calon pemenang pihak ketiga, banyak koordinasi LKPP, sistem masih SIRUP tergantung pusat pengelolaannya, pendampingan LKPP, ruang kantor yang tidak memadai, mamin, anggaran ATK tidak mencukupi mengingat laporan paket 70 paket lelang dan 6000 paket non lelang, dan juga butuh ruang arsip. Selain itu, kendala regulasi LPSE harus permanen untuk verifikasi berkas.- Kendala dalam laporan SPM adalah baseline data berbeda antara Disdukcapil dan BPS, ketersediaan data untuk indikator SPM pusat jadinya target SPM disandingkan dengan di perencanaan saja bukan realisasi 100%.- Terdapat efisiensi sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya untuk pengadaan rumah dinas hanya untuk rumah dinas sekda yang digunakan oleh Pj. Kepala Daerah, sedangkan Pj. Sekda tidak menggunakan rumah dinas. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor penyerapan sekitar 11% karena terkendala barang yang dimaksud tidak ada di katalog dan terkendala TKDN.- Perlu ruang khusus untuk arsip produk-produk hukum yang telah dihasilkan. Namanya JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) secara fisik, tidak hanya secara digital karena ada penilaian dari KemenhumHAM termasuk penunjang dalam pencapaian IKU SPBE serta mendapatkan hadiah uang pembinaan.
30	Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none">- Anggaran yang tersedia sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.- komitmen SDM untuk efisiensi anggaran agar SILPA berkurang	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat dua sub kegiatan dengan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana, yaitu sub giat Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dengan realisasi fisik 11,95% dan keuangan 12,68%. Hal ini dikarenakan kurangnya minat anggota DPRD untuk melaksanakan

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		dibandingkan tahun sebelumnya	<p>medical check up, serta padatnya waktu kegiatan anggota DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub giat Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi fisik 24,49% dan keuangan sebesar 20,29%. Hal ini dikarenakan padatnya jadwal sekretariat DPRD dan sehingga kegiatan sosialisasi bersamaan waktunya dengan kegiatan yang lain. Direncanakan sub giat ini akan dilaksanakan di bulan desember. - Untuk sub giat Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya penyerapan masih rendah karena belum terserap semua belanja modalnya - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan penyerapan masih rendah karena ada 4 kendaraan dinas yg ditarik BPKAD dan digantikan dengan tunjangan transportasi

2.2.4. KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Evaluasi indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta realisasi keuangan di Kota Cimahi dilakukan terhadap capaian Triwulan IV Tahun 2022. Jumlah kegiatan yang dievaluasi sebanyak 225 kegiatan sedangkan jumlah sub kegiatan yang telah dievaluasi sebanyak 648 sub kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan rekapitulasi hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dapat dilihat pada tabel 2.102.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa total capaian kinerja setiap urusan berada dalam sangat tinggi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103%. Penetapan target indikator yang terlalu rendah merupakan salah satu penyebab utama tingginya capaian kinerja. Hal ini disebabkan, pada saat penentuan target indikator masih menggunakan asumsi bahwa kondisi lingkungan masyarakat masih terpengaruh oleh adanya Covid-19, sehingga asumsi ketercapaian kinerja masih menggunakan asumsi pesimis. Selain itu, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara

indikator dan pelaksanaan pekerjaan, atau indikator dan rumus untuk menghitung indikator tersebut. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa rata-rata pelaksanaan kegiatan tidak mengalami kendala yang tidak terselesaikan, artinya meskipun terdapat faktor penghambat, namun pekerjaan di lapangan tetap dapat dilaksanakan.

Selanjutnya, capaian realisasi keuangan berdasarkan hasil evaluasi berada dalam kategori tinggi atau sebesar 85,31%. Dari total anggaran sebesar Rp. 1.614.682.803.477,00 yang dapat terealisasi adalah sebesar Rp. 1.377.414.247.898,00. Secara umum, realisasi anggaran yang lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja disebabkan oleh adanya efektivitas dan efisiensi anggaran. Meskipun, masih terdapat beberapa kegiatan yang mengalami gagal lelang atau tidak dilaksanakan akibat kurang baiknya manajemen waktu dan pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan perencanaan.

Hal yang paling penting dan menjadi catatan khusus dari hasil rekapitulasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta realisasi anggaran ini adalah bahwa kinerja untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masih belum mencapai 100%. Meskipun capaiannya telah mencapai 96% dan berada dalam kategori sangat tinggi, namun belum memenuhi target capaian 100% yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Realisasi kinerja SPM yang paling rendah ada pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang hanya mencapai 86%. Adapun permasalahan yang terjadi dan solusi untuk memecahkan masalah tersebut akan dijelaskan kemudian secara khusus pada sub bab mengenai hasil evaluasi pelaksanaan SPM di Kota Cimahi.

Tabel 2.102
Rekapitulasi Capaian Kinerja Setiap Urusan

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PAGU (RP)	REALISASI	KINERJA KEUANGAN (%)	PREDIKAT	KINERJA FISIK (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
A	URUSAN WAJIB	1.205.251.325.042	1.029.680.534.605	85,43%	Tinggi	109%	Sangat Tinggi
I	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	974.017.801.677	833.073.764.369	85,53%	Tinggi	96%	Sangat Tinggi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	416.445.388.499	343.517.280.189	82,49%	Tinggi	99%	Sangat Tinggi
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	396.531.823.507	348.178.065.783	87,81%	Tinggi	98%	Sangat Tinggi
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	76.984.243.316	68.326.535.824	88,75%	Tinggi	109%	Sangat Tinggi
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	35.436.043.867	33.068.226.117	93,32%	Sangat Tinggi	86%	Tinggi
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33.314.164.416	30.580.700.511	91,79%	Sangat Tinggi	97%	Sangat Tinggi
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.306.138.072	9.402.955.945	61,43%	Rendah	88%	Tinggi
II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	231.233.523.365	196.606.770.236	85,03%	Tinggi	122%	Sangat Tinggi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	10.936.044.853	10.282.908.980	94,03%	Sangat Tinggi	80%	Tinggi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.479.352.442	7.724.473.336	81,49%	Tinggi	78%	Tinggi
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.391.637.453	9.471.537.727	91,15%	Sangat Tinggi	106%	Sangat Tinggi
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	54.608.908.950	48.636.119.860	89,06%	Tinggi	102%	Sangat Tinggi
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.935.590.508	9.662.585.750	88,36%	Tinggi	106%	Sangat Tinggi
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	898.287.800	834.708.649	92,92%	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.327.958.000	5.293.103.757	72,23%	Sedang	123%	Sangat Tinggi
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	33.565.820.444	30.808.199.166	91,78%	Sangat Tinggi	92%	Sangat Tinggi
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.995.863.080	11.165.885.325	85,92%	Tinggi	111%	Sangat Tinggi
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.608.389.000	2.029.869.954	77,82%	Tinggi	144%	Sangat Tinggi

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PAGU (RP)	REALISASI	KINERJA KEUANGAN (%)	PREDIKAT	KINERJA FISIK (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	27.685.509.874	22.221.581.505	80,26%	Tinggi	90%	Tinggi
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	33.831.678.800	25.464.975.908	75,27%	Sedang	100%	Sangat Tinggi
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	263.938.600	254.577.732	96,45%	Sangat Tinggi	156%	Sangat Tinggi
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.963.346.534	7.637.960.454	95,91%	Sangat Tinggi	143%	Sangat Tinggi
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	605.563.200	554.773.601	91,61%	Sangat Tinggi	51%	Sangat Rendah
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	6.766.669.827	4.200.371.412	62,07%	Rendah	200%	Sangat Tinggi
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	368.964.000	363.137.120	98,42%	Sangat Tinggi	286%	Sangat Tinggi
III	URUSAN PILIHAN	28.066.504.750	26.478.910.948	94,34%	Sangat Tinggi	117%	Sangat Tinggi
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	684.584.700	666.483.744	97,36%	Sangat Tinggi	109%	Sangat Tinggi
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.340.549.750	3.228.263.997	96,64%	Sangat Tinggi	110%	Sangat Tinggi
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.561.061.900	1.345.144.742	86,17%	Tinggi	176%	Sangat Tinggi
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	17.174.449.400	16.061.979.228	93,52%	Sangat Tinggi	108%	Sangat Tinggi
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.292.054.000	5.163.742.337	97,58%	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi
6	TRANSMIGRASI	13.805.000	13.296.900	96,32%	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi
IV	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	103.584.076.043	65.155.570.920	62,90%	Rendah	117%	Sangat Tinggi
1	PERENCANAAN	13.609.256.962	13.124.745.045	96,44%	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi
2	KEUANGAN	63.868.292.695	30.757.749.448	48,16%	Sangat Rendah	168%	Sangat Tinggi
3	KEPEGAWAIAN	11.298.705.150	8.842.849.217	78,26%	Tinggi	99%	Sangat Tinggi
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	870.526.600	851.216.544	97,78%	Sangat Tinggi	151%	Sangat Tinggi
5	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.762.004.200	1.526.994.500	86,66%	Tinggi	88%	Tinggi
6	INSPEKTORAT DAERAH	12.175.290.436	10.052.016.166	82,56%	Tinggi	96%	Sangat Tinggi
V	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	168.612.812.248	151.444.449.647	89,82%	Tinggi	65%	Rendah
1	SEKRETARIAT DAERAH	63.941.399.263	58.482.725.184	91,46%	Sangat Tinggi	102%	Sangat Tinggi
2	SEKRETARIAT DPRD	94.012.207.777	84.064.553.459	89,42%	Tinggi	90%	Sangat Rendah

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PAGU (RP)	REALISASI	KINERJA KEUANGAN (%)	PREDIKAT	KINERJA FISIK (%)	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
3	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.659.205.208	8.897.171.004	83,47%	Tinggi	91%	Sangat Tinggi
VI	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	109.168.085.394	104.654.781.778	95,87%	Sangat Tinggi	104%	Sangat Tinggi
1	KECAMATAN	109.168.085.394	104.654.781.778	95,87%	Sangat Tinggi	104%	Sangat Tinggi
TOTAL		1.614.682.803.477	1.377.414.247.898	85,31%	Tinggi	103%	Sangat Tinggi

2.2.5. REALISASI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir penyelenggaraan pemerintahan dalam RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022, oleh karena itu capaian pada tahun 2022 selain menunjukkan kinerja tahunan, juga menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut. Dibawah ini disajikan data capaian indikator kinerja utama (IKU) Kota Cimahi Tahun 2019-2022 disertai dengan persentase, tingkat ketercapaian dan kategorinya. Tabel tersebut juga menyajikan data perbedaan indikator yang digunakan terutama antara tahun 2019-2020 dan tahun 2021-2022. Perbedaan indikator yang digunakan disebabkan oleh adanya hasil dari evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, hasil evaluasi dari pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun-tahun sebelumnya, serta adanya perubahan kebijakan baik dari tingkat pusat maupun Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tahun 2022, masih terdapat 4 indikator yang datanya belum rilis, sedangkan seluruh indikator memiliki kategori sangat tinggi. Meskipun berada dalam kategori sangat tinggi, namun secara capaian, masih kurang dari 100% atau tidak tercapai. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN;
2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Indeks Gini;
4. Angka Kemiskinan;
5. Indeks Pembangunan Gender (IPG); dan
6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Adapun indikator-indikator yang belum rilis angka capaiannya adalah Nilai LPPD dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Data-data tersebut biasanya baru akan dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan antara bulan Juni dan Agustus.

Tabel 2.103
Capaian Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan dan Sasaran) Kota Cimahi Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		CAPAIAN	KATEGORI
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	78,11	-	77,83	-	78,06	78,12	78,77	101	Sangat Tinggi
2	Indeks Pendidikan	74,15	74,81	74,89	74,87*	74,84	75,29	74,9	75,76	101	Sangat Tinggi
3	Indeks Kesehatan	82,49	82,91	82,99	83,12	82,94	83,4	83,12	83,85	101	Sangat Tinggi
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,2	1,07	1,04	0,48	1,02	0,76	1	0,63	137	Sangat Tinggi
5	Indeks Reformasi Birokrasi	60,00 (B)	60,01 (B)	60,13 (B)	59,22 (CC)	60,43 (B)	60,01 (B)	60,73 (B)	62,96 (B)	104	Sangat Tinggi
6	SAKIP	BB	B	BB	B	B	B	B	B	100	Sangat Tinggi
7	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Belum Rilis	Belum Rilis	Belum Rilis
8	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
9	Indeks Profesionalitas ASN	77	72	72	53,23	58	45,04 *)	62	57,37	93	Sangat Tinggi
10	Survei Kepuasan Masyarakat	80	80,75	81,56	81,57	82,37	82,76	83,2	83,61	100,5	Sangat Tinggi
11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	-	-	-	-	3,18	2,75	3,19	3,09	97	Sangat Tinggi
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,66	6,84	-3,07	-2,26	3,69	4,19	5,11	5,92	116	Sangat Tinggi
13	Indeks Gini	0,4	0,437	0,39	0,38	0,39	0,415	0,38	0,408	93	Sangat Tinggi
14	Angka Kemiskinan (%)	5,61	4,39	4,83	5,11	5,07	5,35	5,02	5,11	98	Sangat Tinggi
15	Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,93	7,52	8,08	12,12	12,64	13,07	11,37	10,77	105	Sangat Tinggi
16	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS) (Predikat)	C	D	C	C	C	C	C	C	100	Sangat Tinggi
17	Persentase pengelolaan sampah (%)	100	96,06	95,1	97,61	-	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		CAPAIAN	KATEGORI
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
18	Persentase cakupan layanan air limbah domestik (%)	83,41	75,98	69,9	75,83	-	-	-	-	-	-
19	Persentase luasan genangan terhadap luas kota (%)	0,23	0,07	0,08	0,07	-	-	-	-	-	-
20	Persentase cakupan pelayanan air bersih (%)	72,02	70,35	63,32	69,82	-	-	-	-	-	-
21	Rasio luas kawasan kumuh (%)	3,78	3,16	3,48	0,36	0,18	0,08	0,18	0,036	180	Sangat Tinggi
22	Indeks Resiko bencana	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	100	Sangat Tinggi
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	33,3	46,8	49,14	38,21*	34,36	41,69	36,07	48,002	133	Sangat Tinggi
24	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)	80	100	97,2	95,1	81,25	100	82	Belum Rilis	Belum Rilis	Belum Rilis
25	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,75	n/a	78,83	n/a	74,5	75,21	75	74,36	98	Sangat Tinggi
26	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,5	92,2	92,7	92,01	92,4	91,95	92,6	91,97	99	Sangat Tinggi

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap capaian pembangunan kota. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator tujuan dan sasaran kota yang digunakan beserta targetnya, yang secara implisit dan eksplisit menggambarkan prioritas pembangunan yang ingin dicapai. Secara umum, permasalahan pembangunan di Kota Cimahi dianalisis berdasarkan 4 (empat) kelompok permasalahan daerah, yaitu permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup, pembangunan sumber daya manusia dan masalah sosial, serta tata kelola pemerintahan.

2.3.1. PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2022. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa masih ada *gap expectation* antara target yang direncanakan dengan capaian. Pada sub bab gambaran umum kondisi daerah, dapat dilihat juga hasil analisis pada masing-masing aspek pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kota Cimahi. Permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi. Hal ini dapat dilihat dari ketidaktercapaian nilai indeks gini di Kota Cimahi jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan;
2. Masih tingginya angka kemiskinan di Kota Cimahi yang juga ditunjukkan dengan adanya ketidaktercapaian target indikator angka kemiskinan;
3. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi juga dinilai masih tinggi. Meskipun hasil capaiannya lebih tinggi dari

target yang ditetapkan, namun pengangguran terbuka di Kota Cimahi masih kedua terbesar di Jawa Barat;

4. Masih kurangnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar di Kota Cimahi, meliputi rumah layak huni, akses terhadap air bersih, pengelolaan limbah domestik, penanganan genangan dan banjir. Hal ini dapat dilihat dari hasil capaian pemenuhan SPM yang belum mencapai 100%. Selain itu, Kualitas jalan dalam kondisi baik, serta tingkat pelayanan jalan dan transportasi di Kota Cimahi juga perlu untuk ditingkatkan, meskipun secara capaian, selama 5 tahun ini selalu sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
5. Menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kota Cimahi menjadi permasalahan kota yang setiap tahun selalu menjadi perhatian. Meskipun nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) di Kota Cimahi telah melampaui target yang ditetapkan, namun hal ini lebih disebabkan oleh semakin meningkatkan nilai indeks kualitas udara, namun indeks tutupan lahan dan indeks kualitas air terus menurun. Ketiga indeks tersebut merupakan komponen penting di dalam penghitungan IKLH. Selain itu, isu tentang pengelolaan sampah akan selalu menjadi topik utama akibat Kota Cimahi tidak memiliki TPAS, dan harus mengelola sampahnya di Sarimukti. Usia TPAS Sarimukti sendiri sudah melampaui daya tampungnya, sehingga wacana pengalihan TPAS ke Legok Nangka akan semakin meningkatkan beban pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Cimahi;
6. Angka kematian ibu dan bayi yang mengalami fluktuasi setiap tahun, masih adanya balita stunting, kasus penyakit menular dan tidak menular yang masih tinggi, masih terdapat anak yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP, rendahnya tingkat literasi masyarakat, serta keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa dalam digitalisasi Pendidikan merupakan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan sumber daya manusia di Kota Cimahi. Meskipun Indeks Pendidikan dan Indeks

Kesehatan di Kota Cimahi telah melampaui target yang ditetapkan, dan memiliki nilai yang melebihi capaian Provinsi Jawa Barat, namun data-data mengenai AKI, AKB, prevelensi stunting, Indeks literasi, dan APK di Kota Cimahi masih menunjukkan adanya permasalahan yang perlu untuk ditindaklanjuti;

7. Masih tingginya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan belum optimalnya perbaharuan data tersebut menyebabkan perlindungan dan pelayanan sosial juga belum optimal; dan
8. Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Kota Cimahi ditunjukkan dengan nilai reformasi birokrasi yang masih berada pada predikat B. Meskipun mengalami kenaikan sebesar 2,95 poin pada tahun 2022, namun beberapa komponen yang berpengaruh terhadap nilai reformasi birokrasi masih kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu nilai Akip Kota, Indeks Profesionalisme ASN, kualitas pengelolaan arsip, dan implementasi SPBE. Selain itu, terdapat beberapa komponen yang belum dilakukan pengukuran oleh Kota Cimahi, diantaranya adalah Sistem Merit.

2.3.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap capaian kinerja dan realisasi keuangan, maka dapat diidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keselarasan antara program RKPD tahun 2022 dengan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 telah mencapai 100% sehingga tergolong baik, artinya bahwa secara keseluruhan tidak ada program dalam RKPD yang berbeda dengan program dalam RPJMD;

2. Keselarasan antara program RKPD tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022 tergolong baik, dengan persentase 100%, artinya tidak ada program dalam RKPD yang berbeda dengan program dalam APBD;
3. Capaian kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing urusan sampai dengan triwulan IV memiliki kategori tinggi dan sangat tinggi, walaupun terdapat capaian kinerja yang masih di bawah 100%. Hal ini disebabkan beberapa kendala dalam pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan, baik menyangkut aspek teknis dan non teknis pada pelaksanaan pekerjaan, terutama adanya pemberlakuan ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta beberapa kendala kesalahan penempatan kode rekening belanja;
4. Masih adanya penyesuaian kebijakan berupa Perda atau Perkada terkait Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja pada semua sektor terkait tentang penyederhanaan proses perijinan;
5. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian dalam hal indikator, target kinerja, serta jumlah anggaran yang berimplikasi pada perubahan anggaran; dan
6. Kendala dalam hal keterbatasan sumber daya aparatur secara kuantitas dan kualitas yang terjadi hampir pada seluruh perangkat daerah sehingga menjadi faktor penghambat pencapaian target kinerja kegiatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rekomendasi dan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antara Bappelitbangda dan Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara perencanaan, pengawasan, dan penganggaran;

- 3. Diperlukan adanya penyesuaian penjadwalan pengadaan barang dan jasa untuk mengantisipasi ketersediaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- 4. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar perencanaan dan penganggaran; dan
- 5. Implementasi Perda atau Perkada terkait Undang-Undang Cipta Kerja perlu segera dilaksanakan.

2.4. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.4.1. REALISASI PENERAPAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.4.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Isi Muatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan terdiri dari :

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. Penerima Pelayanan Dasar.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.104
Jenis Pelayanan Dasar, Penerima Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerimaan Pelayanan Dasar
1	Pendidikan Anak Usia Dini	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan	Warga Negara Usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerimaan Pelayanan Dasar
		c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	
2	Pendidikan Dasar	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	Warga Negara Usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas)
3	Pendidikan Kesetaraan	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Warga Negara Usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas)

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Standar Pelayanan Dasar (SPM) Pendidikan Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri Nomor Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengenai target dan kinerja pencapaian SPM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.105
Target dan Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

3. Anggaran

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan yang dilakukan setiap tahun ini tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator

SPM. Anggaran yang digunakan berasal dari beberapa sumber yaitu dari APBD Kota Cimahi, APBN melalui DAK Fisik dan Non Fisik serta APBD Provinsi. Berikut ini besar anggaran yang digunakan pada Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022.

Tabel 2.106
Anggaran Dasar Pencapaian SPM Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2022

No	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cimahi	1,483,166,364,167
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	416,445,388,499
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	26,575,522,509
4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (contoh : dana desa, kerjasama, dana bagi hasil dan lain-lain)	101,903,546,800
	A. APBN	0
	B. APBD	0
	B. DAK	101,903,546,800
	C. LAINYA	0

4. Dukungan Personil

Peran serta Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan SPM akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian target dari SPM ini. Berikut ini adalah Dukungan personil yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan.

Tabel 2.107
Dukungan Personil Untuk Penerapan SPM Bidang Pendidikan

No	Uraian	Jumlah Personil
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretaris Dinas	1 Orang
3	Kepala Bidang	4 Orang
4	Kepala Seksi	8 Orang
5	Kepala Subbagian	1 Orang
6	Jabatan Fungsional Tertentu	8 Orang
7	Jabatan Fungsional Umum	8 Orang

5. Hasil Capaian

Sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyebutkan

Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi :

- a. Capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
- b. Capaian penerima Pelayanan Dasar.

Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis. Sedangkan Capaian penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan menyebutkan Indeks pencapaian SPM bertujuan untuk mengukur tingkat capaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Indeks pencapaian SPM merupakan nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rerata presentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan presentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima. Indeks pencapaian SPM dihitung berdasarkan tata cara perhitungan indeks pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Menteri.

Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) adalah Nilai capaian yang diperoleh melalui perhitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikali bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel 2.108
Capaian Target SPM Pendidikan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/ TAMAT	CAPAIAN (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan Anak Usia Dini	18327	11075	60,4%	20338	20074	98,70%	79,57%
2	Pendidikan Dasar	81720	81168	99,32%	36030	35773	99,29%	99,31%
3	Pendidikan Kesetaraan	81720	81168	99,32%	6904	6706	97,13%	98,23%

Tabel 2.109
Perhitungan Indeks Pencapaian SPM Pendidikan Kota Cimahi

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU PENDIDIKAN			PENERIMA MANFAAT			PARTISIPASI PESERTA DIDIK			HASIL PENCAPAIAN SPM
		SATUAN PENDIDIKAN	PENDIDIK	PERLENGKAPAN DASAR	UMUR 5 - 6	UMUR 7 - 15	UMUR 17 - 18	UMUR 5 - 6	UMUR 7 - 15	UMUR 17 - 18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Anak Usia Dini	0,00%	62,57 %	100,00%	85,03%	0	0	60,43%	0	0	65,92
2	Pendidikan Dasar	96,23%	93,07 %	100,00%	0	96,46%	0	0	99,32%	0	98,75
3	Pendidikan Kesetaraan	79,17%	51,87 %	100,00%	0	0	76,74%	0	0	99,32%	94,81
								INDEKS PENCAPAIAN SPM			86,3%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan Pencapaian SPM Bidang Pendidik di Kota Cimahi adalah :

- a. Untuk Pemenuhan Capaian Penerima Layanan Dasar :
 - 1) Pendidikan Anak Usia Dini
 - Untuk Pemenuhan Capaian SPM hanya mencapai 60,4% dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a) Jumlah Anak Usia Sekolah di Kota Cimahi sebanyak 18.327 orang dengan Jumlah Siswa Bersekolah/Tamat sebanyak 11. 075 orang;

- b) Pencapaian SPM pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Cimahi masih perlu usaha yang cukup keras untuk meningkatkan capaian SPM tersebut; dan
- c) Masih terdapat anak usia PAUD yang belum sekolah dan belum menyelesaikan Pendidikan PAUDnya.

2) Pendidikan Dasar

Untuk Pemenuhan Capaian SPM mencapai 99,31% dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Jumlah Anak Usia Sekolah di Kota Cimahi sebanyak 81.720 orang dengan Jumlah Siswa Bersekolah/Tamat sebanyak 81.168 orang; dan
- b) Pencapaian SPM pada Pendidikan Dasar di Kota Cimahi belum optimal perlu ada usaha untuk melakukan pemerataan pelayanan Pendidikan.

3) Pendidikan Kesetaraan

Untuk Pemenuhan Capaian SPM mencapai 99,31% dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Jumlah Anak Usia Sekolah di Kota Cimahi sebanyak 81. 720 orang dengan Jumlah Siswa Bersekolah/Tamat sebanyak 81.168 orang;
- b) Pencapaian SPM pada Pendidikan Dasar di Kota Cimahi belum optimal perlu ada usaha untuk melakukan pemerataan pelayanan Pendidikan; dan
- c) Perhitungan ini diatas disatukan antara Pendidikan Dasar (formal) dan Kesetaraan (non formal).

b. Untuk Pemenuhan Capaian Penyediaan Layanan Dasar

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Pemenuhan penyediaan Layanan Dasar berhubungan dengan barang dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah yaitu untuk Pendidikan Anak Usia Dini mencapai 98,70% dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Penyediaan layanan dasar ditargetkan 20.338 barang/jasa dan telah disediakan sebanyak 20.074 barang/jasa; dan

- b) Perlu peningkatan untuk pelayanan PAUD khususnya untuk kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

2) Pendidikan Dasar

Pemenuhan penyediaan Layanan Dasar berhubungan dengan barang dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah yaitu untuk Pendidikan Dasar mencapai 99,29% dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Penyediaan layanan dasar ditargetkan 36.030 barang/jasa dan telah disediakan sebanyak 35.773 barang/jasa; dan
- b) Perlu dioptimalkan untuk pelayanan Pendidikan Dasar khususnya untuk kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan Standar Satuan Pendidikan.

3) Pendidikan Kesetaraan

Pemenuhan penyediaan Layanan Dasar berhubungan dengan barang dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah yaitu untuk Pendidikan Kesetaraan mencapai 97,13% dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Penyediaan layanan dasar ditargetkan 6.904 barang/jasa dan telah disediakan sebanyak 6.706 barang/jasa; dan
- b) Perlu peningkatan untuk pelayanan Pendidikan Kesetaraan khususnya untuk kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan Standar Satuan Pendidikan.

c. Capaian Target SPM Pendidikan

Capaian Target SPM Pendidikan dihitung dengan Capaian penerima layanan ditambah dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua): Kategori, yaitu sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59) :

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Pencapaian Target SPM Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Cimahi Mencapai 79,57% dengan Kategori Tinggi. Pencapaian SPM tersebut dikontribusi oleh capaian

penerima layanan sebesar 60,4% dan 98,70% dari capaian penyediaan layanan dasar;

2) Pendidikan Dasar

Pencapaian Target SPM Pendidikan Dasar di Kota Cimahi Mencapai 99,31% dengan Kategori Sangat Tinggi. Pencapaian SPM tersebut dikontribusi oleh capaian penerima layanan sebesar 99,32% dan 99,29% dari capaian penyediaan layanan dasar; dan

3) Pendidikan Kesetaraan

Pencapaian Target SPM Pendidikan Kesetaraan di Kota Cimahi Mencapai 98,23% dengan Kategori Sangat Tinggi. Pencapaian SPM tersebut dikontribusi oleh capaian penerima layanan sebesar 99,32% dan 97,13% dari capaian penyediaan layanan dasar.

Sedangkan untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) adalah sebagai berikut :

1. Hasil Pencapaian SPM Pendidikan PAUD

Hasil Pencapaian SPM Pendidikan PAUD adalah 65,92 dengan Kategori Tuntas Muda. Perlu usaha yang keras untuk meningkatkan pencapaian SPM Pendidikan PAUD ini Khususnya untuk peningkatan Partisipasi Peserta Didik PAUD;

2. Hasil Pencapaian SPM Pendidikan Dasar

Hasil Pencapaian SPM Pendidikan Dasar adalah 98,75 dengan Kategori Tuntas Utama. Optimalisasi layanan untuk meningkatkan pencapaian SPM Pendidikan Dasar;

3. Hasil Pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan

Hasil Pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan adalah 94,81 dengan Kategori Tuntas Utama. Optimalisasi layanan untuk meningkatkan pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan khususnya untuk Standar Satuan Pendidikan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

4. Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Pendidikan Kota Cimahi
$$IP\ SPM = (\% \text{ Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar} \times BM) + (\% \text{ Pencapaian penerima layanan dasar} \times BP)$$
Dengan keterangan :
BM : Bobot Mutu Minimal Layanan Dasar Sebesar 20
BP : Bobot Penerima Layanan Dasar sebesar 80
Sesuai Formulasi diatas maka dihitung
$$IP\ SPM : (86,36\% \times 80) + (86,08\% \times 20) = 86,30$$
(IPSPM) Pendidikan Kota Cimahi adalah **86,30** dengan Kategori **Tuntas Madya**.

2.4.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

Bidang Kesehatan merupakan salah satu dari 6 urusan wajib pemerintah yang di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan kewajiban minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Pelayanan ibu hamil yang sesuai standar yang meliputi :

1) Standar kuantitas.

Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4);

2) Standar kualitas.

Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10T, meliputi : Pengukuran berat badan, tekanan darah, Lingkar Lengan Atas (LILA), tinggi

puncak rahim (*fundus uteri*), Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin, Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, Tes Laboratorium, Tatalaksana/penanganan kasus, Temu wicara (konseling).

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi :

1) Persalinan normal.

Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari : dokter dan bidan, atau 2 orang Bidan, atau Bidan dan perawat; dan

2) Persalinan komplikasi.

Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :

1) Standar kuantitas.

Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali : Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari, Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

2) Standar kualitas.

Usia	Pelayanan
Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).	Pemotongan dan perawatan tali pusat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Injeksi vitamin K1 Pemberian salep/tetes mata antibiotic Pemberian imunisasi (Hepatitis B0).
Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari)	Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM

Usia	Pelayanan
	Pemberian vitamin K1 dan Hepatitis B untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
- 1) Pelayanan kesehatan balita sehat.

Usia	Pelayanan
Balita usia 0-11 bulan	Minimal 8x setahun Pengukuran TB badan minimal 2x/tahun Pemantauan perkembangan minimal 2x/tahun Pemberian kapsul vitamin A lengkap.
Balita usia 12-23 bulan	Minimal 8x setahun Pengukuran TB badan minimal 2x/tahun Pemantauan perkembangan minimal 2x/tahun Pemberian kapsul vitamin A lengkap Imunisasi lanjutan
Balita usia 24-59 bulan	Minimal 8x setahun Pengukuran TB badan minimal 2x/tahun Pemantauan perkembangan minimal 2x/tahun Pemberian kapsul vitamin A lengkap. Pemberian imunisasi dasar lengkap. Pemberian imunisasi lanjutan. Edukasi dan informasi.

- 2) Pelayanan kesehatan balita sakit.
- Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.
- Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :
- 1) Skrining kesehatan meliputi : Penilaian status gizi, Penilaian tanda vital, Penilaian kesehatan gigi dan mulut, Penilaian ketajaman indera; dan

- 2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi: Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, Melakukan rujukan jika diperlukan, Memberikan penyuluhan kesehatan.
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 1) Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa;
 - 2) Pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59;
 - 3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah, Anamnesa perilaku berisiko; dan
 - 4) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi : Melakukan rujukan jika diperlukan, Memberikan penyuluhan kesehatan.
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Pelayanan kesehatan usia lanjut usia 60 tahun ke atas sesuai standar meliputi :
- 1) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah, Pemeriksaan gangguan mental, Pemeriksaan gangguan kognitif, Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, Anamnesa perilaku berisiko; dan
 - 2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi : Melakukan rujukan jika diperlukan, Memberikan penyuluhan kesehatan.
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi :

- 1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat; dan
 - 3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi :
- 1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2) Edukasi; dan
 - 3) Terapi farmakologi. Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi, Melakukan rujukan jika diperlukan.
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan *Skizofrenia* meliputi :
- 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa : Pemeriksaan status mental, Wawancara;
 - 2) Edukasi kepatuhan minum obat; dan
 - 3) Rujukan jika diperlukan.
- k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga *Tuberkulosis* (TB)
- Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC meliputi :
- 1) Pemeriksaan klinis;
 - 2) Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis; dan
 - 3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*HIV*)
- Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi :

- 1) Edukasi perilaku berisiko; dan
- 2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV : Ibu hamil, Pasien TBC, Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), Penjaja seks, Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), Transgender/Waria, Pengguna napza suntik (penasun), Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target SPM Bidang Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 2.110
Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN KINERJA	TARGET	TARGET SASARAN
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	10.689
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100%	10.608
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	10.148
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	25.380
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	69.586
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	249.848
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	31.781
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	58.026

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN KINERJA	TARGET	TARGET SASARAN
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	9815
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	932
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	2602
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus <i>HIV</i>	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	6456

3. Anggaran

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan perlu dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM. Anggaran yang digunakan berasal dari beberapa sumber yaitu dari APBD Kota Cimahi, APBN melalui DAK Non Fisik (BOK). Total anggaran SPM Bidang Kesehatan yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan sebesar Rp.11.342.670.406,- Rupiah. Uraian alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.111
Alokasi Aggaran dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Indikator	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	489.524.900	269.276.600	55,01
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	832.650.000	665.984.293	79,98
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	129.995.000	84.950.000	65,35
4	Pelayanan kesehatan balita	701.569.000	340.474.700	48,53
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	647.875.500	388.452.000	59,96
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	258.451.400	170.570.400	66
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	251.768.400	129.633.000	51,43

No	Indikator	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	139.136.400	74.934.400	53,86
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	116.044.400	64.064.400	55,21
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	221.864.900	163.473.900	73,68
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	337.479.300	250.658.300	74,34
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	289.050.000	193.793.000	67,04
13.	Pengadaan Obat, Vaksin	3.949.961.200	1.718.406.395	43,5
14.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.977.300.000	1.188.990.000	39,94
	TOTAL	11.342.670.406	5.703.661.395	50,28%

4. Dukungan Personil

Standar ketenagaan dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan ditetapkan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan Terdiri dari :

Tabel 2.112
Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Penerapan SPM Tahun 2022

NO	JENIS TENAGA	Jumlah
A.	Tenaga Kesehatan	
1	Dokter umum	402
2	Dokter spesialis kebidanan	24
3	Dokter spesialis penyakit dalam	31
4	Dokter spesialis paru	6
5	Dokter spesialis kulit dan kelamin	11
6	Dokter spesialis kedokteran jiwa	9
7	Bidan	369
8	Perawat	1528
9	Gizi	40
10	Tenaga kesehatan masyarakat	45
11	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	107
12	Penata Rontgen	64
B.	Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi	

NO	JENIS TENAGA	Jumlah
1	Kader kesehatan	2505
2	Guru PAUD (SDIDTK)	352
3	Dokter kecil/ peer conselor	2297
4	kader Kesehatan Remaja	1583
5	Pendamping	2
6	Penjangkau	10

Data Tenaga Kesehatandalam penerapan SPM Bidang Kesehatan pada tabel di atas merupakan seluruh tenaga di Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas yang ada di wilayah kerja Kota Cimahi berdasarkan data Sistem Informasi SDMK dari seksi SDM Kesehatan, Mutu pelayanan dan sarana prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

5. Hasil Capaian

Berikut capaian target SPM Bidang Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2022 Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar dan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :

Tabel 2.113
Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2022		
		SASARAN	CAPAIAN	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	10.689	10.550	98,80
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	10.608	10.518	99,24
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	10.148	9991	98,56
4	Pelayanan kesehatan balita	25.380	25.380	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	69.586	69.586	96.67
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	249.848	248.569	99,59
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	31.781	31.781	97,79
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	58.026	58.026	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	9815	9815	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	932	932	97,85
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	2602	2602	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	6456	6456	94,04
13	Pengadaan Obat, Vaksin	1 paket	1 paket	100
14	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2 paket	2 paket	100

Dari Tabel di atas terlihat capaian SPM Bidang Kesehatan yang belum memenuhi target yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dan pelayanan kesehatan pada usia produktif.

2.4.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2021 Tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal, ada 6 urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar salah satunya Bidang Urusan Pekerjaan Umum. Pelaksanaan penerapan SPM di Kota Cimahi ter kait urusan Pekerjaan umum diantaranya.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum yang jadi kewenangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai Pasal 4 Ayat 2 huruf a dan Pasal 5 ayat (2) terdapat 2 Jenis Pelayanan Dasar, terdiri dari :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 Tentang Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, meliputi Sub Bidang Air Minum

pelayanan dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari dan Sub Bidang Air Limbah dengan jenis pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berusaha memenuhi target SPM tersebut.

Tabel 2.114
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020 – 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TAHUN 2022
		TARGET
1	Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	69,82%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik	77,48%

3. Anggaran

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Dalam pelaksanaan penerapan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Minum dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari yang dilakukan setiap tahun dikelola Seksi Air Bersih pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi di Tahun 2022 mengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sisem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (Empat) Sub Kegiatan, perlu dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM.

Anggaran yang digunakan bersumber dari APBD Kota Cimahi. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut sebesar Rp. 9.586.350.735,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh

Lima Rupiah). Berikut tabel mengenai anggaran untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.115
Anggaran Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum
Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum/	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	2.440.510.000
2	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	168.378.000
3		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.600.000.000
4		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	5.377.462.735
Jumlah			9.586.350.735,00

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik

Dalam pelaksanaan penerapan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Limbah dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik yang dilakukan setiap tahun dikelola Seksi Air Limbah beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi di Tahun 2022 mengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (Tujuh) Sub Kegiatan, perlu dukungan sumber daya keuangan

khhususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM.

Anggaran yang digunakan sebagian besar bersumber dari APBD Kota Cimahi, DAK dan Sisa DAK. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut sebesar Rp. 6.412.607.500,00 (Enam Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Berikut tabel mengenai anggaran untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian SPM Sub Bidang Air Limbah, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.116
Anggaran Bidang Pekerjaan Umum Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.564.451.300
2			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	800.000.000
3			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	194.519.600
4			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	12.780.000
5			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	226.000.000
6			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.848.607.000
7			Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT ALD)	1.766.249.600
Jumlah				6.412.607.500

4. Dukungan Personil

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Dalam melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Minum dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kota Cimahi baik secara langsung maupun tidak langsung akan melibatkan berbagai pihak, antara lain ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dan pihak lainnya. Jumlah tenaga berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan posisi pada Seksi Air Bersih dan BLUD Air Minum Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.117
Personil tenaga pada Seksi Air Bersih dan BLUD Air Minum
Kota Cimahi Tahun 2020-2022

NO	JENIS TENAGA	TAHUN		
		2020	2021	2022
I	Strata II			
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	1	-
2	Tenaga Ahli	1	-	-
3	Tenaga Harian Lepas	-	1	1
II	Strata I			
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5	10	4
2	Tenaga Ahli	-	-	-
3	Tenaga Harian Lepas	9	2	8
III	Diploma III			
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	1	1
2	Tenaga Ahli	1	-	1
3	Tenaga Harian Lepas	-	1	-
IV	SLTA			
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2	2	1
2	Tenaga Ahli	-	-	-
3	Tenaga Harian Lepas	19	16	22
	Jumlah	39	34	38

Sumber : Seksi Air Bersih dan BLUD Air Minum Kota Cimahi.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik

Dalam melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Limbah dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik di Kota Cimahi baik secara langsung maupun tidak langsung akan melibatkan berbagai pihak, antara lain ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dan pihak lainnya.

Bila dibandingkan dengan standar jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yang seharusnya, masih ada beberapa kesenjangan, baik itu yang di UPTD SPAL maupun di Seksi Air Bersih Bidang Sarana Prasarana. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi masih terjadi pengerjaan beban kerja rangkap, dimana petugas tetap harus mengerjakan tugas fungsional sebagai petugas operasional maupun pelaksanaan tugas administrasi lainnya. Jumlah tenaga berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan posisi pada Seksi Air Limbah dan UPTD SPALD Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.118
Personil tenaga pada Seksi Air Limbah dan UPTD SPALD
Kota Cimahi Tahun 2020-2022

NO	JENIS TENAGA	TAHUN		
		2020	2021	2022
I	Strata II			
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	1	1
2	Tenaga Ahli	-	-	-
3	Tenaga Harian Lepas	-	-	-
II	Strata I			
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	4	4
2	Tenaga Ahli	-	-	1
3	Tenaga Harian Lepas	7	8	7
III	Diploma III		-	-
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	-	1
2	Tenaga Ahli	-	-	-

NO	JENIS TENAGA	TAHUN		
		2020	2021	2022
3	Tenaga Harian Lepas	-	1	1
IV	SLTA			
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	-	-
2	Tenaga Ahli	-	-	-
3	Tenaga Harian Lepas	15	12	12
	Jumlah	23	26	27

Sumber : Seksi Air Limbah dan UPTD SPALD Kota Cimahi.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum Kota Cimahi tahun 2022 diantaranya :

Tabel 2.119
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2020-2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	TARGET	CAPAIAN
1	Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	69,82%	69,66%	69,66%	89,79%	69,82%	90,88%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik	75,83%	90,06%	76,78%	80,55%	77,48%	77,96%

Perhitungan capaian tahun 2022 merupakan gabungan dari persentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80% dan persentase pencapaian mutu minimal dasar bobot 20%.

Capaian kebutuhan pokok air minum mulai tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup drastis, hal ini dikarenakan adanya pembaharuan pendataan yang dilakukan oleh konsultan pada tahun 2021, sedangkan target yang tercantum masih menggunakan RPJMD 2017-2022. Penentuan target disesuaikan dengan kemampuan pendanaan Pemerintah Kota Cimahi. Capaian kebutuhan pokok air minum pada tahun 2022 merupakan gabungan dari persentase pencapaian penerima layanan dasar senilai

89,79% dikalikan dengan bobot 80% dan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan nilai 20% sehingga didapat capaian sebesar 91,88%.

Untuk cakupan pelayanan pengolahan air limbah domestik, terdapat perbedaan data pelayanan yang tercatat di Dinas dengan nilai 80,1% menjadi 77,96% sesuai yang tercantum di sistem karena dipengaruhi bobot persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang baru mencapai 66,65%.

2.4.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2021 Tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal, ada 6 urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar salah satunya Bidang Urusan Perumahan Rakyat. Pelaksanaan penerapan SPM di Kota Cimahi terkait urusan Perumahan Rakyat diantaranya :

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal memiliki standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia, kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai Pasal 10 ayat (2) terdapat 2 Jenis Pelayanan Dasar, yaitu :

- a. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota; dan

- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Target pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.120
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Kota Cimahi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	47 unit	1 Tahun
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi	Jumlah Warga Kota Cimahi yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-

Sumber : Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman

Target pencapaian SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi tidak ada, dikarenakan tidak ada program serta sub kegiatan yang mendukung untuk pencapaian SPM tersebut.

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar :

a. Pernyataan Standar

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat di tetapkan berdasarkan Jumlah unit rumah yang rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi terhadap Rencana total unit rumah yang

akan direhabilitasi yang rusak akibat bencana pada tahun di seluruh kabupaten/kota.

b. Pengertian

Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana, Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.

c. Mekanisme Pelayanan

1) Penetapan penerima pemenuhan Pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni; dan

2) Mutu Pelayanan Dasar

Target pencapaian SPM Sub Perumahan rakyat adalah Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

d. Target Capaian Kinerja SPM

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam memberikan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana telah terrealisasi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit rumah dari target 47 (empat puluh tujuh) unit rumah yang rusak akibat bencana yang telah direhabilitasi pada tahun 2022. Adapun formulasi perhitungan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah sebagai berikut :

Jumlah unit rumah korban bencana yang
ditangani pada tahun n

X 100 %

Jumlah total rencana unit rumah korban

Target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat melalui penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi pada Tahun 2022 telah tercapai secara maksimal. Hal tersebut terbukti dengan adanya jumlah rumah roboh/terkena bencana yang masuk ke dalam kategori bencana alam sebagaimana rekomendasi dari BPBD Kota Cimahi telah berhasil direhabilitasi seluruhnya sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit rumah melalui Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, dimana sifatnya hanya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah.

3. Anggaran

Anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Berikut rincian anggaran pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.

Tabel 2.121
Anggaran untuk Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.	928.712.600	APBD
2		Program Kabupaten/Kota	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering	70.678.540	APBD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
			Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.		
Jumlah				999.391.140	APBD

Sumber : Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman

4. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan SPM urusan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Cimahi baik secara langsung maupun tidak langsung akan melibatkan berbagai pihak, antara lain ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, kelurahan, kecamatan serta pihak lainnya.

Berikut ini tabel ketersediaan Sumber Daya Manusia di Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi terkait urusan perumahan rakyat dalam pencapaian target SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.

Tabel 2.122
Keadaan personil berdasarkan kualifikasi pendidikan pada Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Tahun 2021-2022

No	Jenis Tenaga	2021	2022
		Jumlah (orang)	
I	Strata II		
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	1
2	Tenaga Ahli	-	-
3	Tenaga Harian Lepas	-	-
II	Strata I		
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	1
2	Tenaga Ahli	-	-
3	Tenaga Harian Lepas	2	2
III	Diploma III	-	-
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	-

No	Jenis Tenaga	2021	2022
		Jumlah (orang)	
2	Tenaga Ahli	-	-
3	Tenaga Harian Lepas	-	-
IV	SLTA		
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	-
2	Tenaga Ahli	-	-
3	Tenaga Harian Lepas	4	4
	Jumlah	7	8

Sumber : Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman

5. Hasil Capaian

Berikut ini tabel realisasi capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.

Tabel 2.123
Realisasi Anggaran untuk Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.	928.712.600	882.598.681	95,03	100
2		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.	70.678.540	46.144.000	65,29	100	
Jumlah				999.391.140	928.742.681	92,93	100

Sumber : Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman

Tabel 2.124
Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Waktu Capaian	Persentase Capaian
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang	Jumlah Warga Kota Cimahi korban bencana yang	47 unit	47 unit	1 Tahun	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Waktu Capaian	Persentase Capaian
	Layak Huni Bagi Korban Bencana	memperoleh rumah layak huni				
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi	Jumlah Warga Kota Cimahi yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-	-

Sumber : Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman

2.4.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat diampu oleh dua perangkat daerah di Kota Cimahi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol Polisi Pamong Praja dan Damkar.

- 1. Jenis Pelayanan Dasar**
 - a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran**

Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat di

Kabupaten /Kota yang diampuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran terdapat 2 jenis pelayanan dasar, yaitu :

- 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum; dan
- 2) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

b. Sub Urusan Bencana

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyediakan tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (*hazards*) dan kerentanan (*vulnerability*) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (*capacity*) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana;
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana

- Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun; dan
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

1. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran

Target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel 2.125
Target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN KINERJA	TARGET
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh Pemadam Kebakaran I + Persentase Pelayanan sosialisasi dan penyuluhan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang yang telah menerima sosialisasi dan penyuluhan dan/atau dibawah pembinaan Pemadam Kebakaran	100%

2. Sub Urusan Bencana

Target SPM Sub Bidang Kebencanaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel 2.126
Target SPM Bidang Sub Urusan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

3. Anggaran

1. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran

Tabel 2.127
Anggaran Program dan Kegiatan Satpol PP Damkar Tahun 2022 yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu)daerah kabupaten/kota	1.234.773.000	1.199.191.500	97,12%
			26.500.000	26.500.000	100,00%
			1.525.026.310	1.517.583.000	99,51%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
			1.415.770.000	1.405.320.000	99,26%
			97.200.000	-	0,00%
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	122.980.000	122.980.000	100,00%
			18.000.000	18.000.000	100,00%
			592.280.000	592.280.000	100,00%
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	9.002.000	7.602.000	84,45%
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	1.204.200.000	1.196.450.000	99,36%
			351.893.000	300.101.788	85,28%
			28.531.000	21.052.000	73,79%
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	328.945.200	291.205.200	88,53%
			21.600.000	21.600.000	100,00%
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	22.923.900	22.923.900	100,00%
		total	6.999.624.410	6.742.789.388	96,33%

Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2022 memiliki 3 Program yang terbagi di sekretariat 1 Bidang dan di Bidang sebanyak 2 Program, dengan total kegiatan sebanyak 13 kegiatan, tersebar di bidang sebanyak 6 kegiatan dan di sekretariat sebanyak 7 kegiatan dan dengan jumlah sub kegiatan keseluruhan sebanyak 37 sub kegiatan. Adapun anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan penerapan SPM berasal dari APBD Kota Cimahi adalah sebesar Rp.6.999.624.410 atau 30,39% dari keseluruhan Anggaran Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 sebesar Rp. 26.333.408.625,-

Program yang terkait langsung dengan pelaksanaan SPM antara lain program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

2. Sub Urusan Bencana

Total Pagu anggaran BPBD Kota Cimahi Tahun 2022 adalah Rp. 6.980.755.791 (Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) sedangkan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana penunjang SPM pada BPBD Kota Cimahi adalah bersumber dari APBD Kota Cimahi sebesar Rp. 2.570.387.100 (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah). Program dan kegiatan yang menunjang pada penerapan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.128
Anggaran Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2022 yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
I	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.570.387.100	2.452.702.203	95,42%
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	923,208,100	842,564,100	91.26 %
	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	399,500,000	356,212,000	89.16 %
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	523,708,100	486,352,100	92.87 %
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	810,233,400	782,190,678	96.54 %
	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	123,706,000	122,312,000	98.87 %
	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	117,336,000	103,868,000	88.52 %
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	134,553,600	133,659,750	99.34 %
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	182,395,000	179,548,064	98.44 %
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	102,400,000	93,510,064	91.32 %
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	73,036,000	72,486,000	99.25 %
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	76,806,800	76,806,800	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	836,945,600	827,947,425	98.92 %
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	836,945,600	827,947,425	98.92 %

Realisasi anggaran penunjang SPM Sub Bidang Kebencanaan Kota Cimahi pada tahun 2022 mencapai 95,42% dari total penyerapan pagu anggaran dengan capaian target kinerja sebesar 100%.

4. Dukungan Personil

1. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran

Adapun dukungan personil/ pegawai aktif pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi terhitung 31 Desember 2022 adalah 201 orang, terdiri dari 116 orang ASN dan 85 orang Tenaga Harian Lepas. Pejabat struktural 14 orang. Menurut jenjang Pendidikan dapat dibagi sebagai berikut :

- 1) Pasca sarjana (S2) : 6 orang;
- 2) Sarjana (S1) : 21 orang;
- 3) D IV : 3 orang;
- 4) Diploma (DIII) : 9 orang;
- 5) SLTA :169 orang; dan
- 6) SMP : 1 orang.

2. Sub Urusan Bencana

Jumlah Sumber Daya Manusia di BPBD Kota Cimahi sebanyak 14 orang ASN dan 21 orang Non ASN, bila melihat grafik kejadian bencana yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, idealnya membutuhkan penambahan jumlah personil dan peningkatan kapasitas pegawai dalam penanggulangan bencana, namun pada pelaksanaannya BPBD Kota Cimahi, melakukan efesiensi dengan memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada.

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Kota cimahi, Pemerintah Kota Cimahi bersinergi dengan berbagai *stakeholders* dan relawan yang membantu melaksanakan penanggulangan bencana manakala terjadi bencana. Relawan tersebut diataranya terdiri dari Relawan Bencana Kota Cimahi, FPRB Kota Cimahi, Tagana, PMI, KSB, KIC, KPSC, ORARI, Baraya Kodim, Jarambah dan KSR Unjani.

Tabel 2.129
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan BPBD Kota Cimahi
Tahun 2022

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SLTP	2				2
2	SLTA		1			1
3	DIPLOMA 3			1		1
4	SARJANA (S1)			7	1	8
5	PASCA SARJANA (S2)			2		2
JUMLAH						14

*Keterangan : * Data tanggal 31 Desember 2022*

5. Hasil Capaian

1. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran

Adapun realisasi pencapaian pelaksanaan SPM urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.130
Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2022		
		SASARAN	CAPAIAN	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	16 Pengaduan	16 Pengaduan	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	39 Kejadian	37 Kejadian yang respon time	94,87

2. Sub Urusan Bencana

Berikut Perbandingan capaian target SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 :

Tabel 2.131
Realisasi SPM Sub Urusan Bencana 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2022		
		SASARAN	CAPAIAN	%
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	562.160	562.160	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	562.160	562.160	100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	5788	5788	100%

2.4.1.6. Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti; dan
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Cimahi sesuai Renstra Perubahan Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2018-2022 menargetkan pencapaian SPM Bidang Sosial untuk tahun pencapaian 2022 secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 2.132
Target Capaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Tahun 2022
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100 %

3. Anggaran

Anggaran dan dan realisasi anggaran APBD Kota Cimahi Tahun 2022 dalam usaha pencapaian target SPM 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.133
Anggaran dan dan realisasi anggaran SPM Urusan Sosial

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	Rp.51.800.000	Rp. 51.800.000
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Sandang	Rp.125.970.000	Rp.122.455.000
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Rp.250.158.000	Rp.248.685.440,00
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 12.000.000	Rp.7.050.000,00
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp. 522.318.000	Rp. 513.241.580
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Rp. 124.500.000	Rp.121.450.000

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
	Pengemis dan Masyarakat		
Rehabilitasi Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Rp. 5.400.000	Rp. 5.400.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 5.400.000	Rp. 5.400.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp. 14.511.400	Rp. 14.511.400
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp. 184.974.000	Rp. 165.058.500
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp. 7.350.000	Rp. 7.350.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 55.800.000	Rp. 52.800.000
Penanganan Bencana	Penyediaan Makanan	Rp.139.988.000	-
Penanganan Bencana	Penyediaan Sandang	Rp. 61.200.000	-
Penanganan Bencana	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp. 30.600.000	-
		Rp.1.591.969.400	Rp.1.315.201.920

4. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan penerapan SPM Bidang Sosial di Kota Cimahi, Dinas Sosial Kota Cimahi yang mengampu urusan sosial di salah satu bidangnya diperkuat oleh personil PNS Dinas Sosial sebanyak 23 orang PNS. Selain itu Personil Dinas Sosial Kota Cimahi juga diperkuat oleh :

- 15 THL Peksos (Pekerja Sosial) yang bertugas di seluruh kelurahan;
- 3 THL Korcam (Koordinator Kecamatan);
- 9 THL Tagana (Taruna Siaga Bencana) dan TRC (Tim Reaksi Cepat);
- 2 THL Peterpankesos (Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial); dan
- 2 THL Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

5. Hasil Capaian

Realisasi pencapaian target SPM bidang sosial pada tahun 2022 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.134
Realisasi pencapaian target SPM Bidang Sosial

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %

Data rehabilitasi Untuk penyandang disabilitas terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama tahun 2022 sebanyak 325 yang terdiri dari 100 Dewasa dan 225 Anak dengan Disabilitas. Untuk Lanjut Usia Terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama tahun 2022 sebanyak 200 orang. Sedangkan jumlah Anak Terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama tahun 2022 sebanyak 125 orang. Tuna Sosial yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama tahun 2022 sebanyak 30 orang. Untuk Korban Bencana Alam/Sosial yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 45 orang. Capaian realisasi SPM 2022 ini dapat dinyatakan 100 % karena semua pengajuan/permohonan dapat dilayani melalui penerapan program/kegiatan di Dinas Sosial Kota Cimahi. Bahkan jumlah target SPM ini melebihi 100% di tahun 2022 karena banyaknya

jenis bantuan yang disalurkan kepada KPM se-Kota Cimahi yang membutuhkan termasuk KPM yang didalamnya terdapat penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial maupun korban bencana alam/sosial, seperti yang kita ketahui bersama di tahun 2022 masih berlangsung pandemi covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana sosial nasional, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga rentan terdampak pandemi covid-19 ini pun dapat dikategorikan sebagai jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dampak inflasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2022, di kota Cimahi telah didistribusikan 2 (dua) kategori jenis bantuan yakni :

- a. Bantuan Langsung Tunai dampak kenaikan BBM yang bersumber dari Kemensos RI sebanyak Rp. 600.000,- /KPM; dan
- b. Bantuan Langsung Tunai dampak kenaikan BBM Pemerintah Kota Cimahi senilai Rp. 450.000,-.

2.4.2. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG KETERCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.4.2.1. Bidang Urusan Pendidikan

Program serta kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Tahun 2022 yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Bidang Pendidikan adalah sebagai Berikut :

Tabel 2.135
Program dan Kegiatan SPM Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas
2.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa
3.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
4.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
5.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan
6.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru
7.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas
8.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Siswa
9.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
10.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
11.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan
12.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
13.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Paud
14.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Paud
15.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Perlengkapan Siswa Paud
16.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini
17.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Paud
18.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Paud
19.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan
20.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
21.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
22.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

2.4.2.2. Bidang Urusan Kesehatan

Program, Kegiatan dan sub kegiatan Bidang Urusan Kesehatan sebagaimana pada table berikut :

Tabel 2.136
Program dan Kegiatan SPM Dinas Kesehatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan ibu hamil
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
		Pelayanan kesehatan balita

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
		Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
		Pelayanan kesehatan orang terduga TB
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin
		Pengadaan Bahan Habis Pakai

2.4.2.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program, Kegiatan dan sub kegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.137
Program dan Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
		Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
		Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT ALD)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM
		Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan

2.4.2.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.138
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.
2			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Sumber : Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman

2.4.2.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran.

Program serta kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Tahun 2022 yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai Berikut :

Tabel 2.139
Program dan Kegiatan Satpol PP Damkar Tahun 2022 SPM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu)daerah kabupaten/kota	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melaluu Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

2. Sub Urusan Bencana.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD penanggulangan bencana, BPBD menetapkan program dan kegiatannya pada tahun 2022 sebagai berikut :

a. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Tujuan : Meningkatnya Pengurangan Risiko Bencana di Kota Cimahi dengan terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Sasaran : Seluruh warga Kota Cimahi

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :
 - a) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota; dan
 - b) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :
 - a) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
 - b) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
 - c) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
 - d) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - e) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
 - f) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - g) Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota; dan
 - h) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :
 - a) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - b) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah *Zoonosis* Prioritas;
 - c) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota; dan
 - d) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

**b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Tujuan : Mendukungb Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran : Seluruh warga Kota Cimahi

- 1) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD;
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD;
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
 - d) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; dan
 - e) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
 - a) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; dan
 - c) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;

- b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sesuai Tugas dan Fungsi;
 - d) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - e) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g) Penyediaan Bahan/Material;
 - h) Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - i) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - j) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; dan
 - k) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pengadaan Mebel;
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d) Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
 - e) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - f) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan

- g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pemeliharaan Mebel; dan
 - c) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2.4.2.6. Bidang Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang mengampu pelaksanaan penerapan SPM di Bidang Sosial secara khusus adalah :

1. Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Geladangan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan
2. Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

Namun secara umum pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial di Kota Cimahi juga didukung oleh program dan kegiatan lain khususnya yang ada di Dinas Sosial Kota Cimahi.

Tabel 2.140
Program dan Kegiatan SPM Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar, serta Geladangan Pengemis di Luar Panti Sosial
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

2.4.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA CIMAHI

2.4.3.1. Bidang Urusan Pendidikan

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini ditemui beberapa permasalahan/kendala sebagai berikut :

1. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki dalam pemenuhan SPM Bidang Pendidikan;
2. Masih kurangnya data yang dibutuhkan dalam penghitungan SPM bidang Pendidikan; dan
3. Pendataan khusus untuk siswa Baru.

Adapun solusi terhadap permasalahan/kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memaksimal sasaran SPM dengan memberikan prioritas pada setiap kegiatan;
2. Melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan Perangkat Daerah terkait serta forum grup diskusi; dan

3. Melakukan pendataan SPM dengan melibatkan setiap satuan pendidikan (DAPODIK).

2.4.3.2. Bidang Urusan Kesehatan

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini ditemui beberapa permasalahan/kendala sebagai berikut :

1. Data penerima layanan
Data penerima layanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam memenuhi mutu layanan pada setiap indikator SPM, namun ada target estimasi program yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan, sehingga terkendala dalam pelaporan hasil capaian program;
2. Sarana/Data barang dan jasa
Data terkait sarana belum tersedia secara lengkap baik dari Puskesmas atau jejaring fasilitas kesehatan;
3. Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian SPM Tahun 2022 sebesar 11.342.670.406,- Rupiah, bersumber dari dana APBD dan APBN (Bantuan Operasional Kesehatan). Realisasi Anggaran SPM Pada Dinas Kesehatan 2022 sebesar 5.703.661.395,- Rupiah atau 63,33%. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan BOK karena Menu dan Juknis tidak tersedia sejak awal tahun anggaran; dan
4. Sistem pencatatan dan pelaporan
Pelaporan Standar Pelayanan Minimal dari baik dari Puskesmas atau jejaring fasilitas kesehatan belum menyampaikan hasil pelayanan SPM beserta capaian standar mutu layanan SPM masing masing indikator.

2.4.3.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sampai dengan Semester II Tahun 2022 ditemui beberapa permasalahan / kendala sebagai berikut :

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Permasalahan yang dihadapi di Kota Cimahi dalam upaya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Minum dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kota Cimahi adalah Peningkatan layanan air bersih perpipaan yang ada belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang cukup tinggi. Permasalahan tersebut disebabkan karena hal-hal berikut :

- 1) Keterbatasan Sumber Air Baku, semenjak Kota Cimahi Berdiri Tahun 2001 s/d 2021 baru memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari mata air dan air tanah dalam/dangkal untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dengan membangun 60 unit Sumur Artesis, 4 unit Broncaptering dan bantuan 221 unit sumur dangkal (hidran umum). Sedangkan air baku berskala besar yang bersumber dari air permukaan baru memanfaatkan 1 sumber air yang berasal dari Sungai Cimahi untuk pengolahan unit IPA SPAM Cimahi Utara dengan kapasitas 50 lt/det;
- 2) Penurunan muka air tanah, akibat pengambilan air tanah yang berlebihan/ tidak seimbang dengan konservasinya (debit air menurun dan penurunan muka tanah) di wilayah di Kota Cimahi sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap penggunaan air tanah;
- 3) Keterbatasan/ sulit mendapatkan lahan, untuk pengembangan sarana air bersih yakni Instalasi

Pengolahan Air (IPA) maupun sumur air tanah dalam/dangkal tidak memenuhi kriteria/syarat administrasi maupun teknis;

- 4) Kualitas air tanah dangkal mulai tercemar/ tidak layak minum, terutama di wilayah rawan sanitasi dan dekat dengan industri;
- 5) Lambannya program penyediaan SPAM Regional, karena terbentur kepentingan pengelolaan, tingginya investasi biaya infrastruktur penyediaan air bersih, dll; dan
- 6) Pengelolaan SPAM oleh Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air (KP2A) sebagian belum berjalan optimal dan baik, akibatnya sarana yang sudah dibangun tidak dapat beroperasi dan dipelihara dengan baik karena persoalan pemanfaat enggan membayar iuran, pengurus tidak transparan dan amanah, konflik kepentingan kepengurusan maupun lahan dll, sehingga sarana air bersih menjadi tidak berkelanjutan dan akhirnya menjadi monumen cipta karya (MCK).

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik

Permasalahan yang dihadapi di Kota Cimahi dalam upaya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Limbah dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Dalam meningkatkan cakupan layanan dan kualitas layanan air limbah domestik kepada masyarakat, beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- 1) Terbatasnya lahan di wilayah perkotaan untuk pembangunan sarana air limbah dengan sistem setempat maupun terpusat;
- 2) Perhitungan kebutuhan sarana prasarana air limbah domestik masih menggunakan data sekunder. Pengumpulan data baru dilakukan kepada 4 dari 15 Kelurahan dimana pengumpulan data secara sensus menghabiskan dana yang cukup besar;

- 3) Masih banyak terdapat kendala dalam proses pengolahan air limbah sehingga pada sistem SPALD-T yang telah terbangun hasil uji kualitas air limbah domestik belum memenuhi baku mutu Permen LHK No 68 Tahun 2016. Hal itu terjadi karena banyaknya sampah yang ditemukan dalam bak kontrol dan IPAL, air hujan masuk ke dalam jaringan air limbah, grease trap yang enggan dipasang dan jarang dibersihkan yang mengakibatkan minyak dan lemak menumpuk di jaringan dan IPAL, Treatment lanjutan yang sulit diterapkan karena membutuhkan lahan, dll;
- 4) Kondisi medan yang sulit dijangkau oleh armada penyedotan;
- 5) Belum tersedianya IPLT di Kota Cimahi sehingga untuk pembuangan lumpur tinja memerlukan biaya tambahan;
- 6) Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih kurang, terutama pada masa operasional dan pemeliharaan terutama pada sanitasi berbasis masyarakat. Hal ini sering menimbulkan resistensi terhadap program peningkatan akses air limbah domestik;
- 7) Kemampuan anggaran APBD dalam pembangunan sarana air limbah domestik terbatas; dan
- 8) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan investasi dalam pengolahan air limbah dan mengandalkan bantuan dari pemerintah baik untuk pengadaan sarana pengolahan maupun penyedotan.

2. Solusi

Berdasarkan permasalahan tersebut maka beberapa solusi yang mungkin bisa dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi.

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Minum dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan

Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kota Cimahi, akan dilakukan berbagai solusi sebagai berikut :

- 1) Menjalin pemanfaatan air baku dengan daerah lain, misalnya air baku di Kabupaten Bandung di Kabupaten Bandung Barat;
- 2) Pengambilan air tanah sebagai sumber air baku sebaiknya dihentikan;
- 3) Mengusahakan sistem pengolahan air bersih yang tidak memerlukan lahan luas;
- 4) Membuat Sistem penyaringan air untuk sumur dangkal;
- 5) Mendorong pihak provinsi untuk lebih aktif dalam menuntaskan program penyediaan SPAM Regional; dan
- 6) Diadakan pelatihan untuk Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelola SPAM untuk KP2A.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Limbah dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik :

- 1) Melakukan pengadaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana air limbah domestik khususnya untuk skala Kawasan/ kota;
- 2) Menggunakan fasos fasun untuk lokasi penempatan IPAL;
- 3) Perlu mencari teknologi pengolahan air limbah yang efektif dan efisien dalam pengoperasian dan pemeliharaan sehingga efluen yang memenuhi baku mutu dapat tercapai dan mudah dalam operasi pemeliharaan;
- 4) Mencari sumber-sumber pendanaan selain APBD seperti dari APBN, Hibah Luar Negeri, APBD Provinsi, CSR;
- 5) Sosialisasi dan edukasi pembangunan IPLT pada tahun 2024;
- 6) Pendekatan yang terus menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah;

- 7) Meningkatkan kapasitas UPTD PALD dalam pelayanan air limbah;
- 8) Menyusun Database Air Limbah Domestik untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 9) Merencanakan pembangunan jaring-jaring septictank komunal maupun individual untuk menjangkau lokasi yang tidak terakses tangka tinja untuk di sedot;
- 10) Optimalisasi sarana prasarana IPAL/ SPALD-T yang masih Idle;
- 11) Melakukan pembinaan kepada Kelompok Pengguna dan Pemanfaat (KPP)/ masyarakat untuk pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat; dan
- 12) Melakukan optimalisasi sistem-sistem sanitasi yang sudah tidak berfungsi dengan mengoptimalkan proses di IPAL maupun di jaringan.

2.4.3.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait urusan perumahan rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi terdapat beberapa permasalahan/kendala, diantaranya :

1. Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada daerah memiliki SPM yang dikeluarkan oleh kementerian;
2. Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM;
3. Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (*output/outcome*) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
4. Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM;
5. Keterbatasan anggaran dan personil pendukung;
6. Tidak semua rumah yang terkena bencana/robok mendapatkan rekomendasi dari BPBD, sehingga tidak bisa diperbaiki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi melalui program Pengembangan

Perumahan, Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana;

7. Keterbatasan/sulitnya dokumen kepemilikan tanah atas nama penerima bantuan Rumah tidak layak huni berupa Sertifikat Hak Milik (SHM); dan
8. Swadaya masyarakat yang masih minim, padahal kegiatan ini bersifat stimulan, dimana swadaya menjadi syarat utama untuk keberhasilan output kegiatan fisik di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka beberapa solusi yang mungkin bisa dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, diantaranya :

1. Untuk menindaklanjuti permasalahan rumah yang terkena bencana tetapi tidak direkomendasikan oleh BPBD, dialihkan ke Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni supaya rumah yang terkena bencana bisa diperbaiki dan menjadi rumah layak huni kembali; dan
2. Apabila tidak mempunyai dokumen kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), minimal harus mempunyai bukti pembayaran yang dilegalkan oleh pihak Kelurahan.

Akan dilakukan verifikasi pemilihan rumah calon penerima bantuan yang lebih prioritas, tetapi apabila masih tidak masuk ke dalam kuota akan diajukan kembali untuk tahun berikutnya.

2.4.3.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran

Dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini ditemui beberapa permasalahan/kendala sebagai berikut :

- a. Belum adanya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan jabatan fungsional.

Solusi :

Memberikan kesempatan kepada ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran untuk mengikuti diklat fungsional/ diklat teknis di bidang tugas Pol PP.

- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seperti :

- 1) Sarana dan Prasana seperti APD Fire Rescue dan APD Penyelamatan kondisi saat ini sudah tidak layak; dan
- 2) Tidak tersedianya ruangan pemeriksaan pelanggar dan Pos Jaga.

Solusi :

Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.

- c. Peraturan Daerah yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Solusi :

Melakukan revisi atas produk peraturan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomu, sosial dan budaya masyarakat.

- d. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antar dinas/instansi terkait.

Solusi :

Meningkatkan Kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2. Sub Urusan Bencana

a. Kendala dan Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi BPBD dalam pelaksanaan penerapan SPM Sub Urusan Bencana di Kota Cimahi, antara lain :

- 1) Target
 - a) Penetapan target pada setiap jenis layanan belum optimal dan ambigu karena tidak ada petunjuk teknis yang jelas mengenai formulasi dalam

penetapan target SPM untuk setiap jenis pelayanan;

- b) BPBD Kota Cimahi baru melaksanakan penyusunan Kajian Risiko Bencana pada akhir Tahun 2022 sementara dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) sudah disahkan pada pertengahan Tahun 2022, sehingga target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan belum mengacu pada Kajian Risiko Bencana;
- c) Penetapan sasaran belum berdasarkan data riil (by name by address) seperti yang diamanatkan oleh Permendagri No. 59 Tahun 2021 tetapi masih menggunakan estimasi berdasarkan jumlah penduduk karena pengumpulan data sesuai dengan amanat Permendagri No.59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, untuk sub bidang bencana belum terlaksana karena data kependudukan yang terpusat pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri; dan
- d) Sulitnya mendapatkan data dan koordinasi dengan pihak pelaksana SPM di perangkat daerah.

2) Anggaran

Belum optimalnya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk bidang kebencanaan, sehingga belum optimal dalam mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi dan menyebabkan tidak semua standar pelayanan minimal dapat terpenuhi;

3) Kelembagaan

Kelembagaan BPBD Kota cimahi masih *Type B* (eselon III mandiri), sehingga fungsi BPBD sebagai Koordinator, Komando dan Pelaksana, belum

berjalan secara efektif, karena ada ego sektoral pada SKPD terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi;

4) Sumber Daya Manusia

Masih rendahnya pemahaman dan kepedulian personil yang menangani dan melaksanakan SPM, menyebabkan penerapan SPM belum tepat sasaran;

5) Sarana dan Prasarana

a) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Cimahi, sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana belum berjaab secara optimal; dan

b) Belum adanya sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan data/informasi yang dikelola unit kerja lainnya.

b. Solusi

Solusi dalam hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

- 1) Kementrian Dalam Negeri memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mengakses data kependudukan (*by name by address*) untuk proses pendataan dan peneran SPM lainnya;
- 2) Perlu peningkatan dukungan anggaran untuk pelaksanaan SPM Sub Bidang Kebencanaan dengan mengajukan usulan penambahan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulanga bencana Kota Cimahi;
- 3) Penguatan fungsi BPBD sebagai lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana. Penguatan BPBD ini dapat berupa peningkatanstatus level lembaga dari level B ke level A. Peningkatan level ini berfungsidalam meningkatkan kemampuan BPBD

- dalam berkoordinasi dengan pihak operasional perangkat daerah (OPD) yang berada di Kota Cimahi;
- 4) Pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi setiap gejala-gejala serta perubahan alam yang mengidentifikasikannya kejadian suatu bencana akan terjadi, mutlak diperlukan untuk meningkatkan respon masyarakat dalam menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta harta benda yang mungkin untuk diselamatkan. Tujuannya system ini adalah mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda.;
 - 5) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (aparatur dan relawan) agar memiliki pengetahuan teknis tentang kebencanaan dan meningkatkan kualitas dalam penanggulangan bencana;
 - 6) Pemenuhan kebutuhan sumber daya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) baik dalam hal kualitas dan kuantitas. Pemenuhan kebutuhan sumber daya perlu disesuaikan dengan kondisi risiko bencana yang ada;
 - 7) Membangun dan mengembangkan pusat data dan informasi (Pusdatin) kebencanaan, sehingga masyarakat Kota Cimahi dapat memperoleh informasi dan peringatan dini kejadian bencana pada saat terjadi bencana di wilayah Kota Cimahi; dan
 - 8) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya.

2.4.3.6. Bidang Urusan Sosial

Permasalahan mendasar yang harus menjadi perhatian serius setiap tahun dalam penerapan pelaksanaan SPM ini adalah dinamisnya data 5 kategori target SPM yakni penyandang

disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta korban bencana sosial/alam yang sifatnya akan selalu berubah. Solusinya adalah updating data berkala setiap tahun dan melaksanakan pendataan target SPM secara komprehensif serta membuka layanan informasi dan pengaduan seluas-luasnya dengan memanfaatkan jejaring SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) di masing-masing kelurahan. Solusi lain dari dinamisnya data target capaian SPM Bidang Sosial ini adalah menambah slot anggaran cadangan pada anggaran SPM yang telah ditetapkan setiap tahun, sehingga sewaktu-waktu ada kondisi target SPM yang harus diselesaikan dapat dicover pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Permasalahan berikutnya adalah terbatasnya sumber pendanaan APBD Kota Cimahi, solusinya harus dapat memaksimalkan potensi sumber pendanaan lainnya seperti APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, Baznas maupun swadaya masyarakat. Sampai dengan pelaksanaan tahun 2022, berbagai potensi sumber pendanaan ini terbukti meningkatkan efisensi dan efektifitas penerapan pemenuhan layanan dasar bidang sosial di Kota Cimahi.

Permasalahan lainnya yang tak kalah penting adalah terbatasnya SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial di Kota Cimahi. Solusinya adalah menguatkan dan mengembangkan jejaring PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) di Kota Cimahi, termasuk sinergitas dengan mitra kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial di Kota Cimahi ini. Juga yang tak kalah penting dan sangat mendasar adalah advokasi pembentukan Dinas Sosial secara mandiri di Kota Cimahi agar penanganan SPM ini bisa ditangani secara terpadu minimal oleh 1 Bidang tidak seperti kondisi saat ini yang hanya ditangani oleh 1 Sub Bidang yakni Sub Bidang Rehabilitasi Sosial yang telah direalisasikan pada tanggal 23 Desember 2022

melalui Perwal Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah berkaitan erat dengan arah kebijakan ekonomi. Kerangka ekonomi daerah disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun lalu dan tantangan perekonomian daerah ke depan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional maupun provinsi demi terjadinya keselarasan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Bab ini memberikan gambaran kondisi makro ekonomi yang memuat perkembangan perekonomian global dan nasional yang berkembang sampai dengan tahun 2023 dan perkiraannya pada tahun 2024. Dimana hal tersebut akan berimplikasi pada besaran potensi pendapatan daerah di dalam kerangka pendanaan daerah yang meliputi analisis terkait pendapatan dan potensi pendapatan dari sektor-sektor potensial, yang selanjutnya akan mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 dalam kerangka kebijakan anggaran yang efektif dan efisien berbasis kinerja.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi tahun 2024 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Rancangan Awal Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 dengan memperhatikan sasaran dan arah kebijakan nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja pemerintah (RKP) tahun 2024 dengan mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi pada tahun 2022 dan kondisi ekonomi pada awal tahun 2023, target tahun 2024 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2023 dan 2024.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2022, awal tahun 2023 dan Prediksi tahun 2024

Bab ini akan membahas capaian kinerja indikator ekonomi daerah Kota Cimahi tahun 2022 dan awal tahun 2023 yang terdiri atas laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Seiring dengan berakhirnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara nasional oleh Pemerintah Pusat pada bulan Desember 2022, perekonomian Jawa Barat termasuk Kota Cimahi pada tahun 2023 diperkirakan akan berada di fase penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin mendekati kondisi sebelum Covid-19 diberbagai sektor.

Namun demikian, Perekonomian yang mulai memasuki fase penormalan kembali dihadapkan dengan kekhawatiran akan resesi seiring dengan belum menurunnya ketegangan geopolitik sebagai dampak perang Ukraina dan Rusia. Krisis pangan dan Krisis energi yang juga diwarnai dengan melonjaknya inflasi di berbagai negara serta peningkatan suku bunga global mengakibatkan kondisi yang tidak pasti masih menjadi tantangan pada saat memasuki tahun 2023.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat Kota Cimahi harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan ekonomi ini dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Inisiatif dan program yang efektif dan berkesinambungan dibutuhkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kota dapat terus berlangsung dan menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.

Tantangan pertumbuhan ekonomi akibat belum pulihnya dampak pandemi covid dan kondisi perlambatan ekonomi global mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian perekonomian Kota Cimahi tahun 2022 dan awal tahun 2023 menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2021, hal ini ditandai dengan :

1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2022 yang mencapai 5,92% dibandingkan capaian tahun 2021 yang sebesar 4,19%. Hal ini menunjukkan kembali menggeliatnya kembali perekonomian daerah Kota Cimahi pasca pandemi covid 19 meskipun belum sepenuhnya berada pada kondisi sebelum Covid 19;
2. Sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar dalam struktur PDRB (ADHB) Kota Cimahi tahun 2022 sebesar 47,86% Kontribusi sektor ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 46,33%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan (demand) terhadap industri pengolahan setelah sebelumnya mengalami penurunan akibat pandemi Covid;
3. Dari sisi pengeluaran perekonomian Kota Cimahi didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga (dengan kontribusi lebih dari 70%) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) menjadi kontributor kedua dengan persentase diatas 30%;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,30 dibandingkan angka tahun 2021 menjadi sebesar 10,77%. Meskipun mengalami penurunan namun Kota Cimahi menjadi Kota Kedua dengan tingkat TPT terbesar setelah Kota Bogor;
5. Kebijakan PPKM yang masih berlaku di tahun 2022 juga masih berdampak pada pembatasan pergerakan masyarakat namun pada level paling rendah, sehingga dampak yang dirasakan terhadap sektor konsumsi relatif kecil. Dicabutnya kebijakan PPKM oleh Pemerintah pusat pada Bulan Desember 2022, di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan berimplikasi pada percepatan normalisasi pergerakan dan aktivitas masyarakat.

Beberapa indikator makro ekonomi Kota Cimahi yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan perekonomian Kota Cimahi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke-sektor-sektor.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan perubahan kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa final (PDRB) pada periode waktu tertentu – biasanya dalam periode satu tahun. Sumber pertumbuhan ekonomi bisa di lihat dari sisi permintaan (*demand side*) maupun dari sisi penawaran (*supply side*).

Selengkapnya kontribusi sektoral Kota Cimahi dilihat dari jenis lapangan usaha pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Kontribusi sektoral terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (persen)

Lapangan Usaha	PDRB Harga Konstan 2010					Share Sektoral Harga Konstan 2010				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	32.808	33.588,51	34.657,59	35.123,03	34.100,00	0,15%	0,15%	0,16%	0,15%	0,14%
Pertambangan dan Penggalian	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Industri Pengolahan	9.675.440	11.026.479,92	10.250.609,54	10.294.907,59	11.340.690,00	45,65%	48,24%	45,88%	44,23%	46,00%
Pengadaan Listrik dan Gas	55.205	56.634,40	56.063,87	65.197,25	68.790,00	0,26%	0,25%	0,25%	0,28%	0,28%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.810	10.873,22	11.737,11	12.875,58	13.070,00	0,06%	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%
Konstruksi	2.786.348	2.825.914,77	2.747.119,30	2.973.481,93	2.954.760,00	13,15%	12,36%	12,30%	12,78%	11,99%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.591.571	3.694.055,95	3.452.238,90	3.677.017,42	3.761.760,00	16,95%	16,16%	15,45%	15,80%	15,26%
Transportasi dan Pergudangan	733.663	767.188,80	766.162,48	789.081,38	837.190,00	3,46%	3,36%	3,43%	3,39%	3,40%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	264.666	273.988,07	266.807,58	258.676,75	292.430,00	1,25%	1,20%	1,19%	1,11%	1,19%
Informasi dan Komunikasi	1.482.689	1.531.784,69	2.045.804,03	2.340.866,46	2.468.590,00	7,00%	6,70%	9,16%	10,06%	10,01%
Jasa Keuangan dan Asuransi	661.016	671.130,77	711.881,85	744.684,44	739.810,00	3,12%	2,94%	3,19%	3,20%	3,00%
Real Estat	194.181	206.392,43	215.673,48	258.093,37	267.800,00	0,92%	0,90%	0,97%	1,11%	1,09%
Jasa Perusahaan	37.456	40.042,67	34.351,20	36.246,32	40.070,00	0,18%	0,18%	0,15%	0,16%	0,16%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	427.170	439.463,96	426.876,07	423.169,94	411.860,00	2,02%	1,92%	1,91%	1,82%	1,67%
Jasa Pendidikan	754.437	769.941,65	831.768,44	850.365,38	866.590,00	3,56%	3,37%	3,72%	3,65%	3,52%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	178.632	190.344,08	181.189,63	199.585,35	207.670,00	0,84%	0,83%	0,81%	0,86%	0,84%
Jasa lainnya	305.511	318.218,19	307.620,68	316.406,95	347.540,00	1,44%	1,39%	1,38%	1,36%	1,41%
Jumlah	21.192.604	22.856.042,08	22.340.561,74	23.275.779,13	24.652.730,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Data BPS , diolah 2023

Dari sisi lapangan usaha, Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Cimahi masih dihasilkan oleh lapangan usaha Sektor Industri Pengolahan yang mencapai 47,86%, yang disusul oleh lapangan usaha

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 15,10%, lapangan usaha konstruksi sebesar 12,35% serta lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 6,18%.

Kontraksi ke-3 sektor berkontribusi terbesar tersebut di masa pandemik menjadi salah satu penyebab terkontraksinya perekonomian Kota Cimahi di tahun 2020. Sedangkan sektor infokom menjadi salah satu penstabil perekonomian selama periode 2020-2021. sementara peranan lapangan usaha sektor lainnya masing masing di bawah 5 (lima) persen.

Sektor Industri pengolahan juga memiliki pertumbuhan rata-rata yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi selama periode 2018-2022 sebagaimana terlihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (persen)

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Sekoral					Average
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	0,55%	2,38%	3,18%	1,34%	-2,90%	0,91
Pertambangan dan Penggalian		0,00%	0,00%	0,00%		
Industri Pengolahan	7,70%	13,96%	-7,04%	0,43%	10,16%	5,04
Pengadaan Listrik dan Gas	5,71%	2,59%	-1,01%	16,29%	5,51%	5,82
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,16%	-7,93%	7,95%	9,70%	1,48%	3,28
Konstruksi	7,10%	1,42%	-2,79%	8,24%	-0,63%	2,67
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,91%	2,85%	-6,55%	6,51%	2,30%	1,61
Transportasi dan Pergudangan	5,30%	4,57%	-0,13%	2,99%	6,10%	3,76
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,57%	3,52%	-2,62%	-3,05%	13,05%	3,49
Informasi dan Komunikasi	9,14%	3,31%	33,56%	14,42%	5,46%	13,18
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,13%	1,53%	6,07%	4,61%	-0,65%	3,74
Real Estat	8,44%	6,29%	4,50%	19,67%	3,76%	8,53
Jasa Perusahaan	8,02%	6,91%	-14,21%	5,52%	10,54%	3,35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,35%	2,88%	-2,86%	-0,87%	-2,67%	(0,43)
Jasa Pendidikan	4,17%	2,06%	8,03%	2,24%	1,91%	3,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,24%	6,56%	-4,81%	10,15%	4,05%	4,64
Jasa lainnya	5,68%	4,16%	-3,33%	2,86%	9,84%	3,84
Jumlah	6,46%	7,85%	-2,26%	4,19%	5,92%	4,43

Sumber : Data BPS , diolah 2023

Berdasarkan laju pertumbuhan sektoral terdapat 3 (tiga) jenis lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam kontribusinya dalam PDRB (ADHK) tahun 2022 adalah : Sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 13,05%, Sektor Jasa Perusahaan sebesar 10,54% dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,16%.

Untuk menentukan sektor unggulan di Kota Cimahi, dilakukan perhitungan metode *Location Quotient* (LQ) untuk melihat kemampuan

ekspor sektoral dan metode *Shift-Share* (SS) untuk melihat kemampuan daya saing sektoral di Kota Cimahi .

Dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ), beberapa Sektor yang memiliki kemampuan ekspor di Kota Cimahi ditunjukkan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Sektor-Sektor yang memiliki Kemampuan Ekspor
di Kota Cimahi 2018-2022 (Metode LQ)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	1,05	1,12	1,09	1,04	1,07
Pengadaan Listrik dan Gas	0,68	0,69	0,73	0,76	0,76
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,7	0,61	0,59	0,59	0,58
Konstruksi	1,56	1,46	1,5	1,52	1,51
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,11	1,03	1,05	1,08	1,05
Transportasi dan Pergudangan	0,73	0,7	0,73	0,75	0,71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,46	0,44	0,45	0,43	0,44
Informasi dan Komunikasi	1,7	1,56	1,55	1,65	1,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,24	1,2	1,25	1,24	1,23
Real Estat	0,74	0,7	0,71	0,76	0,75
Jasa Perusahaan	0,4	0,38	0,4	0,39	0,38
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,05	1	1,04	1,05	1,03
Jasa Pendidikan	1,26	1,19	1,2	1,22	1,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,05	1	1	1,02	1
Jasa lainnya	0,67	0,63	0,62	0,63	0,63

Sumber : Workshop KEMD Kota Cimahi 2023

Dari hasil perhitungan tersebut terlihat sektor-sektor yang memiliki nilai LQ >1 merupakan sektor-sektor yang memiliki kemampuan ekspor (sektor yang mampu mendorong perekonomian dari sisi permintaan) selama

kurun waktu 2018-2022 antara lain sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Sektor Konstruksi, Sektor Infokom, Sektor jasa Keuangan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, dan sektor jasa Kesehatan.

Dengan menggunakan metode *Shift-Share* (SS), beberapa Sektor yang memiliki daya saing di Kota Cimahi ditunjukkan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Sektor-Sektor di Kota Cimahi yang memiliki Daya Saing selama periode 2018 -2022 (Metode *Shift Share*)

Lapangan Usaha	2018 - 2022		
	NS	MS	RS
Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	3,94	-0,25	-2,4
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
Industri Pengolahan	1.161,09	-109,6	613,73
Pengadaan Listrik dan Gas	6,62	-2,52	9,49
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,42	1,94	-2,1
Konstruksi	334,37	-173,7	7,75
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	431	-200,2	-60,64
Transportasi dan Pergudangan	88,04	-3,3	18,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	31,76	1,62	-5,62
Informasi dan Komunikasi	177,93	813,39	-5,42
Jasa Keuangan dan Asuransi	79,33	-23,53	22,99
Real Estat	23,3	35,36	14,96
Jasa Perusahaan	4,5	-1,12	-0,77
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	51,26	-77,03	10,46
Jasa Pendidikan	90,54	25,82	-4,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21,44	10,52	-2,92
Jasa lainnya	36,66	11,52	-6,16

Sumber : Workshop KEMD Kota Cimahi 2023

Dari hasil perhitungan SS dimana sektor-sektor yang memiliki nilai *Reginal Share*(RS) >1 merupakan sektor-sektor yang memiliki daya saing dibandingkan dengan sektor yang sama di Jawa Barat, sektor yang mempunyai daya saing di Kota Cimahi selama periode 2018-2022 antara lain : Sektor Industri pengolahan, Sektor Konstruksi, Sektor Transportasi, Sektor jasa Keuangan, real estate dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Jika kita definisikan sektor unggulan adalah sektor yang memiliki kemampuan ekspor dan memiliki daya saing, maka beberapa sektor di bawah ini merupakan sektor unggulan di Kota Cimahi selama periode 2018-2022, yaitu **Sektor Industri Pengolahan; Sektor Konstruksi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**. Keempat sektor tersebut merupakan potensi sektoral yang dapat menjadi pondongkrak pertumbuhan PDRB di Kota Cimahi.

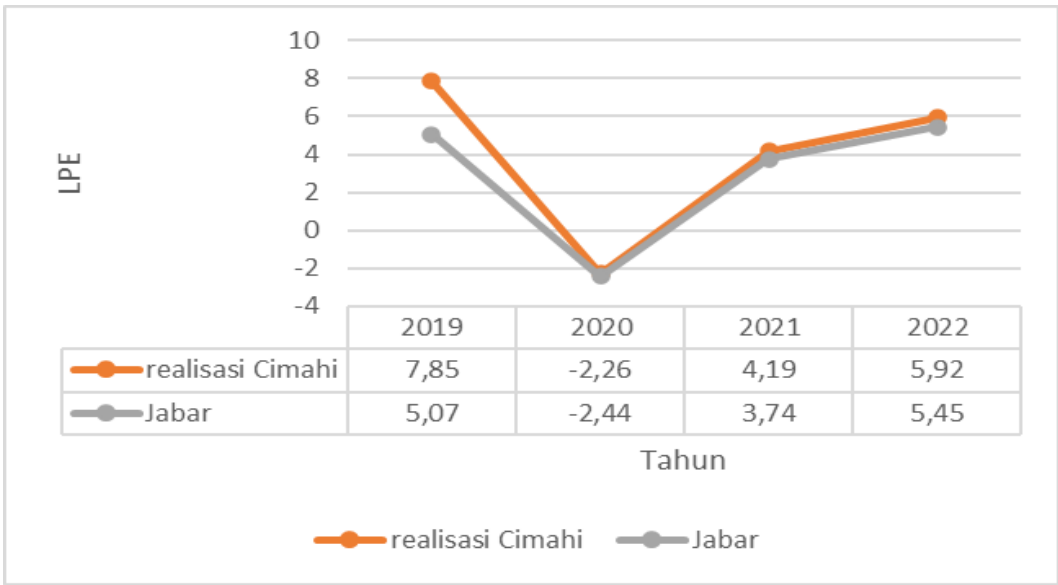
Dari sisi pergeseran struktur lapangan usaha Kota Cimahi dapat dilihat dari kontribusi masing masing lapangan usaha. **Sektor Infokom** menjadi salah satu sektor yang konsisten tumbuh positif selama periode 2018-2022, diikuti dengan **sektor real estate** dan jasa Pendidikan. Pertumbuhan sektor infokom yang relatif besar menyebabkan sektor ini menjadi sektor yang paling cepat peningkatan kontribusinya terhadap perekonomian Kota Cimahi. Sehingga sektor ini menjadi salah satu potensi sektor baru yang dapat didorong perkembangannya. Sebaliknya **sektor lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib** peranannya terus menurun dari 2,48% pada tahun 2018 menjadi 1,88% pada tahun 2022. Dorongan pemerintah berupa belanja yang lebih berkualitas pada program program pemulihan ekonomi pasca COVID 19 serta penerimaan perpajakan yang optimal diharapkan dapat meningkatkan kembali kontribusi sektor ini dalam PDRB Kota Cimahi.

Sementara itu dilihat dari sisi pengeluaran perekonomian Kota Cimahi didominasi oleh **pengeluaran konsumsi rumah tangga** (dengan kontribusi lebih dari 70% sedangkan Pembentukan Modal Tetap Domestic Bruto (PMTDB) menjadi kontributor kedua dengan persentase diatas 30%. Ketergantungan Kota Cimahi terhadap produk dari luar Kota

Cimahi, ditunjukkan dengan nilai Net Ekspor yang negatif – ada kecenderungan penurunan nilai Net Ekspor Kota Cimahi

3.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang positif menuju ke tingkat keseimbangan sebelum pandemi Covid 19. Hal tersebut didorong oleh mulai normalnya kembali konsumsi masyarakat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, sehingga Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,92%.



Sumber : Data BPS, Diolah, 2023

Gambar 3.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2022

Pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi memiliki pola yang hampir mirip dengan pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat pertumbuhan ekonomi Cimahi cenderung lebih baik sejak tahun 2019.

Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 didorong oleh pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang tumbuh secara signifikan sebesar 10,16%. Tumbuhnya LPE secara signifikan di tahun 2022 ini memberikan gambaran bahwa pergerakan ekonomi daerah yang sempat berkontraksi negatif pada tahun 2020 terus mengalami

recovery dan peningkatan aktivitas ekonomi yang pesat terutama pada sektor industri yang sampai saat ini menjadi leading di Kota Cimahi.

Meskipun Kota Cimahi mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024. Salah satu tantangan utama adalah **pengangguran yang masih tinggi, keterbatasan sumber daya alam dan lingkungan serta keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur pada daerah padat penduduk.**

3.1.1.3. Inflasi

Perkembangan inflasi yang terjadi di Kota Cimahi merujuk pada inflasi yang terjadi di Kota Bandung, sebagai kota terdekatnya di Provinsi Jawa Barat. Perhitungan nilai inflasi dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada bulan Desember 2022, gabungan 7 Kota di Jawa Barat terjadi inflasi *year on year* (yoy) sebesar 6,04% dengan Indeks harga Konsumen (IHK) sebesar 115,11. Dimana inflasi tertinggi terjadi di Kota Bandung (yoy) sebesar 7,45% dengan IHK 115,43 dan terendah terjadi di Kota Cirebon sebesar 4,86% dengan IHK sebesar 110,32.

Tabel 3.5
Indeks harga konsumen dan Inflasi tujuh kota Jawa Barat

Kota		IHK Desember 2022	mtm Desember 2022 ¹⁾	Inflasi	
				ytd Desember 2022 ²⁾	yoy Desember 2022 ³⁾
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]
1	BOGOR	115,54	0,49	5,82	5,82
2	SUKABUMI	113,32	0,50	5,45	5,45
3	BANDUNG	115,43	2,04	7,45	7,45
4	CIREBON	110,32	0,35	4,86	4,86
5	BEKASI	115,67	0,46	5,37	5,37
6	DEPOK	114,90	0,32	6,06	6,06
7	TASIKMALAYA	111,78	0,53	6,65	6,65

Keterangan: ¹⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK November 2022.
²⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK Desember 2021.
³⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK Desember 2021.

Sumber : Data BPS , diolah 2023

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran yaitu : kelompok makanan,

minuman dan sembakau sebesar 6,80%, Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,65%, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 5,90%, kelompok transportasi sebesar 12,59%, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,51%, kelompok pendidikan sebesar 4,07%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,17% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,80%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,27%.

Program dan kegiatan prioritas pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas daerah pada tahun 2024, dimana pelaksanaan program kegiatan terkait pengendalian inflasi pada sisi produksi, distribusi dan ketersediaan diharap kandapat dapat mengendalikan harga-harga di tingkat konsumen serta menurunkan inflasi pada tingkat yang terkendali.

3.1.1.4. Tingkat Pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang menganggur dibandingkan dengan penduduk Angkatan Kerja.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Ketenagakerjaan bulan Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi (YoY) tercatat sebesar 10,77% (34,5 ribu jiwa), artinya dari 100 orang penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Cimahi, 10-11 orang diantaranya termasuk pengangguran., atau turun sebesar 2,30% dibandingkan angka pada tahun 2021 sebesar 13,07%. Angka ini melebihi target TPT dalam indikator makro Kota Cimahi pada RKPD 2023 yang sebesar 12,61%.

Pada tahun 2023, TPT Kota Cimahi menduduki peringkat paling tinggi kedua di Jawa Barat setelah Kota Bogor. TPT Cimahi mengalami kenaikan cukup tajam pada saat pandemi di Tahun 2020, kemudian cenderung terus menurun sampai dengan Tahun 2022. Namun, TPT pada Tahun 2022 kondisinya masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.



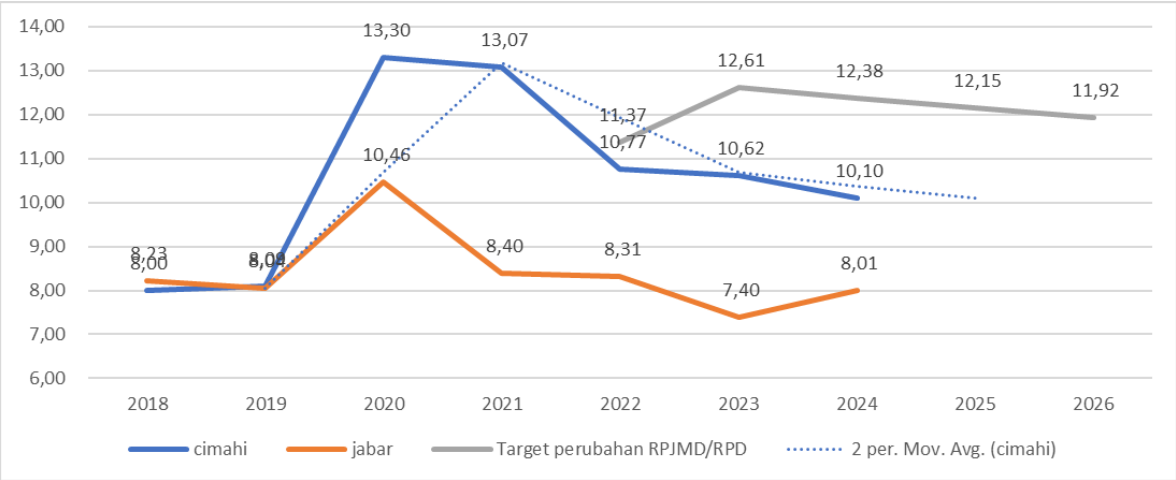
Sumber : Data BPS , diolah 2023

Gambar 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022

Penurunan TPT pada tahun 2022 menunjukkan lapangan pekerjaan di Kota Cimahi sudah membaik meskipun belum sepenuhnya pulih. Tentu saja hal ini sedikit banyak didukung oleh mulai membaiknya aktivitas ekonomi daerah pasca pandemi covid dan diharapkan terus membaik setelah Covid dinyatakan sebagai Endemi dengan dihapuskannya PPKM secara nasional, sehingga penyerapan tenaga kerja terus meningkat terutama pada sektor perdagangan, industri pengolahan dan pertanian.

Tingkat Pengangguran Terbuka tetap perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Cimahi. Rencana Strategis ketenagakerjaan daerah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga target penurunan TPT setiap tahun menjadi lebih terukur.

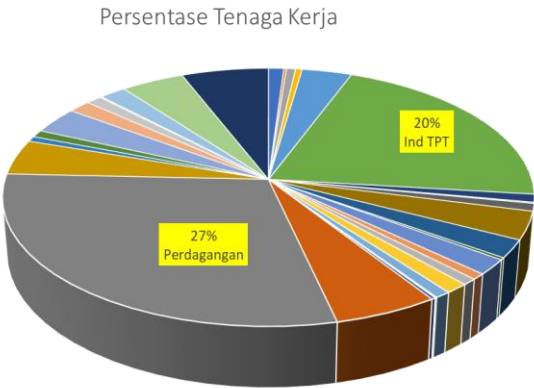
Kondisi penurunan TPT pada tahun 2022 diharapkan terus berlanjut sampai dengan tahun 2026 sebagaimana proyeksi target TPT sebagai berikut :



Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi, 2023

Gambar 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi dan Proyeksinya s/d 2026

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan tenaga kerja di Kota cimahi adalah besarnya komposisi tenaga kerja per sektoral Kota Cimahi.



Sumber : BPS, diolah

Gambar 3.4 Komposisi Tenaga Kerja Sektoral Kota Cimahi

Dari Grafik diatas terlihat bahwa sepertiga Tenaga kerja Kota Cimahi berada pada aktivitas industri yaitu sebesar 33% – dengan konsentrasi terbesar ada pada industri tekstil dan produk tekstil/TPT (20%). Sedangkan pekerja di sektor perdagangan sebanyak kurang lebih 26% dan jasa kemasyarakatan sebesar 20%. Ketiga sektor ini harus lebih mendapat perhatian karena melibatkan pekerja yang relatif besar.

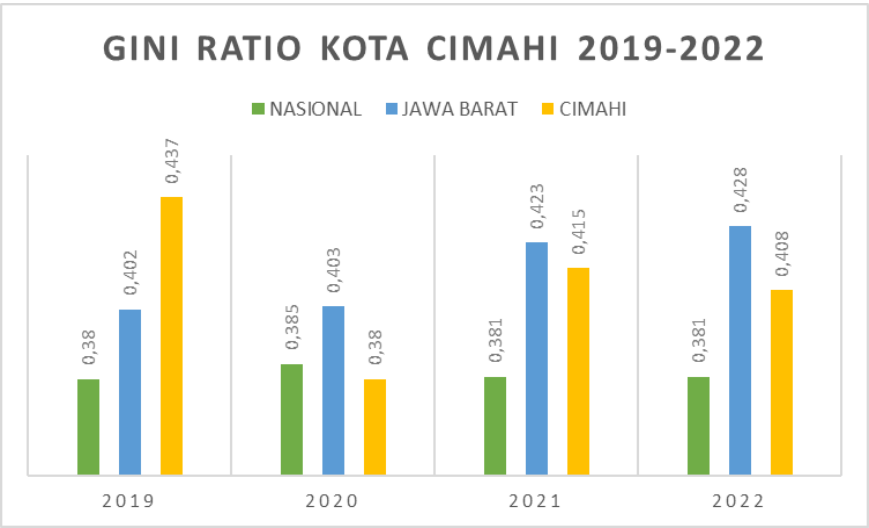
Beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi pengurangan angka pengangguran di Kota Cimahi antara lain :

1. Perlunya mengembangkan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi misalnya dengan meningkatkan hubungan dengan industri besar;
2. Peningkatan kualitas pendidikan yang adaptif terhadap teknologi (pendidikan vokasi dan *soft skill*); serta
3. Pengembangan informasi pasar kerja sehingga terjadi *mix and match* antara potensi dan “*demand*” tenaga kerja daerah.

3.1.1.5. Distribusi Pendapatan (Indeks Gini)

Distribusi pendapatan/ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dapat dijelaskan salah satunya dengan menggunakan Indeks Gini.

Indeks Gini Kota Cimahi mengalami penurunan cukup gradual sampai dengan tahun 2020. Pandemi Covid 19 menyebabkan ketimpangan di Kota Cimahi pada tahun 2021 melebar sehingga Indeks Gini Kota Cimahi pada tahun 2021 meningkat.

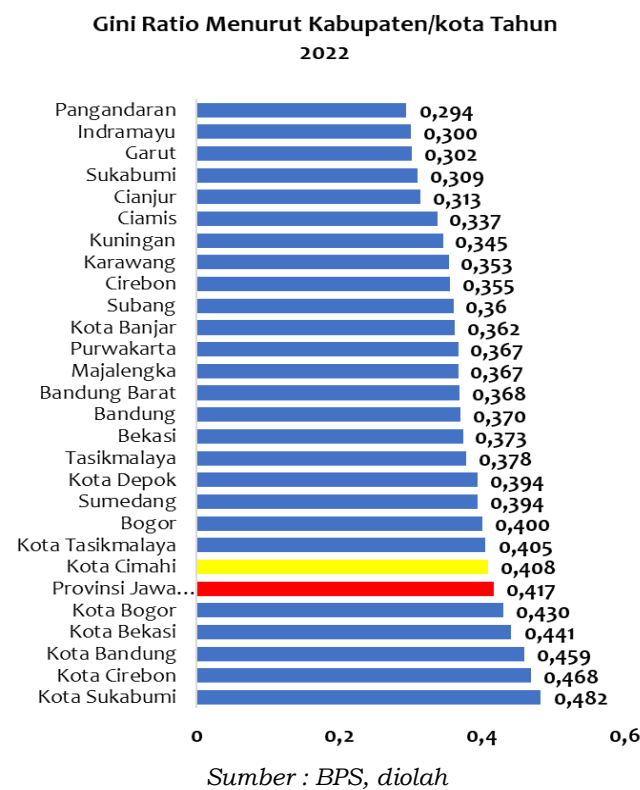


Sumber : Data BPS , diolah 2023

Gambar 3.5 Perkembangan Gini Ratio Kota Cimahi tahun 2019-2022

Sepanjang 2018-2022 *Gini Ratio* Kota Cimahi relatif lebih rendah daripada Provinsi Jawa Barat, kecuali di tahun 2019. Pada tahun 2022 gini ratio Kota Cimahi menurun dibandingkan tahun 2021 dari 0,415 menjadi

0,408. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pemerataan pendapatan pada tahun 2022 meskipun belum sepenuhnya kembali ke angka tahun 2020 yang sebesar 0,380.

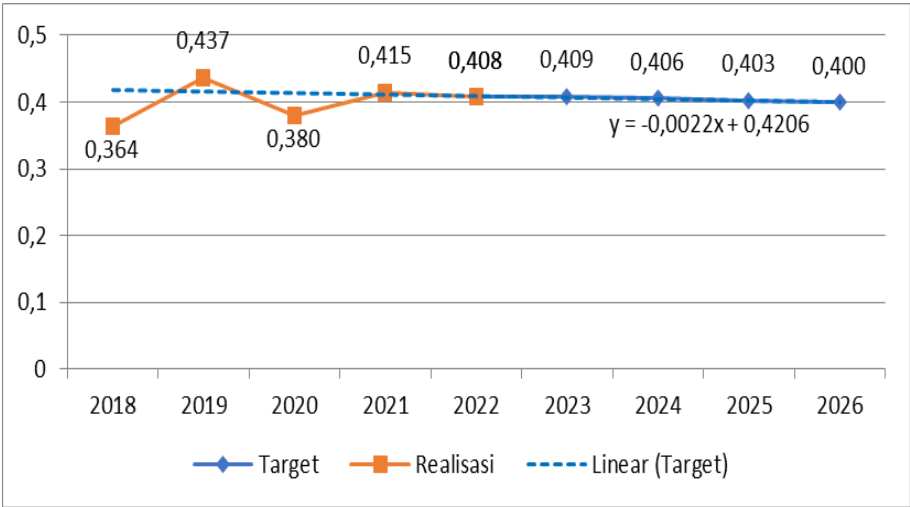


Gambar 3.6 Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

Besarnya gini rasio Kota Cimahi pada tahun 2022 yaitu 0,408. Nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan wilayah Kota Cimahi termasuk kategori dengan ketimpangan sedang karena nilainya masih dibawah 0,5. Pemerintah daerah harus bertindak cepat walaupun masih kategori sedang namun jaraknya cukup dekat dengan kategori tinggi.

Program-Program pembangunan padat karya serta pengembangan ekonomi berbasiskan potensi lokal khususnya usaha mikro dan kecil serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi alternatif kebijakan yang perlu diambil untuk mempersempit ketimpangan ekonomi daerah.

Diharapkan pada tahun 2024 Gini rasio Kota Cimahi menurun sebagaimana proyeksi sebagai berikut :

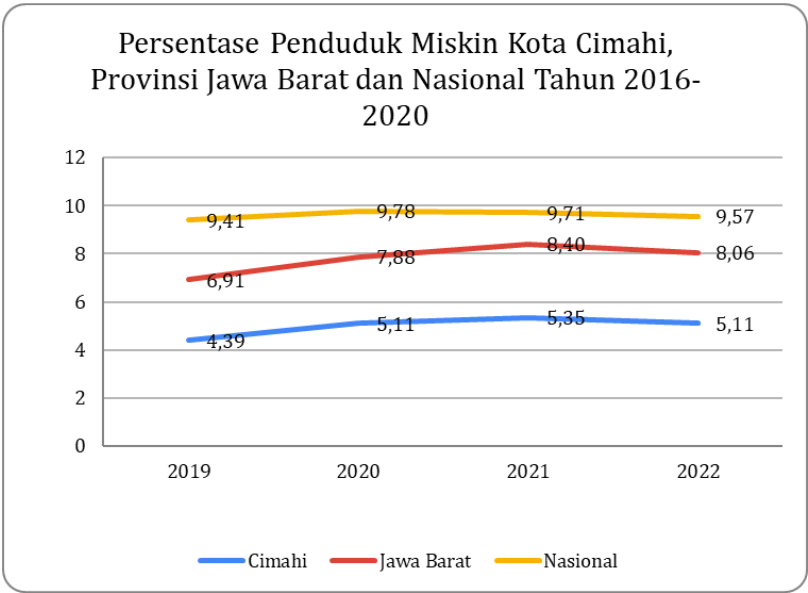


Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi, 2023

Gambar 3.7 Gini rasio dan Proyeksinya s/d 2026

3.1.1.6. Tingkat Kemiskinan

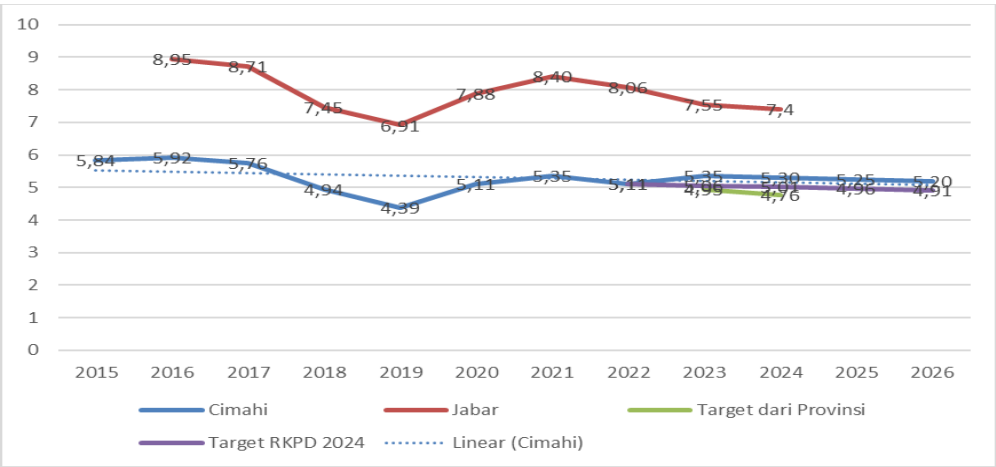
Penurunan aktivitas perekonomian akibat covid mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan sehingga mengakibatkan penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pada akhirnya mendorong kenaikan tingkat kemiskinan yang meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 5,35%.



Gambar 3.8 Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,11% seiring dengan penurunan indeks gini, kondisi ini menunjukkan

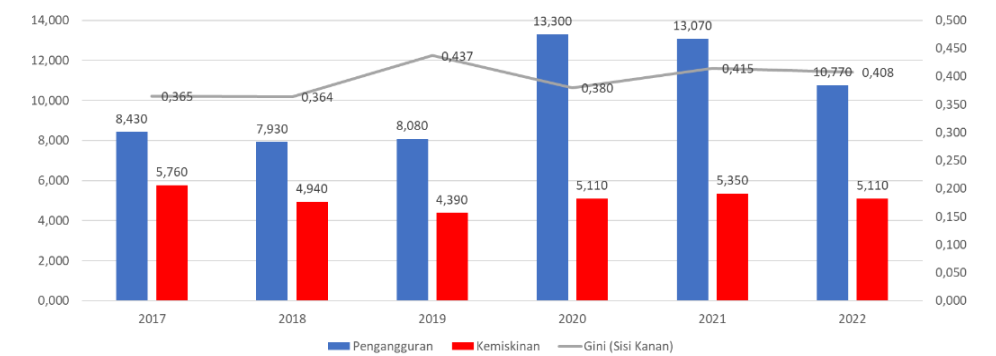
perbaikan seiring dengan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 serta mengindikasikan mulai meningkatnya aktivitas perekonomian daerah serta berhasilnya program jejaring pengaman sosial untuk mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga masyarakat sehingga angka kemiskinan menurun. Kondisi penurunan ini diharapkan terus berlanjut pada tahun 2024 sebagai berikut :



Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi, 2023

Gambar 3.9 Tingkat Kemiskinan Kota Cimahi dan Proyeksi s/d 2026

Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2024 juga harus tetap mewaspadai dampak fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi kondisi masyarakat dan kinerja sektor riil. Sejalan dengan kembalinya pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi ke masa sebelum pandemik, beberapa indikator sosial belum kembali ke kondisi pasca sebelum pandemik - angka tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan yang masih berada di atas angka pengangguran dan kemiskinan sebelum pandemik.



Sumber : Workshop KEMD kota cimahi 2023

Gambar 3.10 Indikator Pembangunan Sosial Kota Cimahi 2017-2022

Kontraksi perekonomian akibat pandemik masih menyisakan permasalahan sosial yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Untuk itu upaya mengatasi peningkatan beban kehidupan masyarakat masih perlu dilanjutkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

3.1.2.1. Tantangan Ekonomi Global dan Nasional

Pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi mengalami perlambatan di tahun 2023 dan 2024. Hampir seluruh regional mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibanding tahun 2022, kecuali pada negara-negara berkembang di Asia dan Sub-Sahara Afrika. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut diprediksi lebih berdampak pada negara-negara maju, sehingga angka pertumbuhannya terkoreksi lebih banyak dari negara-negara berkembang. Ekonomi domestik pada tahun 2022 mengalami pemulihan yang kuat di tengah tren perlambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2022, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lembaga IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 mengalami perlambatan pertumbuhan dan berkisar sekitar 2,9% (Januari 2023), sementara untuk tahun 2024 sebesar 3,1%.

Tantangan ekonomi global tahun 2023-2024 diperkirakan dihadapkan pada terganggunya rantai pasok bahan pangan, krisis energi, normalisasi suku bunga, potensi perkembangan varian baru COVID-19 dan ketidakstabilan eskalasi tensi geopolitik global, dimana Perang Rusia Ukraina memberi dampak terhadap ekonomi global. Setidaknya, konfrontasi kedua negara tersebut berpengaruh terhadap sediaan gas bagi negara-negara Eropa dan meningkatnya harga pangan yang berujung inflasi di berbagai belahan dunia. (IMF, Oktober 2022)

Ditengah ketidakpastian perekonomian global, IMF memprediksi perekonomian Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 masih tumbuh positif mencapai angka 4,3% dan 4,7%. Pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh efektivitas penanganan Covid 19 serta kebijakan nasional dalam memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi pasca Covid 19.

Tantangan ekonomi nasional yang dihadapi antara lain dampak konflik Ukraina, potensi munculnya varian baru Covid 19, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan dampak inflasi akibat kenaikan harga pangan dan energi.

3.1.2.2. Tantangan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Kondisi perekonomian Jawa Barat ke depan tidak terlepas dari perkembangan kasus pandemi Covid 19 serta upaya pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, pengolahan, Perdagangan, jasa konstruksi, serta akomodasi dan perhotelan. Eskalasi tensi geopolitik global (konflik Rusia-Ukraina) berpotensi mempengaruhi perekonomian Jawa Barat melalui 3 (tiga) jalur yaitu jalur perdagangan, jalur komoditas dan jalur keuangan.

Pada jalur perdagangan akan mempengaruhi permintaan global dan volume perdagangan. Pada jalur komoditas akan mempengaruhi inflasi global yang berpengaruh pada harga komoditas dan volume perdagangan. Pada jalur keuangan akan mempengaruhi likuiditas global yang berpengaruh pada risiko pasar dan percepatan kebijakan politik.

Dampak langsung konflik Rusia Ukraina melalui jalur perdagangan ke Jawa Barat relatif rendah, mengingat nilai perdagangan Jawa Barat dengan Rusia dan Ukraina relatif kecil. Baik secara nasional maupun Jawa Barat, kinerja ekspor ke Rusia pada Januari 2022 secara berturut-turut sebesar 0,97% dan 0,88% dari total ekspor secara keseluruhan.

Adapun ekspor terbesar Jawa Barat ke Rusia berasal dari industri mesin dan alat listrik. Pada Januari 2022 kegiatan perdagangan dengan Ukraina juga menunjukkan proporsi yang relatif kecil dibandingkan dengan negara lain. Adapun ekspor terbesar Jawa Barat berasal dari Industri plastik/karet.

Tantangan perekonomian Jawa Barat pada tahun 2024 meliputi :

1. Penormalan kinerja perekonomian dari dampak dinamika perekonomian global;
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci PDRB Jawa Barat melalui percepatan realisasi investasi;
3. Digitalisasi ekonomi dan industri yang berbasis high tech, dan industri kecil menengah dan UMKM;
4. Penguatan konektivitas dan inklusivitas ekonomi Jawa Barat, khususnya UMKM, IKM serta pariwisata; dan
5. Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan.

3.1.2.3. Tantangan Ekonomi Kota Cimahi

Ancaman Perekonomian yang diprediksi akan dihadapi oleh Kota Cimahi pada tahun 2024 adalah masih meningkatnya indeks ketidakpastian global yang disebabkan belum meredanya konflik Rusia Ukraina serta masih adanya Potensi Pandemi Covid 19 yang terjadi meskipun Pemerintah RI sudah menyatakan sebagai Endemi. Ancaman tersebut akan mengakibatkan :

1. Meningkatnya angka inflasi akibat ancaman terjadinya krisis energi dan krisis pangan;
2. Adanya penurunan permintaan global terhadap produksi dalam negeri yang akan menyebabkan terjadinya PHK yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran;
3. Perlambatan pertumbuhan Ekonomi nasional dan regional; dan
4. Meningkatnya angka kemiskinan.

Dari kondisi tersebut di atas maka Tantangan perekonomian yang dihadapi Kota Cimahi pada tahun 2024 meliputi :

1. Pengendalian Inflasi daerah dari dampak dinamika perekonomian global;
2. Akselerasi produktivitas Industri kecil menengah dan UMKM melalui digitalisasi ekonomi dan peningkatan daya saing produk UMKM berbasis ekonomi lokal sehingga mampu menembus pasar regional dan internasional;

3. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas sektor sektor potensial dalam PDRB Kota Cimahi serta meningkatkan realisasi investasi daerah; dan
4. Penurunan angka kemiskinan melalui Penanganan terpadu kemiskinan ekstrim, Pemerataan pendapatan dan penurunan angka pengangguran.

Tantangan perekonomian tersebut harus dijawab dengan arah pembangunan ekonomi yang dilaksanakan secara menyeluruh di setiap sektor perekonomian agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal, efektif dan efisien dengan berbagai strategi untuk :

1. Menjaga ketahanan Pangan Daerah melalui Kerjasama Antar Daerah, Diversifikasi Pangan Lokal dalam mengantisipasi gejolak inflasi daerah;
2. Peningkatan iklim investasi dengan menjamin kondusifitas iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program vokasi dan pelatihan;
4. Meningkatkan daya saing pelaku usaha ekonomi dan produk lokal melalui peningkatan akses pasar, serta Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan serta mempermudah Akses Pembiayaan UMKM; dan
5. Peningkatan daya beli masyarakat dengan Meningkatkan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok untuk mengurangi beban pengeluaran untuk mengantisipasi peningkatan angka kemiskinan daerah.

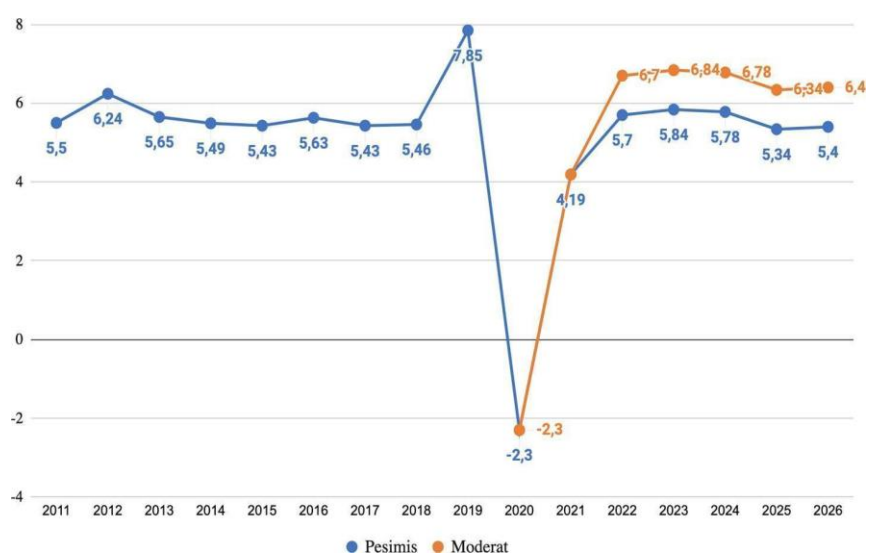
Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut :

1. **Tantangan pada sektor investasi :**
 - a. Menarik investasi daerah melalui pemetaan potensi Investasi daerah di Kota Cimahi;
 - b. Meningkatkan promosi investasi daerah di Kota Cimahi;
 - c. Mempermudah perijinan Usaha Mikro Kecil (UMK) pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);

- d. Mempermudah perijinan melalui Implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSSRBA) pada seluruh sektor perizinan; dan
 - e. Optimalisasi pelayanan dan pengawasan perijinan.
2. **Tantangan pada sektor industri :**
- a. Kemitraan industri besar dan IKM;
 - b. Peningkatan standar dan daya saing Produk IKM;
 - c. Pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri 40%;
 - d. Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pengembangan Industri Kreatif berbasis potensi lokal.
3. **Tantangan pada sektor UMKM :**
- a. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Kota Cimahi melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas;
 - b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, akses permodalan, kemudahan bahan baku dan digitalisasi UMKM;
 - c. Meningkatkan daya saing Produk UMKM; dan
 - d. Meningkatkan potensi pasar bagi produk UMKM Kota Cimahi baik pasar regional maupun pasar ekspor.
4. **Tantangan pada sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif :**
- a. Pengembangan destinasi pariwisata daerah;
 - b. Peningkatan Promosi wisata Kota;
 - c. Peningkatan kapasitas komunitas dan sumber daya pariwisata Kota; dan
 - d. Pengembangan Ekonomi Kreatif daerah.
5. **Tantangan pada sektor perdagangan :**
- a. Meningkatkan sarana prasarana Perdagangan dan ttandarisasi pasar rakyat ber-SNI;
 - b. Menjamin ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok yang terjangkau;
 - c. Promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

- d. Penyediaan komoditas perdagangan yang kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya terjaga;
 - e. Peningkatan perlindungan terhadap Konsumen; dan
 - f. Pemanfaatan teknologi digital pada sektor perdagangan.
6. **Tantangan pada sektor pertanian dan pangan :**
- a. Ketersediaan pangan yang terjangkau dan berkualitas;
 - b. Perlindungan harga ditingkat produsen;
 - c. Penguatan Cadangan Pangan Daerah;
 - d. Peningkatan akses konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - e. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan;
 - f. Peningkatan diversifikasi produk pertanian;
 - g. Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - h. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi pada sektor pertanian; dan
 - i. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi hewan dan masyarakat veteriner.
7. **Tantangan pada sektor ketenagakerjaan :**
- a. Meningkatnya Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - b. Meningkatnya Penempatan calon tenaga kerja Cimahi melalui program pelatihan dan pemagangan;
 - c. Meningkatnya kerjasama dengan Balai Pelatihan Kerja Provinsi atau daerah lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan
 - d. Meningkatnya harmonisasi dengan industrial.

Memperhatikan kondisi saat ini serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan maka proyeksi kinerja ekonomi tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Sumber : Diseminasi perekonomian Kota Cimahi tahun 2023

Gambar 3.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Proyeksi s/d 2026

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi tahun 2023 s/d 2026 masih cukup baik sejalan dengan proyeksi IMF terhadap Indonesia (4,97%) dan proyeksi pertumbuhan Jawa Barat yang cenderung lebih tinggi dari nasional. Kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi tahun 2024 diperkirakan kembali tumbuh positif sebagaimana proyeksi laju pertumbuhan ekonomi yang dilakukan berdasarkan data series serta analisa terkait kondisi pasca covid dan dampak ketidakpastian serta situasi perekonomian daerah, dengan estimasi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 berkisar antara 5,78-6,78%. Perlu juga diingat bahwa adanya Pilkada serentak pada tahun 2024 juga mempengaruhi tingkat laju pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan prediksi Laju pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan meningkat maka Laju pertumbuhan sektoral ekonomi Kota Cimahi sampai dengan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Proyeksi Pertumbuhan Kota Cimahi berdasarkan lapangan usaha s/d
tahun 2026

	Low						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan (Persen)							
PDRB (Target)	-2,26	4,19	5,70	5,84	5,78	5,34	5,40
PDRB <i>(Uji Konsistensi)</i>	-2,26	4,19	5,70	5,84	5,78	5,34	5,40
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,32	1,34	2,05	2,10	2,08	1,92	1,94
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan/Manufacturing <i>(Residual)</i>	-4,96	0,43	4,37	4,47	4,43	4,09	4,13
Pengadaan Listrik dan Gas	-1,01	16,29	4,94	5,06	5,01	4,63	4,68
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,88	9,70	4,35	4,45	4,41	4,07	4,12
Konstruksi	-5,70	8,24	4,95	5,07	5,02	4,63	4,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,05	6,51	5,39	5,52	5,46	5,04	5,10
Transportasi dan Pergudangan	-1,10	2,99	4,77	4,89	4,84	4,46	4,52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,42	-3,05	6,09	6,24	6,18	5,70	5,77
Informasi dan Komunikasi	32,79	14,42	13,85	14,19	14,05	12,97	13,12
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,65	4,61	7,69	7,88	7,80	7,20	7,29
Real Estat	1,24	19,67	6,00	6,15	6,09	5,62	5,69
Jasa Perusahaan	-17,11	5,52	7,89	8,09	8,01	7,39	7,48
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,66	-0,87	2,48	2,55	2,52	2,33	2,35
Jasa Pendidikan	4,28	2,24	8,57	8,78	8,69	8,02	8,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5,75	10,15	8,06	8,26	8,18	7,55	7,64
Jasa lainnya	-5,73	2,86	4,84	4,96	4,91	4,54	4,59
OTHERS	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Diseminasi ekonomi Kota cimahi 2022

Pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum bahwa pada tahun 2021 semua sektor telah menunjukkan pertumbuhan yang positif kecuali Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Sektor infokom menjadi salah satu sektor dengan perkiraan laju pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor lain. Untuk itu pengembangan sektor ini melalui dukungan kepada pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital di Kota Cimahi diharapkan mampu mendorong lebih cepatnya laju pertumbuhan sektor ini dalam PDRB Kota Cimahi.

Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam mempertahankan Pertumbuhan Kota Cimahi yang berkualitas antara lain :

1. Dari sisi sektoral perekonomian Kota Cimahi sangat bergantung pada 4 (empat) sektor utama (Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan Infokom). Mempertahankan perekonomian Kota bisa dilakukan dengan mempertahankan eksistensi dari ke-4 (empat) sektor tersebut antara lain menjaga pertumbuhan sektoralnya;
2. Selain ke-4 (empat) sektor tersebut, sektor-sektor yang terkategori sektor unggulan (sektor yang memiliki kemampuan ekspor dan

- memiliki daya saing) perlu didorong perkembangannya, sehingga bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib); dan
3. Hal yang perlu di waspadai dari kondisi perekonomian Kota Cimahi adalah kondisi sosial masyarakat – yaitu bagaimana agar minimal bisa mempertahankan kesejahteraan masyarakat – terutama dalam menghadapi adanya gejala inflasi, pasokan bahan pangan, ketidakpastian ekonomi, dan juga masalah ketenagakerjaan mencegah peningkatan kemiskinan dan pengangguran.

Secara keseluruhan, kecenderungan perbaikan kondisi perekonomian Kota Cimahi yang diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, dan nasional serta harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2024 yang berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Kota Cimahi.

Adapun Kota Cimahi menuangkan arah pembangunan dalam dokumen ini diselaraskan dengan dokumen Rancangan awal RKP Tahun 2024 dan Rancangan akhir RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dengan mencantumkan perkiraan target dari Indikator Makro Pembangunan untuk tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Target Indikator Makro Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi
Tahun 2024

No	Indikator Makro Pembangunan	Nasional		Jawa Barat *	Kota Cimahi	
		RPJMN	Penyesuaian Target 2024	RPD	RPD	Penyesuaian Target 2024 *
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,54	73,99-74,02	73,56	78,32	79,2
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,2-6,5	5,3-5,7	5,42	5,15-5,95	5,95
3	Tingkat Penganggura Terbuka (TPT) (%)	3,6-4,3	5,0-5,7	8,21	12,38	10,34
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,0 - 7,0	6,5-7,5	7,39	5,3	5,01
5	Indeks Gini (Point)	0,360 -0,374	0,374-0,377	0,408	0,406	0,406

Sumber : rancangan RKP 2024, rancangan RPD Provinsi Jawa Barat , RPD Kota Cimahi 2023-2026

Penyesuaian target indikator Makro pembangunan untuk RKPD 2024 dilakukan melalui desk Penyepakatan Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/Kota se-Jawa Barat Pada tanggal 14 Juni 2023 melalui penandatanganan Berita Acara Kesepakatan target Indikator Makro Pembangunan Daerah tahun 2024.

3.1.3. Arah Kebijakan Perekonomian Kota Cimahi

Arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi mengacu pada arahan kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat sehingga diperlukan Analisa terkait rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah dalam rangka sinkronisasi atau penyelarasan arah pembangunan antara pusat dan daerah.

Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Cimahi tahun 2024 sebagaimana tema pembangunan dalam RKPD 2024 adalah ***Pemantapan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia*** diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah pasca pandemi dengan cara menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta membuka kesempatan kerja yang luas dengan memaksimalkan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia serta pengendalian inflasi daerah melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. **Sektor Ketenagakerjaan :** Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui perluasan kesempatan kerja dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan Kapasitas dan daya saing SDM melalui pendidikan vokasional yang bersertifikasi sesuai dengan kebutuhan kerja;
 - b. Kerja sama dalam rangka Pelatihan & Penempatan Tenaga Kerja;
 - c. Peningkatan pelatihan, pemagangan dan penempatan kerja;
 - d. Peningkatan kompetensi lulusan SMK dengan sertifikasi kompetensi bagi setiap siswa SMK yang lulus;
 - e. Menjaga hubungan industrial yang kondusif dan harmonis serta meningkatkan tingkat kepatuhan pemberi kerja;

- f. Mendorong pembangunan melalui pendekatan padat karya dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal; dan
 - g. Meningkatnya informasi pasar kerja sehingga terjadi *mix and match* antara potensi dan “*demand*” tenaga kerja daerah.
2. **Sektor Industri dan Perdagangan** : Peningkatan Daya Saing Industri, Perdagangan dan Koperasi , dengan arah kebijakan :
- a. Pemberdayaan UMKM Kota Cimahi yang diarahkan pada produk lokal dan produk produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat sehari hari;
 - b. Pelatihan UMKM agar mampu beradaptasi dan memperluas *channeling* melalui *e-commerce* sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas sebagai upaya scale up dari bisnis UMKM;
 - c. Penerapan link and match industri kecil-industri besar;
 - d. Peningkatan standar dan daya saing IKM;
 - e. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas;
 - f. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global;
 - g. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan;
 - h. Pembentukan wirausaha baru;
 - i. Optimalisasi Pasar Tradisional;
 - j. Terjaganya distribusi komoditas bahan pokok dan bahan penting lainnya; dan
 - k. Dukungan terhadap pengembangan pelaku usaha pada sektor Ekonomi Kreatif di Kota Cimahi sebagai upaya mendorong tumbuhnya sektor potensial baru di Kota Cimahi.
3. **Sektor Investasi** : meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui arah kebijakan antara lain :
- a. Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal;
 - b. Menjamin kondusifitas iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
 - c. Promosi dan peningkatan layanan investasi;
 - d. Peningkatan pengawasan perijinan;
 - e. Peningkatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan serta tanda daftar gudang;

- f. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
 - g. Pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal.
4. **Sektor pariwisata** : Meningkatkan daya saing pariwisata daerah dengan arah kebijakan :
- a. Pengembangan Potensi destinasi Wisata Kota Cimahi;
 - b. Rencana Pengembangan ekonomi kreatif di Kota Cimahi sebagai salah satu potensi ekonomi lokal yang bernilai tambah dan berdaya saing;
 - c. peningkatan promosi dan pemasaran wisata daerah dan ekonomi kreatif;
 - d. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata;
 - e. Pemberdayaan komunitas pariwisata daerah;
 - f. Pengembangan budaya lokal yang mendukung pengembangan pariwisata; dan
 - g. Penguatan regulasi potensi pariwisata daerah.
5. Pengendalian Inflasi Daerah dengan arah kebijakan pada **sektor ketahanan pangan** sebagai berikut :
- a. Menjaga Ketahanan Pangan Daerah untuk mengantisipasi gejala inflasi salah satunya dengan cara memperkuat Cadangan Pangan Daerah (CPPD) serta mendistribusikannya kepada target penerima sasaran yang tepat;
 - b. Mewujudkan ketersediaan pasokan bahan Pokok dan Barang penting lainnya melalui kegiatan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
 - c. Melaksanakan gerakan menanam untukantisipasi lonjakan harga komoditi pertanian rawan inflasi;
 - d. Mewujudkan keterjangkauan dan kestabilan harga bahan pokok dan bahan penting lainnya melalui operasi pasar murah dan sidak ke pasar distributor; dan
 - e. Melakukan kerjasama antar daerah untuk menjaga kelancaran distribusi dan stok pangan pokok warga Cimahi.
6. **Peningkatan Pendapatan Daerah** melalui arah kebijakan :
- a. Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah;

- b. Pemberlakuan peraturan daerah beserta turunannya yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan aset- aset daerah dan Potensi aset daerah yang belum termanfaatkan;
- d. Koordinasi dan perhitungan lebih intensif antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non-perimbangan; dan
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM untuk meningkatkan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

7. **Penurunan Angka kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan** melalui arah kebijakan :

- a. Penurunan Kantong kemiskinan dengan melakukan upaya Pemenuhan Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan, fasilitasi dasar untuk memulai usaha, pelayanan infrastruktur dasar dan pelayanan dasar sosial;
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin dengan Meningkatkan Pendapatan/Akses Pekerjaan melalui Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- c. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan Mengintensifkan jaringan pengaman sosial (BTT, Bansos, Bantuan Subsidi lainnya); dan
- d. Peningkatan tatakelola penanggulangan kemiskinan dengan melakukan pembenahan kelembagaan TKPK Kota Cimahi serta melakukan penilaian terhadap efektivitas belanja, terutama bagi belanja yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan yang berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Penetapan kebijakan keuangan daerah didasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah, kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah pada subbab sebelumnya, realisasi keuangan pada tahun sebelumnya, proyeksi keuangan tahun 2023-2025, serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2024 dan Kebijakan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemampuan fiskal pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Suatu daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik pula dalam merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan keberlangsungan pembangunan daerah dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Berikut akan disajikan realisasi keuangan daerah Kota Cimahi Tahun 2021 dan 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 berdasarkan Perwal APBD Kota Cimahi Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kota Cimahi tahun 2023 serta proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 berdasarkan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cimahi yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan penyesuaian kemampuan keuangan daerah berdasarkan Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2021, 2022, serta target tahun 2023.

Untuk tahun 2024, Berdasarkan hasil pembahasan TAPD Kota Cimahi Pendapatan Daerah Kota Cimahi diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar -10,24 % dibandingkan Tahun 2023. Hal ini disebabkan belum diproyeksikannya Pendapatan Transfer Antara Daerah dari pos Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Adanya beberapa mata pajak yang disesuaikan tarifnya berdasarkan UU HKPD 2022 serta adanya beberapa retribusi yang dihapus oleh UU HKPD 2022. Sementara itu untuk besaran Dana transfer Pemerintah Pusat yakni DAK dan DAU menggunakan angka n-1 tahun 2023.

Tabel 3.7
Proyeksi Keuangan Daerah Kota Cimahi

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	APBD 2023	Proyeksi 2025***	Rancangan Akhir RKPD 2024
PENDAPATAN DAERAH	1.520.135.560,503	1.330.998.524,873	1.330.651.927,100	1.406.614.465,005,50	1.194.429.891,221,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	405.104.991,553,11	394.862.451,499,48	377.628.784,304,00	381.614.465,005,50	402.003.917,425,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.053.096.467,719,00	936.136.073,374,00	953.023.142,796,00	1.025.000.000,000,00	792.425.973,796,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61.934.101,231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	1.520.135.560,503,11	1.330.998.524,873,48	1.330.651.927,100	1.406.614.465,005,50	1.194.429.891,221,00
BELANJA	1.481.545.124,849	1.371.508.958,408	1.493.129.280,415	1.554.149.981,000,00	1.533.554.858,887,00
BELANJA OPERASI	1.221.691.133,620,00	1.288.810.584,757,12	1.365.418.336,132,00	1.422.986.817,000,00	1.339.877.868,861,23
BELANJA MODAL	247.060.564,786,00	76.648.202,583,00	102.710.944,283	106.163.164,000,00	168.677.000,026
BELANJA TIDAK TERDUGA	12.793.426,443,00	6.050.171,068,00	25.000.000,000	25.000.000,000	25.000.000,000
BELANJA TRANSFER	12.793.426,443,00	100.000.000,00	-	0	-
Jumlah Belanja	1.481.545.124,849,00	1.371.608.958,408	1.493.129.280,415	1.554.149.981,000,00	1.533.554.858,887
Total Surplus/(Defisit)	38.590.435,654	- 40.510.433,535	- 162.477.353,315	- 147.535.515,995	- 339.124.967,666
PEMBIAYAAN	270.316.712,458	298.032.233,311	162.477.353,315	147.535.515,995	149.263.942,478
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	271.172.220,678	308.665.364,621	194.907.162,315	149.965.324,995	151.693.751,478
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	855.508.220,00	10.633.131.310,00	32.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	855.508,220	10.633.131,310	32.429.809,000	2.429.809,000	2.429.809,000
Pembiayaan Netto	270.316.712,458	298.032.233,311	162.477.353,315	147.535.515,994,50	149.263.942,478
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	308.907.148,112	257.421.799,776	-	-	189.861.025,188,27
Total APBD	1.791.307.781,181	1.639.663.889,494	1.525.559.089,415	1.556.579.790,000	1.346.123.642,699

Sumber : 1. LRA Kota cimahi 2021-2022;
2. RPD Kota Cimahi 2023-2025; dan
3. Pembahasan Tim TAPD terhadap rancangan Keuangan Daerah Kota Cimahi 2024.

Sementara itu untuk Belanja Daerah Kota Cimahi diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 2,71% dibandingkan dengan tahun 2023. Meningkatnya proyeksi belanja tersebut salah satunya diakibatkan karena akan dilaksanakannya Pilkada serentak pada tahun 2024 yang memerlukan biaya lebih dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatannya.

Menurunnya pendapatan daerah dan meningkatnya Belanja Daerah tentu saja mengakibatkan kurangnya pembiayaan daerah tahun berjalan. Dimana hal ini tentu saja harus disikapi oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk dapat terus menggali potensi Pendapatan Daerah dan alternatif Pembiayaan daerah.

3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Komponen pendapatan daerah terdiri dari 3 kelompok besar yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah :

1. **Pendapatan Asli Daerah** yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2. **Dana Perimbangan** yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah** yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah Lainnya.

Kebijakan pendapatan daerah Kota Cimahi diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Kebijakan tersebut harus berupa perkiraan yang dapat terukur serta memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas.

Dilihat dari kinerja pendapatan daerah Kota Cimahi pada tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan mengalami penurunan yang bersumber dari dana transfer yang disebabkan oleh adanya perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2021 s.d 2025

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	APBD 2023	Proyeksi 2025***	Rancangan Akhir RKPD 2024
PENDAPATAN DAERAH	1.520.135.560.503	1.330.998.524.873	1.330.651.927.100	1.406.614.465.005,50	1.194.429.891.221,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	405.104.991.553,11	394.862.451.499,48	377.628.784.304,00	381.614.465.005,50	402.003.917.425,00
Pajak Daerah	179.891.802.692,00	193.907.866.523,00	180.651.551.266,00	173.617.930.739,05	205.004.219.650,00
Retribusi Daerah	11.548.482.640,00	11.294.729.342,00	13.164.349.145,00	13.966.058.007,93	11.555.400.285,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.956.960.000,00	11.022.613.597,00	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	11.022.613.597,00
Lain-lain PAD yang Sah	203.707.746.221,11	178.637.242.037,48	174.421.683.893,00	184.639.276.258,51	174.421.683.893,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.053.096.467.719,00	936.136.073.374,00	953.023.142.796,00	1.025.000.000.000,00	792.425.973.796,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	823.523.843.021,00	777.360.997.705,00	808.237.173.000,00	875.000.000.000,00	647.640.004.000,00
DBH				75.000.000.000,00	0,00
DAK NON FISIK				175.000.000.000,00	168.084.487.000
DAK FISIK				-	14.085.517.000
DAU				625.000.000.000,00	465.470.000.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	229.572.624.698,00	158.775.075.669,00	144.785.969.796,00	150.000.000.000,00	144.785.969.796,00
	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61.934.101.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	6.700.327.000,00				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	55.233.774.231,00				
Jumlah Pendapatan	1.520.135.560.503,11	1.330.998.524.873,48	1.330.651.927.100	1.406.614.465.005,50	1.194.429.891.221,00

Sumber : 1. LRA Kota cimahi 2021-2022;
2. RPD Kota Cimahi 2023-2025; dan
3. Pembahasan Tim TAPD terhadap rancangan Keuangan Daerah Kota Cimahi 2024.

Pada tabel di atas, terlihat bahwa target Pendapatan Daerah tahun 2024 diasumsikan mengalami penurunan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2023, dimana asumsi pendapatan daerah pada tahun 2024 tersebut bergantung pada beberapa faktor, salah satunya diakhirinya pembatasan aktivitas masyarakat akibat telah berubahnya status pandemi Covid 19 menjadi Endemi pada awal tahun 2023 sehingga aktivitas masyarakat sudah kembali normal dan perekonomian telah membaik.

Diharapkan Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2024 meningkat dengan asumsi masyarakat dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak dan membeli kendaraan bermotor, selain hal tersebut harus di analisis kembali terkait strategi dalam penggalian pendapatan daerah mengingat masih banyaknya potensi pendapatan daerah yang harus digali dan dioptimalkan kembali sehingga pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kondisi di atas, perumusan arah kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya agar capaian target pendapatan daerah bisa optimal.

Adapun upaya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Pemberlakuan peraturan daerah beserta turunannya yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset- aset daerah yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan daerah;
4. Koordinasi dan perhitungan lebih intensif antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non-perimbangan;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pendapatan; dan
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka peningkatan kinerja organisasi untuk meningkatkan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa struktur belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasional

- 1.1. Belanja Pegawai
- 1.2. Belanja Barang dan Jasa
- 1.3. Belanja Bunga
- 1.4. Belanja Subsidi
- 1.5. Belanja Hibah
- 1.6. Belanja Bantuan Sosial

2. Belanja Modal

- 2.1. Belanja Modal Tanah
- 2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 2.3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
- 2.4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
- 2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya
- 2.6. Belanja Aset Lainnya

3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer

- 4.1. Belanja Bagi Hasil
- 4.2. Belanja Bantuan keuangan

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Alokasi anggaran merupakan langkah berikutnya setelah mengetahui kapasitas keuangan daerah. Mengingat keterbatasan anggaran, maka alokasi anggaran dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.

Dalam menyusun APBD, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD juga memperhatikan hal khusus lainnya yang terdapat pada pedoman penyusunan APBD. Hal khusus lainnya tersebut adalah antara lain berupa kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal khusus ini antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Sehubungan dengan amanat tersebut, maka pada proyeksi belanja wajib dan mengikat dialokasikan anggaran untuk :

- 1. Belanja fungsi Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
- 2. Belanja fungsi Kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji;

3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (undang-undang tentang APBN);
4. Belanja fungsi Pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah;
5. Belanja Pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah; dan
6. Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah dana alokasi umum tambahan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Cimahi
Tahun 2021-2025

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	APBD 2023	Proyeksi 2025***	Rancangan Akhir RKPD 2024
BELANJA	1.481.545.124.849	1.371.508.958.408	1.493.129.280.415	1.554.149.981.000,00	1.533.554.858.887,00
BELANJA OPERASI	1.221.691.133.620,00	1.288.810.584.757,12	1.365.418.336.132,00	1.422.986.817.000,00	1.339.877.868.861,23
Belanja Pegawai	643.970.516.028,00	659.187.089.769,00	692.151.317.773,00	807.238.836.046,20	651.988.892.361
Belanja Barang dan Jasa	555.398.177.278,00	591.853.793.552,00	633.008.269.375,00	524.626.654.503,80	599.782.822.866
Belanja Bunga	308.874.114,00	234.672.144,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000
Belanja Subsidi	410.574.000,00			200.000.000,00	-
Belanja Hibah	19.031.462.200,00	34.401.157.692,12	35.953.643.450,00	87.421.326.450,00	83.801.048.100
Hibah Uang					
Hibah Barang					
Belanja Bantuan Sosial	2.571.530.000,00	3.133.871.600,00	3.805.105.534,00	3.000.000.000,00	3.805.105.534
BELANJA MODAL	247.060.564.786,00	76.648.202.583,00	102.710.944.283	106.163.164.000,00	168.677.000.026
Belanja Modal Tanah	23.880.085.890,00	171.269.485,00	3.848.782.770		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		18.618.249.892,00	23.358.957.539		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		40.246.977.335,00	45.072.382.489		
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		16.911.640.321,00	28.545.848.575		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		700.065.550,00	1.633.961.410		
Belanja Modal Aset Lainnya			251.011.500		
BELANJA TIDAK TERDUGA	12.793.426.443,00	6.050.171.068,00	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Belanja Tidak Terduga		6.050.171.068,00	25.000.000.000	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
BELANJA TRANSFER	12.793.426.443,00	100.000.000,00	-	0	
Belanja Bantuan Keuangan		100.000.000,00			
Jumlah Belanja	1.481.545.124.849,00	1.371.608.958.408	1.493.129.280.415	1.554.149.981.000,00	1.533.554.858.887
Total Surplus/(Defisit)	38.590.435.654 -	40.510.433.535 -	162.477.353.315 -	147.535.515.995 -	339.124.967.666

Sumber : 1. LRA Kota cimahi 2021-2022;
2. RPD Kota Cimahi 2023-2025; dan
3. Pembahasan Tim TAPD terhadap rancangan Keuangan Daerah Kota Cimahi tahun 2024

Proyeksi belanja daerah Kota Cimahi dilakukan dengan memperhatikan proyeksi pendapatan daerah Kota Cimahi dalam tahun periode yang sama, dan kemampuan keuangan daerah Kota Cimahi dalam menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Cimahi berpegang pada prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu, target/proyeksi belanja Kota Cimahi disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan pendapatan daerah.

Guna dapat memenuhi target prioritas pembangunan daerah dan menjawab isu-isu strategis Kota Cimahi Tahun 2024, maka berikut ini diuraikan Arah Kebijakan Belanja Daerah Kota Cimahi :

1. Pemenuhan pengeluaran wajib dan mengikat;
2. Penerapan pelayanan dasar melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Pencapaian visi dan misi RPD Kota Cimahi 2023-2026;
4. Mendukung upaya pengendalian inflasi daerah;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Cimahi; dan
6. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Selain itu Kebijakan belanja pada tahun 2024 juga mempertimbangkan kebutuhan pendanaan untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah terdiri atas :

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari pengeluaran pembiayaan daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang; dan
3. Sisa Lebih Pembiayaan daerah (SiLPA) tahun berjalan.

Tabel 3.10
Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d
Tahun Anggaran 2025

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	APBD 2023	Proyeksi 2025***	Rancangan Akhir RKPD 2024
PEMBIAYAAN	270.316.712.458	298.032.233.311	162.477.353.315	147.535.515.995	149.263.942.478
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	271.172.220.678	308.665.364.621	194.907.162.315	149.965.324.995	151.693.751.478
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	271.172.220.677,53	308.665.364.621	194.907.162.315	149.965.324.994,50	121.693.751.477,73
Pencairan Dana Cadangan					30.000.000.000,00
Penerimaan Pinjaman Daerah					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	271.172.220.677,53	308.665.364.620,64	194.907.162.315,00	149.965.324.994,50	151.693.751.477,73
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	855.508.220,00	10.633.131.310,00	32.429.809.000,00	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00
Pembentukan Dana Cadangan			30.000.000.000		
Penyertaan Modal Daerah		9.777.623.090,00			
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	855.508.220,00	855.508.220,00	2.429.809.000	2.429.809.000,00	2.429.809.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	855.508.220	10.633.131.310	32.429.809.000	2.429.809.000	2.429.809.000
Pembiayaan Netto	270.316.712.458	298.032.233.311	162.477.353.315	147.535.515.994,50	149.263.942.478
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	308.907.148.112	257.421.799.776	-	-	189.861.025.188,27

Sumber : 1. LRA Kota cimahi 2021-2022;
2. RPD Kota Cimahi 2023-2025; dan
3. Pembahasan Tim TAPD terhadap rancangan Keuangan Daerah Kota Cimahi tahun 2024.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah selain ditujukan untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, juga ditujukan untuk pembentukan dana cadangan yang akan digunakan dalam Pemilihan umum serentak pada tahun 2024.

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kota Cimahi dan terbatasnya sumber–sumber penerimaan konvensional mengharuskan Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kota Cimahi. Sumber sumber pendanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain :

1. APBN;
2. APBD Provinsi;
3. APBD Kabupaten/Kota;
4. Dana Masyarakat/Umat;
5. *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL));

6. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
7. Obligasi Daerah; dan
8. Hibah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2024

Prioritas merupakan fokus pembangunan yang harus diutamakan atau didahulukan sesuai dengan tingkat urgensinya dalam pembangunan. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya dimana sumber daya tersebut diupayakan seoptimal dan mungkin diarahkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Ketepatan dalam penentuan prioritas pembangunan ini akan menjadi kunci penyelesaian permasalahan pembangunan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah seyogyanya mengacu pada :

1. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas RPD Kota Cimahi 2023-2026;
2. Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022;
3. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
4. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; dan
5. Rancangan kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2024; dan RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032.

Prioritas pembangunan Kota Cimahi tahun 2024 merupakan prioritas pada tahun ke-2 RPD Kota Cimahi 2023-2026 yang secara khusus berkaitan dengan sasaran pembangunan daerah, tingkat urgensi prioritas dalam penyelesaian permasalahan pembangunan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Perumusan prioritas pembangunan tersebut dikaitkan dengan penjabaran sasaran dalam RPD 2023-2026 sebagai berikut :

Misi 1 “Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul” dengan sasaran :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya pengarusutamaan gender;
4. Meningkatnya perlindungan terhadap anak;
5. Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota;
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
7. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
8. Meningkatnya pemberdayaan pelaku kebudayaan; dan
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Misi 2 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan sasaran :

1. Meningkatnya keswadayaan masyarakat;
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik;
4. Meningkatnya kualitas pengawasan;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan daerah;
6. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pemerintahan daerah; dan
7. Optimalisasi Tata kelola keuangan dan barang milik daerah.

Misi 3 “Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing serta berbasis Inovasi Daerah” dengan sasaran :

1. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah;
2. Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan; dan
3. Meningkatnya kesempatan kerja.

Misi 4 “Mewujudkan Kerasian Pembangunan yang Berkeadilan” dengan sasaran :

1. Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Misi 5 “ Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan” dengan sasaran :

1. Berkurangnya luasan banjir;
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan;
3. Meningkatnya Kualitas Permukiman;
4. Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas;

5. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati;
6. Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang di Kota Cimahi;
7. Terwujudnya kualitas bangunan gedung dalam kondisi baik; dan
8. Meningkatnya ketahanan bencana.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah sehingga dapat mendukung relevansi misi dengan program pembangunan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi diturunkan berdasarkan misi pembangunan pada RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang masih relevan dengan perkembangan yang terjadi. Selain itu dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, juga memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional 2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu sebagai berikut :

1. Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
4. Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Ketujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
 - b. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi;
 - c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN);
 - d. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi;
 - e. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
 - f. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - g. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan; dan
 - h. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
 - b. Pembangunan wilayah Pulau Papua;
 - c. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku;
 - d. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;
 - e. Pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali;
 - f. Pembangunan wilayah Pulau Nusa Tenggara; dan
 - g. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
 - b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing;
 - c. Mengentaskan kemiskinan;
 - d. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - e. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
 - f. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; dan
 - g. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Memperkuat moderasi beragama;
 - b. Meningkatkan budaya, literasi, inovasi, dan kreativitas;
 - c. Revolusi Mental dan pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - d. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Transformasi digital;
 - c. Energi dan ketenagalistrikan;
 - d. Infrastruktur ekonomi; dan
 - e. Infrastruktur untuk mendukung perkotaan.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
 - b. Pembangunan rendah karbon Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Menjaga stabilitas keamanan nasional;
 - c. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
 - d. Optimalisasi kebijakan luar negeri; dan
 - e. Penegakan hukum nasional.

Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tersebut diturunkan kepada 29 Sasaran Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2024 yaitu :

- SN 1. Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
- SN 2. Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian;
- SN 3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI);
- SN 4. Terjaganya pertumbuhan ekonomi di tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI);
- SN 5. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
- SN 6. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
- SN 7. Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
- SN 8. Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- SN 9. Meningkatnya Aset Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin dan Rentan;
- SN 10. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;
- SN 11. Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;
- SN 12. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;
- SN 13. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
- SN 14. Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;
- SN 15. Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkukuh Karakter Bangsa;
- SN 16. Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;
- SN 17. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;
- SN 18. Meningkatnya Konektivitas Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Akses Menuju Pelayanan Dasar;

- SN 19. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perkotaan;
- SN 20. Meningkatnya Layanan Energi dan Ketenagalistrikan;
- SN 21. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- SN 22. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- SN 23. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
- SN 24. Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline;
- SN 25. Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga- Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara Secara Optimal;
- SN 26. Optimalnya kebijakan luar negeri;
- SN 27. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap;
- SN 28. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan
- SN 29. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD 2024-2026 memiliki tema “Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat” untuk mewujudkan tema tersebut maka dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat;
4. Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pembangunan Pemuda; dan
5. Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk.

Tujuan 2 Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah, dengan sasaran :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan
2. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah;
3. Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Usaha serta Meningkatkan Daya Saing dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
4. Meningkatkan Kinerja Pariwisata Berkelas Dunia dan Ekonomi Kreatif.

Tujuan 3 Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas Berkualitas dan Lingkungan Hidup, dengan sasaran :

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
3. Meningkatkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah.

Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Birokrasi yang Didukung oleh Inovasi Daerah, dengan sasaran :

1. Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
2. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah; dan
3. Meningkatkan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 tentu harus disertai dengan target indikator yang telah ditentukan sehingga menjadi tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 di halaman berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan, Sarasan, Indikator dan Target Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET		KET
					2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,45	73,12	73,34	73,56	
		1.1 Meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	a. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,61	8,78	8,91	9,03	
			b. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,61	12,62	12,69	12,75	
		1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	a. Angka Harapan Hidup	Tahun	73,23	73,52	73,71	73,9	
			b. Prevelensi Stunting	Persen	24,5	20,2	19,2	15,52	
		1.3 Meningkatkan standar hidup layak masyarakat	a. Pengeluaran per kapita	Rp.000	10.934	11.277	11.390	11.504	
		1.4 Meningkatkan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta	a. Indeks Pembangunan Gender	Poin	89,36	89,42	90,02	90,07	
			b. Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	47	47,61	48,23	48,86	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET		KET
					2021	2022	2023	2024	
		pembangunan pemuda							
		1.5 Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	a. Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,41	1,42	1,43	1,44	
2	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan		a. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,74	5,45	5,28	5,42	
			b. Gini Ratio (poin)	Poin	0,406	0,412	0,41	0,408	
			c. Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,43	7,98	7,54	7,39	
		2.1 Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	a. Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	4,22	7	6	5,76	
			b. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	3,19	4,22	4,45	4,53	
		2.2 Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan	a. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	1,31	4,41	4,45	4,5	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET		KET
					2021	2022	2023	2024	
		perikanan dan ketahanan pangan daerah	b. Nilai Tuka Petani (NTP)	Poin	97,84	99,74	100,71	101,67	
			c. Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87	92,3	92,8	93,3	
		2.3 Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	a. Laju Pertumbuhan Pariwisata	Persen	-0,04	25,83	26,35	26,87	
		2.4 Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha serta meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	501,52	511,55	521,78	532,22	
			b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persen	21,67	21,62	22	23,34	
			c. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,82	8,38	8,13	8,01	
3	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur		Indeks Kualitas Infrastruktur (poin)	Poin	60,54	63,95	71,63	72,82	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	Poin	62,69	64,66	61,6	66,13	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET		KET
					2021	2022	2023	2024	
	Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	3.1 Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	a. Tingkat Konektivitas	Persen	43,51	53,2	47	57	
			b. Indeks Penggunaan Air	Poin	1,1913	1,1878	1,1902	1,1896	
			c. Konsumsi listrik per kapita	Kwh/kapita	1.280,53	1.337,16	1.150	1.466	
			d. Persentase rumah tangga hunian layak	Persen	53,14	53,37	53,9	54,47	
			e. Akses penanganan sampah di perkotaan	Persen	70,7	74,03	79	76	
		3.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	43,09	47,13	43,27	48,31	
			b. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	87,42	87,83	75,5	90,07	
			c. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	79,34	80,31	80,11	82,04	
			d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	40,78	41,88	38,9	42,64	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET		KET
					2021	2022	2023	2024	
		3.3 Meningkatkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	a. Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (poin)	Persen	4,23	5,86	5,22	7,11	
		-	b. Indeks Risiko Bencana	Poin	134,94	131,62	130	129	
			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	79,72	80,52	81,32	82,14	
4	Meningkatkan kualitas demokrasi dan birokrasi yang didukung oleh inovasi daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	A	A	A	
		4.1 Meningkatkan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	a. Nilai aspek Kebebasan	Poin	89,71	90,51	91,31	92,11	
			b. Nilai aspek Kesetaraan	Poin	72,99	73,79	74,59	75,39	
			c. Nilai aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Poin	77,93	78,73	79,53	80,33	
		4.2 Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	a. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	A	A	A	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET		KET
					2021	2022	2023	2024	
		4.3 Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	a. Indeks Inovasi Daerah	Poin	62,82 (Sangat Inovatif)	69,15 (Sangat Inovatif)	69,15 (Sangat Inovatif)	69,15 (Sangat Inovatif)	

Sumber : Dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, dimaksudkan untuk dapat menjawab 4 (empat) isu strategis pembangunan daerah yaitu :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar; dan
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

Oleh karena itu kemudian ditetapkanlah tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat;
 - c. Meningkatnya standar hidup layak masyarakat;
 - d. Meningkatnya standar kualitas dan perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga; dan
 - e. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan; dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan;
 - b. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
 - c. Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif;
 - d. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha;
 - e. Terkendalinya tingkat kemiskinan;
 - f. Meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja;
 - g. Meningkatnya ketahanan pangan daerah; dan
 - h. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah.

3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan; dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan; dan
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Inovasi Daerah; dengan sasaran:
 - a. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien;
 - b. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan sejahtera;
 - c. Terwujudnya pemerintah daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel;
 - d. Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas; dan
 - e. Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cimahi 2024

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi tahun 2024 mengacu pada tujuan pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026. RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 memuat 7 (tujuh) Tujuan Kota dan 28 (dua puluh delapan) Sasaran. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolok ukur keberhasilan pembangunan. Selain itu, penentuan tujuan dan sasaran serta indikator dan target capaiannya pada dokumen RPD Kota Cimahi sudah mempertimbangkan keselarasan pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Penajaman tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi tahun 2024 juga dilakukan dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan permasalahan dan isu strategis. Adapun Permasalahan pembangunan di Kota Cimahi Tahun 2024 yang juga didapatkan dari hasil evaluasi pencapaian target-target indikator kinerja pembangunan pada tahun 2022, yaitu :

1. Angka kematian ibu dan bayi yang mengalami fluktuasi setiap tahun, masih adanya balita stunting, kasus penyakit menular dan tidak

menular yang masih tinggi, masih terdapat anak yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP, rendahnya tingkat literasi masyarakat, serta keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa dalam digitalisasi Pendidikan;

2. Masih tingginya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan belum optimalnya pembaharuan data tersebut menyebabkan perlindungan dan pelayanan sosial juga belum optimal;
3. Masih tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi;
4. Masih tingginya tingkat kemiskinan di Kota Cimahi;
5. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi
6. Menurunnya kualitas lingkungan hidup; dan
7. Masih kurangnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar di Kota Cimahi, meliputi rumah layak huni, akses terhadap air bersih, pengelolaan limbah domestik, penanganan genangan dan banjir.
8. Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Berdasarkan permasalahan tersebut maka isu strategis pembangunan Kota Cimahi :

1. Kemiskinan;
2. Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia;
3. Kualitas pembangunan ekonomi;
4. Tata kelola pemerintahan; dan
5. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Selanjutnya untuk menjawab isu strategi tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan Kota Cimahi Tahun 2024 yaitu terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Menurunnya Angka Kemiskinan;
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan; dan
7. Meningkatkan Ketahanan Bencana.

Sasaran pembangunan sebagai turunan dari tujuan pembangunan, juga merupakan jawaban permasalahan yang diperkirakan masih akan dihadapi pada tahun 2024. Berikut ini disajikan matriks sanding antara

permasalahan Kota Cimahi tahun 2024 dengan sasaran pembangunan Kota Cimahi 2024 serta indikator dan target capaiannya pada tahun 2024 tersaji pada Tabel 4.2.

Sasaran pembangunan Kota Cimahi tahun 2024 ini sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya juga sudah melalui penelaahan keselarasan dengan prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Hal ini tersaji pada tabel 4.3.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Kota Cimahi Tahun 2024

PERMASALAHAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
Angka kematian ibu dan bayi yang mengalami fluktuasi setiap tahun, masih adanya balita stunting, kasus penyakit menular dan tidak menular yang masih tinggi, masih terdapat anak yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP, rendahnya tingkat literasi masyarakat, serta keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa dalam digitalisasi Pendidikan	TUJUAN I Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Kesehatan	83,95 indeks
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,30 indeks
		Indeks Pengetahuan	75,94 indeks
	SASARAN I.1 Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	13,83 Tahun
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1,5 Indeks
Angka kematian ibu dan bayi yang mengalami fluktuasi setiap tahun, masih adanya balita stunting, kasus penyakit menular dan tidak menular yang masih tinggi, masih terdapat anak yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP, rendahnya tingkat literasi masyarakat, serta keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa dalam digitalisasi Pendidikan	SASARAN I.2 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Berdasarkan asesmen nasional	2,06 nilai
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,10 Tahun
		Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna Tingkat
Masih tingginya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan belum optimalnya perbaharuan	SASARAN I.3 Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Keluarga sehat	0,32 indeks
		Prosentase paartisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	38 persen

PERMASALAHAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
data tersebut menyebabkan perlindungan dan pelayanan sosial juga belum optimal		Prosentase partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	31,65 persen
		Prosentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik	26,67 persen
Masih tingginya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan belum optimalnya perbaharuan data tersebut menyebabkan perlindungan dan pelayanan sosial juga belum optimal	SASARAN I.4 Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Prosentase Capaian Kota Layak Anak	52 persen
Masih tingginya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan belum optimalnya perbaharuan data tersebut menyebabkan perlindungan dan pelayanan sosial juga belum optimal	SASARAN 1.5 Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	66 persen
	TUJUAN II Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	55 persen
Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan	SASARAN II.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100 Persen
Angka kematian ibu dan bayi yang mengalami fluktuasi setiap tahun, masih adanya balita stunting, kasus penyakit menular dan tidak menular yang masih tinggi, masih terdapat anak yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP, rendahnya tingkat literasi masyarakat, serta keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa dalam digitalisasi Pendidikan	SASARAN II.2 Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11,3 Persen
Angka kematian ibu dan bayi yang mengalami fluktuasi setiap tahun, masih adanya balita stunting, kasus penyakit menular dan tidak menular yang masih tinggi, masih terdapat anak yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP, rendahnya tingkat literasi masyarakat, serta	SASARAN II.3 Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan	Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	60 Persen

PERMASALAHAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa dalam digitalisasi Pendidikan			
Angka kematian ibu dan bayi yang mengalami fluktuasi setiap tahun, masih adanya balita stunting, kasus penyakit menular dan tidak menular yang masih tinggi, masih terdapat anak yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP, rendahnya tingkat literasi masyarakat, serta keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa dalam digitalisasi Pendidikan	SASARAN II.4 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Prosentasi masyarakat yang aktif berolahraga	46,2 Persen
Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan	TUJUAN III Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	60,75 (B) Indeks
		Opini BPK	WTP
	SASARAN III.1 Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	85 Persen
		Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	85 Persen
		Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	85 Persen
Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan	SASARAN III.2 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100 persen
		Persentase pembinaan politik dalam negeri	100 persen
		Prosentase Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang Terbina/Terfasilitasi	50 persen
		Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Selatan	75 persen
		Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan	80 persen

PERMASALAHAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
		Ketertiban Masyarakat Cimahi Tengah	
		Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Utara	75 persen
		Penurunan Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	750 angka
		Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Trantibmas yang dapat dicegah dan ditangani	100 persen
		Waktu respon tanggap kebakaran	15 Menit
Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan	SASARAN III.3 Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	370 Indeks
		Indeks Keterbukaan Infromasi Publik	84 Persen
		Indeks Pembangunan Statistik	3 Level/Tingkat Kematangan
		Indeks Profesionalisme ASN	50,50 Indeks
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,20 Indeks
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah	30 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	50,50 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BAPPELITBANGDA	65,00 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BKPSDMD	60,50 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD	60,50 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Arsip Daerah	51,50 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	50,40 Nilai

PERMASALAHAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	24,93 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	50,50 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	30 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan	35 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	50,50 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	35 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdagkoperin	30 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdukcapil	42 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo	55,50 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	60 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPKP	56 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPMPSTP	35,80 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPUPR	56 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat	64 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan	60,50 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	60,50 Nilai

PERMASALAHAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
		Kecamatan Cimahi Tengah	
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Utara	60,50 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi RSUD Cibabat	25,57 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi SATPOLPP-DAMKAR	60,75 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekertariat DPRD	60,75 Nilai
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	60,75 Nilai
		Nilai IKM Administrasi Kependudukan	82 Nilai
		Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	75 Persen
		Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)	96,88 persen
		Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	100 persen
		Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Selatan	80 Persen
		Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Tengah	80 Persen
		Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Utara	80 Persen
		Indeks LAKE	57 Indeks
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi terhadap Kinerja DPRD	B Nilai
Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan	SASARAN III.4 Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	3 Nilai
		Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	5 Persen

PERMASALAHAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan	SASARAN III.5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	60,75 Persen
		Nilai LPPD	Tinggi Nilai
		Nilai Rata-rata IKM Kota	82,37 Nilai
		Nilai SAKIP Kota	B Nilai
Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan	SASARAN III.6 Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100 Persen
		Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci	85 Persen
Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan	SASARAN III.7 Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Rasio Utilisasi Aset Daerah	73,5 persen
		Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100 persen
		Persentase Penetapan APBD tepat waktu	100 persen
	TUJUAN IV Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Indeks Gini	0,406 Point
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,95 Persen
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,34 Persen
Masih tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi.	SASARAN IV.1 Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase IKM yang berdaya saing	8 persen
		Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar	100 persen
		Persentase Pelaku Usaha yang Berpotensi Ekspor	7 persen
		Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi	40 persen
		Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	29,22 persen
		Realisasi Investasi (dalam miliar rupiah)	7,081 milyar rupiah
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	43.085 orang
		Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	2 hari
Masih tingginya tingkat ketimpangan pendapatan	SASARAN IV.2 Mempercepat	Nilai PPH Ketersediaan	2350 nilai
		Skor PPH Ketersediaan	68 nilai

PERMASALAHAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
	peningkatan pemerataan pendapatan	Persentase Koperasi Sehat	51,25 persen
		Persentase UKM Naik Kelas	26 persen
		Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,32 persen
Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi	SASARAN IV.3 Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	79 persen
	TUJUAN V Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	5,01 persen
Masih tingginya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan belum optimalnya perbaharuan data tersebut menyebabkan perlindungan dan pelayanan sosial juga belum optimal	SASARAN V.1 Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100 persen
		Cakupan PPKS yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha	5 persen
		Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan infrastruktur Dasar	56 persen
		Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	100 persen
	TUJUAN VI Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Sedang Indeks
Masih kurangnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar di Kota Cimahi, meliputi rumah layak huni, akses terhadap air bersih, pengelolaan limbah domestik, penanganan genangan dan banjir	SASARAN VI.1 Berkurangnya luasan banjir	Persentase luasan banjir	0,216 persen
Masih kurangnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar di Kota Cimahi, meliputi rumah layak huni, akses terhadap air bersih, pengelolaan limbah domestik, penanganan genangan dan banjir	SASARAN VI.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	42,56 indeks
Masih kurangnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar di Kota Cimahi, meliputi rumah layak huni, akses terhadap air bersih, pengelolaan limbah domestik, penanganan genangan dan banjir	SASARAN VI.3 Meningkatnya Kualitas Permukiman	Rasio luas kawasan kumuh	0,001 rasio

PERMASALAHAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
Masih kurangnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar di Kota Cimahi, meliputi rumah layak huni, akses terhadap air bersih, pengelolaan limbah domestik, penanganan genangan dan banjir	SASARAN VI.4 Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	95,62 persen
		Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services)	C Predikat
Menurunnya kualitas lingkungan hidup	SASARAN VI.5 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas Kehati Kota Cimahi yang dikelola	1,15 persen
Menurunnya kualitas lingkungan hidup	SASARAN VI.6 Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	62,4 persen
		Persentase Penyelesaian Administrasi Pertanahan	100 persen
Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan	SASARAN VI.7 Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	73,5 persen
	TUJUAN VII Meningkatkan Ketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana	105 (kelas resiko sedang) indeks
Menurunnya kualitas lingkungan hidup	SASARAN VII.1 Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.77 (Level III / sedang) indeks

Sumber : RPD Kota Cimahi 2023-2026, diolah 2023.

Tabel 4.3
Keselarasan Sasaran RKPD Kota Cimahi Tahun 2024 dengan Sasaran Nasional dan Sasaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Cimahi Tahun 2024	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S2. 1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	SASARAN IV.1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah
		S2. 2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan ketahanan pangan daerah	SASARAN IV.2	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan
		S2. 3	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif		
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S2. 1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	SASARAN IV.1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah
		S2. 4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha serta meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	SASARAN IV.2	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan
		S3. 1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	SASARAN IV.3	Meningkatnya kesempatan kerja
S4	Terjaganya pertumbuhan ekonomi di tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	S2. 1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	SASARAN IV.1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Cimahi Tahun 2024	
		S2. 2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan ketahanan pangan daerah	SASARAN IV.2	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan
		S2. 3	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif		
S5	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S1. 5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	SASARAN I.5	Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota
S6	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S1.3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	SASARAN V.1	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
S7	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	S1. 1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	SASARAN I.1	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan
		S1. 2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	SASARAN I.2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
S8	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	S1. 4	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda	SASARAN I.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender
				SASARAN I.4	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak
				SASARAN II.2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
		S1. 1		SASARAN I.1	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Cimahi Tahun 2024	
			Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	SASARAN II.3	Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan
				SASARAN II.4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga
S9	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	S1. 3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	SASARAN V.1	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
S1 0	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S1. 1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	SASARAN I.1	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan
				SASARAN I.2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
S1 1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S4. 1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	SASARAN III.2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
S1 2	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S1. 1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	SASARAN II.3	Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan
		S4. 3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan		
S1 3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S4. 1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	SASARAN III.2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
S1 4	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S4. 1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	SASARAN III.2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Cimahi Tahun 2024	
S1 5	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S1. 4	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda	SASARAN III.2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
S1 6	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	S1. 1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	SASARAN I.1	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan
		S4. 3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	SASARAN II.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
S1 7	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S3. 1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	SASARAN VI.1	Berkurangnya luasan banjir
				SASARAN VI.3	Meningkatnya Kualitas Permukiman
				SASARAN VI.4	Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas
				SASARAN V.1	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
S1 8	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	S3. 1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	SASARAN VI.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan
				SASARAN VI.4	Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas
S1 9	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	S3. 1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	SASARAN VI.3	Meningkatnya Kualitas Permukiman
				SASARAN VI.4	Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Cimahi Tahun 2024	
S2 0	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	S3. 1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	SASARAN V.1	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
		S3. 3	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah		
S2 1	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	S4. 2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	SASARAN III.5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah
S2 2	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	S3. 2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	SASARAN VI.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan
		S3. 3	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah		
S2 3	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	S3. 2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	SASARAN VI.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan
		S3. 3	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah		
S2 4	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	S3. 3	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	SASARAN VI.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan
S2 5	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	S4. 1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	SASARAN III.2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
SN 26	Optimalnya kebijakan luar negeri	S4. 2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	SASARAN III.5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Cimahi Tahun 2024	
SN 27	Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	S4. 2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	SASARAN III.5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah
SN 28	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	S4. 2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	SASARAN II.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
				SASARAN III.1	Meningkatnya keswadayaan Masyarakat
				SASARAN III.3	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik
				SASARAN III.4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan
				SASARAN III.5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah
				SASARAN III.6	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah
				SASARAN III.7	Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
SN 29	Terjaganya keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	S4. 1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	SASARAN III.2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sumber : Hasil Analisis, 2023

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut :

- PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
- PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
- PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2024

Isu strategis :

- 1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia :
 - a. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta Pendidikan informal dan inklusi;
 - b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan Kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat;
 - c. Penerapan *zero new stunting* dan penanganan AIDS *Tuberculosis*

- dan Malaria;
 - d. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana; dan
 - f. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan.
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan :
- a. Penerapan pertanian ekologis;
 - b. Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan;
 - c. Pembentukan sentra pertanian, perikanan dan UMKM;
 - d. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
 - e. Penerapan UMKM dan industri hijau;
 - f. Percepatan digitalisasi ekonomi;
 - g. Penerapan circular ekonomi;
 - h. Pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, pertanian dan perikanan;
 - i. Penerapan *link and match* industri kecil industri besar; dan
 - j. Mitigasi, adaptasi dan penanggulangan bencana.
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar :
- a. Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir;
 - b. Konektivitas dan aksesibilitas di wilayah utara dan selatan Jawa Barat;
 - c. Pengembangan dan pembangunan kawasan industri Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekkarpur, dan Kawasan Cekungan Bandung;
 - d. Penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang terjangkau seluruh wilayah;
 - e. Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - f. Pelayanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestic;
 - g. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis; dan
 - h. Penyediaan transportasi massal perkotaan.
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah :
- a. Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang

- profesional;
- b. Deregulasi peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum;
 - c. Penataan dan penguatan organisasi;
 - d. Penataan tata laksana proses bisnis dan SOP serta keterbukaan informasi;
 - e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur;
 - f. Penguatan akuntabilitas;
 - g. Penguatan pengawasan;
 - h. Kualitas pelayanan publik; dan
 - i. Penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Program Prioritas :

1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata;
2. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama;
3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa; dan
6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

4.2.3. Isu Strategis dan Tema Pembangunan Kota Cimahi 2024

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Kota Cimahi tahun 2024 disusun berdasarkan gambaran umum hasil evaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembangunan tahun 2022, serta hasil penelaahan terhadap

kebijakan strategis nasional dan provinsi yang telah diuraikan sebelumnya. Isu strategis pembangunan Kota Cimahi tahun 2024 meliputi :

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh hampir semua daerah di Indonesia. Kondisi ini umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, gizi serta kesejahteraan penduduk, yang disebabkan oleh terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan yang dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan baik formal maupun non formal. Kondisi Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang terus berlanjut hingga tahun ini, mengakibatkan adanya pencapaian di tahap ke 4 yang lambat, khususnya terkait kondisi ekonomi dan sosial, terlihat dari menurunnya LPE Kota cimahi pada tahun 2020 yang mencapai -2,26%, serta meningkatnya jumlah angka kemiskinan menjadi 5,11% (diperkirakan meningkat menjadi 5,35% pada tahun 2021) dan indeks gini 0,380 point menjadi 0,415 point pada tahun 2021, serta Tingkat pengangguran terbuka Kota cimahi yang mencapai 13,30% pada tahun 2020 (2021 menjadi 13,07%). Meningkatnya angka kemiskinan tersebut, mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial di Kota Cimahi. Keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial menyebabkan peningkatan jumlah PPKS. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah PPKS di Kota Cimahi mencapai 17.210 jiwa. Isu lain yang perlu diperhatikan terkait masalah kemiskinan adalah koordinasi antar wilayah yang berbatasan dalam hal penanganan PPKS secara sinergi. Selain itu perlu diperhatikan juga pemanfaatan data PPKS sebagai data base sasaran program pengentasan kemiskinan di Kota Cimahi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

2. Kualitas dan Daya Saing SDM

Pembangunan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia

menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan manusia menjadi satu yang perlu diperhatikan karena sejatinya pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian fisik saja tetapi juga dari sudut manusianya, dimana pembangunan seharusnya tidak hanya dianalisis dari pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga harus dipahami dari sudut manusianya. Untuk itu, Pembangunan Manusia (IPM) diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai keberhasilan pembangunan.

Peningkatan kualitas SDM terletak pada kualitas hulunya yaitu pendidikan, kurangnya daya saing sumber daya manusia karena kurang jelasnya pengelolaan pendidikan. Maka, perbaikan sistem pendidikan, utamanya revitalisasi sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi seyogyanya terus menjadi pengarusutamaan, penataan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga pengajar, perancangan program dan desain kurikulum, standar pelatihan hingga penyelenggaraan pelatihan kerja, sehingga kebijakan *link and match* dapat benar-benar berjalan.

Kondisi kesehatan SDM juga menjadi salah satu isu penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing mengingat SDM yang memiliki kondisi kesehatan yang baik tentunya akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik pula sehingga mampu memaksimalkan seluruh potensi dirinya dalam berkreasi dan turut serta dalam melaksanakan pembangunan demi kemajuan bersama di Kota Cimahi. Untuk itu maka isu terkait kualitas kesehatan ini perlu terus ditindaklanjuti melalui berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan individu dan masyarakat Kota Cimahi baik yang sifatnya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

3. Kualitas Pembangunan Ekonomi

Kualitas pembangunan ekonomi Kota Cimahi masih memerlukan

beberapa perbaikan, terutama terkait peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan upaya pemerataan pendapatan serta penyerapan tenaga kerja. Penjelasan lebih lanjut mengenai poin-poin perbaikan tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar tidak hanya bagi kesehatan masyarakat namun juga bagi perekonomian baik secara mikro/rumah tangga maupun secara makro regional dan nasional. Hal ini juga memberikan pukulan yang sangat berat bagi sektor-sektor ekonomi di Kota Cimahi. Semua sektor ekonomi mulai dari Industri Pengolahan, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Pertanian, sampai sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdampak. Masyarakat banyak kehilangan pekerjaannya, kehilangan sumber pendapatannya juga banyak yang mengalami penurunan usaha bahkan sampai kehilangan usahanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemulihan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif agar para pelaku usaha dapat menciptakan bangkitan ekonomi baru maupun mengembangkan usahanya dan memunculkan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Selain itu upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dilakukan melalui optimalisasi Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil serta Sektor Industri, Perdagangan dan Pariwisata dalam Perekonomian Daerah yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada. Upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui peningkatan manajemen kelembagaan dan sumber daya manusia, kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana, daya saing dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Peningkatan upaya pemerataan pendapatan melalui penanggulangan kemiskinan Dengan adanya peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2020 maka penanggulangan kemiskinan yang komprehensif masih diperlukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penanggulangan

kemiskinan. Partisipasi dan koordinasi menjadi kata kunci dari penanganan penanggulangan kemiskinan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan. Adanya disparitas antara yang kaya dan yang miskin karena pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi tidak langsung diikuti oleh meningkatnya perekonomian keluarga berpendapatan rendah, sehingga perlu peningkatan upaya pemerataan pendapatan. Ketimpangan pendapatan di Cimahi yang mengalami peningkatan pada tahun 2020- 2021 akibat Pandemi Covid-19 perlu diantisipasi dengan upaya upaya pemerataan pendapatan melalui peningkatan aktivitas ekonomi yang memberikan akses ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat berpendapatan rendah.

- c. Peningkatan upaya penyerapan tenaga kerja Adanya permasalahan dalam kesempatan kerja di Kota Cimahi disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah Angkatan Kerja dengan Pasar Kerja. Kota Cimahi termasuk daerah dengan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) yang cukup besar, seharusnya dapat menjadi modal atau potensi untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi. Kondisi yang diharapkan ternyata belum bisa terwujud karena kemungkinan adanya ketidaksesuaian (mismatching) antara karakteristik angkatan kerja dengan karakteristik jenis pekerjaan yang ada. Selain itu, iklim investasi dan penanaman modal di Indonesia selama 2 (dua) tahun terakhir tidak terlalu menggairahkan, sehingga menyebabkan beberapa perusahaan menutup usahanya di Kota Cimahi.

4. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan di Kota Cimahi, dilihat dari sisi akuntabilitas, masih memerlukan berbagai perbaikan, terutama dalam capaian penilaian kinerja pemerintahan. Diharapkan isu ini dapat diperbaiki melalui berbagai upaya untuk menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik; pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi yang didukung dengan keberhasilan reformasi birokrasi sebagai kunci utama menuju masyarakat Kota Cimahi yang lebih maju. Upaya optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilakukan melalui penciptaan iklim inovasi yang baik dan penyelenggaraan kompetisi inovasi antar Perangkat Daerah, umum dan perguruan tinggi. Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2020 memperoleh nilai 65,07 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah baik. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kota Cimahi sudah berjalan dan menunjukkan hasil yang sangat baik. Pelaksanaan evaluasi SAKIP bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Komponen yang dinilai pada Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Komponen-komponen tersebut dijadikan fokus untuk

perencanaan pembangunan tahun 2023-2026 dengan target nilai SAKIP Kota Cimahi mendapatkan predikat BB. Tata kelola pemerintahan berkaitan erat dengan sistem perencanaan kinerja. Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tingkat Kota (Pemda) dan Perangkat Daerah (PD) menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (RPD) dan Renstra PD sebagai acuan pencapaian kinerja. Dokumen perencanaan kinerja tahunan yaitu Renja, RKPD, RKA dan Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari tingkat Kepala Daerah sampai pada penanggung jawab kegiatan di tingkat PD. Tujuan dan sasaran strategis dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan harus berorientasi pada hasil (outcome) dan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja yang terukur. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Kota Cimahi membangun dan mengimplementasikan sistem perencanaan kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. Aspek berikutnya setelah perencanaan kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja pada Pemerintah Kota Cimahi dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kepala Daerah ke pimpinan PD serta dari pimpinan PD ke penanggungjawab program hingga kegiatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencapaian kinerja organisasi yang terdistribusikan hingga jenjang terbawah dalam organisasi. Pendistribusian pencapaian kinerja secara berjenjang dilakukan sebagai upaya pencapaian kinerja organisasi serta kejelasan pelaporan kinerja. Laporan kinerja menyajikan analisis pencapaian kinerja yang berorientasi pada hasil. Pelaporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Kinerja aspek pengelolaan keuangan dan barang milik daerah baik dalam penyusunan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku harus terus dipertahankan. Fokus yang perlu mendapat perhatian selanjutnya adalah meningkatkan kinerja pengelolaan barang milik daerah melalui peningkatan pemanfaatan aset pemerintah daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja terhadap seluruh PD. Inspektorat Kota Cimahi dalam hal ini melakukan evaluasi serta pengawasan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka

perbaikan sebagai upaya mewujudkan budaya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Cimahi.

5. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas Kota Cimahi secara konstan akan mempengaruhi daya dukung lahan, dan pada akhirnya akan terlampaui. Daya dukung merupakan sebuah konsep yang dikembangkan untuk kegiatan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan dengan berorientasi pada keberlanjutan. Pengertian dan ruang lingkup daya dukung dan daya tampung lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Dengan demikian, konsep daya dukung secara umum dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

- a. Dari sisi ketersediaan, dengan melihat karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah; dan
- b. Dari sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan kebijakan prioritas suatu wilayah.

Penghitungan daya dukung lingkungan Kota Cimahi yang dilakukan pada tahun 2020 terhadap aspek penyedia pangan dan penyedia air. Ambang batas dan status Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) penyedia pangan dimodelkan secara kuantitatif melalui beberapa tahapan, yaitu perhitungan kebutuhan bahan pangan, ketersediaan bahan pangan, dan selisih ketersediaan. Kebutuhan bahan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang dikalikan dengan besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yang direpresentasikan dengan nilai Angka Kecukupan Energi (AKE).

Dari 5 (lima) isu strategis tersebut, maka ditentukan tema pembangunan Kota Cimahi Tahun 2024, yaitu **Pemantapan**

Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang dengan tema ini diharapkan bisa menjadi arahan umum dalam menentukan prioritas pembangunan tahunan.

4.2.4. Telaahan Terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.4

Tabel 4.4
Daftar Usulan Pokok-pokok Pikiran Hasil Reses Anggota DPRD Kota Cimahi untuk Perencanaan 2024

TUJUAN/ SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024	USULAN POKOK PIKIRAN HASIL RESES DPRD 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	PJU (Penerangan Jalan Umum)	Pengembangan dan peningkatan Aksesibilitas kawasan strategis Kota
	PJG (Penerangan Jalan Gang)	
	PJL (Penerangan Jalan Lingkungan)	
	Cermin Tikung	
	Speed Bumper	
	Lampu APIL	
	Pembuatan nama jalan	
	Rekayasa jalan	
	Pemindahan tiang listrik	
	trotoar	
	ZOSS (Zona Selamat Sekolah)	
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Motor Sampah	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
	Gerobak Sampah	
	Mosam & roda Sampah	
	TPS	
	Sarana & Prasarana persampahan (bak sampah, tong sampah, TPS, dll)	

TUJUAN/ SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024	USULAN POKOK PIKIRAN HASIL RESES DPRD 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024
	pengolahan sampah (jadwal pengambilan sampah)	
	Pelatihan Pengolahan Sampah	
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Meningkatnya Kualitas Permukiman	Pengadaan Air Bersih (Sumur Dangkal/Bor/Sarpras Air Bersih)	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan dan kawasan permukiman
	Artesis/Sumur Artesis	
	Sumur Dangkal	
	Sumur Sybel	
	Drainase permukiman	
	Gorong gorong	
	Jalan Setapak	
	TPT/Kirmir	
	Rutilahu	
	MCK	
	Sarpras ALD	
	Septic Tank	
	Septic tank komunal	
	Biopori	
	Sumur resapan	
	Taman	
	RTH	
	Perbaikan Infrastruktur	
	Pemagaran TPU dan Pemakaman	
	Lahan TPU	
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Berkurangnya banjir	Normalisasi Saluran Sungai	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan dan kawasan permukiman
	Kolam Retensi	
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Meningkatnya Kualitas Permukiman	Perbaikan jalan dan drainase jalan	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan dan kawasan permukiman
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Meningkatnya transportasi yang terpadu dan berkualitas	Jalan Lingkungan	Pengembangan dan peningkatan Aksesibilitas kawasan strategis Kota
	Pembangunan jembatan	
	Perbaikan Jembatan	
	Pembangunan jalan	
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi/Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Pembinaan & pelatihan UMKM	Peningkatan daya saing pelaku usaha ekonomi dan produk lokal

TUJUAN/ SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024	USULAN POKOK PIKIRAN HASIL RESES DPRD 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024
Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan/Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Kemudahan Izin Berusaha	Peningkatan daya saing pelaku usaha ekonomi dan produk lokal
	Sarpras Packaging	
Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan/Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Pembinaan Koperasi	Peningkatan daya beli masyarakat
	Permohonan bibit ayam	Menjaga ketahanan pangan daerah
	Budidaya lele	Menjaga ketahanan pangan daerah
	Kelompok Tani	
	Pembentukan KWT	Peningkatan daya beli masyarakat
	Peternakan Lele	
Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan/Meningkatnya kesempatan kerja	BLK (Balai Latihan Kerja)	Penyerapan tenaga kerja
	Pelatihan tenaga kerja	
	kemudahan lapangan kerja	
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia/Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Layanan Kesehatan Gratis (Tengah)	Penguatan kualitas pelayanan kesehatan
	Yanmas (BPJS)	
	Yanmas (Jaminan kesehatan)	
	Yanmas (lahan untuk puskesmas)	
	Yanmas pengaktifan balai pengobatan)	
	Kursi Roda	
	Timbangan	
	BPJS	
Menurunnya Angka Kemiskinan/Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Bansos	Peningkatan aksesibilitas perlindungan dan pelayanan sosial
	Sembako	
	KIP	
	KIS	
	PIP	
	PKH	
	Bantuan meteran listrik	
	STB	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan/Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Seragam linmas	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik
	Hydran	
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan/Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan	Bantuan alat seni	Peningkatan sumber daya olahraga, daya saing pemuda dan pelaku budaya

TUJUAN/ SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024	USULAN POKOK PIKIRAN HASIL RESES DPRD 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan/Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	sarana prasarana olahraga	Peningkatan sumber daya olahraga, daya saing pemuda dan pelaku budaya
	Bantuan speaker (sarana olahraga)	
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan/Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Pelatihan kewirausahaan untuk Karang Taruna	Peningkatan sumber daya olahraga, daya saing pemuda dan pelaku budaya
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan/Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	Jumat Barokah	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik
	renovasi Masjid/Mushola	
	Sarpras rumah ibadah	
	Pemulasaraan jenazah	
	Bantuan Modal UMKM	
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia/Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Beasiswa	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
	Operator Sekolah	
	Insentif guru ngaji	
	Ijazah ditahan : 1 usulan	
	PIP	
	Perbaikan sistem zonasi dan SKTM : 3 usulan	
	Pembangunan sekolah	
	Sarpras Sekolah	
	PPDB	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan/Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	CCTV	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan/Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	Insentif kader (PKK, Karta, posyandu, Posbindu)	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik
	Insentif RT RW	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan/Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Kanopi	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik
	Kantor RW (Selatan)	
	Operasional Posyandu	
	pelayanan Publik	
	pembangunan Kantor RW	
	Permohonan pembangunan gedung serbaguna	
	Poskamling (Selatan)	
	posyandu (selatan)	

TUJUAN/ SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024	USULAN POKOK PIKIRAN HASIL RESES DPRD 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024
	Sarpras	
	Sarpras Kecamatan	
	Sarpras Posyandu	
	Seragam Karta & PKK	
	Gapura	

Sumber : Data Hasil Reses DPRD Kota Cimahi pada SIPD, 2023.

Selanjutnya usulan usulan tersebut ditelaah untuk diselaraskan dan disinkronisasikan dengan program kegiatan dengan RPD dan RKPD sebagai berikut, dimana Program dan kegiatan berdasarkan nomenklatur Program dan Kegiatan dalam Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.5
Sinkronisasi Pokok Pikiran Dewan dengan Program dan Kegiatan SKPD

TUJUAN/ SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2024	USULAN POKOK PIKIRAN HASIL RESES DPRD 2024	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD 2024
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	PJU (Penerangan Jalan Umum)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
	PJG (Penerangan Jalan Gang)	
	PJL (Penerangan Jalan Lingkungan)	
	Cermin Tikung	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
	Speed Bumper	
	Lampu APIL	
	Pembuatan nama jalan	
	Rekayasa jalan	
	Pemindahan tiang listrik	
	trotoar	

TUJUAN/ SASARAN	USULAN POKOK PIKIRAN	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD 2024
PEMBANGUNAN DAERAH 2024	HASIL RESES DPRD 2024	
	ZOSS (Zona Selamat Sekolah)	
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Motor Sampah	Program Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
	Gerobak Sampah	
	Mosam & roda Sampah	
	TPS	
	Sarana & Prasarana persampahan (bak sampah, tong sampah, TPS, dll)	
	pengolahan sampah (jadwal pengambilan sampah)	
	Pelatihan Pengolahan Sampah	
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Meningkatnya Kualitas Permukiman	Pengadaan Air Bersih (Sumur Dangkal/Bor/Sarpras Air Bersih)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum , Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	Artesis/Sumur Artesis	
	Sumur Dangkal	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum , Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	Sumur Sybel	
	Drainase permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan, Sub Kegiatan Rehabilitas Saluran Drainase Perkotaan, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan, Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
	Gorong gorong	
	Jalan Setapak	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum , Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan

TUJUAN/ SASARAN	USULAN POKOK PIKIRAN	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD 2024
PEMBANGUNAN DAERAH 2024	HASIL RESES DPRD 2024	
	TPT/Kirmir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam satu daerah kota, Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai
	Rutilahu	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Perbaikan rumah Tidak Layak Huni
	MCK	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah , Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, - Sub Kegiatan Rehabilitas/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
	Sarpras ALD	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, - Sub Kegiatan Rehabilitas/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman,
	Septic Tank	- Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
	Septic tank komunal	
	Biopori	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	Sumur resapan	
	Taman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	RTH	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	Perbaikan Infrastruktur	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

TUJUAN/ SASARAN	USULAN POKOK PIKIRAN	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD 2024
PEMBANGUNAN DAERAH 2024	HASIL RESES DPRD 2024	
	Pemagaran TPU dan Pemakaman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
	Lahan TPU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Berkurangnya luasan banjir	Normalisasi Saluran Sungai	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum , Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
	Kolam Retensi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, Sub kegiatan Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Meningkatnya Kualitas Permukiman	Perbaikan jalan dan drainase jalan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	Jalan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
	Pembangunan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota , Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
	Perbaikan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota , Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
	Pembangunan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota , Pelebaran Jalan Menuju Standar
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi/Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Pembinaan & pelatihan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha KecilL dan Usaha Mikro (UMKM) , Kegiatan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan/Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan	Kemudahan Izin Berusaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha KecilL dan Usaha Mikro (UMKM) , Kegiatan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para

TUJUAN/ SASARAN	USULAN POKOK PIKIRAN	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD 2024
PEMBANGUNAN DAERAH 2024	HASIL RESES DPRD 2024	
Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah		pemangku kepentingan, sub kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
	Sarpras Packaging	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) , Kegiatan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan/Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Pembinaan Koperasi	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	Permohonan bibit ayam	Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
	Budidaya lele	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
	Kelompok Tani	Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
	Pembentukan KWT	Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
	Peternakan Lele	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan/Meningkatnya kesempatan kerja	BLK (Balai Latihan Kerja)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster
	Pelatihan tenaga kerja	
	kemudahan lapangan kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia/Meningkatnya	Layanan Kesehatan Gratis (Tengah)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP
	Yanmas (BPJS)	

TUJUAN/ SASARAN	USULAN POKOK PIKIRAN	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD 2024
PEMBANGUNAN DAERAH 2024	HASIL RESES DPRD 2024	
kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Yanmas (Jaminan kesehatan)	Kewenangan Daerah Kab/Kota, Sub Giat Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Yanmas (lahan untuk puskesmas)	
	Yanmas pengaktifan balai pengobatan)	
	Kursi Roda	
	Timbangan	
	BPJS	
Menurunnya Angka Kemiskinan/Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Bansos	Program perlindungan dan jaminan sosial , kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota , sub giat Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
	Sembako	
	KIP	Program perlindungan dan jaminan sosial , kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota , sub giat Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	KIS	Program perlindungan dan jaminan sosial , kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota , sub giat Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	PIP	Program perlindungan dan jaminan sosial , kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota , sub giat Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	PKH	Program perlindungan dan jaminan sosial , kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota , sub giat Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Bantuan meteran listrik	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan/Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Seragam linmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota/Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Hydrant	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN/Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota/Pencegahan Kebakaran
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam	Bantuan alat seni	Program Pengembangan Kebudayaan, Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat

TUJUAN/ SASARAN	USULAN POKOK PIKIRAN	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD 2024
PEMBANGUNAN DAERAH 2024	HASIL RESES DPRD 2024	
Pembangunan/Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan		Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota , Kegiatan Perlindungan dan Pengembangan, Sub Kegiatan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan/Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	sarana prasarana olahraga	program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan , kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sub giat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
	Bantuan speaker (sarana olahraga)	
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan/Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Pelatihan kewirausahaan untuk Karang Taruna	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Giat Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan/Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	Jumat Barokah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
	renovasi Masjid/Mushola	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
	Sarpras rumah ibadah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
	Pemulasaraan jenazah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
	Bantuan Modal UMKM	Program Perekonomian dan Pembangunan
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia/Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Beasiswa	program pengelolaan pendidikan, kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar , sub giat Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah dasar
	Operator Sekolah	
	Insentif guru ngaji	
	Ijazah ditahan : 1 usulan	
	PIP	
	Perbaiki sistem zonasi dan SKTM : 3 usulan	program penunjang urusan pemerintah, kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub giat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Pembangunan sekolah	
	Sarpras Sekolah	

TUJUAN/ SASARAN	USULAN POKOK PIKIRAN	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD 2024
PEMBANGUNAN DAERAH 2024	HASIL RESES DPRD 2024	
	PPDB	program penunjang urusan pemerintah, kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub giat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan/Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	CCTV	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan/Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	Insentif kader (PKK, Karta, posyandu, Posbindu)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	Insentif RT RW	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan/Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Kanopi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Kantor RW (Selatan)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Operasional Posyandu	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	pembangunan Kantor RW	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Permohonan pembangunan gedung serbaguna	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Poskamling (Selatan)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	posyandu (selatan)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Sarpras	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Sarpras Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Sarpras Posyandu	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

TUJUAN/ SASARAN	USULAN POKOK PIKIRAN	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD 2024
PEMBANGUNAN DAERAH 2024	HASIL RESES DPRD 2024	
	Seragam Karta & PKK	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Gapura	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber : Data Hasil Reses DPRD Kota Cimahi pada SIPD 2023, dianalisis.

4.2.5. Tema Reformasi Birokrasi Tematik di Kota Cimahi

Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Kota Cimahi. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 RB Tematik di Kota Cimahi difokuskan pada :

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Pengendalian Inflasi;
4. Digitalisasi Pemerintahan; dan
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Dikarenakan *Road Map* RB Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki periodisasi 2023-2024, maka untuk *Road Map* RB Tematik pada tahun 2025-2026 akan dikembangkan tidak sebatas ke-5 RB tematik mandatori, namun juga untuk seluruh kinerja pembangunan daerah yang dari aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target RB tematik Kota Cimahi terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Tema dan Target RB Tematik di Kota Cimahi

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Leading Sector
				2023	2024	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,11%	5,35%	5,30%	Bappelitbangda (Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Daerah)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	7,177 T	7,321 T	7,328 T	DPMPTSP / Bappelitbangda (Tim Percepatan Investasi Daerah)

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Leading Sector
				2023	2024	
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	7,45	5,41	5,41	Sekretariat Daerah / Bappelitbangda (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Menurunnya angka <i>Prevalensi Stunting</i> yang didorong melalui optimalisasi implementasi transformasi digital	<i>Prevalensi Stunting</i>	10,18%,	10,01%	10,00%	Dinas Kesehatan / Bappelitbangda (Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	61,33 %	65,00 %	70 %	Setda (PBJ) (Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)

Sumber : Road Map Reformasi Birokrasi Kota Cimahi, 2023

Khusus untuk tema penanggulangan kemiskinan, ini juga sejalan dengan program nasional penanganan kemiskinan ekstrim yang ditempuh melalui 3 (tiga) strategi yaitu :

1. peningkatan daya beli;
2. pengurangan beban pengeluaran; dan
3. pengurangan faktor kemiskinan.

Di Kota Cimahi sendiri dalam rangka penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui 4 (empat) yaitu :

1. Penurunan kantong kemiskinan;
2. Peningkatan pendapatan;
3. Pengurangan beban pendapatan; dan
4. Peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan.

Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi RB Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

4.2.6. Prioritas Pembangunan Kota Cimahi 2024

Prioritas pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa hal yang menjadi mandat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi, baik itu program dukungan terhadap pencapaian

tujuan pembangunan nasional dan provinsi serta terhadap target global dan nasional lainnya seperti SDG's dan SPM. Permasalahan dan isu strategis juga menjadi hal yang menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan Kota Cimahi pada Tahun 2024.

Sehingga fokus pembangunan daerah diberikan perhatian khusus pada :

1. Optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024 dan kebijakan Nasional melalui RPJMN;
3. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa barat dalam RKPD Provinsi Jawa barat tahun 2024; dan
4. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Berdasarkan permasalahan, isu strategis dan tema pembangunan Kota Cimahi maka disusun prioritas pembangunan Kota Cimahi tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;
3. Peningkatan aksesibilitas perlindungan dan pelayanan sosial;
4. Peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
5. Peningkatan sumber daya olahraga, daya saing pemuda dan pelaku budaya;
6. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana;
7. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
8. Peningkatan iklim investasi;
9. Peningkatan daya beli masyarakat;
10. Peningkatan daya saing pelaku usaha ekonomi dan produk lokal;
11. Menjaga ketahanan pangan daerah;
12. Penyerapan tenaga kerja;
13. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas kawasan strategis kota;
14. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan, dan kawasan permukiman;

- 15. Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik; dan
- 16. Fasilitasi pemilihan umum serentak.

Berikut disajikan tabel keselarasan permasalahan kota yang diangkat pada tahun 2024 dengan isu strategis dan prioritas daerah :

Tabel 4.7
Keselarasan Permasalahan Kota, Isu Strategis, dan Prioritas Daerah Kota Cimahi Tahun 2024

No	Permasalahan Kota	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1	Angka kematian ibu dan bayi yang mengalami fluktuasi setiap tahun, masih adanya balita stunting, kasus penyakit menular dan tidak menular yang masih tinggi, masih terdapat anak yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP, rendahnya tingkat literasi masyarakat, serta keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa dalam digitalisasi Pendidikan	2. Kualitas dan Daya Saing SDM	1. Penguatan kualitas pelayanan kesehatan
			2. Peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan
			5.Peningkatan sumber daya olahraga, daya saing pemuda dan pelaku budaya
2	Masih tingginya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan belum optimalnya perbaharuan data tersebut menyebabkan perlindungan dan pelayanan sosial juga belum optimal	1. Kemiskinan	3. Peningkatan aksesibilitas perlindungan dan pelayanan sosial 4. Peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat berbasis gender
3	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	5.Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	3. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana
4	Masih kurangnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar		4. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
			13. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas kawasan strategis kota 14. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan, dan kawasan permukiman
5	Masih tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi.	3. Kualitas Pembangunan Ekonomi	9.Peningkatan daya beli masyarakat 10. Peningkatan daya saing pelaku usaha ekonomi dan produk lokal 11.Menjaga ketahanan pangan daerah
6	Masih tingginya angka kemiskinan di Kota Cimahi		9. Peningkatan daya beli masyarakat
7	Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka		12. Penyerapan tenaga kerja 8. Peningkatan iklim investasi
8	Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan	4. Tata Kelola Pemerintahan	15.Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik 16.Fasilitasi pemilihan umum serentak

Prioritas pembangunan Kota Cimahi Tahun 2024 dimaksudkan untuk dapat mencapai target dari indikator-indikator Tujuan dan Sasaran Kota Cimahi. Prioritas pembangunan Kota Cimahi juga ditujukan untuk mendukung ketercapaian prioritas nasional khususnya tahun 2024, seperti yang disajikan pada Tabel 4.8.

Selanjutnya, prioritas pembangunan tahun 2024 ini dipetakan terhadap beberapa strategi dan arah kebijakan yang sudah lebih detail menggambarkan kegiatan ataupun pekerjaan apa yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target prioritas tersebut. Pemetaan sasaran, prioritas, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.8
Matriks Sanding Dukungan Prioritas Pembangunan Kota Cimahi terhadap Prioritas Nasional

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS KOTA	PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
TUJUAN I Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Kesehatan				
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	Indeks Pengetahuan				
SASARAN I.1 Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	PN 3	Dinas Pendidikan	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Berdasarkan asesmen nasional				
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)				
SASARAN I.2 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Akreditasi Rumah Sakit	Penguatan kualitas pelayanan kesehatan	PN 3	RSUD Cibabat	
	Indeks Keluarga sehat			Dinas Kesehatan	
SASARAN I.3 Meningkatnya pengarusutamaan gender	Prosentase paartisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	Peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat berbasis gender	PN 4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Prosentase partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi				
	Prosentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
SASARAN I.4 Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Prosentase Capaian Kota Layak Anak	Peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat berbasis gender	PN 4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS KOTA	PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
SASARAN 1.5 Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat berbasis gender	PN 4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
TUJUAN II Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat				
SASARAN II.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	PN 7	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
				Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	
SASARAN II.2 Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	Peningkatan sumber daya olahraga, daya saing pemuda dan pelaku budaya	PN 3 PN 4	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	
SASARAN II.3 Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan	Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	Peningkatan sumber daya olahraga, daya saing pemuda dan pelaku budaya	PN 3 PN 4	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	
SASARAN II.4 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Prosentasi masyarakat yang aktif berolahraga	Peningkatan sumber daya olahraga, daya saing pemuda dan pelaku budaya	PN 3 PN 4	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	
TUJUAN III Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi				
	Opini BPK				
SASARAN III.1 Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	PN 7	Kecamatan Cimahi Selatan	

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS KOTA	PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
	Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah			Kecamatan Cimahi Tengah	
	Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara			Kecamatan Cimahi Utara	
SASARAN III.2 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	PN 7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Penurunan Angka Gangguan Katentraman dan Ketertiban Masyarakat			Badan Kesatuan Bangsa	
	Waktu respon tanggap kebakaran			Kecamatan Cimahi Selatan	
	Persentase pembinaan politik dalam negeri			Kecamatan Cimahi Tengah	
	Prosentase Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang Terbina/Terfasilitasi			Kecamatan Cimahi Utara	
	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Selatan				
	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Tengah				
	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Utara				

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS KOTA	PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
	Prosentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Trantibmas yang dapat dicegah dan ditangani				
SASARAN III.3 Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	PN 7	Dinas Komunikasi dan Informasi	
	Indeks Pembangunan Statistik			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Indeks Profesionalisme ASN			Sekreteriat Daerah	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			Dinas Arsip Daerah	
	Indeks Keterbukaan Infomasi Publik			BPBD	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bakesbangpol			Badan Perencanaan Pembangunan Peneliiian dan Pengembangan Daerah	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BAPPELITBANGDA			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BKPSDMD			Dinas Kesehatan	

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS KOTA	PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD			Dinas Lingkungan Hidup	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Arsip Daerah			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			Dinas Pangan dan Pertanian	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup			Dinas Pendidikan	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian			Dinas Perhubungan	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Dinas Perdagangan Koperasi dan Perindustrian	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan			Dinas Sosial	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial			Dinas Tenaga Kerja	

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS KOTA	PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdagkoperin			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdukcapil			Dinas Penanaman Modal dan Perinjinan Satu Pintu	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker			Inspektorat	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPKP			Kecamatan Cimahi Selatan	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPMPSTSP			Kecamatan Cimahi Tengah	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPUPR			Kecamatan Cimahi Utara	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat			RSUD Cibabat	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Tengah				
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Utara				
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi RSUD Cibabat				

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS KOTA	PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi SATPOLPP-DAMKAR				
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekertariat DPRD				
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah				
	Nilai IKM Administrasi Kependudukan				
	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)				
	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data				
	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah				
	Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Selatan				
	Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Tengah				
	Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Utara				

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS KOTA	PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
	Indeks LAKE				
	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi terhadap Kinerja DPRD				
SASARAN III.4 Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	PN 7	Inspektorat	
	Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan			Sekretariat Daerah	
SASARAN III.5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	PN 7	Sekretariat Daerah	
	Nilai LPPD			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Nilai Rata-rata IKM Kota				
	Nilai SAKIP Kota				
	Indeks Profesionalisme ASN				
SASARAN III.6 Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	PN 7	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci				
SASARAN III.7 Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Rasio Utilisasi Aset Daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	PN 7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan				

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS KOTA	PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
	Persentase Penetapan APBD tepat waktu				
TUJUAN IV Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Indeks Gini				
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)				
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
SASARAN IV.1 Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase IKM yang berdaya saing	Peningkatan daya saing pelaku usaha ekonomi dan produk lokal	PN 1	Dinas Perdagangan Koperasi dan Perindustrian	
	Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar	Peningkatan Iklim Investasi		Dinas Penanaman Modal dan Perinjinan Satu Pintu	
	Persentase Pelaku Usaha yang Berpotensi Ekspor			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi			Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	
	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah				
	Realisasi Investasi (dalam milyar rupiah)				
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara				
	Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara				
SASARAN IV.2 Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Nilai PPH Ketersedian	Peningkatan daya beli masyarakat	PN 1	Dinas Pangan dan Pertanian	

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS KOTA	PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
	Skor PPH Ketersedian	Menjaga ketahanan pangan daerah	PN 1	Dinas Perdagangan Koperasi dan Perindustrian	
	Persentase Koperasi Sehat				
	Persentase UKM Naik Kelas				
	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian				
SASARAN IV.3 Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	Penyerapan tenaga kerja	PN 1	Dinas Tenaga Kerja	
TUJUAN V Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan				
SASARAN V.1Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	Peningkatan aksesibilitas perlindungan dan pelayanan sosial	PN 4	Dinas Sosial	
	Cakupan PPKS yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha			Dinas Pangan dan Pertanian	
	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan infrastruktur Dasar			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial				
TUJUAN VI Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	Indeks Livable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur				
SASARAN VI.1 Berkurangnya luasan banjir	Persentase luasan banjir	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan dan kawasan permukiman	PN 2 PN 5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS KOTA	PRIORITAS NASIONAL	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
SASARAN VI.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	PN 6	Dinas Lingkungan Hidup	
SASARAN VI.3 Meningkatnya Kualitas Permukiman	Rasio luas kawasan kumuh	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan dan kawasan permukiman	PN 2 PN 5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
SASARAN VI.4 Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	Pengembangan dan peningkatan Aksesibilitas kawasan strategis Kota	PN 2 PN 5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services)			Dinas Perhubungan	
SASARAN VI.5 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas Kehati Kota Cimahi yang dikelola	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	PN 2 PN 6	Dinas Lingkungan Hidup	
SASARAN VI.6 Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan dan kawasan permukiman	PN 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase Penyelesaian Administrasi Pertanahan			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
SASARAN VI.7 Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas kawasan strategis kota	PN 2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
TUJUAN VII Meningkatkan Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana				
SASARAN VII.1 Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana	PN 6	BPBD	

Sumber : Hasil Analisis 2023

Tabel 4.9
Pemetaan Tujuan, Sasaran, Prioritas, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Cimahi 2024

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN I Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	SASARAN I.1 Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Meningkatkan kemudahan memperoleh pendidikan untuk semua golongan masyarakat
				Meningkatkan Mutu Pendidikan
	SASARAN I.2 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Penguatan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan pengelolaan kesehatan yang sesuai standar dan menjangkau seluruh wilayah	Peningkatan kualitas pelayanan rujukan rumah sakit
				Percepatan penurunan kasus stunting pada balita
				Peningkatan kualitas penanganan kasus penyakit menular dan tidak menular
	SASARAN I.3 Meningkatnya pengarusutamaan gender	Peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat berbasis gender	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1. Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender 2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan
TUJUAN II Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	SASARAN I.4 Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat berbasis gender	Meningkatkan perlindungan anak	Meningkatkan perlindungan dan tumbuhkembang anak
	SASARAN 1.5 Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota	Peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat berbasis gender	Meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata, berkualitas dan terintegrasi	Mengembangkan Inovasi Promosi Keluarga Berencana
	SASARAN II.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi masyarakat	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi masyarakat

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat
	SASARAN II.2 Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Peningkatan sumber daya olahraga, daya saing pemuda dan pelaku budaya	Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda	Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda
	SASARAN II.3 Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan	Peningkatan sumber daya olahraga, daya saing pemuda dan pelaku budaya	Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Melestarikan, memajukan dan mempromosikan kebudayaan
	SASARAN II.4 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Peningkatan sumber daya olahraga, daya saing pemuda dan pelaku budaya	Meningkatkan Sumber Daya Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Olahraga
TUJUAN III Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	SASARAN III.1 Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan di Kecamatan Cimahi Selatan
				Fasilitasi Kegiatan PPM Tingkat RW di Kecamatan Cimahi Selatan
				Fasilitasi Stakeholder dalam Musrenbang di Kecamatan Cimahi Selatan
			Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan di Kecamatan Cimahi Tengah
				Fasilitasi Kegiatan PPM Tingkat RW di Kecamatan Cimahi Tengah
				Fasilitasi Stakeholder dalam Musrenbang di Kecamatan Cimahi Tengah

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan di Kecamatan Cimahi Utara
				Fasilitasi Kegiatan PPM Tingkat RW di Kecamatan Cimahi Utara
				Fasilitasi Stakeholder dalam Musrenbang di Kecamatan Cimahi Utara
	SASARAN III.2 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
				Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran
			Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Peningkatan Sinergitas Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
			Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Peningkatan Sinergitas Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	Fasilitasi Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan
				Fasilitasi Pemilu di Tingkat Wilayah Kecamatan Cimahi Selatan
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	Fasilitasi Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah
				Fasilitasi Pemilu di Tingkat Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	Fasilitasi Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara
				Fasilitasi Pemilu di Tingkat Wilayah Kecamatan Cimahi Utara
			Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Peningkatan Sinergitas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			Meningkatkan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
	SASARAN III.3 Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi
			Meningkatkan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
			Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Peningkatan kualitas layanan administrasi pemerintahan daerah 2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
			Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
				Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pencatatan sipil
				Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan basis data kependudukan
			Meningkatkan Kualitas Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Peningkatan Kualitas Inovasi dan Teknologi Daerah
			Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Cimahi Selatan	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan Umum Bagi Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan
			Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan Umum Bagi Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Publik di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah	
			Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Cimahi Utara	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan Umum Bagi Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara
			Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan	Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan
			Meningkatkan kelembagaan dan pelayanan kedinasan DPRD	Meningkatkan kapasitas SDM DPRD, Meningkatkan pembuatan produk hukum DPRD, Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan pengawasan
	SASARAN III.4 Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan	Peningkatan kendali mutu pengawasan
				Peningkatan pengawalan reformasi birokrasi, penegakan integritas dan peningkatan kapabilitas APIP
	SASARAN III.5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintah daerah	1. Peningkatan pelayanan penunjang pemerintahan daerah 2. Peningkatan koordinasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 3. Peningkatan koordinasi perekonomian dan pembangunan
			Meningkatkan Penataan Manajemen ASN	Fasilitasi Penataan Manajemen ASN

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	SASARAN III.6 Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	Meningkatkan Kompetensi ASN	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN
			Meningkatkan keselarasan perencanaan kinerja pembangunan daerah	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan dan capaian indikator kinerja pembangunan daerah
				Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
	SASARAN III.7 Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas rencana anggaran daerah
				Peningkatan kualitas perbendaharaan daerah
				Peningkatan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
				Peningkatan dukungan pengelolaan keuangan daerah
TUJUAN IV Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	SASARAN IV.1 Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Peningkatan daya saing pelaku usaha ekonomi dan produk lokal Peningkatan Iklim Investasi	Peningkatan kualitas Perencanaan dan Pembangunan Industri	Peningkatan aksesibilitas kebijakan bidang perindustrian
			Optimalisasi pengendalian dan pengawasan IKM	Peningkatan standar dan daya saing produk IKM
				Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan pemanfaatan teknologi perindustrian	Meningkatkan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
			Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatkan Upaya Pengendalian Harga, dan Stok Barang
				Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
			Peningkatan ekspor produk Kota Cimahi	Meningkatkan upaya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatkan Upaya Pemanfaatan Teknologi Digital sektor Perdagangan
			Peningkatan sarana dan prasarana distribusi dan perdagangan	Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
				Meningkatkan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
			Optimalisasi standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Peningkatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
			Peningkatan intensifikasi dan / atau extensifikasi penerimaan daerah	Peningkatan intensifikasi dan / atau extensifikasi penerimaan daerah
			Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah
			Optimalisasi Pelayanan Perizinan bidang Perdagangan	Peningkatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan serta tanda daftar gudang
			Peningkatan pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan
			Optimalisasi Iklim, promosi Potensi investasi daerah	Pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal
				Pemetaan potensi investasi kota cimahi
			Peningkatan promosi potensi investasi daerah	Peningkatan promosi investasi daerah
			Optimalisasi pengendalian dan pengawasan di Bidang Penanaman modal	Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Peningkatan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan
			Optimalisasi Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan pelayanan perizinan usaha pertanian
			Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata
				Meningkatkan pengelolaan kawasan strategis pariwisata
				Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata daerah
				Peningkatan upaya penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah
			Optimalisasi Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
			Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
				Meningkatkan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif
			Peningkatan Kompetensi SDM bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan penyediaan prasarana ruang kreatif daerah

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Meningkatkan upaya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
	SASARAN IV.2 Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Peningkatan daya beli masyarakat	Peningkatan ketersediaan pangan	peningkatan stabilisasi pasokan dan harga pangan daerah & Peningkatan Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota
		Menjaga ketahanan pangan daerah		peningkatan stabilisasi pasokan dan harga pangan daerah & Peningkatan Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota
			Peningkatan akses konsumsi pangan yang beranekaragam berbasis sumber daya lokal	Peningkatan upaya pencapaian target konsumsi pangan
				Peningkatan upaya penanganan kerawanan pangan
			Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan segar
			Penguatan Penanganan kerawanan pangan	pembuatan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
			Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan Koperasi	Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
				Peningkatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Skala Usaha	Meningkatkan pemanfaatan teknologi, akses permodalan, kemudahan bahan baku dan digitalisasi KUM
			Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) bagi masyarakat miskin	Meningkatkan upaya pemberdayaan usaha mikro bagi masyarakat miskin
			Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterine	Peningkatan penjamin kesehatan hewan dan pengendalian wabah penyakit hewan menular
				Peningkatan upaya pengawasan migrasi hewan dan arus produk hewan
				Peningkatan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner
			Pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam bidang pertanian	Peningkatan penyuluhan pertanian

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan pengawasan penggunaan sarana pertanian
				Peningkatan prasarana pertanian
				Peningkatan dan Pengawasan sumber bibit ternak
			Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya	optimalisasi pengelolaan budidaya perikanan
				optimalisasi SDM pengelola perikanan
			Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	SASARAN IV.3 Meningkatnya kesempatan kerja	Penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar	Meningkatkan upaya Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Upaya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
				Meningkatnya Upaya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Evaluasi pelaksanaan pengiriman Transmigran	Peningkatan pelaksanaan koordinasi mengenai pengiriman transmigran
			Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Meningkatnya kualitas perencanaan Tenaga Kerja
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
			Meningkatnya keharmonisan hubungan industrial	Fasilitasi Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerjasama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten kota
				Fasilitasi Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan
TUJUAN V Menurunnya Angka Kemiskinan	SASARAN V.1 Meningkatkan akses pelayanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Peningkatan aksesibilitas perlindungan dan pelayanan sosial	Peningkatan penanganan kerawanan pangan bagi masyarakat miskin	Meningkatkan upaya penanganan kerawanan pangan bagi masyarakat miskin
			Peningkatan Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) bagi masyarakat miskin	Meningkatkan upaya pemberdayaan usaha mikro bagi masyarakat miskin
			Meningkatkan fasilitasi rutilahu bagi masyarakat miskin	Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat miskin
			Meningkatkan Perlindungan dan Pelayanan Sosial	Peningkatan perlindungan sosial dan akses pelayanan sosial dasar bagi kelompok rentan

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Peningkatan Pemberdayaan lembaga dan SDM kesejahteraan Sosial
				peningkatan pelayanan dan bantuan sosial dasar korban bencana
TUJUAN VI Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	SASARAN VI.1 Berkurangnya luasan banjir	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air	Pengembangan infrastruktur pengendali banjir (embung, polder/kolam retensi, tanggul sungai)
				Pengadaan lahan untuk normalisasi sungai
	SASARAN VI.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Meningkatkan kualitas udara air dan tanah	Fasilitasi rekomendasi lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan
				Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan
				Uji kualitas lingkungan hidup
				Inventarisasi gas rumah kaca (GRK)
				Peningkatan peran masyarakat dalam adaptasi mitigasi perubahan iklim
				Penanganan pengaduan lingkungan hidup
				Reviu dokumen RPPLH, Penyusunan dokumen KLHS RPJMD dan Penyusunan DIKPLHD

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	SASARAN VI.3 Meningkatnya Kualitas Permukiman	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan pengelolaan sampah perkotaan	Pengurangan timbunan sampah
				Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah
				Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Penanganan timbunan sampah
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas utilitas sarana prasarana permukiman	penataan taman lingkungan
				pembangunan dan pemeliharaan jalan setapak dan TPT
				Pemeliharaan TPU
			Meningkatkan akses air minum layak dan aman	Penambahan jaringan distribusi dan sambungan rumah
				Operasional dan pemeliharaan SPAM
			Mengurangi luas genangan di kawasan rawan genangan dan di luar rawan genangan	Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase
			Menyediakan Akses pengelolaan air limbah layak dan aman	Pembangunan dan pengembangan SPALD
				Operasional dan pemeliharaan SPALD

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	SASARAN VI.4 Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	Pengembangan dan peningkatan Aksesibilitas kawasan strategis Kota	Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kota dengan prinsip jalan yang berkeselamatan	Pengadaan lahan untuk IPLT
				Pembangunan dan pemeliharaan jalan
				Pembangunan dan pemeliharaan jembatan
				Pengadaan lahan untuk peningkatan jalan
				Pengelolaan data, informasi dan ledger jalan dan jembatan
			Meningkatkan manajemen dan pengendalian lalu lintas serta angkutan jalan	Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
				Pengelolaan terminal
				Pengelolaan parkir
				Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
				Peningkatan kualitas pengujian kendaraan bermotor
				Pengelolaan angkutan penumpang dan barang
	SASARAN VI.5 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati	Penyediaan sarana prasarana keanekaragaman hayati
				Pengelolaan ruang terbuka hijau

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Pengelolaan keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan
				Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
	SASARAN VI.6 Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Penyusunan Revisi Rencana Umum tata ruang
				Penyusunan Rencana Rinci tata ruang
				Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang
				Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah
				Pengembangan data dan informasi penataan ruang
				Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang
			Melaksanakan penatagunaan tanah	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah
				Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kota
				Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan

TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	SASARAN VI.7 Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas kawasan strategis kota	Meningkatkan kualitas bangunan gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung
				Fasilitasi Persetujuan bangunan gedung dan sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung
				Peningkatan kapasitas tenaga terampil konstruksi
TUJUAN VII Meningkatkan Ketahanan Bencana	SASARAN VII.1 Meningkatnya Ketahanan Bencana	Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan manajemen dan koordinasi bencana pada tahap pra bencana darurat bencana dan pasca bencana	Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Bencana melalui kemitraan multi pihak dan penataan kelembagaan penanggulangan bencana.
				Peningkatan kapasitas SDM baik aparatur maupun relawan/masyarakat serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.

Sumber : Hasil Analisis, 2023

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

TAHUN 2024

Berdasarkan Sasaran, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 yang dibahas pada Bab 4. dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026. disusun program dan kegiatan beserta indikator dan target yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 oleh perangkat daerah.

Pembahasan substansi pada Bab V diperoleh dari kondisi permasalahan. Isu strategis hingga menghasilkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Tahun 2024 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui serangkaian Program Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Selanjutnya Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2024. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan dengan berbagai pendekatan. Program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Proses penyusunan program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, *bottom up*, *top-down*, dan politis serta unsur

inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Cimahi.

1. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 berarti bahwa RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematis dalam melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan pelibatan akademisi yang berfungsi sebagai narasumber, serta pelibatan fungsional perencana yang berfungsi sebagai tim pelaksana penyusunan RKPD. Pada tahap ini dilakukan FGD untuk menentukan isu strategis sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan Tahun 2024;
2. Pendekatan partisipatif dan *bottom-up* dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas;
 - b. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, dilakukan melalui SIPD, sehingga masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan secara *real time*;
 - c. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
 - d. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Cimahi; dan
 - e. Pelibatan secara aktif warga dalam Forum Rembug Warga untuk menyepakati usulan yang akan disampaikan pada Forum Musrenbang Kelurahan.
3. Pendekatan *top-down* yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024, sinergi dan konsisten dengan RPD maupun RPJPD, serta sinergi dan komitmen terhadap tujuan global seperti SDG's dan pemenuhan SPM;
4. Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedepankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui :
 - a. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan program kepala daerah; dan

- b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan rencana. diantaranya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD maupun reses anggota DPRD.

5.1. RINGKASAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Ringkasan anggaran Perangkat Daerah yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif. dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang hendak dicapai. Ringkasan anggaran yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2024. Hal-hal yang menjadi perhatian Perangkat Daerah dalam menetapkan anggaran program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Perangkat Daerah yang diinput ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri adalah sebagai berikut :

1. **Prioritas I.** merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (dua puluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik. bersifat monumental. berskala besar. dan memiliki kepentingan yang tinggi. memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian tujuan pembangunan daerah. Di samping itu. prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. **Prioritas II.** merupakan prioritas program di tingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan dan dengan memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan Perangkat

Daerah terkait. Sehingga prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani;

- Prioritas III.** merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi seperti : tambahan penghasilan PNS; belanja hibah; belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan. belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa.serta belanja tidak terduga.

Secara rinci rumusan program prioritas Perangkat Daerah beserta ringkasan anggarannya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Rekapitulasi Belanja Program pada Anggaran Tahun 2024

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	371.449.839.442,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	256.485.943.261,00	Dinas Pendidikan
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	114.758.896.181,00	Dinas Pendidikan
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	75.000.000,00	Dinas Pendidikan
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	30.000.000,00	Dinas Pendidikan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	130.215.813.830,00	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73.435.595.598,00	Dinas Kesehatan
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	55.862.201.182,00	Dinas Kesehatan
8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	436.348.600,00	Dinas Kesehatan
9	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	61.703.950,00	Dinas Kesehatan
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	419.964.500,00	Dinas Kesehatan

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	195.315.972.468,00	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.315.972.468,00	RSUD CIBABAT
12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	145.000.000.000,00	RSUD CIBABAT
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38.425.260.443,00	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.516.259.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.647.956.143,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	18.886.045.100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.375.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	555.110.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.020.000.000,00	
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.020.000.000,00	UPTD Pemakaman
21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.994.906.960,00	UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa
22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.900.000.000,00	UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31.074.847.423,00	
23	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11.498.618.291,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.725.779.132,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.715.450.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.135.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	33.451.819.573,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.843.537.252,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
28	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	437.124.921,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
29	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.246.157.400,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
30	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.125.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
31	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	9.800.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	100.000.000,00	
32	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
33	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
34	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
35	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	28.576.097.475,00	
36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.002.477.775,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
37	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.323.556.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
38	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	5.250.063.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.435.286.000,00	
39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.378.948.050,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
40	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.056.337.950,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.037.536.975,00	
41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.482.232.825,00	Dinas Sosial
42	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.095.655.700,00	Dinas Sosial
43	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.451.346.950,00	Dinas Sosial
44	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.175.667.300,00	Dinas Sosial
45	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	832.634.200,00	Dinas Sosial
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	11.296.512.607,00	
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.239.207.217,00	Dinas Tenaga Kerja
47	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	55.720.000,00	Dinas Tenaga Kerja
48	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.976.128.997,00	Dinas Tenaga Kerja
49	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	755.388.043,00	Dinas Tenaga Kerja
50	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.270.068.350,00	Dinas Tenaga Kerja
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.348.180.750,00	
51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.738.087.050,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
52	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	417.250.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
53	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	359.100.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
54	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	405.650.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
55	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	74.999.750,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pagu Indikatif (Rp)	
56	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	225.787.700,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
57	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	127.306.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.947.780.000,00	
58	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	207.680.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
59	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.740.100.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.497.924.050,00	
60	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	673.488.650,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
61	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.242.888.950,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.581.546.450,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.808.196.334,00	
63	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.889.932.516,00	Dinas Pangan dan Pertanian
64	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	679.519.968,00	Dinas Pangan dan Pertanian
65	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	160.000.050,00	Dinas Pangan dan Pertanian
66	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	78.743.800,00	Dinas Pangan dan Pertanian

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	760.381.620,00	
67	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	671.738.320,00	Dinas Pangan dan Pertanian
68	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	88.643.300,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.477.674.034,00	
69	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	75.000.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian
70	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	961.575.284,00	Dinas Pangan dan Pertanian
71	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	4.400.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian
72	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	436.698.750,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.150.000.000,00	
73	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.150.000.000,00	UPTD Laboratorium Lingkungan
74	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	12.408.520.140,00	UPTD Pelayanan Persampahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	561.112.400,00	
75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	261.112.400,00	Dinas Lingkungan Hidup
76	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
77	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.510.423.505,00	Dinas Lingkungan Hidup
78	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
79	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	761.139.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
80	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.507.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
81	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	110.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pagu Indikatif (Rp)	
82	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.070.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
83	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	183.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
84	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	12.810.822.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.501.960.710,00	
86	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.819.320.710,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
87	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	513.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
88	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	578.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
89	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	563.640.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
90	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	28.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	31.157.612.000,00	
91	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.870.362.000,00	Dinas Perhubungan
92	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8.287.250.000,00	Dinas Perhubungan
93	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.344.500.000,00	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.555.636.357,00	
94	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.441.987.400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
95	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.113.648.957,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	501.852.500,00	
96	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	501.852.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	641.150.000,00	
97	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	641.150.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
98	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.339.362.750,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.408.500.000,00	
99	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	473.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
100	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	550.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
101	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.095.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
102	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	590.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
103	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	700.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
104	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.228.385.361,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.293.781.575,00	
105	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.143.781.575,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
106	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	900.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
107	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.750.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
108	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.250.000.000,00	
109	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.550.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pagu Indikatif (Rp)	
110	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	300.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
111	PROGRAM PEMBINAAN Sejarah	0,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
112	PROGRAM PElestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	400.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Pariwisata	4.621.408.000,00	
113	PROGRAM Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.229.204.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
114	PROGRAM Pemasaran Pariwisata	605.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
115	PROGRAM PENGEMBANGAN Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	150.000.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
116	PROGRAM PENGEMBANGAN Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	637.204.000,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Perpustakaan	865.010.000,00	
117	PROGRAM PEMBINAAN Perpustakaan	865.010.000,00	Dinas Arsip Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Kearsipan	855.000.559,00	
118	PROGRAM PENGELOLAAN Arsip	855.000.559,00	Dinas Arsip Daerah
119	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.529.130.148,00	Dinas Arsip Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	13.311.472.344,00	
120	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.538.880.344,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
121	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Koperasi	78.006.600,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
122	PROGRAM PENILAIAN Kesehatan KSP/USP Koperasi	248.645.900,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
123	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN Perkoperasian	195.016.400,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pagu Indikatif (Rp)	
124	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	389.057.700,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
125	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.033.045.800,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
126	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	828.819.600,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.003.000.200,00	
127	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	29.252.500,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
128	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	635.935.300,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
129	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	355.905.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
130	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	536.295.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
131	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	445.612.400,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	599.675.500,00	
132	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	390.032.800,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
133	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	29.252.500,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
134	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	180.390.200,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
135	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	326.652.500,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	638.678.600,00	
136	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	638.678.600,00	UPTD Metrologi Legal
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.436.557.800,00	
137	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.436.557.800,00	UPTD Cimahi Technopark
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.608.173.800,00	
138	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.608.173.800,00	UPTD Pasar
	SEKRETARIAT DAERAH	69.744.540.657,00	
139	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.456.194.768,00	Sekretariat Daerah
140	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.096.138.975,00	Sekretariat Daerah
141	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.786.655.314,00	Sekretariat Daerah
142	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.405.551.600,00	Sekretariat Daerah
	SEKRETARIAT DPRD	89.481.628.500,00	
143	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.952.057.381,00	Sekretariat DPRD
144	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	32.529.571.119,00	Sekretariat DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	PERENCANAAN		
145	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.447.625.845,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
146	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.981.858.928,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
147	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.887.883.922,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
148	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.168.118.152,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pagu Indikatif (Rp)	
	KEUANGAN	13.318.101.253,00	
149	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.748.994.138,00	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
150	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.569.107.115,00	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
	KEUANGAN	49.200.290.494,21	
151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.478.906.900,21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
152	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	28.138.792.894,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
153	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.582.590.700,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	KEPEGAWAIAN	13.920.924.930,00	
154	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.666.624.930,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
155	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.628.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
156	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.550.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
157	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.300.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
	INSPEKTORAT DAERAH	13.499.499.239,00	
158	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.225.447.442,00	Inspektorat
159	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.251.778.064,00	Inspektorat
160	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.022.273.733,00	Inspektorat
	UNSUR KEWILAYAHAN		
	KECAMATAN CIMAHI UTARA	15.603.120.150,00	
161	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.471.610.300,00	Kecamatan Cimahi Utara
162	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	758.323.400,00	Kecamatan Cimahi Utara
163	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	314.654.100,00	Kecamatan Cimahi Utara

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pagu Indikatif (Rp)	
164	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	156.156.800,00	Kecamatan Cimahi Utara
165	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.902.375.550,00	Kecamatan Cimahi Utara
166	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.955.491.500,00	Kelurahan Cipageran
167	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.480.304.100,00	Kelurahan Cipageran
168	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	126.134.400,00	Kelurahan Cipageran
169	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.011.291.500,00	Kelurahan Citeureup
170	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.111.104.100,00	Kelurahan Citeureup
171	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	126.134.400,00	Kelurahan Citeureup
172	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.592.041.500,00	Kelurahan Cibabat
173	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.270.104.100,00	Kelurahan Cibabat
174	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	126.134.400,00	Kelurahan Cibabat
175	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.625.517.900,00	Kelurahan Pasirkaliki
176	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	666.954.100,00	Kelurahan Pasirkaliki
177	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	126.134.400,00	Kelurahan Pasirkaliki
	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	21.712.712.850,00	
178	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.187.274.900,00	Kecamatan Cimahi Tengah
179	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.266.626.200,00	Kecamatan Cimahi Tengah
180	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.389.185.750,00	Kecamatan Cimahi Tengah
181	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	424.247.500,00	Kecamatan Cimahi Tengah

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pagu Indikatif (Rp)	
182	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	445.378.500,00	Kecamatan Cimahi Tengah
183	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.463.562.560,00	Kelurahan Baros
184	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.032.124.450,00	Kelurahan Baros
185	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	187.098.500,00	Kelurahan Baros
186	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.260.404.570,00	Kelurahan Cigugur Tengah
187	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.129.777.900,00	Kelurahan Cigugur Tengah
188	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	155.913.000,00	Kelurahan Cigugur Tengah
189	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.096.191.818,00	Kelurahan Karangmekar
190	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	747.795.200,00	Kelurahan Karangmekar
191	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	150.578.350,00	Kelurahan Karangmekar
192	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.083.708.426,00	Kelurahan Setiamanah
193	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	804.459.700,00	Kelurahan Setiamanah
194	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	185.437.200,00	Kelurahan Setiamanah
195	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.786.174.960,00	Kelurahan Cimahi
196	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	509.920.900,00	Kelurahan Cimahi
197	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	172.606.500,00	Kelurahan Cimahi
198	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.442.602.100,00	Kelurahan Padasuka
199	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.353.048.000,00	Kelurahan Padasuka
200	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	167.765.000,00	Kelurahan Padasuka

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pagu Indikatif (Rp)	
	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	17.667.739.643,00	
201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.555.439.598,00	Kecamatan Cimahi Selatan
202	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	888.255.650,00	Kecamatan Cimahi Selatan
203	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	776.621.395,00	Kecamatan Cimahi Selatan
204	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	208.308.000,00	Kecamatan Cimahi Selatan
205	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	239.115.000,00	Kecamatan Cimahi Selatan
206	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.596.161.124,00	Kelurahan Cibeber
207	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	766.918.190,00	Kelurahan Cibeber
208	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	89.165.000,00	Kelurahan Cibeber
209	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.985.229.374,00	Kelurahan Leuwigajah
210	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.242.856.620,00	Kelurahan Leuwigajah
211	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	108.377.375,00	Kelurahan Leuwigajah
212	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.734.738.349,00	Kelurahan Utama
213	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	850.685.300,00	Kelurahan Utama
214	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	106.280.315,00	Kelurahan Utama
215	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.369.430.842,00	Kelurahan Melong
216	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.620.848.002,00	Kelurahan Melong
217	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.063.213,00	Kelurahan Melong
218	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.766.225.118,00	Kelurahan Cibeureum
219	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.446.616.500,00	Kelurahan Cibeureum

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pagu Indikatif (Rp)	
220	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.281.035,00	Kelurahan Cibeureum
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	67.305.763.550,00	
221	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.343.211.350,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
222	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.342.617.800,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
223	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	55.344.873.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
224	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	930.020.180,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
225	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	584.943.020,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
226	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.760.097.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH		1.533.554.858.887,21	

Bab ini juga mengemukakan secara eksplisit rencana program. kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan. kedudukan tahun rencana RKPD Kota Cimahi Tahun 2024 dan capaian kinerja yang direncanakan di dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Adapun rencana program. kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 terdapat pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran
Tahun 2024
(Tabel terlampir pada Buku II)

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dapat dilihat pada Tabel 6.1. dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan, dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Penetapan target IKU daerah dalam RKPD 2024, terdapat penyesuaian dari target IKU yang telah ditetapkan di tahun 2024 pada RPD, hal ini dilakukan karena adanya perubahan kondisi perekonomian pasca covid, terjadi beberapa perubahan asumsi target indikator makro di tahun 2024 berdasarkan ketercapaian di tahun 2022. Selain itu terjadi penyesuaian indikator berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro Nasional dalam Rancangan awal RKP 2024 dan Kerangka Ekonomi Daerah dalam Rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024, serta berdasarkan capaian target indikator makro pembangunan ekonomi Kota Cimahi di tahun 2022.

Beberapa target IKU yang dilakukan penyesuaiannya adalah; Indeks Kesehatan, Indeks Pengetahuan, Tingkat kemiskinan, Indeks gini, LPE, dan Tingkat Pengangguran Terbuka; seperti yang tercantum dalam Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal RPD	Target 2024 dalam RPD	Target 2024 Penyesuaian untuk RKPD
1	Indeks Kesehatan	83.40 Indeks	83.43 Indeks	83.95 Indeks
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77.21 indeks	77.30 indeks	77.30 indeks
3	Indeks Pengetahuan	75.29 indeks	75.29 indeks	75.94 indeks
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat	N/A persen	55 persen	55 persen
5	Tingkat Kemiskinan	5.35 persen	5.30 persen	5.01 persen
6	Indeks Gini	0.412 Point	0.406 Point	0.406 Point
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5.11 Persen	5,15-5,95 Persen	5,95 Persen

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal RPD	Target 2024 dalam RPD	Target 2024 Penyesuaian untuk RKPD
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	13.07 Persen	12.38 Persen	10.34 Persen
9	Indeks Resiko Bencana	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks
10	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	N/A	Sedang	Sedang
11	Indeks Reformasi Birokrasi	59,22 (CC) Indeks	60,75 (B) Indeks	60,75 (B) Indeks
12	Opini BPK	WTP	WTP	WTP

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
Persentase Peningkatan pemustaka aktif	1,81 persen	5 persen	Dinas Arsip Daerah
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang PAUD	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SD	1 ; 27 rasio	1 ; 27 rasio	
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SMP	1 : 29 rasio	1 : 29 rasio	
Rasio Guru terhadap Warga Belajar Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	
Rasio pengawas dan penilik PAUD	1,03 persen	3,20 persen	
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	67,64 persen	67,84 persen	Dinas Pendidikan
Angka Kesiapan sekolah	3,39 persen	4,5 persen	
Angka Partisipasi Murni (5 - 6 tahun)	33,87 persen	35 persen	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SDSD/MI/PaketA/SDLB	95,57 persen	95,75 persen	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/SMPLB	91,27 persen	91,47 persen	
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/PaketA/SDLB	90,83 persen	91,03 persen	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/SMPLB	83,03 persen	83,23 persen	
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/PaketA/SDLB	93,25 persen	93,45 persen	
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SM/MTs/Paket B/SMPLBP	87,53 persen	87,73 persen	
Angka Putus Sekolah SD	0,08 persen	0,06 persen	
Angka Putus Sekolah SMP	0,05 persen	0,04 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	67,64 persen	67,84 persen	
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	83,26 persen	83,46 persen	
Proporsi PTK bersertifikat dari PPG	43,69 persen	45 persen	
Pertumbuhan Proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/DIV	72,51 persen	73,5 persen	
Proporsi pendidik berijazah minimal S1/DIV	39,95 persen	41 persen	
Proporsi GTK bersertifikat (Jenjang SD)	49,85 persen	51 persen	
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	93,85 persen	93,94 persen	
Proporsi GTK bersertifikat (Jenjang SMP)	71,98 persen	72,80 persen	
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	95,86 persen	95,86 persen	
Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	85,48 persen	86,5 persen	
Persentase PKBM yang Terakreditasi	30,40 persen	34,78 persen	
Persentase SD yang Terakreditasi A	47 persen	55 persen	
Persentase SMP yang Terakreditasi A	64,50 persen	67,5 persen	
Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,88 nilai	2,28 nilai	
Rata-rata kemampuan numerasiSD berdasarkan asesmen nasional	1,87 nilai	2,27 nilai	
Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,88 nilai	2,28 nilai	
Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,75 nilai	2,05 nilai	
Standar kompetensi pendidikan PAUD	54,11 persen	55,5 persen	
Proporsi kepala satuan PAUD berijazah minimal S1/DIV	68,75 persen	70 persen	
Proporsi PTK dalam Diklat Teknis PAUD	31 persen	35 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diterapkan sesuai standar	100 persen	100 persen	Dinas Pendidikan
Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang diterapkan sesuai standar	100 persen	100 persen	
Persentase lembaga pendidikan yang mendapatkan izin	100 persen	100 persen	Dinas Pendidikan
Persentase lembaga pendidikan yang terbina dan terkendali	100 persen	100 persen	
Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Cibabat	77,83 indeks	80,25 indeks	Dinas Kesehatan
Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	196,08 angka	115,0 angka	
Rasio Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7,06 angka	6,2 angka	
Cakupan Imunisasi Booster (12-23 bulan)	N/A persen	70,8 persen	
Cakupan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	91,89 persen	93,5 persen	
Cakupan Jamaah Haji yang mendapat pemantauan kesehatan haji	100 persen	100 persen	
Cakupan Puskesmas dengan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di atas 0,28	N/A persen	9 persen	
Cakupan Rumah Tangga yang ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	56 persen	58 persen	
Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan di puskesmas	13 angka	13 angka	
Capaian Universal Health Coverage (UHC)	98,64 persen	98,65 persen	
Case Fatality Rate (CFR) Demam Berdarah Dengue (DBD)	3,6 angka	1 angka	
Insidensi HIV per 1000 Penduduk	N/A kasus	0,06 kasus	
Insidensi TB per 100.000 Penduduk	N/A kasus	302 kasus	
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani	100 persen	100 persen	
Persentase Kelurahan Open Defecation Free (ODF)	26,6 persen	86,6 persen	
Persentase pelayanan puskesmas terhadap penyakit yang diduga akibat kerja	35 persen	40 Spersen	
Persentase peserta pemeriksaan kebugaran yang mendapat konseling PNS	100 persen	100 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
Persentase puskesmas terakreditasi minimal Utama	53,85 persen	61,54 persen	
Persentasi Pengadaan Obat sesuai Formularium Nasional (FORNAS)	100 persen	100 persen	
Prevalensi Stunting pada Balita	10,18 persen	10,00 persen	
Rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	98,37 persen	100 persen	
Cakupan strata RW Siaga aktif minimal Purnama	68,91 persen	78,20 persen	Dinas Kesehatan
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar	100 persen	100 persen	Dinas Kesehatan
Persentase sarana kefarmasian dan penyediaan makanan dan minuman sesuai standar	100 persen	100 persen	Dinas Kesehatan
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapat pengawasan eksternal	100 persen	100 persen	
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	66,82 persen	69 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100 persen	100 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100 persen	100 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	85 persen	89 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
			Keluarga Berencana
Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender	70 persen	75 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100 persen	100 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
persentase kepesertaan keluarga dalam BKB	46,49 persen	47,5 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	29,72 persen	29,72 persen	
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	26,95 persen	27,5 persen	
Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R	9,12 persen	9,16 persen	
Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKA	0,87 persen	0,9 persen	
Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	0,36 persen	0,35 persen	
Rasio Akseptor KB MKJP (Memakai Kontrasepsi Jangka Panjang)	34,92 persen	35,92 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rata-rata Jumlah anak/keluarga	2,3 jiwa	2,3 jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	13 persen	12,5 persen	
Persentase kelurahan yang terbina	100 persen	100 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
			Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan Aktif	N/A persen	100 persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100 persen	100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persentase organisasi pemuda yg aktif	70 persen	72 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase anggota pramuka yang dibina (anggota kwarcab)	0 persen	14 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase kebudayaan yang dikembangkan	0 persen	50 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	N/A persen	50 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase SDM Sejarah Lokasi yang dibina	0 persen	25 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	0 persen	56 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase sumber daya olahraga yang terbina	0 persen	55 persen	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cimahi	0 persen	75 persen	
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Selatan

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
Yang Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Selatan			
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Selatan	85 persen	85 persen	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Tengah	85 persen	85 persen	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Utara	85 persen	85 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan trantib di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib yang dilaksanakan di Cimahi selatan	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib yang dilaksanakan di Cimahi Utara	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	- persen	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	N/A persen	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	100 persen	100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 persen	100 persen	
Persentase ketahanan ideologi dan karakter kebangsaan	N/A persen	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100 persen	100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM)	100 persen	100 persen	
Persentase wilayah terpantau	100 persen	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase kaderasi partai politik	N/A persen	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada	N/A persen	77,5 persen	
Persentase Jumlah RW yang terfasilitasi dalam PEMILU di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase Jumlah RW yang terfasilitasi dalam PEMILU di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase Jumlah RW yang terfasilitasi dalam PEMILU di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,5 Nilai Indeks	2,75 Nilai Indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase anggota DPRD yang mengikuti bimtek	N/A persen	100 persen	Sekretariat DPRD

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
Persentase penetapan anggaran tepat waktu	N/A persen	100 persen	
Persentase produk hukum daerah yang disahkan	N/A persen	60 persen	
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A persen	65 persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	95,23 persen	96,5 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 persen	100 persen	
Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan	100 persen	100 persen	
Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 persen	100 persen	
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	98,29 persen	99 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	86 persen	92 persen	
Persentase pengembangan inovasi	N/A persen	60 persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 persen	100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Indeks LAKE	35 Indeks	50 Indeks	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan melauai hak akses data	N/A persen	45 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	N/A persen	91 persen	
Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan profil kependudukan	100 persen	100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	71 (BB) Nilai	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Indeks	50,50 Indeks	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	BB Nilai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nilai IKM Perangkat Daerah	90,69 Nilai	81 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,5 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Nilai IKM Perangkat Daerah	80.45 nilai	81.05 nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50.2 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	73 Nilai	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Nilai IKM Perangkat daerah	N/A Nilai	76 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	64,10 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	A Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Nilai IKM Perangkat Daerah	80,82 Nilai	81,5 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	68,00 Nilai	
Nilai Sakip Perangkat Daerah	B Nilai	BB Nilai	Dinas Arsip Daerah
Nilai IKM Perangkat Daerah	75 Nilai	77 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	50 Nilai	52 Nilai	
Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Nilai	68 Nilai	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Nilai IKM Perangkat Daerah	0 Nilai	87,5 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	0 Nilai	51 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Indeks Profesionalitas ASN	46,33 Nilai	50,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Kesehatan
Nilai IKM Perangkat Daerah	80,50 Nilai	83,82 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	74,5 Nilai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	80,61 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Lingkungan Hidup
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	77,15 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	45 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Pangan dan Pertanian
Nilai IKM Perangkat Daerah	80,4 Nilai	80,5 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	46 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	72,5 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,5 Nilai	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
			Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	81 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50.2 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Pendidikan
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,5 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	60,75 (B) Nilai	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Nilai IKM Perangkat daerah	N/A Nilai	78,25 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,25 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Perhubungan
Nilai IKM Perangkat daerah	N/A Nilai	76,5 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	BB Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	Dinas Sosial
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,5 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Dinas Tenaga Kerja
Nilai IKM Perangkat daerah	86 nilai	86 nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A nilai	50,50 nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	Inspektorat
Nilai IKM Perangkat Daerah	94,81 Nilai	95,5 Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	71 (BB) Nilai	Kecamatan Cimahi Selatan
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	71 (BB) Nilai	Kecamatan Cimahi Tengah
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A Nilai	71 (BB) Nilai	Kecamatan Cimahi Utara
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	RSUD CIBABAT
Indeks Profesionalitas ASN	43,54 Nilai	50,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,50 Nilai	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Sekretariat DPRD
Nilai IKM Perangkat Daerah	N/A Nilai	B Nilai	
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,50 Nilai	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	N/A Ha	0,68 Ha	Dinas Perumahan dan

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
			Kawasan Permukiman
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	88 persen	89 persen	Cimahi Selatan
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	91 persen	91 persen	Cimahi Tengah
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	91 persen	91 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani di Kecamatan Cimahi Selatan	100 persen	100 persen	Cimahi Selatan
Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani di Kecamatan Cimahi Tengah	100 persen	100 persen	Cimahi Tengah
Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani di Kecamatan Cimahi Utara	100 persen	100 persen	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	30,00 persen	50 persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	27 persen	47 persen	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase hasil pengawasan	71 persen	85 persen	Inspektorat
Level Kapabilitas APIP	2 level	3 level	Inspektorat
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian)	79,00 Nilai	79,50 Nilai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Persentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	0,20 persen	0,19 persen	
Persentase ASN yang melaporkan SKP	78,30 persen	83,23 persen	
Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	7,50 persen	9,08 persen	
Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	2,08 persen	2,16 persen	
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	84 Nilai	84 Nilai	Sekretariat Daerah
Persentase Kasus Hukum yang terfasilitasi	100 persen	100 persen	
Persentase Kegiatan Agama dan Pendidikan yang Terlaksana	97 persen	97 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
Persentase Kegiatan bidang kesehatan P2KBP3A, Sosial, Kepemudaan dan Olahraga	71 persen	71 persen	
Persentase Pertanggungjawaban Dokumen Pemerintah Daerah yang Bernilai Baik	100 persen	100 persen	
Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi	100 persen	100 persen	
Persentase Produk Hukum yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	100 persen	100 persen	
Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Hukum	77 Nilai	77 Nilai	
Persentase terfasilitasinya bantuan hukum , penyusunan produk hukum sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan pendokumentasian produk hukum serta pengelolaan informasi hukum	100 persen	100 persen	
Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Pemerintahan	77 Nilai	77 Nilai	
Persentase ASN yang memenuhi syarat Kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	10,11 persen	10,15 persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Sekretariat Daerah
Indeks Profesionalitas ASN	N/A Nilai	50,50 Nilai	
Nilai IKM bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	78 Nilai	78 Nilai	
Nilai IKM pada Bagian Umum	80 Nilai	80 Nilai	
Persentase Kegiatan KDH dan WAKDH yang Terasilitas dengan Baik	100 persen	100 persen	
Persentase koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	100 persen	100 persen	
Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	100 persen	100 persen	
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 persen	100 persen	
Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	100 persen	100 persen	
Persentase Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas	100 persen	100 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
Nilai IKM bagian Administarsi Perekonomian	77 Nilai	77 Nilai	Sekretariat Daerah
Nilai IKM bagian Perekonomian dan SDA	77 Nilai	81 Nilai	
Nilai IKM pada Bagian Administrasi Pembangunan	77 Nilai	77 Nilai	
Nilai IKM pada bagian pengadaan barang dan jasa	79,05 Nilai	79,05 Nilai	
Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100 persen	100 persen	
Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100 persen	100 persen	
Persentase Rekomendasi terhadap Perusahaan Daerah yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A persen	85 persen	
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	100 persen	
Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	N/A persen	85 persen	
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	100 persen	100 persen	
Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Perekonomi dan SDA	N/A persen	85 persen	
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 persen	100 persen	
Persentase capaian indikator program	N/A persen	85 persen	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	
Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A Nilai	85 Nilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah destinasi yang terpromosikan	N/A lokasi	3 lokasi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola dengan sistem informasi penanaman modal	21 jenis	23 jenis	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	13,18 persen	3 persen	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Persentase Realisasi Pajak Daerah	117,74 persen	100 persen	
Persentase IKM yang dikelola di dalam SIINAS	N/A persen	100 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	N/A jenis	0 jenis	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah Sub Sektor Ekraf yang difasilitasi HAKI	N/A jenis	0 jenis	
Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti pameran promosi	30 persen	30 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal	N/A dokumen	8 dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase ASN yang Memenuhi Syarat Kompetensi	10,11 persen	11,11 persen	Badan Kepegawaian

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan			dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Jumlah SDM sub sektor ekraf yang dibina	N/A orang	50 orang	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah SDM Kepariwisata yang dibina	N/A orang	80 orang	
Persentase permohonan rekomendasi IUI kecil dan menengah yang dilayani	N/A persen	100 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	509 perusahaan	540 perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti P3DN	30 persen	30 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah daya tarik wisata yang terkelola dengan baik	N/A lokasi	2 lokasi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah pasar rakyat/tradisional yang dikelola pemerintah sesuai dengan SNI	1 pasar	1 pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah IKM yang Berdaya Saing	N/A IKM	120 IKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah Sentra Industri Pengolahan	2 Sentra	3 Sentra	
Persentase permohonan rekomendasi tanda daftar gudang yang dilayani	100 persen	100 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase Potensi Investasi Daerah yang dipromosikan	N/A	2,43 persen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	100 persen	100 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	55 persen	59 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase Koperasi Aktif	29,74 persen	33 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	16 persen	26 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase Koperasi yang mendapatkan fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan	11,15 persen	40,13 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah koperasi yang diawasi/diperiksa	150 Koperasi	25 Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	70 persen	70 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	278,9 ton	290 ton	Dinas Pangan dan Pertanian
Jumlah produksi ikan hias (dalam juta ekor)	2,312 juta ekor	2,375 juta ekor	
Persentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	N/A persen	100 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil	1 persen	2 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase Koperasi Sehat	41,25 persen	31 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	16 persen	26 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Rata-rata ketersediaan Energi di kota Cimahi	2318 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2350 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	Dinas Pangan dan Pertanian
Rata-rata ketersediaanProtein di kota Cimahi	67,8 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	67,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	
Rata-rata Konsumsi Energi di Kota Cimahi	2093,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2100 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	
Rata-rata Konsumsi Protein di Kota Cimahi	2093,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	
Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	25 persen	30 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana pendukung pertanian	N/A persen	100 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	10 persen	6 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	N/A persen	100 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	34,19 persen	37 persen	Dinas Tenaga Kerja
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	14,08 persen	15 persen	Dinas Tenaga Kerja
Persentase koordinasi pelaksanaan penempatan transmigrasi	N/A persen	100 persen	Dinas Tenaga Kerja
jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	1037 orang	1000 orang	Dinas Tenaga Kerja
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	N/A persen	90 persen	Dinas Tenaga Kerja
Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dasar rutilahu	100 persen	100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase LKS yang mendapatkan penguatan kelembagaan	65,38 persen	76,92 persen	Dinas Sosial
Persentase PPKS dan PSKS yang dididik, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis	20 persen	20 persen	
Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha	N/A persen	5 persen	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
			Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin	N/A persen	100 persen	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Bansos	20 persen	20 persen	Dinas Sosial
Persentase Anak terlantar yang tertangani	100 persen	100 persen	
Persentase KPM dalam DTKS yang masuk program PBI JK APBN dan APBD	30 persen	34 persen	
Persentase KPM PKH yang graduasi	3,75 persen	4,25 persen	
Persentase PPKS dengan kategori terlantar yang mendapat jaminan sosial daerah	100 persen	100 persen	
Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 persen	100 persen	Dinas Sosial
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 persen	100 persen	
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	100 persen	
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi hak dasarnya.	100 persen	100 persen	
Persentase kapasitas sungai dan bangunan penampung air	96,90 persen	97,06 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	80 persen	80 persen	
Persentase penanggung jawab dan/atau kegiatan yang memenuhi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Cimahi	50 persen	50 persen	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase pengelolaan sampah	94 persen	99 persen	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase penanganan timbulan sampah	73 persen	71 persen	Dinas Lingkungan Hidup

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
Persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	75 persen	58 persen	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase dokumen analisa kualitas lingkungan yang dijadikan acuan	N/A persen	100 persen	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dipedomani	100 persen	100 persen	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestic	80,55 persen	81,81 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase luas genangan di daerah rawan genangan dan di daerah tidak rawan genangan	0,6 persen	0,56 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	69,82 persen	69,20 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase Tingkat Hunian	100 persen	100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	100 persen	100 persen	
Persentase sarana permukiman yang tersedia PSU penunjang fungsi hunian	N/A persen	100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase rumah layak huni di luar kawasan kumuh	100 persen	100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase tingkat kemantapan jalan	94,87 persen	95,37 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	50 persen	64 persen	Dinas Perhubungan
Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	N/A persen	55 persen	
Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Layak	83 persen	86 persen	
Rasio Konektivitas Kota	0,64 rasio	0,64 rasio	
Persentase luasan kehati Kota Cimahi yang dikelola	1,13 persen	1,15 persen	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Penatagunaan tanah Aset Pemkot	N/A persen	50 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase termanfaatnya tanah kosong sesuai dengan fungsinya	N/A persen	50 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2024	
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	62 persen	62,4 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase Peyeleasaan ganti rugi dan santunan tanah yang di fasilitasi	N/A persen	50 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase Penyelesaian Sengketa Yang difasilitasi	N/A persen	50 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	72,5 persen	73,5 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi	13,44 persen	17,62 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 persen	100 persen	Dinas Sosial
Persentase SDM relawan kebencanaan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	100 persen	
Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	100 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase Pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana	100 persen	100 persen	
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 persen	100 persen	
Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100 persen	100 persen	

BAB VII PENUTUP

RKPD Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dan merupakan Rencana Pembangunan Tahun ke 2 (kedua) dari RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rencana pembangunan haruslah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, untuk mencapai sasaran program-program yang telah direncanakan di dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2024, seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip tersebut di dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, serta memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/ tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Kota Cimahi Tahun 2024 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2024. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang RKPD Kota Cimahi Tahun 2024. RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 10 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 717

LAMPIRAN II : BERITA DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 717 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 JULI 2023

TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran
Kota Cimahi
Tahun 2024

No	1	Kode	2	3	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	4	Target Akhir Periode Renstra OPD	5	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	6	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	7	Target 2024	8	Pagu Indikatif (Rp)	9	Lokasi	10	Sumber Dana	11	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																						12	13		14	15		16	17
					Dinas Pendidikan												371.449.839.442,00										0,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												371.449.839.442,00										0,00		
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												371.449.839.442,00										0,00		
1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												256.485.943.261,00								-		0,00		
	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							-			539.466.000,00			-	-		-	-	-	-	0,00		
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								3 Dokumen			60.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-				0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								2 Dokumen			6.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-				0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																							
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								2 Dokumen			6.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-				0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																							
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								2 Dokumen			8.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-				0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																							
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								2 Dokumen			8.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-				0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								21 Laporan			451.466.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-				0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							-			253.034.460.461,00			-	-		-		-		0,00		
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								2820 Orang/bulan			252.900.588.161,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-TAMSI L GURU PNSD, DAK NON FISIK-TPG PNSD	-	-		-				0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																							
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								2 Laporan			16.150.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-				0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								12 Laporan			117.722.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-				0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							-			175.422.500,00			-	-		-		-		0,00		
	1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																							
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								4 Dokumen			81.242.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-				0,00	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD													
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	14.600.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	48.080.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	23.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD													
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	8.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	399.820.100,00			-	-	-	-	0,00	
	1	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	87.400.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2097 Dokumen	3.600.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2097 Dokumen	50.400.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				161 Orang	258.420.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	599.001.900,00			-	-	-	-	0,00	
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	142.149.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.985.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	141.542.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	32.259.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				32 Dokumen	24.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	253.066.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	1.301.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	101.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
															Nasional	Daerah		12		13	14	15	16	17	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	1.200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	148.252.300,00			-	-	-	-	0,00						
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	86.365.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	61.887.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	288.520.000,00			-	-	-	-	0,00						
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit	130.770.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																			
						Jumlah Mebel yang Dipelihara					25 Unit	22.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					166 Unit	66.750.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	69.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	114.758.896.181,00						-	0,00						
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	56.442.346.143,00			-	-	-	-	0,00						
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					3 Ruang	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun					2 Ruang	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																			
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					2 Ruang	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					40 Unit	758.124.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					4 Ruang	137.604.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					4 Ruang	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					2 Ruang	131.324.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah																			
						Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia					8 Paket	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)							
															Nasional	Daerah										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																				
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia					400 Paket	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																				
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					500 Peserta Didik	630.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																				
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia					20 Paket	250.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																				
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					2435 Peserta Didik	550.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																				
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					882 Orang	3.365.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																				
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					16 Orang	47.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																				
						Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah					116 Satuan Pendidikan	80.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																				
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					113 Satuan Pendidikan	44.501.700.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																				
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					339 Orang	313.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																				
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					232 Orang	150.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					4 Dokumen	60.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																				
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					2 Dokumen	16.068.243,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																				
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi					43 Komunitas	9.589.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																				
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					1000 Paket	800.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																				
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					5 Ruang	1.800.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				12 Unit	1.200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				180 Orang	250.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik													
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar				116 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	1.292.436.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-		-	37.046.486.243,00			-	-	-	-	0,00	
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)													
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	2.505.073.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	549.025.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	2.000.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah													
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	152.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama													
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2300 Peserta Didik	2.650.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				5 Paket	325.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2305 Peserta Didik	400.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				316 Orang	1.600.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				3 Orang	30.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajiemn Sekolah																			
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				43 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				46 Satuan Pendidikan	25.689.320.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				92 Orang	60.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				96 Orang	120.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	16.068.243,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				10 Komunitas	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				22050 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				24 Ruang	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				135 Orang	180.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				9700 Paket	400.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-		-	12.711.477.795,00			-	-	-	-	0,00							
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				0 Unit	1.594.653.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD																			
						Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat				0 Unit	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD													
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1000 Peserta Didik	600.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD													
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				5 Paket	120.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD													
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				0 Peserta Didik	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD													
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1609 Orang	3.655.236.552,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD													
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	150.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD													
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				306 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD													
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				306 Satuan Pendidikan	5.855.520.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD													
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				306 Orang	30.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	55.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	16.068.243,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan													
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				40 Komunitas	140.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				280 Orang	145.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1200 Paket	150.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-		-	8.558.586.000,00			-	-	-	-	0,00	
	1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan													
						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	554.356.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				250 Orang	455.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	150.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				47 Satuan Pendidikan	19.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				18 Satuan Pendidikan	3.640.730.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				36 Orang	25.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan													
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				6 Komunitas	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2300 Paket	149.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				40 Orang	60.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				2600 Peserta Didik	3.455.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-		-	100.000.000,00						-	0,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-		-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional	Daerah									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-		-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00						
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				6 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-		-	75.000.000,00						-	0,00						
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-		-	75.000.000,00			-	-	-	-	0,00						
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	25.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-		-	30.000.000,00						-	0,00						
	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-		-	10.000.000,00			-	-	-	-	0,00						
	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
						Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				16 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-		-	20.000.000,00			-	-	-	-	0,00						
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				66 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				66 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
	1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				354 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
						Dinas Kesehatan					111.269.166.730,00							108.223.508.430,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					111.269.166.730,00							108.223.508.430,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					111.269.166.730,00							108.223.508.430,00	
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	54.488.948.498,00						-	54.399.252.898,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	261.386.100,00			-	-	-	-	261.386.100,00	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	175.140.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.140.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	86.245.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		86.245.400,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	52.342.641.998,00			-	-	-	-	52.343.241.998,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				416 Orang/bulan	52.047.566.998,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.047.566.998,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN													
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3 Laporan	295.075.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		295.675.000,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD													
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	159.860.200,00			-	-	-	-	159.945.000,00	
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				85 Paket	24.785.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.905.000,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan													
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				23 Orang	135.075.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.040.000,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	648.503.200,00			-	-	-	-	648.533.800,00	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	10.002.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.002.600,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2 Paket	137.175.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		137.175.600,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	22.884.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.884.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	150.133.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.133.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	153.382.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		153.382.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	174.926.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		174.956.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	20.136.000,00			-	-	-	-	20.135.000,00	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	20.136.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.135.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	279.771.000,00			-	-	-	-	279.771.000,00	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	179.771.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		179.771.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	776.650.000,00			-	-	-	-	686.240.000,00	
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	491.140.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
	Nasional	Daerah	12	13	14											15	16				17	
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	285.510.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	286.240.000,00	DINAS KESEHATAN			
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih S ehat (PHBS) Capaian Universal Health Coverage (UHC) Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan di Puskesmas Case Fatality Rate (CFR) Demam Berdarah Dengue (DBD) Insidensi HIV (Per 1000 Penduduk) Persentase peserta pemeriksaan kebugaran yang mendapat konseling PNS Persentase puskesmas terakreditasi minimal Utama Persentasi Pengadaan Obat sesuai Formularium Nasional (FORNAS) Prevalensi Stunting pada balita Cakupan Imunisasi Booster (12-23 bulan) Cakupan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Cakupan Jamaah Haji yang mendapat pemantauan kesehatan haji Cakupan Puskesmas dengan capaian Indeks Keluarga	-			59 persen 98.70 persen 13 Puskesmas <1 angka 0,05 Rasio 100 persen 61.54 persen 100 persen 9,9 persen 75,5 Persen 94 Persen 100 Persen 10 Puskesmas 296 Rasio 100 Persen 93,3 persen 45 Persen 6,1 rasio 114,9 rasio 100 persen	55.862.201.182,00					-	53.184.496.082,00				
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8.975.142.200,00			-	-	-	5.983.335.400,00				
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas																
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				0 Unit	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	350.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	750.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	4.142.556.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	500.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	3.749.999.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3.749.999.000,00	DINAS KESEHATAN			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas					12 Keluarga	232.586.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		232.586.400,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	46.328.311.682,00			-	-	-	-	46.444.704.682,00					
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					10559 Orang	489.524.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		489.524.900,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					10518 Orang	832.650.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		832.650.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					9991 Orang	129.995.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		129.995.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					27395 Orang	701.569.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		701.569.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					71129 Orang	647.875.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		647.875.500,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					248977 Orang	258.451.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		258.451.400,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					36215 Orang	251.768.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		251.768.400,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					56576 Orang	139.136.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		139.136.400,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					10039 Orang	116.044.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		116.044.400,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					1132 Orang	221.864.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		221.864.900,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					4596 Orang	337.479.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		337.479.300,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					7516 Orang	289.050.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		289.050.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	1.069.450.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.069.450.800,00	DINAS KESEHATAN				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	194.698.898,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		194.698.898,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	361.044.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		361.044.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	1.111.928.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.111.928.300,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	147.309.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		147.309.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	910.692.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		910.692.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	24.919.680.002,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.919.680.002,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				12 Dokumen	119.952.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		119.952.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	11.000.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-	-		11.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		116.393.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota													
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				6 Unit	120.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	352.772.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		352.772.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)													
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1.084.201.182,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.084.201.182,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1860 Orang	147.172.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		147.172.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				65 Orang	154.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		154.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				30 Orang	220.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-		-	356.456.000,00			-	-	-	-	356.456.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional	Daerah									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen	356.456.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	356.456.000,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	202.291.300,00				-	-	-	400.000.000,00						
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan					13 Unit	202.291.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN					
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	-	436.348.600,00						-	377.150.000,00						
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	436.348.600,00				-	-	-	377.150.000,00						
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					12 Dokumen	436.348.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	377.150.000,00	DINAS KESEHATAN					
9	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	-	-	61.703.950,00						-	61.703.950,00						
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	-	20.850.000,00				-	-	-	20.850.000,00						
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					12 Dokumen	20.850.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20.850.000,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	-	-	40.853.950,00				-	-	-	40.853.950,00						
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					12 Dokumen	40.853.950,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	40.853.950,00	DINAS KESEHATAN					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	419.964.500,00					-	200.905.500,00		
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	419.964.500,00			-	-	-	200.905.500,00		
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masvarakat														
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masvarakat					12 Dokumen	419.964.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	200.905.500,00	DINAS KESEHATAN	
						Puskesmas Padasuka						1.870.538.000,00							1.870.538.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.870.538.000,00							1.870.538.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.870.538.000,00							1.870.538.000,00	
11	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.870.538.000,00					-	1.870.538.000,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.870.538.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-	1.870.538.000,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1.870.538.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah - Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-	1.870.538.000,00	PUSKESMAS PADASUKA	
						Puskesmas Melong Asih						1.469.358.200,00							1.469.358.200,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.469.358.200,00							1.469.358.200,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.469.358.200,00							1.469.358.200,00	
12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.469.358.200,00					-	1.469.358.200,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.469.358.200,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-	1.469.358.200,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1.469.358.200,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Melong	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-	1.469.358.200,00	PUSKESMAS MELONG ASIH	
						Puskesmas Melong Tengah						932.004.400,00							932.004.400,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						932.004.400,00							932.004.400,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						932.004.400,00							932.004.400,00	
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	932.004.400,00					-	932.004.400,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	932.004.400,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-	932.004.400,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	932.004.400,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Melong	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-	932.004.400,00	PUSKESMAS MELONG TENGAH	
						Puskesmas Cigugur Tengah						1.486.834.700,00							1.486.834.700,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.486.834.700,00							1.486.834.700,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.486.834.700,00							1.486.834.700,00	
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.486.834.700,00					-	1.486.834.700,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.486.834.700,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-	1.486.834.700,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1.486.834.700,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros - Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-	1.486.834.700,00	PUSKESMAS CIGUGUR TENGAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Puskesmas Cimahi Selatan						1.580.201.200,00							1.580.201.200,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.580.201.200,00							1.580.201.200,00		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.580.201.200,00							1.580.201.200,00		
15	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	1.580.201.200,00						-	1.580.201.200,00		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	1.580.201.200,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-	-	1.580.201.200,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.580.201.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-		1.580.201.200,00	PUSKESMAS CIMAHI SELATAN	
					Puskesmas Cipageran						1.672.618.650,00							1.672.618.650,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.672.618.650,00							1.672.618.650,00		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.672.618.650,00							1.672.618.650,00		
16	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	1.672.618.650,00						-	1.672.618.650,00		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	1.672.618.650,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-	-	1.672.618.650,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.672.618.650,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-		1.672.618.650,00	PUSKESMAS CIPAGERAN	
					Puskesmas Cimahi Tengah						1.622.904.400,00							1.622.904.400,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.622.904.400,00							1.622.904.400,00		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.622.904.400,00							1.622.904.400,00		
17	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	1.622.904.400,00						-	1.622.904.400,00		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	1.622.904.400,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-	-	1.622.904.400,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.622.904.400,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar - Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-		1.622.904.400,00	PUSKESMAS CIMAHI TENGAH	
					Puskesmas Citeureup						1.345.689.300,00							1.345.689.300,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.345.689.300,00							1.345.689.300,00		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.345.689.300,00							1.345.689.300,00		
18	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	1.345.689.300,00						-	1.345.689.300,00		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	1.345.689.300,00			-	-	-	-	1.345.689.300,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.345.689.300,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Citeureup	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		1.345.689.300,00	PUSKESMAS CITEUREUP	
					Puskesmas Cimahi Utara						2.192.051.650,00							2.192.051.650,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.192.051.650,00							2.192.051.650,00		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.192.051.650,00							2.192.051.650,00		
19	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	2.192.051.650,00						-	2.192.051.650,00		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	2.192.051.650,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-	-	2.192.051.650,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.192.051.650,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-		2.192.051.650,00	PUSKESMAS CIMAHI UTARA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															12	13		14	15	16
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Puskesmas Pasirkaliki						707.609.400,00							707.609.400,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						707.609.400,00							707.609.400,00		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						707.609.400,00							707.609.400,00		
20	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	707.609.400,00						-	707.609.400,00		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	707.609.400,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-	-	707.609.400,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	707.609.400,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-		707.609.400,00	PUSKESMAS PASIRKALIKI	
					Puskesmas Cibeureum						1.941.194.300,00							1.941.194.300,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.941.194.300,00							1.941.194.300,00		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.941.194.300,00							1.941.194.300,00		
21	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	1.941.194.300,00						-	1.941.194.300,00		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	1.941.194.300,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-	-	1.941.194.300,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.941.194.300,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-		1.941.194.300,00	PUSKESMAS CIBEUREUM	
					Puskesmas Cibeber						940.798.000,00							940.798.000,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						940.798.000,00							940.798.000,00		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						940.798.000,00							940.798.000,00		
22	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	940.798.000,00						-	940.798.000,00		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	940.798.000,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-	-	940.798.000,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	940.798.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-		940.798.000,00	PUSKESMAS CIBEBER	
					Puskesmas Leuwigajah						1.184.844.900,00							1.184.844.900,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.184.844.900,00							1.184.844.900,00		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.184.844.900,00							1.184.844.900,00		
23	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	1.184.844.900,00						-	1.184.844.900,00		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	1.184.844.900,00			-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-	-	1.184.844.900,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.184.844.900,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	-		1.184.844.900,00	PUSKESMAS LEUWIGAJAH	
					RSUD CIBABAT						195.315.972.468,00							203.627.613.000,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						195.315.972.468,00							203.627.613.000,00		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						195.315.972.468,00							203.627.613.000,00		
24	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	50.315.972.468,00						-	58.627.613.000,00		
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	50.315.972.468,00			-	-	-	-	58.627.613.000,00		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				505 Orang/bulan	50.315.972.468,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		58.627.613.000,00	RSUD CIBABAT	
25	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	145.000.000.000,00						-	145.000.000.000,00		
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	145.000.000.000,00			-	-	-	-	145.000.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit					1 Dokumen	145.000.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		145.000.000.000,00	RSUD CIBABAT
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						38.980.370.443,00							44.816.646.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						38.425.260.443,00							44.261.536.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						38.425.260.443,00							44.261.536.000,00	
26	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	9.516.259.200,00						-	9.695.921.200,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	71.779.800,00			-	-	-	-	71.779.800,00	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9 Dokumen	67.279.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		67.279.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Laporan	4.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			n/a	8.671.984.500,00			-	-	-	-	8.922.500.492,00	
						Dokumen Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran, Iuran Asuransi THL, Upah Jasa THL, Pembayaran Gaji ASN, Pembayaran TPP ASN														
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	8.623.264.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.873.780.792,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	999.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		999.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					17 Laporan	47.719.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		47.719.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	21.000.000,00			-	-	-	-	34.818.208,00	
	1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					84 Orang	21.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		34.818.208,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	443.852.900,00			-	-	-	-	359.180.700,00	
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	62.221.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.221.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	154.725.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		124.725.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	27.905.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.743.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					385 Dokumen	24.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	131.490.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	175.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	89.625.000,00			-	-	-	-	89.625.000,00					
	1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	89.625.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		89.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	218.017.000,00			-	-	-	-	218.017.000,00					
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	89.940.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		89.940.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24 Laporan	28.200.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	99.877.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		99.877.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
27	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	7.647.956.143,00			-	-	-	-	14.415.614.800,00					
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	7.647.956.143,00			-	-	-	-	14.415.614.800,00					
	1	03	08	2.01	0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan					1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan					0 Bangunan Gedung	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala					3 Bangunan Gedung	924.695.443,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
						Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung					1 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota					5 Bantuan Teknis	15.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan,	Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				8 Dokumen	5.458.260.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.200.614.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
	1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				25 Orang	150.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				62 Dokumen	1.000.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	-			73,5 Persentase	0,00					-	-	0,00	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	undefined	-			undefined	0,00			-	-	-	-	0,00	
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				0 Kawasan	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	-			95,62 %	18.886.045.100,00					-	-	18.150.000.000,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kota dalam kondisi mantap	-			n/a	18.886.045.100,00			-	-	-	-	18.150.000.000,00	
	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				3 Dokumen	300.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				11 Dokumen	1.150.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				5 KM	950.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				0 KM	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				5 KM	10.586.045.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar														
						Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar					0,1 KM	2.000.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
						Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin					5 Jembatan	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan														
						Jumlah Jembatan yang Dibangun					0 Jembatan	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
						Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya					105 KM	700.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin					5 KM	3.000.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0048	Pelebaran Jembatan														
						Jumlah Jembatan yang Dilebarkan					1 Jembatan	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi	-			17,62 Persentase	1.000.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	600.000.000,00			-	-	-		600.000.000,00	
	1	03	11	2.01	0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
						Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan					1 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi					50 Orang	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya					25 Lembaga	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
						Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan					0 Orang	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih					50 Orang	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	-	-		250.000.000,00	
	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
						Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan					1 Perangkat Pendukung	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				2 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-		-	150.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	
	1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota													
						Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				1 Bangunan Konstruksi	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi													
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				25 Lembaga	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-		-	1.375.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-		-	300.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang													
						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota													
						Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang													
						Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				300 Orang	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	200.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	
	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang													
						Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	400.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang													
						Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				49 Layanan	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang													
						Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				2 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	475.000.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				48 Dokumen	225.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				26 Dokumen	150.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				2 Berita Acara	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	X					NON URUSAN						555.110.000,00							555.110.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						555.110.000,00							555.110.000,00	
32	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	555.110.000,00					-		555.110.000,00	
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	555.110.000,00			-	-	-	-	555.110.000,00	
	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	555.110.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		555.110.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						BLUD Air Minum						0,00							0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						0,00							0,00	
33	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	-	-	-	0,00					-		0,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	0,00	
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		0,00	BLUD AIR MINUM
						UPTD Pemakaman						1.020.000.000,00							1.020.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.020.000.000,00							1.020.000.000,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						1.020.000.000,00							1.020.000.000,00	
34	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	1.020.000.000,00					-		1.020.000.000,00	
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	1.020.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	1.020.000.000,00	
	1	04	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				10,6583 Ha	1.020.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		1.020.000.000,00	UPTD PEMAKAMAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa						3.994.906.960,00							3.994.906.960,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.994.906.960,00							3.994.906.960,00	
	1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						3.994.906.960,00							3.994.906.960,00	
35	1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	3.994.906.960,00						-	3.994.906.960,00	
	1	04	02	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-			-	3.994.906.960,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	3.994.906.960,00	
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun				12 Laporan	3.994.906.960,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		3.994.906.960,00	UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
					UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik						2.900.000.000,00							2.963.737.600,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.900.000.000,00							2.963.737.600,00	
	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2.900.000.000,00							2.963.737.600,00	
36	1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	2.900.000.000,00						-	2.963.737.600,00	
	1	03	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.900.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	2.963.737.600,00	
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Pervedotan Lumpur Tinja													
						Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				6500 Rumah Tangga	776.872.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		776.872.400,00	UPTD SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
	1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja													
						Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				2 Unit	686.865.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		686.865.200,00	UPTD SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				15 Unit	1.436.262.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		1.500.000.000,00	UPTD SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						64.626.666.996,00							64.618.451.268,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						64.526.666.996,00							64.518.451.268,00	
	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						31.074.847.423,00							31.074.847.423,00	
37	1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	11.498.618.291,00						-	11.498.618.291,00	
	1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.798.618.291,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	10.798.618.291,00	
	1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai													
						Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				15.075 KM	2.665.618.291,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		2.665.618.291,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi													
						Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	282.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		282.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	02	2.01	0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	60.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				200 KM	7.165.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		7.165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				1 Unit	70.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				10 Dokumen	80.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0123	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				150 KM	426.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		426.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	700.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	700.000.000,00	
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				150 KM	250.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				1 Bendung	70.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																			
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara					3.250 KM	380.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		380.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
38	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	5.725.779.132,00					-		5.725.779.132,00						
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.725.779.132,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	5.725.779.132,00						
	1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																			
						Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					60 Orang	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																			
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun					3 Dokumen	1.043.858.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		1.043.858.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi					3 Unit	600.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
						Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					1000 SR	3.981.921.132,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		3.981.921.132,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
39	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	9.715.450.000,00					-		9.715.450.000,00						
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.715.450.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	9.715.450.000,00						
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																			
						Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun					420 M³/Hari	4.200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		4.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	1	03	05	2.01	0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																			
						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi					30 Unit	400.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	1	03	05	2.01	0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa																			
						Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					220 Desa	215.450.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		215.450.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																			
						Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun					0 M³/Hari	3.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah		12		13	14	15
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				239 Rumah Tangga	1.600.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		1.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				10 Orang	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				10 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
40	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	4.135.000.000,00					-		4.135.000.000,00			
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.135.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	4.135.000.000,00			
	1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				8 Dokumen	115.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		115.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				405 Sistem Drainase Perkotaan	1.100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	06	2.01	0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan																
							Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	06	2.01	0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan																
							Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya				1 Kawasan Genangan	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				405 Sistem Drainase Perkotaan	700.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				200 Sistem Drainase Perkotaan	1.210.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		1.210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				37745 Sistem Drainase Perkotaan	810.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		810.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						33.451.819.573,00							33.443.603.845,00	
41	1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	12.843.537.252,00						-	12.835.321.524,00	
	1	04	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	187.883.528,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	179.667.800,00	
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	94.290.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		94.290.800,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	93.592.728,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		85.377.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.294.990.324,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	9.294.990.324,00	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	9.287.202.224,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		9.287.202.224,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.788.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		7.788.100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	98.980.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	98.980.000,00	
	1	04	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	98.980.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		98.980.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	340.900.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	340.900.000,00	
	1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				306 Orang	340.900.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		340.900.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	611.580.400,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	611.580.400,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.956.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		1.956.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	216.749.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		216.749.200,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.110.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		26.110.300,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	86.984.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		86.984.900,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	24.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		24.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	205.780.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		205.780.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	417.300.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	417.300.000,00	
	1	04	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	417.300.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		417.300.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	742.373.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	742.373.000,00	
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	117.660.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		117.660.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	581.972.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	581.972.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	42.741.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	42.741.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.149.530.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	1.149.530.000,00		
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	1.072.530.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	1.072.530.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				105 Unit	77.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	77.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
42	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	437.124.921,00					-	437.124.921,00		
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	437.124.921,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	437.124.921,00		
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				20 Unit Rumah	437.124.921,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	437.124.921,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
43	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	8.246.157.400,00					-	8.246.157.400,00		
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	1.140.157.400,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	1.140.157.400,00		
	1	04	03	2.02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				15 Laporan	448.725.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	448.725.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				2 Dokumen	247.932.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	247.932.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				5 Kelompok Masyarakat	240.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	240.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				2 Dokumen	203.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		203.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	7.106.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	7.106.000.000,00	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				141 Unit Rumah	7.106.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		7.106.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
44	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-			-	2.125.000.000,00						-	2.125.000.000,00	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.125.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	2.125.000.000,00	
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				45 Unit Rumah	2.125.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		2.125.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
45	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	9.800.000.000,00						-	9.800.000.000,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	9.800.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	9.800.000.000,00	
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				4 Lokasi	4.000.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		4.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				3 Laporan	5.800.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		5.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00						100.000.000,00		
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						100.000.000,00						100.000.000,00		
46	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-			-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	100.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	10	04	2.01	0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					5 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran						28.576.097.475,00							38.604.998.878,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						28.576.097.475,00							38.604.998.878,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						28.576.097.475,00							38.604.998.878,00	
47	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	19.002.477.775,00						-	25.843.692.223,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	736.724.300,00			-	-	-	-	603.863.563,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	109.814.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		193.129.275,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					4 Dokumen	31.780.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		28.516.378,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12 Laporan	595.129.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		382.217.910,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.214.174.339,00			-	-	-	-	21.754.218.859,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					121 Orang/bulan	15.118.174.680,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.643.819.491,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	14.037.059,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		16.142.493,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	81.962.600,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		94.256.875,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	317.767.000,00			-	-	-	-	571.104.260,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					3 Paket	144.115.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		331.464.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					205 Orang	173.652.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		239.639.760,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	447.427.100,00			-	-	-	-	560.264.199,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	10.892.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		12.526.260,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
												Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional	Daerah									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	155.443.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	135.166.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-								
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	60.996.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	44.200.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-								
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	87.587.979,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	76.169.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-								
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	6.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.000.000,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-								
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	236.810.760,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	175.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-								
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	247.046.000,00			-	-	-	-	354.200.000,00						
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	170.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	26.556.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-								
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	184.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	220.490.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-								
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	406.252.000,00			-	-	-	-	525.730.320,00						
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	58.788.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	44.610.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-								
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	77.278.620,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	67.198.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-								
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	389.663.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	294.444.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-								
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	1.633.087.036,00			-	-	-	-	1.474.311.022,00						
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	1.402.551.022,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				133 Unit	1.596.758.440,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-								
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	71.760.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	36.328.596,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-								
48	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		-	4.423.554.500,00						-	7.288.664.000,00						
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	3.433.200.500,00			-	-	-	-	6.110.000.000,00						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen	48.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum													
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10 Dokumen	634.450.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				6 Dokumen	288.600.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				750 Laporan	2.442.020.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah													
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	20.130.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-		-	942.684.000,00			-	-	-	-	1.110.994.000,00	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				14 Laporan	261.690.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		310.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				13 Laporan	620.994.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		720.994.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				14 Laporan	60.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-		-	47.670.000,00			-	-	-	-	67.670.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	47.670.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		67.670.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
49	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	5.150.065.200,00						-	5.472.642.655,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.478.700.700,00			-	-	-	-	4.837.750.655,00	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				12 Dokumen	1.505.351.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.096.928.380,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	2.638.847.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.259.589.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	334.502.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		481.233.025,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	367.500.000,00			-	-	-	-	404.892.000,00	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkung an yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				12 Dokumen	209.700.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		248.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkung an yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				12 Dokumen	157.800.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		156.492.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	303.864.500,00			-	-	-	-	230.000.000,00	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				1000 Orang	303.864.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah						7.435.286.000,00							7.640.843.150,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.435.286.000,00							7.640.843.150,00	
	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						7.435.286.000,00							7.640.843.150,00	
50	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.378.948.050,00						-	4.560.843.150,00	
	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	93.730.350,00			-	-	-	-	53.748.000,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	64.265.350,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		39.323.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Laporan	29.465.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		14.425.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.710.699.352,00			-	-	-	-	2.881.018.150,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.679.551.352,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.840.843.150,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD				14 Laporan	31.148.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		40.175.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	48.971.500,00			-	-	-	-	44.300.000,00	
	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9 Dokumen	48.971.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		44.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	94.736.000,00			-	-	-	-	140.266.000,00	
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	32.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				37 Orang	62.236.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		110.266.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	494.420.900,00			-	-	-	-	404.340.500,00	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	116.030.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		71.336.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	147.675.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		102.966.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	55.715.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		55.037.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	175.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		175.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	315.805.000,00			-	-	-	-	348.567.400,00	
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	315.805.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		348.567.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	242.238.564,00			-	-	-	-	461.594.000,00	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	57.525.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		52.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	31.045.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		80.752.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	153.668.564,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		328.342.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	378.346.384,00			-	-	-	-	227.009.100,00	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					9 Unit	207.870.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		207.870.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					1 Unit	170.476.384,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		19.139.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
51	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	3.056.337.950,00						-	3.080.000.000,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	375.000.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
						Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal					1 Dokumen	75.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun					500 Orang	300.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	1.354.248.550,00			-	-	-	-	1.600.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan													
						Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				4 Kawasan	120.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota													
						Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				80 Orang	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi													
						Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	105.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
						Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				300 Orang	166.079.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana													
						Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				1 Dokumen	105.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam													
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				200 Keluarga	85.358.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota													
						Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	80.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota													
						Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				10 Unit	279.881.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota													
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				200 Kawasan	150.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota													
						Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	162.929.750,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-		-	911.095.400,00			-	-	-	-	880.000.000,00	
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				2 Dokumen	30.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				500 Orang	655.650.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-							
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				500 Orang	175.445.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-							
	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-							
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-		-	415.994.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00					
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				12 Dokumen	210.988.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-							
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan				1 Kegiatan	205.006.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-							
						Dinas Sosial					15.037.536.975,00							15.282.955.311,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																15.282.955.311,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																15.282.955.311,00	
52	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase Unit Kerja yang mendapatlan pelayanan umum Indeks Profesionalitas ASN	-		50 Nilai 100 Persen 51 Nilai	6.482.232.825,00						-	6.746.547.211,00					
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	-		2 Kegiatan	106.463.200,00			-	-	-	-	106.463.000,00					
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	53.023.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		53.023.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	53.440.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		53.440.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	fasilitasi Gaji ASN dan tunjangan	-		26 orang	5.082.384.352,00			-	-	-	-	5.470.696.511,00					
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	5.033.674.252,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.421.986.511,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Alkhir Tahun SKPD				2 Laporan	48.710.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48.710.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah jam pelajaran bimbingan teknis kompetensi yang diikuti oleh ASN	-		20 JP	235.498.000,00			-	-	-	-	173.090.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-			23 Orang	235.498.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		173.090.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tahun fasilitasi penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-			1 Tahun	348.692.025,00			-	-	-	-	304.964.700,00	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	8.565.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.565.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	120.526.025,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		106.373.100,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	44.414.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.414.600,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-			1 Paket	27.592.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.593.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-			1 Laporan	9.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			1 Laporan	138.594.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		124.019.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Tahun Fasilitasi sewa gedung/kantor	-			1 Tahun	353.000.000,00			-	-	-	-	432.000.000,00	
	1	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			3 Unit	353.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		432.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tahun Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Tahun	185.405.000,00			-	-	-	-	131.223.000,00	
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			1 Laporan	68.100.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Laporan	14.730.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-		14.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			1 Laporan	102.575.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		56.323.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah	-			2 unit	170.790.248,00			-	-	-	-	128.110.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	170.790.248,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		128.110.000,00	DINAS SOSIAL
53	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase LKS yang mendapatkan penguatan kelembagaan Prosentase PPKS dan PSKS yang dididik yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis	-		92,31 persen 20 persen	2.095.605.700,00					-		2.018.899.000,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota dalam meningkatkan kemampuannya	-		28 orang	2.095.605.700,00			-	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Masyarakat Kota Cimahi	-	2.018.899.000,00	
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				18 Orang	828.375.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Masyarakat Kota Cimahi		829.033.800,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	146.944.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	Masyarakat Kota Cimahi		169.624.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Lembaga	895.244.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Masyarakat Kota Cimahi		796.897.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)													
						Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Sertifikat	225.042.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Masyarakat Kota Cimahi		223.344.000,00	DINAS SOSIAL
54	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar Prosentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti	-		100 Persen 100 persen	1.451.346.950,00					-		1.528.411.900,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial	-		100 Persen	1.391.714.450,00			-	-	-	-	1.468.554.400,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan													
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				865 Orang	103.960.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		103.440.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang														
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					870 Orang	135.090.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		135.090.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					84 Orang	173.511.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		173.550.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					16 Orang	9.600.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota					700 Orang	666.833.250,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		667.166.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					450 Orang	178.022.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota					24 Orang	5.400.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota					24 Orang	5.400.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota					24 Orang	65.378.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	-		82.813.400,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota					144 Orang	34.680.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.315.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					24 Orang	6.920.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	-		7.200.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	6.920.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.480.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-			100 Persen	59.632.500,00			-	-	-	-	59.857.500,00	
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	8.327.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.327.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	7.200.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	20.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24.105.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.330.000,00	DINAS SOSIAL
55	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase anak terlantar yang tertangani Prosentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Bansos	-			100 persen 20 persen	4.175.667.300,00						-	4.309.430.000,00	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya kegiatan penanganan anak-anak terlantar	-			3 Kegiatan	145.616.900,00			-	-	-	-	145.617.000,00	
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	63.365.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		81.978.100,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	21.323.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.323.900,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	60.927.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.315.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tahun Fasilitasi kegiatan pengelolaan dan pemutakhiran data	-			1 Tahun	4.030.050.400,00			-	-	-	-	4.163.813.000,00	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				40000 Orang	515.050.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		526.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				10000 Keluarga	207.519.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		307.613.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1500 Keluarga	3.227.481.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-		-		3.250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	80.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-		-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL
56	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota Prosentase SDM relawan kebencanaan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-			100 persen 100 persen	832.684.200,00						-	679.667.200,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	-			100 Persen	191.250.000,00			-	-	-	-	136.700.000,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	70.050.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-		-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	54.800.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-		-		54.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Unit	30.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-		Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	24.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-		-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	11.900.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-		-		11.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	-			12 bulan	641.434.200,00			-	-	-	-	542.967.200,00	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	59.427.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-		-	-	59.427.200,00	DINAS SOSIAL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana													
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	582.007.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		483.540.000,00	DINAS SOSIAL
						Dinas Tenaga Kerja					11.296.512.607,00							11.240.792.607,00	
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.296.512.607,00							11.240.792.607,00	
		2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					11.296.512.607,00							11.240.792.607,00	
57	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	6.239.207.217,00						-	6.239.207.217,00	
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	207.768.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	207.768.200,00	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	101.978.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		101.978.800,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	6.043.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		6.043.700,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.462.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		6.462.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.394.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		3.394.900,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.404.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		3.404.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	86.484.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		86.484.800,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	5.047.762.877,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	5.047.762.877,00	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	4.989.114.347,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		4.989.114.347,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.628.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		5.628.400,00	DINAS TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD					17 Laporan	53.020.130,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		53.020.130,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.468.120,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	10.468.120,00					
	2	07	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					3 Dokumen	10.468.120,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		10.468.120,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	128.777.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	128.777.200,00					
	2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					45 Orang	128.777.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		128.777.200,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined	-			undefined undefined	229.667.850,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	229.667.850,00					
	2	07	01	2.06	0002	Penvediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	28.099.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		28.099.600,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	01	2.06	0004	Penvediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	34.937.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		34.937.200,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	01	2.06	0005	Penvediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					13 Paket	17.851.050,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		17.851.050,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	01	2.06	0006	Penvediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	24.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		24.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	6.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	118.780.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		118.780.000,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	280.230.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	280.230.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					7 Unit	280.230.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		280.230.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	186.049.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	186.049.000,00	
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	18.600.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		18.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	167.449.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		167.449.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	148.483.970,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	148.483.970,00	
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					0 Unit	140.080.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		140.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit	140.080.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		140.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					1 Unit	8.403.970,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		8.403.970,00	DINAS TENAGA KERJA
58	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-			90 persen	111.440.000,00						-	55.720.000,00	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	-			1 Dokumen 50 Perusahaan	111.440.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	55.720.000,00	
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
						Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro					50 Orang	111.440.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		55.720.000,00	DINAS TENAGA KERJA
59	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	2.920.408.997,00						-	2.920.408.997,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	2.848.658.997,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	2.848.658.997,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
															Nasional					Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																			
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n					300 Orang	2.848.658.997,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		2.848.658.997,00	DINAS TENAGA KERJA					
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-			-	23.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	23.000.000,00						
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																			
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina					33 Lembaga	23.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA					
	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-			-	18.750.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	18.750.000,00						
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																			
						Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas					50 Perusahaan	18.750.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		18.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA					
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	30.000.000,00						
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah					1 Dokumen	30.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA					
60	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	731.145.343,00						-	731.145.343,00						
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	269.463.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	269.463.300,00						
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja																			
						Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL					1000 Orang	145.468.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		145.468.200,00	DINAS TENAGA KERJA					
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																			
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan					100 Orang	39.576.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		39.576.700,00	DINAS TENAGA KERJA					
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																			
						Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD					50 Orang	56.885.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		56.885.000,00	DINAS TENAGA KERJA					
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja																			
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja					80 Orang	27.533.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		27.533.400,00	DINAS TENAGA KERJA					
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	321.969.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	321.969.400,00						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online													
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	137.877.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		137.877.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online													
						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1700 Orang	184.092.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		184.092.400,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	139.712.643,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	139.712.643,00	
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)													
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				15 Orang	139.712.643,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		139.712.643,00	DINAS TENAGA KERJA
61	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-		-	1.294.311.050,00						-	1.294.311.050,00	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	511.920.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	511.920.400,00	
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan													
						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				38 Perusahaan	25.077.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		25.077.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan													
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				4 Perusahaan	25.077.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		25.077.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan													
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	461.766.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		461.766.400,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	782.390.650,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi	-	782.390.650,00	
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah				45 Perkara	308.785.450,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		308.785.450,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				45 Perkara	98.240.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		98.240.300,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi													
						Jumlah Asosiasi dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				7 Asosiasi dan Serikat Pekerja	211.653.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		211.653.200,00	DINAS TENAGA KERJA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	163.711.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha Ekonomi		163.711.700,00	DINAS TENAGA KERJA		
						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													21.308.082.000,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														21.308.082.000,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														11.376.000.000,00	
62	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	7.738.087.050,00						-	9.501.000.000,00			
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	226.971.750,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	240.000.000,00			
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	64.705.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	162.266.750,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	6.481.582.790,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	7.900.000.000,00			
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				462 Orang/bulan	6.433.830.790,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		7.850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	47.752.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	57.520.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	60.000.000,00			
	2	08	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				32 Orang	57.520.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	398.622.250,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	621.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	11.654.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	55.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	8.010.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	79.958.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	59.999.850,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	9.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	175.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	108.100.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	120.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2 Unit	108.100.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	186.113.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	210.000.000,00	
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Laporan	45.780.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	90.333.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	279.177.260,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	350.000.000,00	
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					12 Unit	279.177.260,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
63	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	417.250.000,00						-	520.000.000,00	
	2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	175.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	220.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	175.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-		-	242.250.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		300.000.000,00	
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
						Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	242.250.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
64	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	359.100.000,00						-	400.000.000,00	
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	359.100.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		400.000.000,00	
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan					25 Orang	359.100.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
65	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-			-	405.650.000,00						-	450.000.000,00	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	405.650.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		450.000.000,00	
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	405.650.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
66	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-			-	74.999.750,00						-	90.000.000,00	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	74.999.750,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		90.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
																Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	74.999.750,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
67	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	225.787.700,00						-	240.000.000,00						
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	225.787.700,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	240.000.000,00						
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				10 Organisasi	131.100.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	94.687.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
68	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	127.306.250,00						-	175.000.000,00						
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	127.306.250,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	175.000.000,00						
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																			
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				1 Orang	127.306.250,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		2.310.000.000,00	
69	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	207.680.000,00						-	300.000.000,00						
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	207.680.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	300.000.000,00						
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																			
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				15 Dokumen	17.680.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	190.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
70	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	1.740.100.000,00					-		2.010.000.000,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.740.100.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	2.010.000.000,00	
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	530.100.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Lembaga	250.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				15 Unit	285.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		330.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	55.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					1 Laporan	190.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	30.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	400.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		440.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
71	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						7.497.924.050,00						7.622.082.000,00		
	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	673.488.650,00					-	754.000.000,00		
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	176.903.650,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		198.000.000,00	
	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				2 Satuan Pendidikan	82.214.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				20 Organisasi	30.488.950,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	64.200.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	496.585.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		556.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	490.585.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	6.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
72	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-			-	3.242.888.950,00					-		3.448.082.000,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	493.750.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	493.750.000,00	
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	80.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	57.750.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		57.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
							Jumlah Laporan Hasil Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	39.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		39.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	47.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		47.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				10 Organisasi	120.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	1.403.341.950,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	1.575.000.000,00	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				390 Orang	887.042.950,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	516.299.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		575.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.094.349.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	1.114.332.000,00	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	26.100.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		26.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				750 Orang	693.595.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		693.595.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Unit	120.937.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- PENUGASAN- PENGUATAN INTERVENSI STUNTING	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		120.937.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	53.700.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		53.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	200.017.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	251.448.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	265.000.000,00	
	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				1 Organisasi	56.448.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				3 Laporan	195.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		195.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
73	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	3.581.546.450,00					-		3.420.000.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	3.365.490.500,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	3.245.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	89.790.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				6 Laporan	156.299.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				1 Unit	360.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		360.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
						Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				1314 Orang	2.759.400.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		2.600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-		-	216.055.950,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	175.000.000,00		
	2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja														
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	216.055.950,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
						Dinas Pangan dan Pertanian					13.046.251.988,00					13.038.650.000,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					10.808.196.334,00					10.981.750.000,00				
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					10.808.196.334,00					10.981.750.000,00				
74	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	9.889.932.516,00					-		9.932.450.000,00		
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	229.066.441,00			-	-	-	-	240.000.000,00		
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	156.413.841,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		165.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	24.398.050,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	48.254.550,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	8.480.443.675,00			-	-	-	-	8.500.000.000,00	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	8.480.443.675,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-		8.500.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	63.000.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	
	2	09	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	63.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	287.422.400,00			-	-	-	-	292.350.000,00	
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	6.561.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		6.600.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	23.218.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		24.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	32.393.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15.250.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		15.750.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	25.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	175.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		175.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	435.000.000,00			-	-	-	-	439.100.000,00	
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-		1.100.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	102.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-	103.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	332.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-	335.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			395.000.000,00				-	-	-	396.000.000,00	
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	197.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-	198.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	198.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-	198.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
75	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			679.519.968,00				-	-	-	802.500.000,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			134.749.400,00				-	-	-	127.000.000,00	
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	30.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-	19.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan				12 Dokumen	54.749.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-	56.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				4 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-	52.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			204.822.550,00				-	-	-	250.000.000,00	
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				18 Ton	204.822.550,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-	250.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			339.948.018,00				-	-	-	425.500.000,00	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				12 Dokumen	39.484.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				12 Laporan	300.464.018,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-	385.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
76	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-			160.000.050,00				-	-	-	166.000.000,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			29.999.900,00				-	-	-	30.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan													
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	29.999.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-			-	130.000.150,00			-	-	-	-	136.000.000,00	
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	120.000.150,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota													
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				2 Laporan	10.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
77	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-		-	78.743.800,00			-	-	-	-	80.800.000,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	78.743.800,00			-	-	-	-	80.800.000,00	
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	28.743.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		29.800.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				2 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		51.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
78	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-		-	671.738.320,00			-	-	-	-	674.000.000,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-		-	96.033.400,00			-	-	-	-	97.000.000,00	
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan													
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				4 Kelompok	96.033.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		97.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-		-	575.704.920,00			-	-	-	-	577.000.000,00	
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	4.999.750,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	570.705.170,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		572.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
79	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-		-	88.643.300,00			-	-	-	-	89.000.000,00	
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-		-	88.643.300,00			-	-	-	-	89.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil														
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko					37 Unit Usaha	88.643.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-	89.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
80	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	1.477.674.034,00	75.000.000,00				-	1.293.900.000,00		
						PRASARANA PERTANIAN	-				-	75.000.000,00					-	68.000.000,00		
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	75.000.000,00			-	-	-	68.000.000,00		
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
						Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola					1 Dokumen	75.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-	68.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
81	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-				-	961.575.284,00					-	810.000.000,00		
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	119.118.500,00			-	-	-	121.000.000,00		
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota					2 Laporan	119.118.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-	121.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	59.252.000,00			-	-	-	61.000.000,00		
	3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM														
						Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM					2 Laporan	59.252.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-	61.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	783.204.784,00			-	-	-	628.000.000,00		
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner					12 Laporan	783.204.784,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-	628.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
82	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-				-	4.400.000,00					-	10.400.000,00		
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	4.400.000,00			-	-	-	10.400.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian														
						Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian					2 Dokumen	4.400.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		10.400.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
83	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	436.698.750,00					-	-	405.500.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	436.698.750,00			-	-	-	-	405.500.000,00	
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					8 Unit	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		67.800.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					8 Unit	336.698.750,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-	-		337.700.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						UPTD Laboratorium Lingkungan														
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.150.000.000,00							1.800.000.000,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						2.150.000.000,00							1.800.000.000,00	
84	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase dokumen analisa kualitas lingkungan yang dijadikan acuan	-			100 Persen	2.150.000.000,00						-	1.800.000.000,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan	-			3 Indeks	2.150.000.000,00			-	-	-	-	1.800.000.000,00	
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
						Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan					1054 Dokumen	2.150.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.800.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
						UPTD Pelayanan Persampahan														
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.408.520.140,00							13.237.875.000,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						12.408.520.140,00							13.237.875.000,00	
85	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	12.408.520.140,00						-	13.237.875.000,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	-	-			-	12.408.520.140,00			-	-	-	-	13.237.875.000,00	
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
						Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan					220 Ton	12.408.520.140,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.237.875.000,00	UPTD PELAYANAN PERSAMPAHAN
						Dinas Lingkungan Hidup														
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						37.519.498.055,00							48.823.738.230,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						561.112.400,00							473.140.000,00	
86	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			45 Nilai 77.15 Nilai BB Nilai	261.112.400,00						-	223.140.000,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan movev	-			7 dokumen	190.640.000,00			-	-	-	-	123.140.000,00	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	120.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					23 Laporan	70.640.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		73.140.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi kebutuhan administrasi umum	-			12 bulan	70.472.400,00			-	-	-	-	100.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	70.472.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
87	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase penanganan timbulan sampah	-			70 Persen	300.000.000,00					-		250.000.000,00	
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Timbulan Sampah	-			70 Persen	300.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	
	1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				5 Ton/hari	300.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						36.958.385.655,00						48.350.598.230,00		
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						36.958.385.655,00						48.350.598.230,00		
88	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			45 Nilai 77.15 Nilai BB Nilai	19.516.423.505,00					-		22.980.823.230,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan move	-			7 dokumen	33.520.000,00			-	-	-	-	39.560.000,00	
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	12.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9.520.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.380.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	6.000.000,00	-	-	-	-	-		8.340.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.340.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-			1 dokumen	13.129.577.431,00			-	-	-	-	13.842.117.230,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/bulan	13.082.880.181,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.795.259.730,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	29.297.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.857.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.399.750,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					18 Laporan	10.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitas administrasi kepegawaian undefined	-			12 bulan undefined	502.849.750,00			-	-	-	-	671.400.000,00	
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					2 Orang	30.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					291 Orang	472.849.750,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		641.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitas administrasi kebutuhan administrasi umum	-			12 bulan	329.333.400,00			-	-	-	-	365.500.000,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	1.758.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	68.226.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	65.496.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	10.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	183.852.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	55.000.000,00			-	-	-	-	55.000.000,00	
	2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	55.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	377.743.524,00			-	-	-	-	434.840.000,00	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	62.610.460,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		117.840.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	264.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		264.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	51.133.064,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		53.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.088.399.400,00			-	-	-	-	7.572.406.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.330.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.720.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				111 Unit	5.050.069.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.501.686.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
89	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dipedomani	-		100 Persen	500.000.000,00					-		350.000.000,00	
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup	-		- dokumen	500.000.000,00			-	-	-		350.000.000,00	
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD													
						Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	350.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang													
						Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
90	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase dokumen analisa kualitas lingkungan yang dijadikan acuan	-		100 Persen	1.261.139.650,00					-		2.942.000.000,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan	-		3 Indeks	1.261.139.650,00			-	-	-		2.792.000.000,00	
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
						Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				8 Dokumen	650.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		673.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	111.139.650,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		119.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah													
						Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokuman	500.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	-		1 titik	0,00			-	-	-		150.000.000,00	
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup													
						Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 Titik	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
91	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas Kehati Kota Cimahi yang dikelola	-		1.14 Persen	1.507.000.000,00					-		1.770.875.000,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Luas Kehati yang dikelola	-		45,87 Ha	1.507.000.000,00			-	-	-		1.770.875.000,00	
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha	490.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		920.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				3 Unit	317.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan														
						Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota					0.5 Unit	700.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
92	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	-			60 Persen	110.000.000,00					-		110.000.000,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi rincian teknis penyimpanan limbah B3	-			15 Rekomendasi	10.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3														
						Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3					15 Laporan	10.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	
	2	11	05	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
						Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					15 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
93	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase penanggung jawab dan/atau kegiatan yang memenuhi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Cimahi	-			50 Persen	1.070.000.000,00						-	1.180.000.000,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang telah mengimplementasikan UU No 32/2009 dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku	-			50 Pelaku Usaha	1.070.000.000,00			-	-	-	-	1.180.000.000,00	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan					150 Dokumen	270.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		280.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi					75 Badan Usaha	800.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
94	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup Prosentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	-			100 Persen 100 Persen	183.000.000,00						-	185.000.000,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	-			100 Persen	183.000.000,00			-	-	-	-	185.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
																Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																			
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani					12 Pengaduan	60.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																			
						Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota					25 Perkara	123.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
95	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase pengelolaan sampah	-			99 Persen	12.810.822.500,00						-	18.831.900.000,00						
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Timbunan Sampah	-			30 Persen	12.810.822.500,00			-	-	-	-	18.831.900.000,00						
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																			
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					95 Kelompok	2.000.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.522.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir					134 Unit	2.385.176.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.135.850.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																			
						Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan					4 Dokumen	175.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbunan sampah																			
						Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbunan sampah					2 Laporan	3.560.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan																			
						Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan					12 Dokumen	4.690.646.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.073.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						10.501.960.710,00							12.085.925.000,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.501.960.710,00							12.085.925.000,00						
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						10.501.960.710,00							12.085.925.000,00						
96	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8.819.320.710,00						-	10.056.925.000,00						
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	92.000.000,00			-		Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	112.000.000,00						
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9 Dokumen	51.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	52.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14 Laporan	41.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.792.460.710,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	7.866.080.000,00	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					45 Orang/bulan	6.781.960.710,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		7.855.080.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	4.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	6.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	172.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	250.000.000,00	
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					66 Paket	61.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					66 Orang	110.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.196.860.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	1.238.845.000,00	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	621.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		703.845.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	14.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		14.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	62.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		67.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	90.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					4 Laporan	10.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	300.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		310.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)										
															Nasional			Daerah		14	15	16	17					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
	2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			32.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	99.360.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-			32.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	88.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-		92.000.000,00								
	2	12	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																						
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	88.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-			92.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	125.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-		123.000.000,00								
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	25.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-			23.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	353.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-		375.000.000,00								
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																						
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4 Unit	218.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-			235.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																						
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					94 Unit	135.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-			140.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
97	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	513.000.000,00						-		564.000.000,00								
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	343.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-		374.000.000,00								
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																						
						Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					800 Dokumen	23.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-			32.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																						
						Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					12 Laporan	320.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-			342.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	95.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-		115.000.000,00								
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																						
						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia					17000 Dokumen	95.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-			115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	75.000.000,00			-	-	-	-		75.000.000,00								

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk													
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				900 Dokumen	32.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		37.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk													
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				6 Laporan	43.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		38.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
98	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-		-	578.000.000,00						-	645.000.000,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-		-	375.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	395.000.000,00	
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil													
						Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				20 Layanan	375.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		395.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-		-	148.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	160.000.000,00	
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil													
						Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	74.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		78.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				10 Laporan	74.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		82.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-		-	55.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	90.000.000,00	
	2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil													
						Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	55.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
99	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-		-	563.640.000,00						-	786.000.000,00	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-		-	119.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	126.000.000,00	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan													
						Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan													
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	19.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		21.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-		-	408.640.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	520.000.000,00	
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	225.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		255.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				12 Laporan	183.640.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		265.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	36.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	140.000.000,00	
	2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	36.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		140.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
100	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-			-	28.000.000,00						-	34.000.000,00	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	28.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	34.000.000,00	
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang terasun				1 Dokumen	28.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		34.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Dinas Perhubungan						31.157.612.000,00							31.022.937.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						31.157.612.000,00							31.022.937.000,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						31.157.612.000,00							31.022.937.000,00	
101	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			BB Nilai	22.870.362.000,00					-		22.786.378.500,00	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			21 Dokumen	209.237.750,00			-	-	-	-	190.000.000,00	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	150.451.450,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		137.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Laporan	58.786.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan PD	-			12 Bulan	10.166.144.250,00			-	-	-	-	10.265.500.000,00	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66 Orang/bulan	10.099.052.750,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.850.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	51.241.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			130 Orang	253.833.000,00			-	-	-	-	435.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				130 Orang	203.833.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		385.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	-			12 Bulan	617.579.000,00			-	-	-	-	688.418.500,00	
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.650.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	60.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	90.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.555.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	202.579.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		267.213.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	24.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	6.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	225.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		225.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Disediakan	-			22 Unit	329.951.000,00			-	-	-	-	310.000.000,00	
	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	206.089.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	123.862.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	10.210.762.000,00			-	-	-	-	10.043.460.000,00	
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.985.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.820.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	225.762.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		223.460.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	1.082.855.000,00			-	-	-	-	854.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
															Nasional					Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					32 Unit	1.043.855.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		815.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN						
	2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					56 Unit	39.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN						
102	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	-			55 %	8.287.250.000,00					-		8.236.558.500,00							
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	-			4 Kegiatan	5.745.000.000,00			-	-	-	-	5.422.620.900,00							
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun					405 Unit	2.550.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.630.854.000,00	DINAS PERHUBUNGAN						
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia					143 Unit	900.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		524.824.000,00	DINAS PERHUBUNGAN						
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																				
						Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					5000 Unit	1.300.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.395.327.000,00	DINAS PERHUBUNGAN						
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																				
						Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					70 Unit	995.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		871.615.900,00	DINAS PERHUBUNGAN						
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Tipe C Yang Dikelola	-			100 %	611.280.200,00			-	-	-	-	628.830.150,00							
	2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C																				
						Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi					3 Dokumen	531.507.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		559.494.550,00	DINAS PERHUBUNGAN						
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																				
						Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara					3 Unit	79.772.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		69.335.600,00	DINAS PERHUBUNGAN						
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Dan Koordinasi Penertiban Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-			1 Kegiatan	295.000.000,00			-	-	-	-	294.169.000,00							
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					19 Laporan	295.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		294.169.000,00	DINAS PERHUBUNGAN						
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa LLAJ	-			11 Laporan	399.000.000,00			-	-	-	-	633.169.000,00							
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																				
						Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					4 Laporan	24.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
																Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
						Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi					7 Laporan	375.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		609.169.000,00	DINAS PERHUBUNGAN					
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Andalalin	-			6 Dokumen	75.000.000,00			-	-	-	-	7.250.000,00						
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																			
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin					6 Laporan	22.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN					
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																			
						Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi					12 Laporan	52.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN					
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan	-			4 Kegiatan	106.969.900,00			-	-	-	-	296.129.350,00						
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																			
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					2 Laporan	36.969.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.165.350,00	DINAS PERHUBUNGAN					
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota					3 Laporan	55.000.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		252.387.400,00	DINAS PERHUBUNGAN					
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																			
						Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					3 Laporan	15.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.576.600,00	DINAS PERHUBUNGAN					
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kota	-			2 Kegiatan	529.999.750,00			-	-	-	-	282.098.100,00						
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					26 Laporan	380.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		130.124.300,00	DINAS PERHUBUNGAN					
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia					8 Unit	149.999.750,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		151.973.800,00	DINAS PERHUBUNGAN					
	2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	500.000.000,00			-	-	-	-	555.531.100,00						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
												Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional	Daerah									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	15	02	2.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																	555.531.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	500.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian jalan raya jaringan perkotaan	-			1 Kegiatan	25.000.150,00			-	-	-	-	116.760.900,00					
	2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	116.760.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	25.000.150,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
						UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor																	1.386.106.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	1.386.106.000,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	1.386.106.000,00	
103	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Layak	-		86 %	1.344.500.000,00						-		1.386.106.000,00					
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Secara Berkala	-		7600 Kendaraan	1.332.500.000,00				-	-	-	-	1.374.106.000,00					
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	50.000.000,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit	75.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																	26.500.000,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
						Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				0 Unit	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	110.000.000,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
						Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4400 Dokumen	110.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	19.150.000,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
						Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	17.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji																	5.000.000,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
						Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				2 Laporan	5.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	1.137.056.000,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				12 Unit	1.100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	26.400.000,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	25.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-		2 Laporan	12.000.000,00			-	-	-	-		12.000.000,00					
	2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor																	12.000.000,00	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
						Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	12.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					Dinas Komunikasi dan Informatika						15.038.001.607,00							0,00			
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.038.001.607,00							0,00			
	2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						13.894.999.107,00							0,00			
104	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.339.362.750,00					-	-	0,00			
	2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	159.642.000,00			-		-	-	0,00			
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	78.735.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					16 Laporan	80.907.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.125.624.000,00			-	-	-	-	0,00			
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					34 Orang/bulan	6.090.074.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					18 Dokumen	35.550.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	20.942.000,00			-	-	-	-	0,00			
	2	16	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD															
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					5 Dokumen	20.942.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	45.980.000,00			-	-	-	-	0,00			
	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					40 Orang	45.980.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	317.195.750,00			-	-	-	-	0,00			
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	81.739.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					40 Paket	43.307.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					15 Paket	17.200.250,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					60 Laporan	174.949.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	154.369.000,00			-	-	-	-	0,00			
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					16 Laporan	91.180.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					16 Laporan	3.800.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	59.389.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	515.610.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	150.580.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	345.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	20.030.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
105	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-		-	3.441.987.400,00					-		0,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	3.441.987.400,00			-	-	-	-	0,00	
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik													
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	230.344.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik													
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	390.035.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media													
						Jumlah Layanan Hubungan Media				10 Layanan	2.821.607.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
106	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-		-	3.113.648.957,00					-		0,00	
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.814.982.320,00			-	-	-	-	0,00	
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah													
						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				75 Unit	1.814.982.320,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	1.298.666.637,00			-	-	-	-	0,00	
	2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	307.400.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah													
						Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	418.662.637,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik													
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3 Unit	422.014.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah														
							Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	17.450.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas														
							Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	133.140.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
107	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-			-	501.852.500,00						-	0,00	
	2	20	02			PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-			-	501.852.500,00						-	0,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	501.852.500,00			-	-	-	-	0,00	
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				20 Dokumen	415.768.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi														
							Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				60 Orang	86.084.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
108	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	641.150.000,00						-	0,00	
	2	21	02			PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	641.150.000,00						-	0,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	424.900.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	172.900.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				20 Perangkat Daerah	252.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	216.250.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				5 Perangkat Daerah	216.250.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu														
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
109	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	17.228.385.361,00						-	0,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	260.500.000,00			-	-	-	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	140.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.245.933.671,00			-	-	-	-	0,00	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					35 Orang/bulan	6.235.933.671,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	162.060.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	18	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					5 Dokumen	162.060.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					50 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.602.938.500,00			-	-	-	-	0,00	
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	671.420.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	126.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	241.070.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	270.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
																Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	254.448.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	200.000.000,00			-	-	-		0,00							
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	200.000.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	7.185.828.720,00			-	-	-		0,00							
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	17.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	3.901.828.720,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	3.267.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	1.371.124.470,00			-	-	-		0,00							
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5 Unit	694.714.470,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					1 Unit	676.410.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
110	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-			-	473.500.000,00			-	-	-		0,00							
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	292.000.000,00			-	-	-		0,00							
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																				
						Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					2 Dokumen	197.000.000,00	-	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																				
						Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko					150 Dokumen	95.000.000,00	-	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	-	-			-	181.500.000,00			-	-	-		0,00							

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				2 Dokumen	181.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
111	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-		-	550.000.000,00						-	0,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	550.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
112	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-		-	1.095.000.000,00						-	0,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-		-	1.095.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah													
						Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	320.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	300.000.000,00	-	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko													
						Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				75 Pelaku Usaha	225.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko													
						Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				75 Kegiatan Usaha	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
113	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-		-	590.000.000,00						-	0,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	590.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				600 Kegiatan Usaha.	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				20 Pelaku Usaha	452.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				20 Kegiatan Usaha	88.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
114	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-			-	700.000.000,00						-	0,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	700.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga						27.165.189.575,00							0,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						22.543.781.575,00							0,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						20.293.781.575,00							0,00	
115	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	11.143.781.575,00						-	0,00	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	357.800.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	287.800.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	25.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	45.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.612.837.575,00			-	-	-	-	0,00	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	4.415.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	139.737.575,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-							
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-							
	2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	17.800.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-							
	2	19	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-							
	2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	40.300.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-							
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	60.400.000,00			-	-	-	-		0,00				
	2	19	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	30.400.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-							
	2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-							
	2	19	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-		-	50.000.000,00			-	-	-	-		0,00				
	2	19	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-							
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	170.000.000,00			-	-	-	-		0,00				
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				34 Paket	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-							
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	70.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-							
	2	19	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				38 Orang	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-							
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	544.744.000,00			-	-	-	-		0,00				
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	119.044.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	79.250.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	74.950.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	170.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	404.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	204.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	229.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	25.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.715.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	206.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	23.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.450.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
116	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-		-	900.000.000,00					-		0,00	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-		-	310.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penvelenggaraan Peningkatan Kapasitas Dava Saing Pemuda Pelopor				15 Orang	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penvelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda				50 Orang	90.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				10 Orang	170.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan								-	-	-			
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	590.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				7 Dokumen	590.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
117	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-		-	7.750.000.000,00						-	0,00	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	100.000.000,00			-	-	-	-	0,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota					0 Unit	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	5.850.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	300.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan													
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				400 Orang	5.550.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-		-	550.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlet Daerah													
						Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				300 Orang	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)													
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				1 Pelatda	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota													
						Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				15 Orang	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga													
						Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				0 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-		-	200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	19	03	2.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait													
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-		-	1.050.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Dokumen	550.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi													
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	500.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
118	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-		-	500.000.000,00						-	0,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-		-	500.000.000,00			-	-	-	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)							
																Nasional	Daerah										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																					
						Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya					1 Organisasi	500.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
119	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																			0,00		
	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-			-	1.550.000.000,00						-	0,00								
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	650.000.000,00			-	-	-	-	0,00								
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan					5 Objek	250.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					250 Orang	400.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	900.000.000,00			-	-	-	-		0,00							
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan					112 Objek	550.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					1 Laporan	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan					10 Sertifikat	250.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
120	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-			-	300.000.000,00						-		0,00							
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-		0,00							
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)					100 Orang	150.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi					25 Sertifikat	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																				0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya					5 Lembaga	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
121	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-			-	0,00						-		0,00							
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-		0,00							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	-	-	-	0 Orang	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
122	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	-	-	-	400.000.000,00					-	-	0,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	310.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	-	-	-	6 Objek	60.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-	-	-	5 Objek	250.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	90.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-	-	-	5 Objek	90.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.621.408.000,00							0,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						4.621.408.000,00							0,00	
123	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-	-	-	-	2.954.204.000,00					-	-	0,00	
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	2.804.204.000,00			-	-	-	-	0,00	
	3	26	02	2.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	-	-	-	2 Lokasi	150.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-	-	-	1 Lokasi	1.704.204.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-	-	-	11 Unit	250.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	2 Laporan	700.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	150.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
	3	26	02	2.04	0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	-	-	-	4 Laporan	150.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
124	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	605.000.000,00					-	-	0,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	605.000.000,00			-	-	-	-	0,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri															
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri															
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota															
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Kegiatan	500.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri															
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	55.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
125	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-		-	150.000.000,00			-			-	0,00			
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-		-	150.000.000,00			-	-	-	-	0,00			
	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif															
						Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	150.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
126	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-		-	912.204.000,00			-			-	0,00			
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-		-	912.204.000,00			-	-	-	-	0,00			
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif															
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	307.204.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif															
						Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				0 Orang	330.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata															
						Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				15 Orang	275.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					Dinas Arsip Daerah					7.249.140.707,00		11		12		13		7.680.357.000,00		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.249.140.707,00								7.680.357.000,00		
	2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					865.010.000,00								765.000.000,00		
127	2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-		-	865.010.000,00						-		765.000.000,00		
	2	23	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	670.010.000,00			-	-	-	-	515.000.000,00			
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	380.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	300.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH		
	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang	40.010.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	40.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH		
	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka														
						Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				2400 Eksemplar	250.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	175.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH		
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	195.000.000,00			-	-	-	250.000.000,00			
	2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				10 Lokus	120.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	150.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH		
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
						Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	75.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH		
	2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					6.384.130.707,00							6.915.357.000,00			
128	2	24	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	5.529.130.148,00						-	6.293.028.729,00			
	2	24	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	175.000.000,00			-	-	-	98.000.000,00			
	2	24	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	75.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	45.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH		
	2	24	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	53.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH		
	2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	4.214.094.348,00			-	-	-	5.586.528.729,00			
	2	24	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	4.164.094.348,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	5.543.528.729,00	DINAS ARSIP DAERAH		
	2	24	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	43.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH		
	2	24	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	20.000.000,00			-	-	-	19.500.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	24	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					6 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.500.000,00	DINAS ARSIP DAERAH
	2	24	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	155.151.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	
	2	24	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					30 Orang	55.151.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH
	2	24	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					5 Orang	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH
	2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	309.990.000,00			-	-	-	-	230.500.000,00	
	2	24	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					7 Paket	70.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.500.000,00	DINAS ARSIP DAERAH
	2	24	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					9 Paket	30.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH
	2	24	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					5 Paket	15.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH
	2	24	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					30 Laporan	174.990.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH
	2	24	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					50 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH
	2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	199.900.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	
	2	24	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	199.900.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH
	2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	224.995.000,00			-	-	-	-	108.000.000,00	
	2	24	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	29.995.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH
	2	24	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3 Laporan	195.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		58.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH
	2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	229.999.800,00			-	-	-	-	150.500.000,00	
	2	24	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5 Unit	90.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH
	2	24	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	69.999.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH
	2	24	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.500.000,00	DINAS ARSIP DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	2	24	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	20.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS ARSIP DAERAH			
129	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-			-	855.000.559,00					-		622.328.271,00				
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	104.999.919,00			-	-	-		113.221.000,00				
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					30 Laporan	104.999.919,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		113.221.000,00	DINAS ARSIP DAERAH			
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	349.991.140,00			-	-	-		233.221.000,00				
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																	
						Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					6 Arsip	349.991.140,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		233.221.000,00	DINAS ARSIP DAERAH			
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	400.009.500,00			-	-	-		275.886.271,00				
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					2 Laporan	400.009.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275.886.271,00	DINAS ARSIP DAERAH			
						Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian															17.089.217.792,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																14.498.031.210,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																14.498.031.210,00	
130	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	9.865.532.844,00			-	-	-		10.792.031.210,00				
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	116.034.700,00			-	-	-		119.000.000,00				
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9 Dokumen	8.775.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					33 Laporan	107.259.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.613.541.344,00			-	-	-		9.702.731.210,00				
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					52 Orang/bulan	8.558.936.844,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.646.731.210,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	8.775.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
																Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		47.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					13 Laporan	45.828.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-									
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	32.177.700,00			-	-	-	-	33.000.000,00							
	2	17	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			33.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	32.177.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-									
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	92.632.800,00			-	-	-	-	75.000.000,00							
	2	17	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					135 Orang	92.632.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-									
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	503.128.600,00			-	-	-	-	345.300.000,00							
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			2.900.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	29.252.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-									
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			48.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	46.803.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-									
	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			3.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	3.412.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-									
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			10.900.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	101.882.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-									
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	107.259.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-									
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			170.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					120 Laporan	214.518.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-									
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	181.365.200,00			-	-	-	-	182.000.000,00							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	13.651.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	-	12.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	167.714.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	-	170.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	326.652.500,00			-	-	-	-	335.000.000,00	
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					7 Unit	234.019.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	-	240.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					97 Unit	92.632.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	-	95.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
131	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-			-	78.006.600,00			-	-	-	-	80.000.000,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	78.006.600,00			-	-	-	-	80.000.000,00	
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi					65 Unit Usaha	29.252.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					7 Unit Usaha	48.754.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
132	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-			-	248.645.900,00			-	-	-	-	255.000.000,00	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	248.645.900,00			-	-	-	-	255.000.000,00	
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					80 Unit Usaha	4.875.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi	Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				28 Unit Usaha	243.770.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
133	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-			-	195.016.400,00					-		200.000.000,00	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	195.016.400,00			-	-	-		200.000.000,00	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	195.016.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
134	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-			-	389.057.700,00					-		371.000.000,00	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	389.057.700,00			-	-	-		371.000.000,00	
	2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	28.277.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		31.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota														
							Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				80 Unit Usaha	360.780.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		340.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
							Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit Usaha	360.780.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		340.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
135	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-			-	2.033.045.800,00					-		1.950.000.000,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	2.033.045.800,00			-	-	-		1.950.000.000,00	
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				25 Unit Usaha	58.504.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro					405 Unit Usaha	243.770.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					250 Unit Usaha	536.295.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		522.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro					20 Orang	63.380.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		57.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	07	2.01	0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil					525 Unit Usaha	838.570.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		760.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro					500 Unit Usaha	292.524.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
136	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-			-	828.819.600,00						-	850.000.000,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	828.819.600,00			-	-	-	-	850.000.000,00	
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro					370 Unit Usaha	828.819.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		850.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.602.675.700,00							2.591.186.582,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						2.003.000.200,00							1.962.186.582,00	
137	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-			-	29.252.500,00						-	30.000.000,00	
	3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-			-	29.252.500,00			-	-	-	-	30.000.000,00	
	3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
						Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang					5 Dokumen	29.252.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
138	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	635.935.300,00						-	652.186.582,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	440.918.900,00			-	-	-	-	452.186.582,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan					1 Unit	440.918.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	452.186.582,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-			-	195.016.400,00			-	-	-	200.000.000,00		
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					3 Dokumen	97.508.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					1 Dokumen	97.508.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
139	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-			-	355.905.000,00					-	365.000.000,00		
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	19.501.700,00			-	-	-	20.000.000,00		
	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					12 Laporan	6.825.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
						Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					12 Laporan	12.676.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	13.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	336.403.300,00			-	-	-	345.000.000,00		
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota														
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota					12 Laporan	29.252.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					12 Laporan	14.626.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
																Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					4 Laporan	292.524.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN						
140	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-			-	589.924.500,00					-		605.000.000,00							
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	589.924.500,00			-	-	-	-	605.000.000,00							
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional																				
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang					30 Pelaku Usaha	219.393.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-		225.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN						
	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal																				
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal					50 Pelaku Usaha	121.885.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN						
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																				
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan					240 Pelaku Usaha	195.016.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN						
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																				
						Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi					1 Produk	53.629.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN						
141	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-			-	391.982.900,00					-		310.000.000,00							
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	391.982.900,00			-	-	-	-	310.000.000,00							
	3	30	07	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																				
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri					30 Orang	146.262.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGH HASIL	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN						
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																				
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					50 UMKM	97.508.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN						
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																				
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi					30 UMKM	148.212.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					599.675.500,00							629.000.000,00		
142	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-		-	390.032.800,00						-	450.000.000,00		
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-		-	390.032.800,00			-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	-	-	450.000.000,00		
	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penvebaran dan Perwilayahan Industri														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	48.754.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				20 Dokumen	300.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	-		350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				2 Dokumen	41.278.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
143	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-		-	29.252.500,00						-	7.000.000,00		
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	29.252.500,00			-	-	-	-	7.000.000,00		
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
						Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				2 Dokumen	29.252.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-	7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN		
144	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-		-	180.390.200,00						-	172.000.000,00		
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	180.390.200,00			-	-	-	-	172.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														
						Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas					4 Dokumen	180.390.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	-	-		172.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
						UPTD Metrologi Legal						638.678.600,00							567.126.882,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						638.678.600,00							567.126.882,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						638.678.600,00							567.126.882,00	
145	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	638.678.600,00						-	567.126.882,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	638.678.600,00			-	-	-	-	567.126.882,00	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					3000 Unit	536.295.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		497.269.832,00	UPTD METROLOGI LEGAL
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina					30 Orang	68.255.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		46.670.000,00	UPTD METROLOGI LEGAL
	3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal														
						Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal					0 Unit	34.127.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.187.050,00	UPTD METROLOGI LEGAL
						UPTD Cimahi Technopark						4.436.557.800,00							4.348.091.208,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.436.557.800,00							4.348.091.208,00	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						4.436.557.800,00							4.348.091.208,00	
146	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	4.436.557.800,00						-	4.348.091.208,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	4.436.557.800,00			-	-	-	-	4.348.091.208,00	
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					4 Dokumen	4.436.557.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.348.091.208,00	UPTD CIMAHI TECHNOPARK
						UPTD Pasar						3.608.173.800,00							3.719.638.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.608.173.800,00							3.719.638.000,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3.608.173.800,00							3.719.638.000,00	
147	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	3.608.173.800,00						-	3.719.638.000,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	3.608.173.800,00			-	-	-	-	3.719.638.000,00	
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
						Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					4 Unit	3.608.173.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.719.638.000,00	UPTD PASAR
						Sekretariat Daerah						69.744.540.657,00							74.520.985.103,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						63.510.689.557,00							68.058.234.003,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						63.510.689.557,00							68.058.234.003,00	
148	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	53.627.895.268,00						-	57.656.682.778,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	245.216.016,00			-	-	-	-	69.142.100,00	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	176.073.916,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.241.900,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.241.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9.948.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.948.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9.948.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.948.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	9.948.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.948.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	14.948.100,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.948.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	14.107.800,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.107.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	29.371.511.900,00			-	-	-	-	29.371.511.900,00	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				160 Orang/bulan	29.141.511.900,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.141.511.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	230.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	262.000.000,00			-	-	-	-	262.000.000,00	
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	27.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				160 Orang	235.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		235.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	7.478.514.292,00			-	-	-	-	8.749.115.992,00	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	176.982.744,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		176.982.744,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	905.414.648,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		905.414.648,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.235.568.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.424.285.350,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
															10	11			
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	314.550.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	448.384.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	55.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.290.998.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5.239.049.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	500.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.293.900.000,00			-	-	-	1.293.900.000,00	
	4	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	1.293.900.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.293.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.027.569.520,00			-	-	-	5.679.660.650,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	780.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	780.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.820.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.820.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.427.569.520,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3.079.660.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.923.766.340,00			-	-	-	1.923.766.340,00	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	491.493.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	491.493.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				57 Unit	1.414.948.340,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.414.948.340,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				70 Unit	17.325.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	17.325.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	1.780.940.000,00			-	-	-	1.813.240.000,00	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	1.583.240.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.583.240.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Paket	197.700.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	1.781.396.260,00			-	-	-	-	3.104.715.800,00	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				12 Paket	1.075.513.380,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.139.199.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				0 Paket	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.139.199.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				12 Paket	705.882.880,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		826.317.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	-	-	1.173.448.600,00			-	-	-	-	1.430.000.000,00	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	473.449.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		580.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	399.999.850,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				8 Dokumen	299.999.750,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	3.289.632.340,00			-	-	-	-	3.959.629.996,00	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	2.304.760.340,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.820.723.496,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	171.700.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		186.246.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	813.171.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		952.660.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
149	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	7.096.138.975,00					-		7.606.821.297,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	1.698.119.000,00			-	-	-	-	1.233.027.000,00	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan				7 Dokumen	1.195.631.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		705.413.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	315.063.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		330.817.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	187.425.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		196.797.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	4.453.608.695,00			-	-	-	-	5.523.260.800,00	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	4.033.108.395,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.948.260.800,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial					4 Dokumen	205.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		256.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat					4 Dokumen	215.500.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		318.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terfasilitasinya koordinasi Hukum dan Penyusunan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	-			100 persentase	814.702.280,00			-	-	-	-	714.338.497,00	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				6 Dokumen	129.622.430,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		106.126.099,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				10 Kasus	437.463.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		431.811.295,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				4 Dokumen	247.616.250,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		176.401.103,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	129.709.000,00			-	-	-	-	136.195.000,00	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				2 Dokumen	107.113.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		112.469.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan	22.596.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.726.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
150	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	2.786.655.314,00					-	-	2.794.729.928,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	1.333.750.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	1.684.794.400,00	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	883.750.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		972.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	371.250.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		561.326.550,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
															Nasional					Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		151.342.850,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					1 Dokumen	78.750.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-								
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	707.057.785,00			-	-	-	-	326.825.600,00						
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		326.825.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah					3 Dokumen	382.797.051,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					2 Laporan	324.260.734,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	745.847.529,00			-	-	-	-	783.109.928,00						
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		264.844.226,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1 Dokumen	252.232.596,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		98.358.534,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik					1 Dokumen	127.502.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		419.907.168,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					32 Orang	366.112.533,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	X					NON URUSAN																		6.462.751.100,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		6.462.751.100,00	
151	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.233.851.100,00					-		6.462.751.100,00						
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.076.100,00			-	-	-	-	13.076.100,00						
	X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	13.076.100,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	13.076.100,00	SEKRETARIAT DAERAH						
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	72.500.000,00			-	-	-	-	75.500.000,00						
	X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		75.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					52 Unit	72.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.506.000.000,00			-	-	-	-	1.731.900.000,00						
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		1.731.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	1.506.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.642.275.000,00			-	-	-	-	4.642.275.000,00						
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		216.210.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4 Unit	216.210.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		4.004.570.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					9 Unit	4.004.570.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	421.495.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		421.495.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Sekretariat DPRD					89.481.628.500,00							95.420.491.792,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					89.481.628.500,00							95.420.491.792,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD					89.481.628.500,00							95.420.491.792,00	
152	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	56.952.057.381,00						-	57.522.908.592,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	402.925.550,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	383.757.250,00	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	150.137.100,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		210.137.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	252.788.450,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		173.620.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	6.758.655.668,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	6.826.242.225,00	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	6.758.655.668,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		6.826.242.225,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			-	630.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	630.000.000,00	
	4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	600.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	30.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	433.966.700,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	433.966.700,00	
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	333.559.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		333.559.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	100.407.700,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		100.407.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	694.516.900,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	594.516.900,00	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	40.020.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		40.020.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	39.341.300,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		39.341.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	19.974.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		19.974.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	94.779.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		94.779.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	252.178.600,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		252.178.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	148.224.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		148.224.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	2.482.917.800,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	2.482.917.800,00	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	597.038.400,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		597.038.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	432.002.400,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		432.002.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.453.877.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		1.453.877.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	1.339.437.719,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	1.539.437.719,00	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	158.370.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		158.370.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	180.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	1.001.067.719,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		1.181.067.719,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-		-	42.676.350.544,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	43.098.783.498,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD													
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	42.137.950.544,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		42.560.383.498,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				45 Paket	441.400.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		441.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	97.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		97.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-		-	1.533.286.500,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		1.533.286.500,00	
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	1.533.286.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		1.533.286.500,00	SEKRETARIAT DPRD
153	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-		-	32.529.571.119,00						-	37.897.583.200,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-		-	5.838.483.119,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		7.443.355.200,00	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	156.071.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		156.071.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				24 Dokumen	3.755.662.919,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		5.360.535.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan													
						Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				24 Dokumen	424.947.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		424.947.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				12 Dokumen	820.228.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		820.228.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD													
						Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	681.574.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		681.574.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-		-	4.174.549.500,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		4.251.549.500,00	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS													
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	386.642.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		386.642.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	387.579.700,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		387.579.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD													
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				4 Dokumen	1.210.299.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		1.210.299.500,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				3 Dokumen	980.028.300,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		980.028.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				5 Dokumen	609.120.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		669.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertangungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertangungjawaban APBD				2 Dokumen	600.880.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		617.880.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	7.578.463.200,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	9.578.463.200,00	
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				21 Laporan	804.994.300,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		804.994.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				21 Laporan	848.478.300,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		848.478.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				21 Laporan	1.023.270.300,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		1.023.270.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				21 Laporan	804.994.300,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		804.994.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				6 Laporan	1.109.602.100,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		1.109.602.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				10 Dokumen	2.987.123.900,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		4.987.123.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	7.139.743.900,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	7.050.883.900,00	
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				45 Dokumen	250.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	1.861.806.700,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		1.861.806.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	679.292.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		679.292.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				96 Dokumen	613.403.700,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		613.403.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	2.000.404.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		2.161.544.500,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD					182 Dokumen	1.734.836.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		1.734.836.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	3.600.018.700,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	4.257.018.700,00		
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah					48 Laporan	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD					1 Dokumen	0,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		135.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses					3 Dokumen	3.500.018.700,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		3.972.018.700,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	35.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	0,00		
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD					12 Laporan	35.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	-			-	726.579.700,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	726.579.700,00		
	4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah					52 Dokumen	726.579.700,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		726.579.700,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	3.436.733.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-	-	4.589.733.000,00		
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					12 Dokumen	17.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		170.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					36 Dokumen	3.419.733.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	-		4.419.733.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
						Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah													17.027.427.000,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													17.027.427.000,00		
	5	01				PERENCANAAN														15.912.202.000,00	
154	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			70 Indeks 82 Nilai A Nilai	12.447.625.845,00						-	12.116.905.000,00		
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-			44 Dokumen	693.750.008,00			-	-	-	-	350.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8 Dokumen	574.820.958,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	9.999.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	9.999.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3 Laporan	19.999.250,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30 Laporan	78.930.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	-			14 Dokumen	10.235.215.891,00			-	-	-	-	10.489.803.702,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					50 Orang/bulan	10.194.930.441,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.449.803.702,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	15.071.450,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD					12 Laporan	25.214.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	-			70 Orang	368.873.500,00			-	-	-	-	325.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					50 Orang	292.460.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					70 Orang	35.190.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					50 Orang	41.223.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum sesuai kebutuhan	-			100 Persen	674.871.466,00			-	-	-	-	473.391.298,00	
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	159.005.926,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	79.040.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	35.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	25.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	300.321.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		203.391.298,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	76.504.540,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	-			1 Unit	75.900.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	5	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnva																		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	75.900.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	-			24 Laporan	111.212.128,00			-	-	-	-	116.200.000,00						
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		16.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	16.200.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	95.012.128,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	-			44 Unit	287.802.852,00			-	-	-	-	287.510.000,00						
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		132.510.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit	133.562.852,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Jumlah Mebel yang Dipelihara					20 Unit	10.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnva																		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					20 Unit	44.240.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
155	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program Persentase capaian indikator program Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	-			90 Persen 90 Persen 100 Persen 100 Persen	1.981.858.928,00					-		1.765.200.000,00		
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan	-			3 BA 2 Dokumen 5 Dokumen	1.201.465.364,00			-	-	-	-	880.000.000,00		
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah															
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)					6 Dokumen	489.397.164,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik															
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					3 Berita Acara	74.495.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota															
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota					2 Berita Acara	588.573.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)					3 Dokumen	49.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	-			2 Dokumen	136.069.800,00			-	-	-	-	145.200.000,00		
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah															
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi					50 Orang	69.869.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan					1 Buku	66.200.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	-			19 Dokumen	375.295.100,00			-	-	-	-	470.000.000,00		
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota															
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan					8 Laporan	46.776.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah															
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah					10 Laporan	328.518.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		440.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	-			3 Dokumen	269.028.664,00			-	-	-	-	270.000.000,00		
	5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah															
						Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola					1 Dokumen	87.812.364,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah															
						Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					2 Dokumen	181.216.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
156	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	-			90 Persen 90 Persen 90 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.887.883.922,00						-	2.030.097.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan Jumlah dokumen monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dihasilkanJumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	-			12 Dokumen 10 Dokumen	820.258.930,00			-	-	-		876.197.000,00
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	334.759.430,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		345.697.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				13 Laporan	29.999.750,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				13 Laporan	33.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	369.999.750,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				7 Laporan	25.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				7 Laporan	27.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	-			12 Dokumen 10 Dokumen	520.000.000,00			-	-	-	-	477.600.000,00
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	220.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					5 Laporan	18.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					5 Laporan	25.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					4 Dokumen	214.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					4 Laporan	18.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					4 Laporan	25.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	-			12 Dokumen 10 Dokumen	547.624.992,00			-	-	-	-	676.300.000,00	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					4 Dokumen	181.436.864,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		330.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					2 Laporan	10.050.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					2 Laporan	61.305.464,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					4 Dokumen	223.405.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan															
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					2 Laporan	10.050.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan															
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					2 Laporan	61.377.664,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
157	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	-			100 Persen	1.168.118.152,00						-	1.115.225.000,00		
						Persentase pengembangan inovasi					70 Persen										
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	-			2 Dokumen	260.218.814,00			-	-	-	-	115.310.000,00		
	5	05	02	2.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi															
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi					0 Laporan	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan															
						Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik					0 Laporan	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.310.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan															
						Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan					1 Rekomendasi	260.218.814,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	-			4 Dokumen	52.070.850,00			-	-	-	-	155.000.000,00		
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial															
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial					0 Dokumen	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan															
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					1 Dokumen	17.356.950,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata															
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					0 Dokumen	17.356.950,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	17.356.950,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	-			4 Dokumen	54.812.650,00			-	-	-	-	170.370.000,00	
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	17.365.950,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				0 Dokumen	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				0 Dokumen	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.370.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	37.446.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	-			19 Dokumen	801.015.838,00			-	-	-	-	674.545.000,00	
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				0 Dokumen	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		126.445.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				0 Laporan	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				5 Laporan	727.060.238,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	58.955.750,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		72.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
															10	11			
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				9 Laporan	14.999.850,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual											14.379.183.000,00		
						Badan Pengelola Pendapatan Daerah					13.318.101.253,00						14.379.183.000,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN					13.318.101.253,00						14.379.183.000,00		
158	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		64,10 Nilai 76 Nilai 73 Nilai	9.748.994.138,00					-	10.526.647.000,00		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	-		15 Dokumen	124.147.000,00			-	-	-	125.680.000,00		
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	53.647.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	55.271.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	2.950.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	3.034.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	2.500.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	2.760.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	2.750.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	5.642.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	2.450.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	2.685.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	8.850.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	11.057.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	51.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	45.231.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		12 Bulan	7.927.383.138,00			-	-	-	8.866.354.000,00		
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			38 Orang/bulan	7.879.613.138,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8.820.094.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	46.200.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	44.657.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	1.570.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		1.603.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	-			2 Kegiatan	69.457.000,00			-	-	-	-	204.690.000,00	
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					70 Orang	19.333.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					8 Orang	50.124.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		144.690.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	341.832.900,00			-	-	-	-	458.086.000,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1.532.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		2.396.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	73.466.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		77.596.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					3 Paket	8.091.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		45.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	82.644.800,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		81.263.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	58.862.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		61.831.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					5 Laporan	3.700.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					70 Laporan	113.536.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		175.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Gedung/ Kantor yang Diadakan	-			12 Bulan	888.382.100,00			-	-	-	-	350.930.000,00	
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					17 Unit	816.507.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		250.930.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	71.875.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	119.875.000,00			-	-	-	-	169.377.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	90.515.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		138.677.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		12 Laporan	29.360.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		30.700.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Barang Milik daerah yang Dipelihara	-		12 Bulan	277.917.000,00			-	-	-	-	351.530.000,00	
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit	200.270.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		262.300.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			68 Unit	77.647.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		89.230.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
159	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah Persentase Realisasi Pajak Daerah	-		3 Persen 100 Persen	3.569.107.115,00					-		3.852.536.000,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	-		115615 WP	3.569.107.115,00			-	-	-	-	3.852.536.000,00	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			2 Dokumen	70.999.814,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		76.500.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			1 Dokumen	148.655.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		272.530.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			4 Laporan	190.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.450.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			2 Unit	786.594.562,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		589.256.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			3 Laporan	523.718.992,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			3 Laporan	61.909.964,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		61.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			50 Obyek Pajak	95.999.678,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		106.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			118098 Dokumen	735.460.250,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		840.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			575 Layanan	0,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				118098 Dokumen	173.949.806,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	183.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1200 Dokumen	265.246.649,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	235.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				300 Dokumen	106.821.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	167.800.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				500 Dokumen	246.670.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	275.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	88.426.400,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	122.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	74.654.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	349.000.000,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						49.200.290.494,21						49.327.385.000,37	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						49.200.290.494,21						49.327.385.000,37	
	5	02				KEUANGAN						49.200.290.494,21						49.327.385.000,37	
160	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-		19.478.906.900,21					-	19.952.747.900,37	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-		31.845.000,00			-	-	-	31.845.000,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	23.115.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	23.115.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	8.730.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	8.730.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-		18.463.957.458,21			-	-	-	18.833.087.767,37	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				504 Orang/bulan	18.456.515.458,21	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	18.825.645.767,37	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.440.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	4.440.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	3.002.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	3.002.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-		1.714.500,00			-	-	-	1.714.500,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.714.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		1.714.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	10.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				44 Orang	10.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	588.195.900,00			-	-	-	-	505.195.900,00	
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	159.184.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		159.184.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	53.722.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		53.722.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	27.069.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		27.069.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	223.362.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	85.707.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		61.069.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	39.150.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		39.150.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	146.178.042,00			-	-	-	-	333.888.733,00	
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	146.178.042,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		333.888.733,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	20.516.000,00			-	-	-	-	20.516.000,00	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5.400.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		5.400.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	15.116.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		15.116.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	216.500.000,00			-	-	-	-	216.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Pajaknya	-	-	-	12 Unit	216.500.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-	-	216.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
161	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	28.138.792.894,00					-	-	28.124.637.100,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	-	-	-	1.266.154.344,00			-	-	-	-	1.349.637.100,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	83.402.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-	-	88.599.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	79.650.750,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-	-	76.963.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	232.660.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-	-	232.660.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				60 Dokumen	265.529.644,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-	-	292.262.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	21.711.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-	-	21.711.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	21.711.700,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-	-	21.711.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	100.128.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-	-	100.128.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				8 Dokumen	99.192.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-	-	99.192.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	150.360.650,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-	-	217.609.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	76.176.350,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-	-	76.176.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	55.888.550,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-	-	53.076.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				120 Orang	79.741.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-	-	69.546.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	-	-	-	360.799.100,00			-	-	-	-	300.000.000,00	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	24.391.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-	-	52.613.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				240 Dokumen	36.727.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-	-	26.727.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			5 Dokumen	41.331.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		31.331.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			12 Laporan	42.478.900,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		32.478.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			132 Dokumen	39.673.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		29.673.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			1 Dokumen	64.468.300,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			220 Orang	111.728.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		77.175.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-		-	840.846.950,00			-	-	-	-	775.000.000,00	
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			22 Dokumen	34.677.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		34.677.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			3 Laporan	458.285.550,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		392.438.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	71.823.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		71.823.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	36.442.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		36.442.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah													
						Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	69.308.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		69.308.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah													
						Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	61.810.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		61.810.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				60 Orang	53.268.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		53.268.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota													
						Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				15 Lembaga	28.747.200,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		28.747.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah													
						Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	26.484.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		26.484.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-		-	25.500.000.000,00			-	-	-	-	25.500.000.000,00	
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				2 Laporan	500.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		500.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	25.000.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		25.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-		-	170.992.500,00			-	-	-	-	200.000.000,00	
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah													
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	170.992.500,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
162	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-		-	1.582.590.700,00			-	-	-	-	1.250.000.000,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-		-	1.582.590.700,00			-	-	-	-	1.250.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga														
						Jumlah Standar Harga yang Disusun					2 Dokumen	140.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah					2 Dokumen	37.174.100,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
						Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					2 Dokumen	20.426.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		35.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah					4 Laporan	189.990.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		75.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah					1 Laporan	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah					15 Laporan	600.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		325.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah					4 Laporan	205.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		160.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					4 Laporan	25.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					5 Dokumen	150.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					4 Laporan	15.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					130 Orang	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah							13.920.924.930,00						15.546.256.900,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.920.924.930,00						15.546.256.900,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN							11.370.924.930,00						12.616.256.900,00	
163	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Indeks Profesionalitas ASN	-			72 (BB) Nilai 59 Indeks	7.742.924.930,00						-	8.536.256.900,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan monev yang disusun	-			50 Dokumen	196.000.000,00			-	-	-	-	251.000.000,00	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9 Dokumen	80.010.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	7.500.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35 Laporan	85.990.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	-			28 Dokumen	6.730.924.930,00			-	-	-	-	7.290.256.900,00	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	6.717.924.930,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.275.256.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.500.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	6.500.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelayanan administrasi kepegawaian ASN BKPSDMD	-			12 bulan	50.000.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	
	5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelayanan administrasi umum perkantoran	-			12 bulan	584.300.000,00			-	-	-	-	735.000.000,00	
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	11.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	140.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	60.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional					Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	85.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																14.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	76.300.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 bulan	46.200.000,00			-	-	-	50.000.000,00					
	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	46.200.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 bulan	19.500.000,00			-	-	-	30.000.000,00					
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	13.500.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 bulan	116.000.000,00			-	-	-	120.000.000,00					
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	86.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					40 Unit	30.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
164	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian) Prosentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin Prosentase ASN yang dijatuhi hukuman disiplin Prosentase ASN yang melaporkan SKP Prosentase ASN yang melaporkan SKP Prosentase ASN yang melaporkan SKP Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	-			79.75 Nilai 80.5 Nilai 0.18 Persen 0.18 Persen 86.33 Persen 86.33 Persen 86.33 Persen 2.20 Persen	3.628.000.000,00					-	4.080.000.000,00		
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengelolaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	-			3 Dokumen	1.945.000.000,00			-	-	-	-	2.000.000.000,00	
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	35.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	950.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	15.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				2 Dokumen	310.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				2 Lembaga	350.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	225.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	60.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen pengelolaan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat ASN	-			12 dokumen	980.000.000,00			-	-	-	-	1.080.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					4 Dokumen	300.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					600 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					4 Dokumen	580.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		580.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen pengembangan kompetensi ASN	-			4 Dokumen	238.000.000,00			-	-	-	-	430.000.000,00	
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
						Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya					80 Orang	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		265.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan					40 Orang	90.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
						Jumlah ASN Fungsional yang Dibina					150 Orang	48.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen pengelolaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin dan penyelesaian pelanggaran disiplin	-			3 Dokumen	465.000.000,00			-	-	-	-	570.000.000,00	
	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					13 Laporan	60.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
						Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan					3 Orang	75.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
						Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa					250 Orang	65.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN														
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan					500 Orang	210.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					12 Laporan	30.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
																Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				12 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						2.550.000.000,00							2.930.000.000,00				
165	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase ASN yang memenuhi syarat Kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan Prosentase ASN yang memenuhi syarat Kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	-			10.25 Persen 11 Persen	2.550.000.000,00						-	2.930.000.000,00				
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	-			150 Orang	550.000.000,00			-	-	-	-	650.000.000,00				
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
						Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi					4100 Orang	300.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-						
	5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					35 Dokumen	250.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-						
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis manajerial dan fungsional	-			70 Orang	2.000.000.000,00			-	-	-	-	2.280.000.000,00				
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																580.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					1 Laporan	400.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-						
	5	04	02	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																1.700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama					3 Dokumen	1.600.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
														Nasional	Daerah		14		15	16		17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Inspektorat						13.499.499.239,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	56.444.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	93.478.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		93.500.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	18.989.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang diadakan	-			2 set	57.405.000,00			-	-	-	-	73.000.000,00	
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	11.205.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	46.200.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		63.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	-			12 Bulan	369.754.512,00			-	-	-	-	259.368.000,00	
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	42.640.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.368.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	327.114.512,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan BMD	-			12 Bulan	329.472.192,00			-	-	-	-	269.840.000,00	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Paiknya				3 Unit	145.312.064,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.540.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	5.940.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	115.924.128,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		93.300.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	62.296.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	INSPEKTORAT
167	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Hasil Pengawasan	-			88 %	1.251.778.064,00						-	742.750.000,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	-			25 Kegiatan	875.666.000,00			-	-	-	-	592.740.000,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				30 Laporan	303.104.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		209.970.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				5 Laporan	146.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		82.285.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				30 Laporan	196.804.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				30 Laporan	48.300.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.485.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					12 Dokumen	181.458.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	-			8 Kegiatan	376.112.064,00			-	-	-	-	150.010.000,00	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani					4 Laporan	122.412.064,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.765.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					5 Laporan	253.700.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		89.245.000,00	INSPEKTORAT
168	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	-			3 Level	1.022.273.733,00						-	503.903.572,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi yang dihasilkan	-			2 Dokumen sesuai ketentuan yang berlaku	238.232.000,00			-	-	-	-	155.000.000,00	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun					2 Rekomendasi	238.232.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		155.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT	-			18 Kegiatan	784.041.733,00			-	-	-	-	348.903.572,00	
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					30 perangkat daerah	96.254.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		114.975.572,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					36 Kegiatan	523.438.733,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		171.800.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					30 perangkat daerah	164.349.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62.128.000,00	INSPEKTORAT
						Kecamatan Cimahi Utara						15.603.120.150,00							17.467.178.820,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						15.603.120.150,00							17.467.178.820,00	
	7	01				KECAMATAN						15.603.120.150,00							17.467.178.820,00	
169	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	12.902.375.550,00						-	14.428.113.820,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	215.469.850,00			-	-	-	-	257.623.820,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen	120.519.850,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		144.623.820,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	94.950.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		113.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.782.730.900,00			-	-	-	-	10.733.460.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	9.713.880.900,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.650.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	14.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.640.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	54.850.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.820.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	115.700.000,00			-	-	-	-	138.840.000,00	
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	14.700.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.640.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				130 Orang	101.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		121.200.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	944.037.390,00			-	-	-	-	1.164.600.000,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	444.421.800,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		533.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	28.995.590,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		41.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	213.300.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		255.100.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				24 Paket	53.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		63.700.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	66.500.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		79.800.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	137.820.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		192.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	24.000.000,00			-	-	-	-	44.385.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	24.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.385.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	681.836.000,00			-	-	-	-	769.880.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	161.900.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	194.200.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	519.936.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	575.680.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			1.138.601.410,00			-	-	-	-	1.319.325.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paia	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	454.800.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	490.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				5 Unit	683.801.410,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	829.325.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
170	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			1.471.610.300,00					-		1.621.085.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			1.448.460.000,00			-	-	-	-	1.593.300.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1.448.460.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.593.300.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			23.150.300,00			-	-	-	-	27.785.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	23.150.300,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	27.785.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
171	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			758.323.400,00					-		922.620.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			558.323.400,00			-	-	-	-	682.620.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	83.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				87 Unit	159.600.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	191.520.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	338.723.400,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	408.100.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			200.000.000,00			-	-	-	-	240.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					4 Laporan	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		240.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
172	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	314.654.100,00					-		384.960.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	314.654.100,00			-	-	-	-	384.960.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					24 Laporan	314.654.100,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		384.960.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
173	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	156.156.800,00					-		110.400.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	156.156.800,00			-	-	-	-	110.400.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					800 Orang	85.780.800,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.400.000,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila					87 Lembaga Masyarakat	70.376.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMAHI UTARA
						Kelurahan Cipageran						4.561.930.000,00							4.868.400.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						4.561.930.000,00							4.868.400.000,00	
	7	01				KECAMATAN						4.561.930.000,00							4.868.400.000,00	
174	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.955.491.500,00					-		3.226.600.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.955.491.500,00			-	-	-	-	3.226.600.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7 Lembaga Kemasyarakatan	42.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	KELURAHAN CIPAGERAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					29 Unit	1.578.950.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.666.100.000,00	KELURAHAN CIPAGERAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	1.334.541.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.510.500.000,00	KELURAHAN CIPAGERAN
175	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	1.480.304.100,00						-	1.560.800.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1.480.304.100,00			-	-	-	-	1.560.800.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				36 Laporan	1.480.304.100,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.560.800.000,00	KELURAHAN CIPAGERAN
176	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	126.134.400,00						-	81.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	126.134.400,00			-	-	-	-	81.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				450 Orang	76.134.400,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.000.000,00	KELURAHAN CIPAGERAN
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila														
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				7 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CIPAGERAN
						Kelurahan Citeureup														
	7					UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01				KECAMATAN														
177	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.011.291.500,00						-	2.265.300.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.011.291.500,00			-	-	-	-	2.265.300.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	42.450.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Citeureup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		64.000.000,00	KELURAHAN CITEUREUP
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				19 Unit	1.047.300.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.105.100.000,00	KELURAHAN CITEUREUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	921.541.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Citeureup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.096.200.000,00	KELURAHAN CITEUREUP
178	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	1.111.104.100,00						-	1.173.150.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1.111.104.100,00			-	-	-	-	1.173.150.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				36 Laporan	1.111.104.100,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Citeureup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.173.150.000,00	KELURAHAN CITEUREUP
179	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	126.134.400,00						-	81.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	126.134.400,00			-	-	-	-	81.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	76.134.400,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Citeureup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.000.000,00	KELURAHAN CITEUREUP
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila														
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				7 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Citeureup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CITEUREUP
						Kelurahan Cibabat						3.988.280.000,00							4.281.650.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.988.280.000,00							4.281.650.000,00	
	7	01				KECAMATAN						3.988.280.000,00							4.281.650.000,00	
180	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.592.041.500,00						-	2.860.550.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.592.041.500,00			-	-	-	-	2.860.550.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	57.550.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.450.000,00	KELURAHAN CIBABAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	1.353.900.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.428.600.000,00	KELURAHAN CIBABAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7 Pokmas / Ormas	1.180.591.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.371.500.000,00	KELURAHAN CIBABAT
181	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	1.270.104.100,00						-	1.340.100.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1.270.104.100,00			-	-	-	-	1.340.100.000,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					36 Laporan	1.270.104.100,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.340.100.000,00	KELURAHAN CIBABAT
182	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	126.134.400,00						-	81.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	126.134.400,00			-	-	-	-	81.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					400 Orang	76.134.400,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	81.000.000,00	KELURAHAN CIBABAT	
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila														
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila					7 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	KELURAHAN CIBABAT	
						Kelurahan Pasirkaliki						2.418.606.400,00							2.609.050.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.418.606.400,00							2.609.050.000,00	
	7	01				KECAMATAN						2.418.606.400,00							2.609.050.000,00	
183	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.625.517.900,00						-	1.821.250.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.625.517.900,00			-	-	-	-	1.821.250.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7 Lembaga Kemasyarakatan	41.200.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	43.300.000,00	KELURAHAN PASIRKALIKI	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					14 Unit	783.800.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	827.050.000,00	KELURAHAN PASIRKALIKI	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
																Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	950.900.000,00	KELURAHAN PASIRKALIKI
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-			7 Pokmas / Ormas	800.517.900,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
184	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	666.954.100,00					-	-	706.800.000,00					
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	666.954.100,00			-	-	-	-	706.800.000,00					
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	706.800.000,00	KELURAHAN PASIRKALIKI
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-			36 Laporan	666.954.100,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
185	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	126.134.400,00					-	-	81.000.000,00					
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	126.134.400,00			-	-	-	-	81.000.000,00					
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	81.000.000,00	KELURAHAN PASIRKALIKI
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-			900 Orang	76.134.400,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila																	0,00	KELURAHAN PASIRKALIKI
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	-	-			7 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
						Kecamatan Cimahi Tengah						21.712.712.850,00							20.622.000.000,00					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						21.712.712.850,00							20.622.000.000,00					
	7	01				KECAMATAN						21.712.712.850,00							20.622.000.000,00					
186	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	18.187.274.900,00					-	-	17.202.000.000,00					
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	217.909.400,00			-	-	-	-	220.000.000,00					
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	110.000.000,00	KECAMATAN CIMAH TENGGAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-			7 Dokumen	108.874.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	110.000.000,00	KECAMATAN CIMAH TENGGAH
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			8 Laporan	109.034.900,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.585.284.000,00			-	-	-	-	13.280.000.000,00					
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	13.200.000.000,00	KECAMATAN CIMAH TENGGAH
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-			88 Orang/bulan	13.466.654.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-							

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.387.800,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN CIMAH TENGGAH	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD				12 Laporan	108.242.200,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN CIMAH TENGGAH	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	176.128.100,00			-	-	-	98.000.000,00		
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	35.401.600,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	33.000.000,00	KECAMATAN CIMAH TENGGAH	
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	140.726.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	65.000.000,00	KECAMATAN CIMAH TENGGAH	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	1.448.531.600,00			-	-	-	1.154.000.000,00		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	679.448.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	370.000.000,00	KECAMATAN CIMAH TENGGAH	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	415.056.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	365.000.000,00	KECAMATAN CIMAH TENGGAH	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	134.997.600,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	200.000.000,00	KECAMATAN CIMAH TENGGAH	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	87.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	89.000.000,00	KECAMATAN CIMAH TENGGAH	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	132.030.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	130.000.000,00	KECAMATAN CIMAH TENGGAH	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	1.011.775.000,00			-	-	-	840.000.000,00		
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	1.011.775.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	840.000.000,00	KECAMATAN CIMAH TENGGAH	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	1.164.566.800,00			-	-	-	1.060.000.000,00		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	307.452.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	300.000.000,00	KECAMATAN CIMAH TENGGAH	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	857.114.800,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	760.000.000,00	KECAMATAN CIMAH TENGGAH	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	583.080.000,00			-	-	-	550.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	583.080.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI TENGAH
187	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		-	1.266.626.200,00					-		1.270.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-		-	1.200.241.400,00			-	-	-	-	1.200.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1.200.241.400,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.200.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI TENGAH
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	66.384.800,00			-	-	-	-	70.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	66.384.800,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI TENGAH
188	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-	1.389.185.750,00					-		1.155.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	1.118.853.750,00			-	-	-	-	905.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga Kemasyarakatan	109.214.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI TENGAH
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	219.912.700,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI TENGAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				14 Pokmas / Ormas	789.727.050,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		680.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI TENGAH
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-		-	270.332.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	270.332.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI TENGAH
189	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		-	424.247.500,00					-		400.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	424.247.500,00			-	-	-	-	400.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					24 Laporan	424.247.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI TENGAH
190	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	445.378.500,00					-		595.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	445.378.500,00			-	-	-	-	595.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	181.934.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		145.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI TENGAH
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				110 Lembaga Masyarakat	263.444.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI TENGAH
						Kelurahan Baros						3.682.785.510,00							3.662.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.682.785.510,00							3.662.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						3.682.785.510,00							3.662.000.000,00	
191	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.463.562.560,00					-		2.618.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.463.562.560,00			-	-	-	-	2.618.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga Kemasyarakatan	91.986.800,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.000.000,00	KELURAHAN BAROS
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	1.465.773.900,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.398.000.000,00	KELURAHAN BAROS
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				14 Pokmas / Ormas	905.801.860,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.125.000.000,00	KELURAHAN BAROS
192	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	1.032.124.450,00					-		945.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1.032.124.450,00			-	-	-	-	945.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12 Laporan	1.032.124.450,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		945.000.000,00	KELURAHAN BAROS			
193	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	187.098.500,00						-	99.000.000,00				
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	187.098.500,00			-	-	-	-	99.000.000,00				
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					100 Orang	137.098.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		99.000.000,00	KELURAHAN BAROS			
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila																	
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila					25 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN BAROS			
						Kelurahan Cigugur Tengah						3.546.095.470,00							3.198.000.000,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.546.095.470,00							3.198.000.000,00				
	7	01				KECAMATAN						3.546.095.470,00							3.198.000.000,00				
194	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.260.404.570,00						-	2.153.000.000,00				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.260.404.570,00			-	-	-	-	2.153.000.000,00				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					14 Lembaga Kemasyarakatan	87.051.400,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		78.000.000,00	KELURAHAN CIGUGUR TENGAH			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					19 Unit	1.109.372.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.060.000.000,00	KELURAHAN CIGUGUR TENGAH			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					14 Pokmas / Ormas	1.063.981.170,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.015.000.000,00	KELURAHAN CIGUGUR TENGAH			
195	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	1.129.777.900,00						-	955.000.000,00				
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1.129.777.900,00			-	-	-	-	955.000.000,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12 Laporan	1.129.777.900,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		955.000.000,00	KELURAHAN CIGUGUR TENGAH
196	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	155.913.000,00						-	90.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	155.913.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia					100 Orang	105.913.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	KELURAHAN CIGUGUR TENGAH
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila														
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila					19 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CIGUGUR TENGAH
						Kelurahan Karangmekar														
	7					UNSUR KEWILAYAHAN														
	7	01				KECAMATAN														
197	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.096.191.818,00						-	2.055.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.096.191.818,00			-	-	-	-	2.055.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					14 Lembaga Kemasyarakatan	86.821.450,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	KELURAHAN KARANGMEKAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					17 Unit	1.085.337.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		990.000.000,00	KELURAHAN KARANGMEKAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					14 Pokmas / Ormas	924.032.868,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		985.000.000,00	KELURAHAN KARANGMEKAR
198	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	747.795.200,00						-	685.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	747.795.200,00			-	-	-	-	685.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
																Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	747.795.200,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		685.000.000,00	KELURAHAN KARANGMEKAR					
199	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	150.578.350,00					-	-	95.000.000,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	150.578.350,00			-	-	-	-	95.000.000,00						
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100.578.350,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		95.000.000,00	KELURAHAN KARANGMEKAR					
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila																			
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				17 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KARANGMEKAR					
						Kelurahan Setiamanah															2.997.000.000,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																2.997.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN																	2.997.000.000,00		
200	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.083.708.426,00					-	-	2.145.000.000,00						
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.083.708.426,00			-	-	-	-	2.145.000.000,00						
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga Kemasyarakatan	78.771.735,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	KELURAHAN SETIAMANAH					
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				18 Unit	1.106.867.200,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.060.000.000,00	KELURAHAN SETIAMANAH					
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				14 Pokmas / Ormas	898.069.491,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.005.000.000,00	KELURAHAN SETIAMANAH					
201	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	804.459.700,00					-	-	750.000.000,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	804.459.700,00			-	-	-	-	750.000.000,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12 Laporan	804.459.700,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		750.000.000,00	KELURAHAN SETIAMANAH
202	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	185.437.200,00						-	102.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	185.437.200,00			-	-	-	-	102.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					100 Orang	135.437.200,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		102.000.000,00	KELURAHAN SETIAMANAH
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila														
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila					18 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SETIAMANAH
						Kelurahan Cimahi						2.468.702.360,00							1.985.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.468.702.360,00							1.985.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						2.468.702.360,00							1.985.000.000,00	
203	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.786.174.960,00						-	1.446.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.786.174.960,00			-	-	-	-	1.446.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					14 Lembaga Kemasyarakatan	83.732.700,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		69.000.000,00	KELURAHAN CIMAHI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					10 Unit	644.677.900,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		609.000.000,00	KELURAHAN CIMAHI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					14 Pokmas / Ormas	1.057.764.360,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		768.000.000,00	KELURAHAN CIMAHI
204	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	509.920.900,00						-	460.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	509.920.900,00			-	-	-	-	460.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12 Laporan	509.920.900,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		460.000.000,00	KELURAHAN CIMAHI
205	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	172.606.500,00						-	79.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	172.606.500,00			-	-	-	-	79.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					100 Orang	122.606.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		79.000.000,00	KELURAHAN CIMAHI
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila														
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila					10 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CIMAHI
						Kelurahan Padasuka						3.963.415.100,00							3.779.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.963.415.100,00							3.779.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						3.963.415.100,00							3.779.000.000,00	
206	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.442.602.100,00						-	2.469.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.442.602.100,00			-	-	-	-	2.469.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					14 Lembaga Kemasyarakatan	77.797.050,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		79.000.000,00	KELURAHAN PADASUKA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					21 Unit	1.352.401.900,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.290.000.000,00	KELURAHAN PADASUKA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					14 Pokmas / Ormas	1.012.403.150,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.100.000.000,00	KELURAHAN PADASUKA
207	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	1.353.048.000,00						-	1.225.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1.353.048.000,00			-	-	-	-	1.225.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	1.225.000.000,00	KELURAHAN PADASUKA
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12 Laporan	1.353.048.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
208	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	167.765.000,00					-	85.000.000,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	167.765.000,00			-	-	-	85.000.000,00						
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	85.000.000,00	KELURAHAN PADASUKA
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					100 Orang	117.765.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila																	0,00	KELURAHAN PADASUKA
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila					21 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
						Kecamatan Cimahi Selatan															18.551.104.456,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																18.551.104.456,00		
	7	01				KECAMATAN																	18.551.104.456,00	
209	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	15.555.439.598,00					-	16.330.084.445,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	224.453.500,00			-	-	-	165.096.697,00						
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	48.683.250,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					13 Dokumen	113.583.550,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	116.413.447,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13 Laporan	110.869.950,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.390.532.641,00			-	-	-	13.010.059.273,00						
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	12.986.931.763,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					85 Orang/bulan	12.368.506.441,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-							
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	12.396.615,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	11.806.300,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD				12 Laporan	10.219.900,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.730.895,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN					
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	66.902.100,00			-	-	-	-	70.745.955,00					
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	9.975.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.972.500,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN					
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	56.927.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	59.773.455,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN					
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	935.497.087,00			-	-	-	-	1.028.299.194,00					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	14.952.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15.699.600,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN					
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	292.168.485,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	321.385.333,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN					
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	374.733.037,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	412.206.340,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN					
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	43.190.565,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	47.509.621,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN					
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	78.750.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	86.625.000,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN					
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	131.703.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	144.873.300,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN					
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	81.970.000,00			-	-	-	-	94.710.000,00					
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	81.970.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	94.710.000,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN					
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	724.918.850,00			-	-	-	-	773.449.635,00					
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	245.696.850,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	270.266.535,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN					
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	479.222.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	503.183.100,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN					
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	1.131.165.420,00			-	-	-	-	1.187.723.691,00					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	493.168.420,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		517.826.841,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	637.997.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		669.896.850,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN
210	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-		-	888.255.650,00					-		935.773.397,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-		-	826.156.350,00			-	-	-	-	867.464.167,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	826.156.350,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		867.464.167,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	62.099.300,00			-	-	-	-	68.309.230,00	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	62.099.300,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		68.309.230,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN
211	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-	776.621.395,00					-		815.452.464,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	647.340.250,00			-	-	-	-	679.707.262,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	88.868.850,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		93.312.292,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	138.957.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		145.904.850,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	419.514.400,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		440.490.120,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-		-	129.281.145,00			-	-	-	-	135.745.202,00	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	129.281.145,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		135.745.202,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN
212	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		-	208.308.000,00					-		218.723.400,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	208.308.000,00			-	-	-	-	218.723.400,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				24 Laporan	208.308.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	218.723.400,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	
213	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-		-	239.115.000,00					-	-	251.070.750,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	239.115.000,00			-	-	-	-	251.070.750,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1190 Orang	139.115.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	146.070.750,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila													
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				115 Lembaga Masyarakat	100.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	105.000.000,00	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	
						Kelurahan Cibeber					2.452.244.314,00							2.574.856.519,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.452.244.314,00							2.574.856.519,00	
	7	01				KECAMATAN					2.452.244.314,00							2.574.856.519,00	
214	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-	1.596.161.124,00						-	1.675.969.170,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	51.524.924,00			-	-	-	-	54.101.170,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11 Lembaga Kemasyarakatan	51.524.924,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	54.101.170,00	KELURAHAN CIBEBER	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	1.544.636.200,00			-	-	-	-	1.621.868.000,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	769.200.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	807.660.000,00	KELURAHAN CIBEBER	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	775.436.200,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	PAJAK DAERAH	-	-	-	814.208.000,00	KELURAHAN CIBEBER	
215	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		-	766.918.190,00						-	805.264.099,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	766.918.190,00			-	-	-	-	805.264.099,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	766.918.190,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		805.264.099,00	KELURAHAN CIBEBER
216	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-		-	89.165.000,00					-	-	93.623.250,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	89.165.000,00			-	-	-	-	93.623.250,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				700 Orang	39.165.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		41.123.250,00	KELURAHAN CIBEBER
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila													
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				14 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	PAJAK DAERAH	-	-	-		52.500.000,00	KELURAHAN CIBEBER
						Kelurahan Leuwigajah					3.336.463.369,00							3.503.286.536,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					3.336.463.369,00							3.503.286.536,00	
	7	01				KECAMATAN					3.336.463.369,00							3.503.286.536,00	
217	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-	1.985.229.374,00					-	-	2.084.490.842,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	57.671.624,00			-	-	-	-	60.555.205,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11 Lembaga Kemasyarakatan	57.671.624,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.555.205,00	KELURAHAN LEUWIGAJAH
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-	1.927.557.750,00			-	-	-	-	2.023.935.637,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	1.081.200.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.135.260.000,00	KELURAHAN LEUWIGAJAH
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	846.357.750,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		888.675.637,00	KELURAHAN LEUWIGAJAH
218	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		-	1.242.856.620,00					-	-	1.304.999.451,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	1.242.856.620,00			-	-	-	-	1.304.999.451,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					4 Laporan	1.242.856.620,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.304.999.451,00	KELURAHAN LEUWIGAJAH
219	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	108.377.375,00						-	113.796.243,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	108.377.375,00			-	-	-	-	113.796.243,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					600 Orang	58.377.375,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		61.296.243,00	KELURAHAN LEUWIGAJAH
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila														
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila					20 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	PAJAK DAERAH	-	-	-		52.500.000,00	KELURAHAN LEUWIGAJAH
						Kelurahan Utama						2.691.703.964,00							2.826.289.160,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.691.703.964,00							2.826.289.160,00	
	7	01				KECAMATAN						2.691.703.964,00							2.826.289.160,00	
220	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.734.738.349,00						-	1.821.475.265,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.734.738.349,00			-	-	-	-	1.821.475.265,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					11 Lembaga Kemasyarakatan	66.184.499,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		69.493.723,00	KELURAHAN UTAMA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					16 Unit	872.356.850,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		915.974.692,00	KELURAHAN UTAMA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					13 Pokmas / Ormas	796.197.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		836.006.850,00	KELURAHAN UTAMA
221	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	850.685.300,00						-	893.219.565,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	850.685.300,00			-	-	-	-	893.219.565,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
																Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					4 Laporan	850.685.300,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		893.219.565,00	KELURAHAN UTAMA					
222	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	106.280.315,00						-	111.594.330,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	106.280.315,00			-	-	-	-	111.594.330,00						
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					300 Orang	56.280.315,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		59.094.330,00	KELURAHAN UTAMA					
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila																			
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila					16 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	PAJAK DAERAH	-	-	-		52.500.000,00	KELURAHAN UTAMA					
						Kelurahan Melong						5.090.342.057,00							5.344.859.158,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						5.090.342.057,00							5.344.859.158,00						
	7	01				KECAMATAN						5.090.342.057,00							5.344.859.158,00						
223	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.369.430.842,00						-	3.537.902.383,00						
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.369.430.842,00			-	-	-	-	3.537.902.383,00						
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					11 Lembaga Kemasyarakatan	86.783.085,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Melong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		91.122.239,00	KELURAHAN MELONG					
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					36 Unit	1.933.319.104,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Melong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.029.985.059,00	KELURAHAN MELONG					
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					13 Pokmas / Ormas	1.349.328.653,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Melong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.416.795.085,00	KELURAHAN MELONG					
224	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	1.620.848.002,00						-	1.701.890.402,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1.620.848.002,00			-	-	-	-	1.701.890.402,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
																Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					4 Laporan	1.620.848.002,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Melong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.701.890.402,00	KELURAHAN MELONG				
225	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	100.063.213,00						-	105.066.373,00					
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	100.063.213,00			-	-	-	-	105.066.373,00					
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					600 Orang	50.063.213,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Melong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.566.373,00	KELURAHAN MELONG				
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila																		
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila					36 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Melong	PAJAK DAERAH	-	-	-		52.500.000,00	KELURAHAN MELONG				
						Kelurahan Cibeureum						4.313.122.653,00							4.528.778.783,00					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						4.313.122.653,00							4.528.778.783,00					
	7	01				KECAMATAN						4.313.122.653,00							4.528.778.783,00					
226	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.766.225.118,00						-	2.904.536.372,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.766.225.118,00			-	-	-	-	2.904.536.372,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					12 Lembaga Kemasyarakatan	76.335.217,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.151.977,00	KELURAHAN CIBEUREUM				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					29 Unit	1.568.641.596,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.647.073.675,00	KELURAHAN CIBEUREUM				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					11 Pokmas / Ormas	1.121.248.305,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.177.310.720,00	KELURAHAN CIBEUREUM				
227	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	1.446.616.500,00						-	1.518.947.325,00					
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1.446.616.500,00			-	-	-	-	1.518.947.325,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					4 Laporan	1.446.616.500,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.518.947.325,00	KELURAHAN CIBEUREUM
228	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	100.281.035,00					-		105.295.086,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	100.281.035,00			-	-	-	-	105.295.086,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				700 Orang	50.281.035,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.795.086,00	KELURAHAN CIBEUREUM
	7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				29 Lembaga Masyarakat	50.000.000,00	- Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	PAJAK DAERAH	-	-	-		52.500.000,00	KELURAHAN CIBEUREUM
	8					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						67.305.763.550,00							67.305.763.550,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						67.305.763.550,00							67.305.763.550,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						67.305.763.550,00							67.305.763.550,00	
229	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.343.211.350,00					-		6.343.211.350,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	115.548.500,00			-	-	-	-	115.548.500,00	
	8	01	01	2.01	0001	Penvusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	40.712.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.712.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	74.836.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		74.836.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.955.091.050,00			-	-	-	-	4.955.091.050,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	4.955.091.050,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.955.091.050,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	187.419.500,00			-	-	-	-	187.419.500,00	
	8	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				32 Orang	149.270.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		149.270.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				32 Orang	38.149.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.149.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	489.151.900,00			-	-	-	-	489.151.900,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
	Nasional	Daerah																	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	178.530.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		178.530.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	81.544.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.544.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	54.076.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		54.076.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175 Laporan	175.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	
	8	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	258.490.800,00			-	-	-	-	258.490.800,00	
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	65.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	187.490.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		187.490.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	287.509.600,00			-	-	-	-	287.509.600,00	
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	87.509.600,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		87.509.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
230	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-		-	1.342.617.800,00			-	-	-	-	1.342.617.800,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-		-	1.342.617.800,00			-	-	-	-	1.342.617.800,00	
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	5.000.000,00	- Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															657.234.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				650 Orang	657.234.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-						
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															680.383.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1735 Orang	680.383.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-						
231	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-		-	55.344.873.600,00					-	55.344.873.600,00					
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-		-	55.344.873.600,00			-	-	-	55.344.873.600,00					
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	4.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-						
	8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	7.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	55.196.023.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.196.023.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	134.350.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		134.350.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	2.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
232	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-		-	930.020.180,00						-	930.020.180,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-		-	930.020.180,00			-	-	-	-	930.020.180,00	
	8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	5.300.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
						Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	5.300.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	856.873.680,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					5100 Orang	856.873.680,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	54.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					10 Orang	54.700.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	7.846.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					4 Laporan	7.846.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
233	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	584.943.020,00			-	-	-	584.943.020,00						
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	584.943.020,00			-	-	-	584.943.020,00						
	8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun					1 Dokumen	7.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	297.440.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					100 Orang	297.440.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-							

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				750 Orang	280.003.020,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		280.003.020,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
234	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-		-	2.760.097.600,00					-		2.760.097.600,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-		-	2.760.097.600,00			-	-	-	-	2.760.097.600,00	
	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	38.848.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.848.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	221.625.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		221.625.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				30 Orang	458.191.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		458.191.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				85 Orang	1.090.200.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.090.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.06.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 Laporan	23.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0006		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	927.833.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					927.833.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H								1.533.554.858.847,21							1.150.766.894.195,37	

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN



Disampaikan di Cimahi
pada tanggal 10 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 717